

Tanggal Efektif	:	31 Januari 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	9 Februari 2022
Masa Penawaran Umum	:	3-4 Februari 2022	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	9 Februari 2022
Tanggal Penjatahan	:	7 Februari 2022	Tanggal Pencatatan Efek Pada PT. Bursa Efek Indonesia	:	10 Februari 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Pembiayaan Konvensional dan Pembiayaan Syariah

KANTOR OPERASIONAL

SOHO West Point Lantai 2
Jl. Macan Kav 4-5, Kedoya Utara
Kebon Jeruk – Jakarta Barat
Indonesia - 11510
Telp : (021) 21192288

KANTOR PUSAT

Menara Batavia Lt. 27
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Karet Tengsin, Jakarta Pusat
Indonesia - 10220
Telp : (021) 57930010

KANTOR PERWAKILAN

Jl. T. Amir Hamzah No. 48 C
Sei Agul, Medan Baru
Medan - Sumatera Utara
Indonesia - 20117
Telp : (061) 6633065

Situs Internet : <https://reliance-finance.com>

Email: corsec@reliance-finance.com

**PENAWARAN UMUM
OBLIGASI I REFI TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR
RP. 400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuai Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% (delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat jatuh tempo.
Seri B	:	Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% (sembilan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat jatuh tempo.
Seri C	:	Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat jatuh tempo.

Obligasi ini di tawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 9 Mei 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 19 Februari 2023 untuk Seri A, tanggal 9 Februari 2025 untuk Seri B dan tanggal 9 Februari 2027 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN TERHUTANG DAN WAJIB DIBAYARKAN OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERUPA PIUTANG PERSEROAN, JAMINAN DARI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PERSEROAN YAITU PT RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT, DAN JUGA PIUTANG BARU PERSEROAN. PERSEROAN DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI AKAN SENANTIASA MEMPERTAHANKAN NILAI JAMINAN SEBESAR SEKURANG-KURANGNYA 100% (SERATUS PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG, YANG AKAN DI SERAHKAN SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI OBLIGASI, DAN MEMBERIKAN JAMINAN 120% (SERATUS DUA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI YANG TERUTANG, DALAM WAKTU SELAMBAT-LAMBATNYA 90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER TERHITUNG SEJAK TANGGAL EMISI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERILAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIMATANAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI:

PT KREDIT RATING INDONESIA (KRI):

*in*BBB

(Triple B)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, DIMANA RISIKO KREDIT YANG DIMAKSUD ADALAH RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”

PENJAMIN PELAKSANA EMISI



PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA Tbk

WALI AMANAT

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ("BJB")

Prospektus ini di terbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Obligasi I REFI Tahun 2022 dengan No. 076/UPRI/DIR/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta. Sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi tersebut, akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi I REFI Tahun 2022. Untuk Obligasi I REFI Tahun 2022 dengan total jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip atas permohonan Pencatatan Efek dengan nomor No.:S-09038/BEI.PP1/11-2021 tanggal 30 November 2021. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi I akan batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan- ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi I ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Obligasi ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Sedangkan penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Obligasi ini dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi I.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK No. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 3 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK

PERSEROAN TELAH MENDAPATKAN SURAT PENCATATAN ATAS LAPORAN RENCANA PENERBITAN OBLIGASI PERSEROAN DARI OJK PENGAWAS IKNB, DENGAN NOMOR S-1349/NB.221/2021 TANGGAL 29 APRIL 2021 TENTANG PENCATATAN ATAS LAPORAN RENCANA PENERBITAN EFEK MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI I PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA, DAN SURAT TERSEBUT BERLAKU SETERUSNYA.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	8
I. PENAWARAN UMUM	17
1. Keterangan Tentang Obligasi Yang Diterbitkan	18
2. Hasil Pemeringkatan Obligasi.....	29
3. Perpajakan	30
4. Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi.....	30
5. Wali Amanat	30
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	31
III. PERNYATAAN UTANG	32
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	37
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	40
VI. FAKTOR RISIKO	53
1. Risiko Yang Berkaitan Dengan Usaha Perseroan.....	53
2. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi.....	56
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	57
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	58
1. Keterangan Tentang Perseroan	58
2. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha Perseroan	95
IX. PERPAJAKAN	104
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	105
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	106
XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT.....	108
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	119
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	123
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	124
XVI. LAPORAN KEUANGAN	125

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“Afiliasi”	Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM Nomor 8 tahun 1995, yaitu: hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; hubungan antara suatu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan serta berkewajiban membantu kepentingan Perseroan dalam melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran termasuk diantaranya untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk pasal 12.
"Bank Kustodian"	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam”	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam dan LK”	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bunga Obligasi”	Berarti jumlah bunga Obligasi per tahun dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan tingkat bunga sebagai berikut: • Seri A: 8% (delapan persen) per tahun; • Seri B: 9% (sembilan persen) per tahun; dan • Seri C: 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun.
"Bursa Efek"	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Daftar Pemegang Rekening”	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Debt”	Berarti utang berbunga
“Denda”	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat

bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

“Efek”	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap Derivative Efek.
“Emisi”	Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Force Majeure”	Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, atau menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Hari Bursa”	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Hari Kerja”	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Jumlah Terhutang”	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
“Konfirmasi Tertulis”	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR”	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Kredit Rating Indonesia”	Berarti PT Kredit Rating Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.
“KSEI”	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Kustodian”	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“Masyarakat”	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

"Obligasi"	Berarti Obligasi I REFI Tahun 2022 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% (delapan persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); Obligasi seri B sebesar 9% (sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). Obligasi seri C sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"OJK"	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU No. 21 Tahun 2011"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011.
"Pemerintah"	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"Pemegang Obligasi"	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: Rekening Efek pada KSEI; atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Rekening"	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
"Penawaran Umum"	Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
"Pengakuan Hutang"	Berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam akta Pengakuan Utang Obligasi I REFI Tahun 2022 No. 65 tanggal 31 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie S.H., Notaris di Jakarta.
"Penitipan Kolektif"	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Penjamin Emisi Obligasi"	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk.
"Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi"	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Peraturan IX.A.2"	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	Berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.

"POJK No. 33/2014"	Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 34/2014"	Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 35/2014"	Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 30/2015"	Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 55/2015"	Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 56/2015"	Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"POJK No. 7/2017"	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 9/2017"	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"POJK No. 19/2020"	Berarti Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
"POJK No. 20/2020 "	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 42/2020"	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan
"POJK No. 49/2020"	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemingkat Efek Bersifat Utang Dan / Atau Sukuk.
"Perjanjian Agen Pembayaran"	Berarti Akta Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Perihal Pelaksanaan Pembayaran Bunga Obligasi I REFI Tahun 2022 dengan nomor No. 62 tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie S.H., Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI"	Berarti perjanjian antara Emiten dan KSEI perihal pelaksanaan pendaftaran Obligasi di KSEI, nomor SP-008/OBL/KSEI/0122 tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat dengan bermeterai cukup.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I REFI Tahun 2022 No. 66 tanggal 31 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie S.H., Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Perwaliamanatan"	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I REFI Tahun 2022 No. 64 tanggal 31 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie S.H., Notaris di Jakarta.
"Permohonan Pencatatan Efek Bersifat Utang"	Berarti Permohonan yang di buat oleh Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia perihal pencatatan Obligasi, yang dibuat dengan bermaterai cukup, No. 207/UPRI/DIR/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021.
"Pernyataan Pendaftaran"	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal <i>juncto</i> POJK No. 7/2017, berikut dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
"Perseroan"	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA, berkedudukan di Jakarta Barat, Soho West Point Lt.2, JL. Macan Kav 4-5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk.

"Perusahaan Efek"	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Pokok Obligasi"	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal dalam jumlah sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah). yang terdiri dari: Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% (delapan persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); Obligasi seri B sebesar 9% (sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). Obligasi seri C sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan.
"Prospektus"	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 26 UUPM dan POJK No.9/2017
"Rekening Efek"	Berarti rekening yang memuat catatan mengenai posisi Obligasi dan atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.
"RUPO"	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliananatan.
"RUPS"	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"RUPSLB"	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan"	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya dan satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
"Seri Obligasi"	Berarti 3 (tiga) Seri Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), yaitu: Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% (delapan persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); Obligasi seri B sebesar 9% (sembilan persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). Obligasi seri C sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).
"Sertifikat Jumbo Obligasi"	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, sertifikat tersebut wajib diperbaharui dengan Jumlah Pokok Obligasi yang terutang setelah Perseroan melakukan pelunasan sebagian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan.
"Pernyataan Efektif"	Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi berhak menawarkan dan menjual Obligasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Tanggal Emisi"	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.
"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yaitu tanggal 19 Februari 2023 untuk Seri A, tanggal 9 Februari 2025 untuk Seri B, dan tanggal 9 Februari 2027 untuk Seri C.
"Tanggal Pembayaran"	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	Berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, serta dengan perincian tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi pada Bab I.
"Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi"	Berarti tanggal-tanggal dimana Jumlah Pokok Obligasi sesuai dengan masing-masing Seri Obligasi telah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Penjatahan"	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yaitu 1 (satu) hari kerja setelah hari terakhir Penawaran Umum Obligasi.
"UUPM"	Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
"Wali Amanat"	Berarti PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama "PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation" sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas "PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation No. 38 tanggal 12 Mei 1989, yang dibuat di hadapan M.M.I. Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.7473.HT.01.01- Th'89 tanggal 15 Agustus 1989 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1130/1989 tanggal 22 Agustus 1989 ("Akta Pendirian").

Perubahan nama Perseroan dari PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation menjadi PT Nation Capital Finance berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation No. 2 tanggal 2 Desember 2002, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No.C-00394 HT.01.04.TH.2003 tanggal 9 Januari 2003 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 090516545378 tanggal 11 Maret 2004.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan UUPT yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nation Capital Finance No. 7 tanggal 10 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Lanawati Dewi Soegianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-51209.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0071063.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008.

Adapun perubahan nama Perseroan dari PT Nation Capital Finance menjadi PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Nation Capital Finance No. 17 tanggal 25 September 2012, yang dibuat di hadapan Aryani, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No.AHU-53399.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090561.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 28 tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0056263.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan sesuai penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No. AHU-AH.01.03-0349739 tanggal 14 Agustus 2020 dan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 063 dan Tambahan BNRI No. 025054 tanggal 6 Agustus 2021, yaitu mengenai perubahan dan pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("Akta No. 24/2020").

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha utama Perseroan sejak Perseroan berdiri adalah melakukan berbagai jenis pembiayaan, yang antara lain meliputi:

- Sewa Guna Usaha;
- Modal Ventura;
- Perdagangan Surat Berharga;
- Anjak Piutang;
- Pembiayaan Konsumen;
- Mendirikan Perseroan-perseroan lain dengan maksud untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- Mendirikan atau melakukan investasi di perusahaan dalam segala bidang usaha.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nation Capital Finance No. 7 tanggal 10 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Lanawati Dewi Soegianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No.AHU-51209.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-

0071063.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang pembiayaan, yang antara lain meliputi:

- Sewa Guna Usaha;
- Pembiayaan Konsumen;
- Anjak Piutang; dan
- Usaha Kartu Kredit.

Adapun pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 18/2022, maksud dan tujuan Perseroan saat ini ialah berusaha dalam bidang pembiayaan baik konvensional dan syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan Usaha Pembiayaan Konvensional 64911:
Mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu: pembiayaan investasi; pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna; dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan konvensional dalam kelompok ini dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Menjalankan usaha Pembiayaan Syariah 64913:
Mencakup kegiatan unit kerja dari kantor pusat perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan pembiayaan Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Dengan melihat kondisi dan potensi pasar untuk industri pembiayaan di Indonesia, Perseroan memutuskan untuk fokus kepada *Core Business* yang terdiri dari:

Mid-low Mortgage

Bekerjasama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk memberikan kredit kepemilikan rumah kepada masyarakat berpendapatan menengah dan rendah dan pembiayaan modal kerja kepada pihak pengembang terkait terutama pengembang dalam skala Usaha Kelas Menengah

Pembiayaan Multiguna

Pemberian pembiayaan ke konsumen dengan menjalin kerjasama dengan pelaku-pelaku utama *consumer finance* yang memanfaatkan platform digital dan berbagai institusi untuk memberikan pembiayaan karyawan maupun mahasiswa.

Pembiayaan Produktif

Pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah ("UMKM") dan individu-individu yang bernaung dibawah sebuah komunitas dan institusi-institusi. Dengan semangat pengembangan inklusi keuangan kami menjalin kerjasama dengan pelaku-pelaku utama kredit komunitas seperti Koperasi berbentuk Simpan Pinjam dengan Grameen Model dan berbagai institusi untuk memberikan pembiayaan ke sektor antara lain pertanian dan perikanan

Dengan semakin besarnya bisnis dan jumlah pelanggan Perseroan dan Reliance Group (merupakan group usaha yang terdiri dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, PT Asuransi Reliance Indonesia, PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia, PT Usaha Pembiayaan RelianceIndoneisa, PT Reliace Modal Ventura dan PT Reliance Manager Investasi), Perseroan melihat adanya peluang untuk memanfaatkan database pelanggan sebagai upaya untuk melakukan strategi *repeat order*, *upselling*, maupun *cross selling* untuk meningkatkan pertumbuhan perseroan secara efisien. Perseroan juga akan lebih mengoptimalkan menggarap *customer based Reliance Group* baik terutama *existing customer* asuransi.

Perseroan memiliki 4 pilar untuk mencapai rencana jangka panjangnya:

Pilar Pertama: Model Bisnis yang Berkesinambungan.

Menjadi spesialis dalam memberikan pembiayaan kepada individu dan pelaku usaha yang 'tidak terlayani' melalui Bisnis Inti Perseroan.

Pilar Kedua: Keseimbangan Pertumbuhan Bisnis dan Manajemen Risiko.

Menerapkan sistem manajemen risiko berbasis "3 lines of defense mechanism" yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan produk dan proses dengan sistim monitoring yang aktif.

Pilar Ketiga: Pengembangan Produk yang Mengikuti Kebutuhan Pasar.

Pengembangan produk dan proses yang sesuai dengan kebutuhan para mitra bisnis Perseroan yang memiliki keahlian dan spesialisasi terhadap target dan market yang dibina oleh para mitra tersebut .

Pilar Keempat: Sistem IT Terintegrasi.

Menerapkan sistem IT berbasis digital yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan .

Pemasaran dan Pelanggan

Untuk mendukung *Core Business* Perseroan kegiatan pemasaran Perseroan memegang peranan yang penting dalam penambahan jumlah Pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan.

Pemasaran produk-produk Pembiayaan Perseroan dilakukan melalui model “Business To Business To Consumer” (B2B2C) dengan model distribusi sebagai berikut :

- Produk pembiayaan *Mid Low Mortgage*, Produk ini dipasarkan dengan bekerja sama dengan para pengembang perumahan (“B2B”) dalam skala usaha kelas menengah dengan target masyarakat dengan pendapatan menengah dan rendah, serta yang memiliki keterbatasan akses ke Perbankan. Pembiayaan yang dilakukan untuk produk ini adalah :
 - Para pengembang tersebut tadi juga akan menjadi target pemasaran untuk produk Pembiayaan Modal Kerja dalam mengembangkan usahanya.
 - Untuk saluran pemasaran Perseroan kepada nasabah individual (“B2C”) juga memanfaatkan Kerjasama dengan Reli ID sebagai *fintech aggregator* (Inovasi Keuangan Digital) untuk memudahkan pemasaran Produk mid low mortgage ini dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- Pembiayaan Multiguna, Produk Pembiayaan Multiguna ini dipasarkan bekerja sama dengan Perusahaan berbasis finansial teknologi atau *fintech aggregator* (“B2B”) yang memiliki segmen individual konsumen (“B2C”) dengan pendapatan menengah dan rendah baik di sektor formal maupun informal.
- Pembiayaan Produktif, Produk ini dipasarkan dipasarkan bekerja sama dengan komunitas yang bernaung di bawah institusi koperasi, ekosistem berbasis teknologi dan Perusahaan berbasis finansial teknologi (“B2B”) yang pembiayaannya diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (“UMKM”) baik individual maupun institusi-institusi yang masih belum *bankable*. Saat ini Perseroan menjalin kerjasama dengan pelaku-pelaku utama kredit komunitas seperti Koperasi berbentuk Simpan Pinjam dengan Grameen Model dan berbagai institusi untuk memberikan pembiayaan ke sektor antara lain pertanian, perikanan dan sektor produktif skala UMKM lainnya.

Dengan model dan cara pemasaran seperti tersebut diatas, Daerah Pemasaran Perseroan menjadi lebih luas dan menyebar di berbagai wilayah, keterbatasan jaringan yang dimiliki Perseroan dapat diatasi dengan adanya inovasi pada sistem teknologi informasi dan pemanfaatan jaringan pemasaran milik Mitra Usaha Perseroan. Sehingga jangkauan daerah Pemasaran Perseroan menjadi lebih luas.

Fokus wilayah pemasaran produk pembiayaan Perseroan saat ini masih di wilayah Jabodetabek tetapi dengan Kerjasama melalui para mitra B2B luas jangkauan wilayah pemasaran meliputi seluruh wilayah di Indonesia.

Berikut ini komposisi Penyaluran Pembiayaan Perseroan berdasarkan daerah Pemasaran dalam 2 tahun terakhir.

WILAYAH	2019		2020		31 Juli 2021	
	Nilai (Rp ribuan)	%	Nilai (Rp ribuan)	%	Nilai (Rp ribuan)	%
Jabodetabek	386.332.914	84,69%	316.037.735	86,70%	354.421.870	85,04%
Jawa Barat	9.121.320	2,00%	9.022.627	2,48%	2.198.093	0,53%
Jawa Tengah & DIY	17.634.405	3,87%	22.794.480	6,25%	31.267.190	7,50%
Jawa Timur	6.058.669	1,33%	9.829.510	2,70%	20.947.755	5,03%
Sumatera	30.540.455	6,69%	3.943.062	1,08%	6.329.276	1,52%
Bali & Nusa Tenggara	1.389.985	0,30%	222.096	0,06%	184.049	0,04%
Kalimantan	2.391.577	0,52%	1.187.262	0,33%	1.216.676	0,29%
Sulawesi	2.253.833	0,49%	242.041	0,07%	173.563	0,04%
Lainnya	475.585	0,10%	1.227.160	0,34%	30.363	0,01%
TOTAL	456.198.743	100%	364.505.973	100%	416.768.836	100%

Komposisi Penyaluran Pembiayaan Mid low Mortgage berdasarkan daerah Pemasaran dalam 2 tahun terakhir :

Mid low Mortgage

WILAYAH	2019		2020		31 Juli 2021	
	Nilai (Rp ribuan)	%	Nilai (Rp ribuan)	%	Nilai (Rp ribuan)	%
Jabodetabek	115.899.874	82,72%	94.811.321	85,58%	120.600.273	95,11%
Jawa Barat	2.736.396	1,95%	2.706.788	2,44%	816.409	0,64%
Jawa Tengah & DIY	10.499.106	7,49%	9.141.191	8,25%	1.035.815	0,82%
Jawa Timur	1.817.601	1,30%	2.948.853	2,66%	304.874	0,24%
Sumatera	9.162.137	6,54%	1.182.919	1,07%	4.037.469	3,18%
Bali & Nusa Tenggara	-	-	-	-	-	-
Kalimantan	-	-	-	-	-	-
Sulawesi	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-
TOTAL	140.115.113	100%	110.791.071	100%	126.794.839	100%

Komposisi Penyaluran Pembiayaan Multiguna berdasarkan daerah Pemasaran dalam 2 tahun terakhir :

Multiguna

WILAYAH	2019		2020		31 Juli 2021	
	Nilai (Rp ribuan)	%	Nilai (Rp ribuan)	%	Nilai (Rp ribuan)	%
Jabodetabek	77.266.583	84,69%	63.207.547	86,70%	13.978.820	65,69%
Jawa Barat	1.824.264	2,00%	1.804.525	2,48%	1.349.800	6,34%
Jawa Tengah & DIY	3.526.881	3,87%	4.558.896	6,25%	1.205.382	5,66%
Jawa Timur	1.211.734	1,33%	1.965.902	2,70%	1.716.915	8,07%
Sumatera	6.108.091	6,69%	788.612	1,08%	2.260.942	10,63%
Bali & Nusa Tenggara	277.997	0,30%	44.419	0,06%	181.602	0,85%
Kalimantan	478.315	0,52%	237.452	0,33%	382.003	1,80%
Sulawesi	450.767	0,49%	48.408	0,07%	173.563	0,82%
Lainnya	95.117	0,10%	245.432	0,34%	30.363	0,14%
TOTAL	91.239.749	100%	72.901.195	100%	21.279.390	100%

Komposisi Penyaluran Pembiayaan Produktif berdasarkan daerah Pemasaran dalam 2 tahun terakhir :

Produktif

WILAYAH	2019		2020		31 Juli 2021	
	Nilai (Rp ribuan)	%	Nilai (Rp ribuan)	%	Nilai (Rp ribuan)	%
Jabodetabek	193.166.457	85,91%	158.018.868	87,39%	220.675.546	82,13%
Jawa Barat	4.560.660	2,03%	4.511.314	2,50%	31.883	0,01%
Jawa Tengah & DIY	8.817.203	3,92%	11.397.240	6,30%	29.025.994	10,80%
Jawa Timur	3.029.335	1,35%	4.914.755	2,72%	18.925.966	7,04%
Sumatera	15.270.228	6,79%	1.971.531	1,09%	30.865	0,01%
Bali & Nusa Tenggara	-	-	-	-	2.447	0,00%
Kalimantan	-	-	-	-	1.905	0,00%
Sulawesi	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-
TOTAL	224.843.882	100%	180.813.707	100%	268.694.606	100%

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pada kuartal III/2021 kondisi perekonomian nasional dimasa pandemi masih belum mengalami pemulihan. Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan Per September 2021, dari 164 perusahaan pembiayaan dengan total asset sebesar Rp 430,7 triliun menurun sebesar 10,17% dari nilai Rp 474,6 triliun pada posisi September 2020. Jumlah pembiayaan netto pada posisi September 2021 adalah sebesar Rp 359,08 triliun menurun sebesar 7,58% atau senilai Rp 27,2 triliun jika dibandingkan dengan posisi September 2020 yang senilai Rp 386,3 triliun. Sampai dengan bulan Oktober 2021 pemulihan di sektor pembiayaan kegiatan masyarakat pun masih melambat disebabkan oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sehingga menahan lajunya perekonomian nasional.

Secara terperinci pembiayaan produktif pada posisi September 2021 mengalami penurunan dimana piutang pembiayaan investasi yang mencapai Rp 111,6 triliun, turun sebesar 6,54% atau senilai Rp 7,30 triliun dibandingkan posisi bulan September 2020 yang sejumlah Rp 118,9 triliun sedangkan untuk piutang pembiayaan modal kerja mencapai Rp 27,59 triliun atau naik sebesar 15,10% dibandingkan posisi September 2020 yang senilai Rp 23,42 triliun Sedangkan untuk pembiayaan multiguna

yang didominasi dengan pembiayaan kendaraan bermotor mencapai Rp 207,5 triliun mengalami penurunan senilai 11,44% atau sebesar Rp 4,1 triliun dibandingkan posisi September 2020 yang berjumlah Rp 231,2 triliun. Secara umum pelaku industri pembiayaan masih optimis pembiayaan akan mengalami pertumbuhan.

Sesuai dengan model bisnis yang dijalankan Perseroan masih meyakini bahwa prospek pembiayaan di sektor perumahan, Produktif UMKM dan Pembiayaan multiguna untuk masyarakat menengah bawah masih akan mengalami pertumbuhan di Kuartal IV 2021 dan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya dengan dasar sudah ada pemulihan atas kondisi pandemi Covid-19 dan jumlah penduduk yang di vaksin mencapai target yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Di sektor perumahan berdasarkan data Kementerian PUPR masih terdapat kekurangan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 11.4 juta dengan nilai sebesar Rp2.865 triliun, sehingga pemerintah menargetkan untuk penyediaan perumahan sebanyak 1.25 juta untuk menutupi kekurangan tersebut. Sedangkan di wilayah JABOTABEK baru mencapai 51% kepemilikan rumah, dengan asumsi nilai pembiayaan rata rata Rp1 juta, maka potensial pembiayaan perumahan adalah sebesar Rp17,4 triliun. Disektor pembiayaan perumahan hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan pembiayaan. Dengan kondisi tersebut, maka salah satu fokus pembiayaan Perseroan adalah Pembiayaan Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Berdasarkan data Direktorat Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 30 September 2021, capaian Program Sejuta Rumah tercatat telah menembus angka 763.127 unit rumah di seluruh wilayah Indonesia. Program Sejuta Rumah, merupakan sebuah ersama ersama untuk melibatkan para pemangku kepentingan bidang perumahan baik Kemeterian/ Lembaga terkait, pemerintah daerah, pengembang, perbankan dan masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk membangun rumah yang layak huni sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dengan target minimal satu juta unit rumah per tahun. (<https://perumahan.pu.go.id/news/akhir-september-capaian-psr-tembus-763127-unit>)

Di sektor pembiayaan UMKM dan dalam rangka mendukung peningkatan peranan UMKM di dalam pertumbuhan perekonomian nasional yang berdasarkan data menunjukan bahwa jumlah pelaku usaha UMKM bisa mencapai 98% dari pelaku usaha di Indonesia. Saat ini diperkirakan 46.6 juta pelaku usaha UMKM belum memiliki akses kredit atau pembiayaan dimana penyaluran pembiayaan kepada UMKM belum banyak dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dan pelaku usaha UMKM juga saat ini mengalami suatu kendala dalam pengajuan pembiayaan modal kerja melalui perbankan dimana mereka banyak terbentur pada pemenuhan persyaratan yang ketat dari perbankan. Peluang ini yang dilihat oleh Perseroan dimana Perseroan saat ini memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM melalui kerjasama dengan komunitas, koperasi, dan Perusahaan Finansial Teknologi.

Dimasa pemulihan perekonomian nasional, kebutuhan pendanaan jangka pendek bagi masyarakat sangat tinggi dimana setiap tahunnya mencapai Rp1.600 triliun per tahun. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital, maka Perseroan dalam penyaluran produk pembiayaan multiguna menggunakan platform digital bekerjasama dengan Perusahaan berbasis Finansial teknologi termasuk digital platform yang dikembangkan oleh Reliance Group melalui PT RelianceIntegrasi Dunia Anda (Reli:ID). Segmen masyarakat yang diberikan pembiayaan multiguna adalah masyarakat berpenghasilan tetap dengan skema B2B2C dimana terlebih dahulu dilakukan kerjasama dengan perusahaan.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

Nama Obligasi	:	Obligasi I REFI Tahun 2022
Jumlah Pokok	:	Sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah), yang terdiri dari: Seri A sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) Seri B sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) Seri C sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah)
Jangka Waktu	:	Seri A : 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi Seri B : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi Seri C : 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi
Bunga	:	Seri A : 8% (delapan persen) Seri B : 9% (sembilan persen) Seri C : 9,5% (sembilan koma lima persen)
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya

Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah)
Mata Uang Obligasi	:	Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan
Jaminan	:	Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dari Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I REFI Tahun 2022 No. 64 tanggal 31 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, jaminan yang diberikan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat atas Obligasi I REFI Tahun 2022 adalah berupa piutang dan <i>corporate guarantee</i> dengan rincian sebagai berikut: a. Piutang atau hak tagih milik Emiten yang timbul dari kegiatan usaha Emiten, piutang mana belum jatuh tempo dan dengan kriteria status lancar serta usia penagihannya tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo masing-masing piutang sebagaimana yang tercantum dalam daftar piutang/berita acara dan/atau dokumentasi lain yang memuat nilai tagih dan kewajiban pembayaran oleh pengguna jasa kepada Emiten, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut: - nilai yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia atas Piutang yang ditandatangani pada Tanggal Emisi adalah sekurang-kurangnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi; dan - dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, Emiten wajib menambah Piutang hingga nilainya menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, perubahan mana akan disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam akta perubahan (addendum) jaminan fidusia atas Piutang. b. Jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) oleh PT Reliance Capital Management, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut: - nilai yang harus dimuat dalam akta jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) yang ditandatangani pada Tanggal Emisi, adalah sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi; dan - setelah nilai Jaminan Piutang milik Emiten telah mencapai nilai sekurang-kurangnya sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi yang harus terpenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah Tanggal Emisi, maka nilai penjaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) akan diubah atau diturunkan nilainya menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, perubahan mana akan disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam akta perubahan (addendum) perjanjian jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>). Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan senantiasa mempertahankan nilai jaminan sebesar sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari nilai pokok obligasi yang terutang, yang akan di serahkan selambat-lambatnya pada tanggal emisi obligasi, dan pemberian jaminan 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai pokok obligasi yang terutang, dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal emisi.
Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	:	-
Pembelian Kembali Obligasi (<i>Buy Back</i>)	:	Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan selengkapnya mengenai pembelian kembali (<i>buy back</i>) dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
Wali Amanat	:	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Keterangan selengkapnya mengenai wali amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Efek Bersifat Utang yang belum dilunasi yaitu, MTN IVB Tahun 2019 sebesar Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah), dengan bunga 10% per tahun yang akan jatuh tempo tanggal 27 Februari 2022.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No.49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia.

Untuk memenuhi ketentuan POJK No.49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-011/KRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana telah ditegaskan kembali dengan Surat No. RTG-002/KRI-DIR/I/2012 tanggal 18 Januari 2022 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi I REFI Tahun 2022 (Seri A, Seri B dan Seri C) dari Kredit Rating Indonesia yang berlaku untuk periode 12 Oktober 2021 sampai dengan 1 Mei 2022 dan yang akan dilakukan *review* peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Perseroan telah mendapat peringkat:

irBBB
(Triple B)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Kredit Rating Indonesia yang bertindak sebagai perusahaan pemeringkat efek.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

1. Melunasi Pokok Medium Term Notes MTN IV B Tahun 2019 sebesar Rp.200.000.000.000, yang di terbitkan pada tanggal 27 Februari 2019, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur
 - a) Pihak berelasi : Rp.163.200.000.000
 - b) Tidak berelasi : Rp. 36.800.000.000
 - 2) Nilai MTN per tanggal 30/11/2021 : Rp.200.000.000.000
 - 3) Nilai MTN yang akan dibayarkan/dilunasi : Rp.200.000.000.000
 - 4) Nilai MTN Setelah Pembayaran : Rp.0
 - 5) Tingkat Kupon : 10% p.a
 - 6) Sumber Dana Pembayaran Kupon : Internal Kas Perseroan
 - 7) Jatuh Tempo : 27/02/2022
 - 8) Tujuan Penggunaan Dana
 - a) Pembiayaan KPR : Rp.70.000.000.000
 - b) Pembiayaan KPR Modal Kerja/Konstruksi : Rp.80.000.000.000
 - c) Pembiayaan UMKM : Rp.40.000.000.000
 - d) Pembiayaan Multiguna : Rp.10.000.000.000

Catatan:

Pihak berelasi yang memiliki MTN IV B Tahun 2019 yaitu PT Multi Artha Griya, PT Reliance Modal Ventura, PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, PT Viva Medika, Anton Budidjaja, Bagus Abimayu Lulu, Mulyati, Nathania Putri Budidjaja, dan Peter Djuliar.

2. Sisanya, akan digunakan untuk peningkatan portofolio pembiayaan.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, komposisi kepemilikan saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 56 tanggal 19 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0303830 tanggal 26 Juli 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0120456.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019 ("Akta No. 56/2019") adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Reliance Capital Management	113.000	113.000.000.000,-	84,97
2. PT Asuransi Reliance Indonesia	20.000	20.000.000.000,-	15,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	133.000	133.000.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	267.000	267.000.000.000,-	

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 beserta catatan – catatan atas laporan – laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Calon Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 yang tercantum dalam Prospektus.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan (Parker Randall International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 6 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Yansyafrin (Izin Akuntan Publik No. AP.1482).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan (Parker Randall International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Yansyafrin (Izin Akuntan Publik No. AP.1482).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Stephens International Ltd.), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 19 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003).

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
Jumlah Aset	520.051.799.661	443.468.194.653	480.563.711.907
Jumlah Liabilitas	312.513.003.288	243.349.291.356	292.416.287.028
Jumlah Ekuitas	207.538.796.373	200.118.903.297	188.147.424.879

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2021 (Audit)	2020 (Reviu)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
Pendapatan	39.895.068.886	33.869.395.366	53.383.338.884	63.823.087.731
Beban	30.256.816.038	10.181.329.851	24.286.335.903	61.630.528.522
Laba Tahun Berjalan	7.426.563.942	17.451.863.415	21.643.928.137	1.621.840.033
Jumlah Penghasilan Komprehensif	7.419.893.076	17.765.028.622	22.180.782.778	1.527.974.982
Laba per saham dasar	55.839	131.217	162.736	12.194

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
ROA (%)	1,43	4,88	0,34
ROE (%)	3,58	10,82	0,86
Gearing ratio (x)	1,25	1,01	1,32
Financing to Asset (%)	72,38	82,19	94,93
Laba tahun berjalan/pendapatan (%)	18,62	40,54	2,54
Debt to Equity Ratio (%)	150,58	121,60	155,42
Debt to Assets Ratio (%)	60,09	54,87	60,85
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,58	2,53	3,33
Interest Coverage Ratio (ICR)	1,49	2,31	1,07

FAKTOR RISIKO

RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Utama

Risiko Utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah Risiko Kredit, dimana risiko kredit yang dimaksud adalah risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perseroan.

Risiko Usaha

- Risiko Operasional
- Risiko Pasar
- Risiko Likuiditas
- Risiko Hukum
- Risiko Kepatuhan - Tata Kelola
- Risiko Reputasi
- Risiko Strategi

Risiko Umum

- Risiko Perekonomian
- Risiko Perubahan Kurs
- Risiko Sosial dan Keamanan
- Risiko Kebijakan Moneter
- Risiko Dampak Akibat Krisis Global

RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat pada Bab VI perihal Faktor Risiko dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM OBLIGASI I REFI TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP400.000.000.000,- (EMPAT RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah) yang memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% (delapan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat jatuh tempo.
Seri B	:	Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% (sembilan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat jatuh tempo.
Seri C	:	Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% (Sembilan koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat jatuh tempo.

Jumlah pokok yang ditawarkan Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*). Bila jumlah dalam penjaminan secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 9 Mei 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 19 Februari 2023 untuk Seri A, tanggal 9 Februari 2025 untuk Seri B dan tanggal 9 Februari 2027 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari PT Kredit Rating Indonesia:

irBBB
(Triple B)



PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah

KANTOR OPERASIONAL
SOHO West Point Lantai 2
Jl. Macan Kav 4-5, Kedoya Utara
Kebon Jeruk – Jakarta Barat
Indonesia - 11510
Telp : (021) 21192288

KANTOR PUSAT
Menara Batavia Lt. 27
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Karet Tengsin, Jakarta Pusat
Indonesia - 10220
Telp : (021) 57930010

KANTOR PERWAKILAN
Jl. T. Amir Hamzah No. 48 O
Medan Helvetia
Medan - Sumatera Utara
Indonesia - 20117
Telp : (061) 6633065

Situs Internet : <https://reliance-finance.com>

Email: corsec@reliance-finance.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, DIMANA RISIKO KREDIT YANG DIMAKSUD ADALAH RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PERIHAL FAKTOR RISIKO DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MENDAPATKAN SURAT PENCATATAN ATAS LAPORAN RENCANA PENERBITAN OBLIGASI PERSEROAN DARI OJK PENGAWAS IKNB, DENGAN NOMOR S-1349/NB.221/2021 TANGGAL 29 APRIL 2021 TENTANG PENCATATAN ATAS LAPORAN RENCANA PENERBITAN EFEK MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI I PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA, DAN SURAT TERSEBUT BERLAKU SETERUSNYA.

1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

1.1 Nama Obligasi

Obligasi I REFI Tahun 2022.

1.2 Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

1.3 Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari setelah Tanggal Emisi untuk Seri A, 36 (tiga puluh enam) bulan setelah Tanggal Emisi untuk Seri B dan 60 (enam puluh) bulan setelah Tanggal Emisi untuk Seri C. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 19 Februari 2023 untuk seri A, tanggal 9 Februari 2025 untuk seri B dan tanggal 9 Februari 2027 untuk seri C.

1.4 Jumlah Pokok Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) Seri A, Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) Seri B, dan Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) Seri C, dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.5 Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.6 Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.7 Harga Penawaran Obligasi

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

1.8 Bunga Obligasi

Sifat dan besarnya tingkat bunga adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi sebesar 8% (delapan persen) per tahun untuk Seri A, 9% (sembilan persen) per tahun untuk Seri B dan 9.5% (sembilan koma lima persen) per tahun untuk Seri C akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 9 Mei 2022, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah tanggal 19 Februari 2023 untuk Seri A, tanggal 9 Februari 2025 untuk Seri B dan tanggal 9 Februari 2027 untuk Seri C.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	9 Mei 2022	9 Mei 2022	9 Mei 2022
2	9 Agustus 2022	9 Agustus 2022	9 Agustus 2022
3	9 November 2022	9 November 2022	9 November 2022
4	19 Februari 2023	9 Februari 2023	9 Februari 2023
5	-	9 Mei 2023	9 Mei 2023
6	-	9 Agustus 2023	9 Agustus 2023
7	-	9 November 2023	9 November 2023
8	-	9 Februari 2024	9 Februari 2024
9	-	9 Mei 2024	9 Mei 2024
10	-	9 Agustus 2024	9 Agustus 2024
11	-	9 November 2024	9 November 2024
12	-	9 Februari 2025	9 Februari 2025
13	-	-	9 Mei 2025
14	-	-	9 Agustus 2025
15	-	-	9 November 2025
16	-	-	9 Februari 2026
17	-	-	9 Mei 2026
18	-	-	9 Agustus 2026
19	-	-	9 November 2026
20	-	-	9 Februari 2027

1.9 Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.10 Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.11 Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.12 Jaminan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I REFI Tahun 2022, jaminan yang diberikan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat atas Obligasi I REFI Tahun 2022 adalah berupa **piutang dan corporate guarantee** dengan rincian sebagai berikut:

- a. Piutang atau hak tagih milik Emiten yang timbul dari kegiatan usaha Emiten, piutang mana belum jatuh tempo dan dengan kriteria status lancar serta usia penagihannya tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo masing-masing piutang sebagaimana yang tercantum dalam daftar piutang/berita acara dan/atau dokumentasi lain yang memuat nilai tagih dan kewajiban pembayaran oleh pengguna jasa kepada Emiten, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - nilai yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia atas Piutang yang ditandatangani pada Tanggal Emisi adalah sekurang-kurangnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi; dan
 - dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, Emiten wajib menambah Piutang hingga nilainya menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, perubahan mana akan disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam akta perubahan (addendum) jaminan fidusia atas Piutang.
- b. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh PT Reliance Capital Management, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - nilai yang harus dimuat dalam akta jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang ditandatangani pada Tanggal Emisi, adalah sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi; dan
 - setelah nilai Jaminan Piutang milik Emiten telah mencapai nilai sekurang-kurangnya sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi yang harus terpenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah Tanggal Emisi, maka nilai penjaminan perusahaan (*corporate guarantee*) akan diubah atau diturunkan nilainya menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, perubahan mana akan disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam akta perubahan (addendum) perjanjian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan senantiasa mempertahankan nilai jaminan sebesar sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari nilai pokok obligasi yang terutang, yang akan di serahkan selambat-lambatnya pada tanggal emisi obligasi, dan pemberian jaminan 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai pokok obligasi yang terutang, dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal emisi.

1.13 Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

1.14 Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Emiten lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau melunasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; atau
 - b. Emiten dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Emiten dengan krediturnya (*cross-default*) dalam jumlah hutang melebihi 20% (dua puluh persen) persen) dari Ekuitas Emiten, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. Emiten lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau yang secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Emiten tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Emiten dan/atau pengelolaan Emiten secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang dengan putusan hukum tetap telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Emiten atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Emiten untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya yang dimiliki Emiten dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Emiten tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Emiten dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- g. Emiten berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- h. Apabila Emiten diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*).

Dalam hal terjadi kondisi kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- 1) Huruf a dan b, pada pasal diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- 2) Huruf d, e, f, dan g pada pasal diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- 3) Huruf c pada pasal diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara membuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Emiten.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Emiten untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Emiten, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah langkah yang harus diambil terhadap Emiten sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Emiten, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Emiten.

- 2. Apabila Emiten dibubarkan (selain dari pembubaran karena penggabungan) atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dinyatakan dalam keadaan pailit maka Wali Amanat berhak, tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
- 3. Apabila Emiten diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ikut serta dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.15 Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- 4. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 5. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 6. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi;

7. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
15. dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;
17. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan;
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.16 Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 2.18.iii.b di bawah ini, maka Perseroan harus

membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

1.17 Syarat-Syarat Obligasi

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Obligasi Merupakan Bukti Utang:
 - a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.
2. Pendaftaran Obligasi di KSEI:
 - a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
3. Penarikan Obligasi:

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.
4. Pengalihan Obligasi:

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.
5. Sanksi:

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya ketentuan 2.18.iii (b) di bawah ini maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

6. Lain-lain:
 - a. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
 - b. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.
 - c. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
 - d. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

1.18 Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membayar atau membuat atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Hutang;
 - b. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi (kecuali karyawan Perseroan) ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit, sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat;
 - c. menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan baik melalui jual beli maupun jual sewa atau cara lainnya, yang nilai per transaksi lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit;
 - d. melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan atau pihak lain, kecuali dalam melakukan penggabungan, konsolidasi atau peleburan dengan perusahaan yang terkonsolidasi dalam induk perseroan, Perseroan harus memberitahukan penggabungan, konsolidasi atau peleburan yang diperbolehkan oleh Pasal 6.1.(iv) Perjanjian Perwaliamanatan kepada Wali Amanat. Pihak yang tetap berdiri dari hasil penggabungan, konsolidasi atau peleburan tersebut tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Emisi seolah-olah telah disebutkan sebagai Perseroan;
 - e. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - f. melakukan penurunan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan;
 - g. mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan;
 - h. melakukan investasi secara langsung dalam bentuk portofolio saham dari perusahaan lain untuk diperjualbelikan;
 - i. melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk:

- a. menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Jumlah Denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut diatas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- b. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan konsolidasian semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.3.(vii) Perjanjian Perwaliamanatan, harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);
- c. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan OJK Nomor: 47/POJK.05/2020 tanggal 17 November 2020 Tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu (kecuali untuk rasio yang diatur dalam pasal 6.3.(iii) Perjanjian Perwaliamanatan) sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
- d. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik (termasuk tetapi tidak terbatas terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- f. mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan;
- g. menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :
 - 1) laporan keuangan konsolidasian tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan konsolidasian kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - 2) laporan keuangan konsolidasian tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
 - 3) laporan keuangan konsolidasian triwulan Perseroan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal triwulan atau pada saat penyerahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek.
- h. memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
- i. mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- j. memberitahu Wali Amanat atas :
 - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku berjalan;

- 2) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan segala Dokumen Emisi;
- 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
- 4) setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan (jika ada);
- 5) setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau anak perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- 6) Peminjaman hutang baru, atau memberikan persetujuan kepada Anak Perseroan (jika ada) untuk melakukan peminjaman hutang baru, yang memiliki jaminan khusus, kecuali:
 - a. Penjaminan dan/atau pembebanan harta kekayaan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan ini;
 - b. Agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- k. mengupayakan bahwa selama jangka waktu Obligasi, pemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, induk Perseroan tetap merupakan pemegang saham mayoritas {lebih dari 50% (lima puluh persen)} dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dari waktu ke waktu.
- l. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
- m. Perseroan menunjuk PT Kredit Rating Indonesia untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan terhadap Obligasi.
- n. menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

1.19 Rapat Umum Pemegang Obligasi

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan POJK No.20/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No.20/2020.
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

- a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat;
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - i. tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - ii. agenda RUPO;
 - iii. pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - iv. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - v. kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

- i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil

- keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

1.20 Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dibuat berdasarkan dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No.49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia.

Untuk memenuhi ketentuan POJK No.49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-011/KRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana telah ditegaskan kembali dengan Surat No. RTG-002/KRI-DIR/I/2012 tanggal 18 Januari 2022 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi I REFI Tahun 2022 (Seri A, Seri B dan Seri C) dari Kredit Rating Indonesia yang berlaku untuk periode 12 Oktober 2021 sampai dengan 1 Mei 2022 dan yang akan dilakukan *review* peringkat dalam periode 1 (satu) tahun sekali, Obligasi Perseroan telah mendapat peringkat:

**irBBB
(Triple B)**

Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Heliantono & Rekan (Parker Randall International); serta data keuangan audit 31 Desember 2017 – 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebelumnya.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Kredit Rating Indonesia yang bertindak sebagai perusahaan pemeringkat efek.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, sebagaimana diatur dalam POJK No.49/2020.

Perseroan akan menyampaikan hasil pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali, selama kewajiban Obligasi tersebut belum lunas dan menyampaikan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau penadapat atas Obligasi tersebut yang diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat efek kepada OJK, Wali Amanat dan BEI tempat Obligasi dicatatkan serta mengumumkan hasil pemeringkatan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau lama (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

3. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab IX perihal Perpajakan dalam Prospektus ini.

4. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

5. WALI AMANAT

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

Alamat Wali Amanat
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
Divisi Treasury
Grup Kustodian dan Wali Amanat
Sinarmas MSIG Tower Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta Selatan 12920
Tel. (021) 5228737
Faksimili: (021) 5228738
Email : trustee_custody@bankbjb.co.id

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat terdapat dalam bab XII di dalam Prospektus ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

1. Melunasi Pokok Medium Term Notes MTN IV B Tahun 2019 sebesar Rp.200.000.000.000, yang di terbitkan pada tanggal 27 Februari 2019, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur
 - a) Pihak berelasi : Rp.163.200.000.000
 - b) Tidak berelasi : Rp. 36.800.000.000
 - 2) Nilai MTN per tanggal 30/11/2021 : Rp.200.000.000.000
 - 3) Nilai MTN yang akan dibayarkan/dilunasi : Rp.200.000.000.000
 - 4) Nilai MTN Setelah Pembayaran : Rp.0
 - 5) Tingkat Kupon : 10% p.a
 - 6) Sumber Dana Pembayaran Kupon : Internal Kas Perseroan
 - 7) Jatuh Tempo : 27/02/2022
 - 8) Tujuan Penggunaan Dana
 - a) Pembiayaan KPR : Rp.70.000.000.000
 - b) Pembiayaan KPR Modal Kerja/Konstruksi : Rp.80.000.000.000
 - c) Pembiayaan UMKM : Rp.40.000.000.000
 - d) Pembiayaan Multiguna : Rp.10.000.000.000

Catatan:

Pihak berelasi yang memiliki MTN IV B Tahun 2019 yaitu PT Multi Artha Griya, PT Reliance Modal Ventura, PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, PT Viva Medika, Anton Budidjaja, Bagus Abimayu Lulu, Mulyati, Nathania Putri Budidjaja, dan Peter Djuliar.

2. Sisanya, akan digunakan untuk peningkatan portofolio pembiayaan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat penerbitan MTN baru yang dilakukan oleh Perseroan. Adapun bunga MTN yang berjalan sampai sekarang, dibayarkan dengan menggunakan internal kas Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 bulan kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Adapun mengenai sumber dana yang akan digunakan dalam halnya dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan, maka akan diambil dari internal kas Perseroan dan juga pendanaan diluar pasar modal (perbankan) sesuai dengan rencana bisnis yang sudah disampaikan ke OJK.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 2,73% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan: 0,11%;
- Biaya jasa penjaminan emisi: 0,11%;
- Biaya jasa penjualan: 1,65%;
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,57%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik: 0,31%; biaya jasa Konsultan Hukum: 0,24%; dan biaya jasa Notaris: 0,02%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,19%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,03% dan biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,16%;
- Biaya Lain-lain (Biaya Penerbitan OJK, Biaya Listing BEI, Biaya Agen Pembayar KSEI, Biaya Iklan dan Biaya Percetakan): 0,10%.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2021 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Laporan konsolidasian posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2021 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan konsolidasian arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan (Parker Randall International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Yansyafrin (Izin Akuntan Publik No. AP.1482).

Pada tanggal 31 Juli 2021, Perseroan melaporkan total liabilitas sebesar Rp312.513.003.288, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Surat utang jangka menengah	249.514.685.654
Utang pajak	1.444.942.451
Pinjaman yang diterima	28.893.138.261
Beban akrual	3.382.948.718
Liabilitas lain-lain	28.394.390.929
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	882.897.275
Jumlah	312.513.003.288

Tidak ada pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak Pemegang Obligasi, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Surat Utang Jangka Menengah

Saldo Surat Utang Jangka Menengah pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp249.514.685.654,- yang terdiri dari:

Keterangan	Jumlah
Nilai nominal:	
MTN IV Tahun 2018	50.500.000.000
MTN IVB Tahun 2019	199.650.000.000
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(635.314.346)
Jumlah	249.514.685.654

Rincian nilai nominal surat utang jangka menengah pada tanggal 31 Juli 2021, menurut tahun jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Tahun 2021	50.500.000.000
Tahun 2022	199.650.000.000
Jumlah	250.150.000.000

Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah atau Medium Term Notes UPRI IV Tahun 2018 dan Medium Term Notes UPRI IVB Tahun 2019 dengan jumlah nilai pokok masing-masing sebesar Rp 100 miliar dan Rp 200 miliar.

Jangka waktu MTN tersebut adalah 3 (tiga) tahun atau jangka waktu yang lebih singkat jika dilakukan Opsi oleh Perseroan. Tingkat bunga MTN ini adalah 10% (sepuluh persen) per tahun yang dibayarkan setiap bulan. MTN Perseroan akan jatuh tempo masing-masing pada 29 Oktober 2021 (MTN UPRI IV Tahun 2018) dan 27 Pebruari 2022 (MTN UPRI IVB Tahun 2019).

MTN ini tidak dijamin dengan agunan khusus namun dijamin dengan piutang pembiayaan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari dan tidak dicatatkan di bursa manapun.

Perseroan menunjuk PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, serta pihak-pihak berelasi, dan masing-masing sebagai kustodian MTN.

Pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 Perseroan melakukan pembelian kembali MTN IV dan MTN IVB masing-masing sebesar nihil dan Rp38.500.000.000. Pada tahun 2020 Perseroan melakukan pembelian kembali MTN IV dan MTN IVB masing-masing sebesar Rp159.350.000.000 dan Rp3.000.000.000. Pada tahun 2019 Perseroan melakukan pembelian kembali MTN IV dan MTN IVB masing-masing sebesar Rp18.000.000.000 dan Rp7.000.000.000 serta menyetujui konversi dari MTN IV yang dimiliki oleh PT Reliance Capital Management sebesar Rp33.000.000.000 menjadi modal saham Perseroan.

Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp1.444.942.451,- yang terdiri dari:

Keterangan	Jumlah
Pajak kini	
2019	-
2017	686.422.838
2016	423.432.910
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	295.130.137
Pasal 21	35.429.490
Pasal 23	4.524.076
Pasal 25	-
Jumlah	1.444.942.451

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

Pinjaman yang Diterima

Saldo Pinjaman yang Diterima pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp28.893.138.261,- yang terdiri dari:

Keterangan	Jumlah
Pinjaman bank	
PT Bank Central Asia Tbk	8.664.712.765
Pinjaman pihak ketiga	
PT Sarana Multigriya Finansial	9.228.425.496
PT Wijaya Unggul Sentosa	-
Pinjaman musyarakah	11.000.000.000
Jumlah	28.893.138.261

Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan memperoleh fasilitas kredit berupa installment loan dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp 30 miliar. Fasilitas ini berjangka waktu 5 tahun dan dikenakan suku bunga sebesar 10,75% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan 2 unit ruang kantor milik PT Suryatama Tigamitra, pihak berelasi, yang terletak di Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 adalah saldo setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi sebesar Rp 68.513.573.

Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi batasan-batasan tertentu antara lain menjaga rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh bank yaitu menjaga *gearing ratio* maksimal 5 kali dan *Non Performing Financing (NPF)* maksimal 2%, selain itu juga tidak diperbolehkan menerima pinjaman dari pihak lain berhubungan dengan jaminan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada Bank, meminta persetujuan dari Bank apabila akan melakukan penarikan dividen lebih dari 30% dari laba berjalan sebelumnya, memberitahukan Bank apabila terdapat perubahan susunan pengurusan dan pemegang saham sepanjang Anton Budidjaja masih sebagai ultimate shareholders perseroan dan memberitahukan apabila terdapat penambahan pinjaman dari pihak lain.

Pada tanggal 31 Juli 2021, Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian pinjaman. Nilai tercatat pada biaya perolehan diamortisasi dari pinjaman bank adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Pinjaman bank	8.700.000.000
Blaya perolehan yang belum diamortisasi	(35.287.235)
Jumlah	8.664.712.765

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman tanggal 9 Nopember 2018, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) setuju memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp10 miliar yang digunakan untuk refinancing Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun sejak tanggal pencairan pinjaman dan dikenakan suku bunga sebesar 9,5% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan fidusia tagihan KPR sebesar 125%. Pada tanggal 18 Nopember 2019, perseroan telah melunasi seluruh pinjaman ke PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman tanggal 30 Oktober 2019, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) setuju memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp2.641.261.367 yang digunakan untuk refinancing KPR. Fasilitas ini berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan pinjaman dan dikenakan suku bunga sebesar 8,75% per tahun serta dijamin dengan fidusia tagihan KPR sebesar 100%.

Berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman tanggal 13 Januari 2020, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) setuju memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp5.151.841.949 yang digunakan untuk refinancing KPR. Fasilitas ini berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan pinjaman dan dikenakan suku bunga sebesar 8,60% per tahun serta dijamin dengan agunan portofolio KPR.

Berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman tanggal 29 Desember 2020, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) setuju memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp4.301.570.566 yang digunakan untuk refinancing KPR. Fasilitas ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan pinjaman dan dikenakan suku bunga sebesar 9,00% per tahun serta dijamin dengan agunan portofolio KPR.

PT Wijaya Unggul Sentosa

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 29 Juni 2019, PT Wijaya Unggul Sentosa setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 5 miliar secara bertahap yang digunakan untuk pengembangan usaha. Pinjaman ini dikenakan bunga 18% per tahun dan berjangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian ini.

Pada tanggal 6 Februari 2020, PT Wijaya Unggul Sentosa (Shopintar) telah memberitahukan pengakhiran kerjasama pembiayaan dengan Perseroan, dalam Surat Pemberitahuan Pengakhiran Kerjasama (SPPK) yang efektif per tanggal 7 Maret 2020. Seluruh kewajiban pembayaran kembali atas fasilitas pokok beserta seluruh bunga telah diselesaikan pada tanggal 12 Maret 2020.

Pinjaman Musyarakah

Rincian fasilitas pinjaman musyarakah Perseroan adalah sebagai berikut:

Shahibul Maal	Jumlah dan/atau jaminan Pembiayaan	Nisbah Bagi Hasil	Jangka Waktu
Koperasi Jasa Gramindo Berkah Madani	3.000.000.000	17,5%-19,5%	60 bulan
PT Unicorn Teknologi Indonesia	8.000.000.000	16%-18%	12 bulan
Jumlah	11.000.000.000		

Beban Akrua

Saldo Beban akrual pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp3.382.948.718,- yang terdiri dari:

Keterangan	Jumlah
Jasa manajemen	1.046.461.600
Jasa professional	577.832.200
Bunga	313.814.703
Asuransi tenaga kerja	-
Lain-lain	1.444.840.215
Jumlah	3.382.948.718

Liabilitas Lain-Lain

Saldo Liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp28.394.390.929,- yang terdiri dari:

Keterangan	Jumlah
Titipan konsumen	18.035.507.555
Utang developer	10.358.883.374
Jumlah	28.394.390.929

Titipan konsumen merupakan uang yang diterima terlebih dahulu sehubungan dengan penerimaan angsuran piutang pembiayaan dan pembayaran premi asuransi dari konsumen.

Utang kepada developer merupakan utang kepada developer (pihak ketiga) sehubungan dengan kegiatan pembiayaan yang tidak dikenakan bunga dan biasanya akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan menyelenggarakan imbalan kerja jangka panjang untuk 32 karyawan pada tanggal 31 Juli 2021 sesuai Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada tanggal 31 Juli 2021, Perseroan mempunyai saldo liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp882.897.275,- dengan mutasi nilai kini kewajiban pasca kerja sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Saldo awal tahun	786.897.946
Biaya jasa kini	54.626.735
Biaya bunga	32.820.202
Pembayaran imbalan pasca kerja	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	8.552.392
Saldo akhir tahun	882.897.275

Perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Muh Imam Basuki dan Rekan, aktuaris independen.

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang:

Keterangan	31 Juli 2021
Tingkat Diskonto	7,78%
Tingkat Kenaikan Gaji per tahun	5,0%
Tingkat Kematian	TMI IV
Usia Pensiun Normal	57

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

31 Juli 2021			
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti			
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(24.761.958)	26.428.952
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	24.375.903	(23.208.085)

Perseroan tidak memiliki liabilitas kontinjensi yang signifikan pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

Perseroan mengadakan perjanjian sewa Kantor Gedung Soho Westpoint, Jl. Macan Kav. 4-5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan PT Multi Artha Griya untuk periode 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2023. Perseroan telah melakukan pembayaran di muka beban sewa atas komitmen sewa tersebut diatas dan oleh karenanya tidak ada liabilitas sewa yang diakui di laporan posisi keuangan.

Komitmen

Perseroan mengadakan perjanjian sewa sebagai berikut :

Pihak lawan	Item yang disewa	Periode perjanjian
PT Multi Artha Griya	Kantor pusat di Jakarta	1 Juli 2020 – 30 Juni 2023

Perseroan sudah melakukan pembayaran di muka beban sewa atas komitmen sewa tersebut diatas dan oleh karenanya tidak ada liabilitas sewa yang diakui di laporan keuangan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM PROSPEKTUS. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2021 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN KECUALI RASIO UTANG BANK KE BANK BCA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL KECUALI SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN DIDALAM PROSPEKTUS INI YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DIATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 beserta catatan – catatan atas laporan – laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Calon Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020, dan 2019 yang tercantum dalam Prospektus.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan (Parker Randall International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 6 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Yansyafrin (Izin Akuntan Publik No. AP.1482).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan (Parker Randall International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Yansyafrin (Izin Akuntan Publik No. AP.1482).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Stephens International Ltd.), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 19 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003).

Laporan Posisi Keuangan

Uraian	31 Juli	31 Desember	
	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
ASET			
Kas dan bank	7.437.094.502	1.366.472.701	9.095.178.837
Investasi jangka pendek kepada pihak berelasi	-	-	-
Piutang pembiayaan - bersih	211.977.241.980	235.385.442.279	314.904.934.178
Piutang sewa pembiayaan - bersih	642.979.331	1.543.839.242	26.146.535.613
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	78.889.882.941	76.153.728.119	42.067.246.514
Piutang pembiayaan syariah - bersih	84.897.292.403	51.422.962.937	73.080.026.944
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	70.584.779.635	7.000.000.000	4.000.000.000
- Pihak ketiga	35.127.275.528	21.737.853.812	2.280.270.598
Pajak dibayar dimuka	-		
Biaya dibayar dimuka	2.291.324.130	223.796.463	223.585.908
Aset pajak tangguhan	194.237.400	1.596.212.481	4.170.794.084
Aset tetap	2.442.607.638	2.945.364.206	620.727.377
Aset hak guna	1.414.017.000	1.844.370.000	-
Agunan yang diambil alih	20.116.958.903	38.834.337.700	3.820.939.354
Klaim lebih bayar pajak	3.752.108.270	3.129.814.713	-
Aset lain-lain	284.000.000	284.000.000	153.472.500
JUMLAH ASET	520.051.799.661	443.468.194.653	480.563.711.907
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Surat utang jangka menengah	249.514.685.654	181.533.639.195	235.035.313.737
Utang pajak	1.444.942.451	1.402.347.594	2.151.105.617
Pinjaman yang diterima	28.893.138.261	28.571.512.931	37.434.499.513

Beban akrual	3.382.948.718	2.558.552.746	1.246.275.568
Liabilitas lain-lain	28.394.390.929	28.496.340.944	15.146.219.808
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	882.897.275	786.897.946	1.402.872.785
JUMLAH LIABILITAS	312.513.003.288	243.349.291.356	292.416.287.028

EKUITAS

Ekuitas yang diatribusikan

Modal saham	133.000.000.000	133.000.000.000	133.000.000.000
Tambahan modal disetor	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Saldo laba	74.508.796.373	67.088.903.297	55.117.424.879
JUMLAH EKUITAS	207.538.796.373	200.118.903.297	188.147.424.879

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli		31 Desember	
	2021 (Audit)	2020 (Reviu)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
PENDAPATAN				
Bunga				
Pembiayaan	17.727.893.521	20.094.439.671	36.983.614.613	41.982.286.869
Sewa pembiayaan	115.219.169	1.306.123.298	1.742.302.861	6.137.167.823
Pembiayaan konsumen	5.693.464.140	6.205.395.431	5.569.578.304	5.857.239.672
Marjin/bagi hasil	13.902.386.539	4.144.873.875	7.234.532.142	8.341.104.155
Anjak piutang	-	-	-	-
Bank	10.005.151	77.429.943	81.412.945	276.605.301
Administrasi	491.371.511	416.632.742	1.144.840.133	1.741.128.399
Denda	491.579	10.442.283	11.286.262	559.639.265
Asuransi	19.609.205	116.997.504	139.091.287	79.127.840
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih	177.133.512	984.473.633	361.088.973	(1.479.966.565)
Keuntungan penjualan aset tetap	(56.526.037)	-	-	235.925.000
Lainnya	1.814.020.596	512.586.986	115.591.364	92.829.972
Jumlah pendapatan	39.895.068.886	33.869.395.366	53.383.338.884	63.823.087.731
BEBAN				
Beban umum dan administrasi	10.364.408.405	10.422.480.047	17.714.960.689	14.522.406.589
Beban pemasaran	80.676.868	37.240.464	51.358.264	33.482.260
Cadangan kerugian (pemulihan) penurunan nilai piutang	(5.489.632.459)	(29.376.696.639)	(43.197.696.605)	16.712.819.847
Cadangan Kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih	-	-	4.938.068.773	-
Beban bunga dan keuangan	19.622.123.208	14.197.216.833	22.214.078.916	30.299.198.460
Beban lain-lain	5.679.240.016	14.901.089.146	22.565.565.866	62.621.366
Jumlah beban	30.256.816.038	10.181.329.851	24.286.335.903	61.630.528.522
LABA SEBELUM PAJAK	9.638.252.848	23.688.065.515	29.097.002.981	2.192.559.209
BEBAN PAJAK	(2.211.688.906)	(6.236.202.100)	(7.453.074.844)	(570.719.176)
LABA TAHUN BERJALAN	7.426.563.942	17.451.863.415	21.643.928.137	1.621.840.033
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(8.552.392)	401.493.855	688.275.181	(125.153.402)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	1.881.526	(88.328.648)	(151.420.540)	31.288.351
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
- SETELAH PAJAK	(6.670.866)	313.165.207	536.854.641	(93.865.051)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	7.419.893.076	17.765.028.622	22.180.782.778	1.527.974.982
LABA PER SAHAM DASAR	55.839	131.217	162.736	12.194

Rasio Keuangan

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan Usaha	17,79	(16,3)	(6,5)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(57,45)	1.234,5	(85,7)
EBITDA	(22,70)	(27,7)	(14,8)
Total Aset	17,27	(7,7)	(1,9)
Total Liabilitas	28,42	(16,7)	(13,1)
Total Ekuitas	3,71	6,3	22,4
Net Interest Margin (NIM)	4,74	8,04	7,02
Gross Profit Margin (GPM)	18,5	22,0	28,0
Rasio Keuangan (x)			
Total Liabilitas/Total Ekuitas	1,51	1,22	1,55
Total Liabilitas/Total Aset	0,60	0,55	0,61
Total Ekuitas/Total Aset	0,40	0,45	0,39
Rasio Usaha(%)			
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha	18,62	40,54	2,54
Return on Asset (ROA)	1,43	4,88	0,34
Return on Equity (ROE)	3,58	10,82	0,86
Laba periode/tahun berjalan/pendapatan	18,62	40,54	2,54
FAR	72,38	82,19	94,93
DER	150,58	121,60	155,42
BOPO	79,71	45,90	94,85
NPF Gross	1,97	1,88	22,41
Rasio Kecukupan Modal (x)			
Gearing Ratio	1,25	1,01	1,32
Rasio Likuiditas (X)			
Current Ratio	2,43	3,82	4,36
Quick Ratio	1,89	2,78	4,08
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,58	2,53	3,33
Interest Coverage Ratio (ICR)	1,49	2,31	1,07

Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang

Rasio Keuangan	Rasio yang dipersyaratkan	31 Juli	31 Desember	
		2021	2020	2019
Gearing Ratio (x)	Maksimum 5x	1,25	1,01	1,32
Non Performing Financing (>90 hari) (%)	Maksimum 5%	1,97	1,88	22,41

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan (Parker Randall International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 6 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Yansyafrin (Izin Akuntan Publik No. AP.1482).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan (Parker Randall International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Yansyafrin (Izin Akuntan Publik No. AP.1482).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Stephens International Ltd.), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 19 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003).

Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Perseroan, dimana terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh Perseroan antara lain Covid-19 dan keterbatasan sumber pendanaan dimana perbankan banyak yang menghentikan kerjasama dengan Perusahaan Pembiayaan dalam penyaluran kreditnya. Dengan berjalannya waktu pada 2021 pandemi Covid 19 masih membuat usaha Perseroan mengalami perlambatan belum sesuai dengan rencana kerja Perseroan yang mana hal ini disebabkan oleh adanya pelonjakan kasus Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi dengan adanya kebijakan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM Mikro).

Perseroan menyadari bahwa kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan. Dalam hal ini Perseroan berusaha untuk melakukan upaya-upaya dengan mengantisipasi terjadinya perubahan kebijakan pemerintah tersebut dengan fokus pada sektor pembiayaan yang tidak terdampak secara langsung terhadap kebijakan PPKM Mikro, seperti sektor pembiayaan perumahan menengah bawah, pembiayaan multiguna khusus kepada karyawan.

Dalam hal kebijakan pemerintah yang mempengaruhi Perseroan baik secara langsung adalah kebijakan untuk Covid-19, terkait dengan Covid-19 ini Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020 mengeluarkan aturan relaksasi keuangan. Aturan ini memberikan kelonggaran kepada Perseroan dan Perusahaan Pembiayaan lain untuk dapat melakukan recovery serta fokus pada collection. Setelah aturan ini diterapkan sebagian nasabah yang berdampak terhadap COVID-19 ini mengajukan Restrukturisasi kepada Perseroan. Sehingga Perseroan harus mengupayakan pengajuan tersebut sesuai aturan relaksasi dari OJK, tentu dengan Persyaratan yang sudah ditentukan oleh OJK. Perseroan memberikan kebijakan untuk jenis restrukturisasi yaitu adalah Perpanjangan Tenor, dan penangguhan angsuran.

Namun tidak sedikit juga kebijakan Pemerintah ini memberikan dampak positif terhadap Perseroan. Sebagai contoh program Pemerintah pengadaan rumah subsidi untuk kalangan kelas menengah, kelas bawah atau pun masyarakat dalam sektor informal menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan dampak positif untuk Perseroan. Namun Perseroan mengikuti perkembangan kondisi perekonomian yang terjadi sehingga Perseroan dapat menyusun berbagai strategi untuk mengantisipasi terjadinya perubahan kebijakan pemerintah.

1. Umum

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama “PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation” sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas “PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation No. 38 tanggal 12 Mei 1989, yang dibuat di hadapan M.M.I. Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.7473.HT.01.01- Th’89 tanggal 15 Agustus 1989 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1130/1989 tanggal 22 Agustus 1989 (“**Akta Pendirian**”).

Perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan dan pembiayaan syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah, yang antara lain meliputi:

- I. Pembiayaan Investasi
- II. Pembiayaan Modal Kerja
- III. Pembiayaan Multiguna
- IV. Pembiayaan Jual Beli (Khusus Syariah)
- V. Pembiayaan Jasa (Khusus Syariah)
- IV. Kegiatan usaha pembiayaan lain yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Segmen Operasi

Selain yang tersebut diatas, Perseroan juga mengelola kegiatan usahanya dengan mengidentifikasi segmen sebagai berikut :

- **Properti (Perumahan)**
 Pembiayaan properti yang dimaksud adalah pembiayaan dengan tujuan pembelian properti dan menyasar segmen masyarakat berpendapatan menengah dan bawah. Secara pertumbuhan pada 31 Juli 2021, pembiayaan properti mengalami kenaikan dibandingkan posisi 31 Juli 2020 sebesar Rp 52,7 Milyar dari Rp74,81 Milyar menjadi Rp127,53 Milyar atau mengalami kenaikan sebesar 70,47%. Atau menyumbang sebesar 33,88% pada tahun 2021 dan sebesar 22,54% terhadap total pembiayaan sebesar Rp 376,40 Milyar dan Rp 331,90 Milyar. Dari posisi laba tahun berjalan juga mengalami kenaikan dibandingkan posisi 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp 2,24 Milyar dari Rp 7,08 Milyar pada 2020 menjadi Rp 10,04Milyar atau naik sebesar 28,74% . segmen ini memberikan kontribusi sebesar 13,60% pada Juli 2020 dan sebesar 23,39% pada tahun Juli 2021 untuk posisi laba tahun berjalan.
- **Konsumtif (Multiguna)**
 Pembiayaan konsumtif dimaksud disini adalah pembiayaan multiguna baik langsung ataupun dengan kerjasama dengan mitra fintech. Secara pertumbuhan pada 31 Juli tahun 2021, pembiayaan konsumtif mengalami kenaikan dibandingkan posisi 31 Juli 2020 sebesar Rp 12,35 Milyar dari Rp 8,92 Milyar menjadi Rp 21,27 Milyar atau mengalami sebesar 138,50%. Atau menyumbang sebesar 5,65% pada 31 Juli 2020 dan sebesar 2,69% pada 31 Juli 2021 terhadap total pembiayaan sebesar Rp 331,90 Milyar dan Rp 37640 Milyar.
- **Kebutuhan usaha (Modal Kerja)**
 Segmen ini untuk kebutuhan usaha baik korporasi maupun pelaku UMKM dengan bekerja sama dengan komunitas dan koperasi, baik dalam bentuk pembiayaan modal kerja ataupun pembiayaan investasi atau dalam bentuk pembiayaan produktif. Secara pertumbuhan pada 31 Juli tahun 2021, pembiayaan kebutuhan usaha mengalami penurunan dibandingkan posisi 31 Juli 2020 sebesar Rp 20,66 Milyar dari Rp 248,16 Milyar menjadi 227,50Milyar atau sebesar 8,33%. Atau menyumbang sebesar 74,77% pada tahun 2020 dan sebesar 60,45% pada posisi 2021 terhadap total pembiayaan sebesar Rp 331,90 Milyar dan Rp 376,40 Milyar. Dari posisi laba tahun berjalan juga mengalami penurunan dibandingkan posisi 31 Juli 2020 yaitu sebesar Rp 19,06Milyar dari Rp 50,02 Milyar pada 31 Juli 2021 menjadi Rp 30,95Milyar atau tutun sebesar 38,12% . segmen ini memberikan kontribusi sebesar 87,18% pada 2020 dan sebesar 72,10% pada tahun 2021 untuk posisi laba tahun berjalan.

Visi Perseroan adalah

Menjadi perusahaan pembiayaan terdepan yang memberikan solusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan pelaku UMKM.

Misi Perseroan adalah

Kemitraan	:	Kami melakukan kemitraan dengan komunitas yang mengerti kebutuhan dari para anggotanya.
Skalabilitas	:	Kami memberikan solusi keuangan kepada para mitra kami sehingga bias menaikkan skala bisnis para anggota mitra bisnis/komunitas
Kesinambungan	:	Kami memberikan pelayanan yang dapat diandalkan dan memberi nilai tambah sesuai dengan kebutuhan target market dan mitra bisnis kami yang dikelola dengan management risiko yang baik.
Technology	:	Kami menggunakan teknologi digital untuk dapat menjangkau semua nasabah kami dengan cara yang efesien.
Good Corporate Governance	:	Kami mengelola bisnis kami dengan secara professional,tata kelola yang bersih, akuntabel dan transparansi.

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perseroan tidak melakukan perubahan kebijakan akuntansi pada tahun 2020 dan 2019.

3. Keuangan

Keterangan yang diberikan dalam bab ini, harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas Laporan Keuangan dalamnya, yang terpada pada Bab XVI dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut bersumber dari Laporan keuangan Perseroan pada tanggal yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan (Parker Randall International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 28 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Yansyafrin (Izin Akuntan Publik No. AP.1482).

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Stephens International Ltd.), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 19 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003).

a. Analisa Kinerja Keuangan

Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli		31 Desember	
	2021 (Audit)	2020 (Reviu)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
PENDAPATAN				
Bunga				
Pembiayaan	17.727.893.521	20.094.439.671	36.983.614.613	41.982.286.869
Sewa pembiayaan	115.219.169	1.310.393.752	1.742.302.861	6.137.167.823
Pembiayaan konsumen	5.693.464.140	6.205.395.431	5.569.578.304	5.857.239.672
Margin/bagi hasil	13.902.386.539	4.144.873.875	7.234.532.142	8.341.104.155
Anjak piutang	-	-	-	-
Bank	10.005.151	77.429.943	81.412.945	276.605.301
Administrasi	491.371.511	416.632.742	1.144.840.133	1.741.128.399
Denda	491.579	10.442.283	11.286.262	559.639.265
Asuransi	19.609.205	116.997.504	139.091.287	79.127.840
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih	177.133.512	984.473.633	361.088.973	(1.479.966.565)
Keuntungan penjualan aset tetap	(56.526.037)	-	-	235.925.000
Lainnya	1.814.020.596	512.586.986	115.591.364	92.829.972
Jumlah pendapatan	39.895.068.886	33.869.395.366	53.383.338.884	63.823.087.731

Perbandingan Pendapatan untuk Periode tujuh bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2021 dan 2020

Jumlah pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 17,79% menjadi Rp39.895.068.886 untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2021 dari sebelum nya sebesar Rp33.869.395.365 pada periode yang sama tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan margin bagi hasil pembiayaan Syariah pada segmen pembiayaan multiguna yang meningkat dari Rp 4.144.873.875 pada posisi 31 Juli 2020 menjadi Rp 13.902.386.539 atau naik sebesar 235,41%. Segmen pembiayaan multi guna menyumbang sebesar Rp 1.962.273.538 atau 14,11% untuk saldo pendapatan bagi hasil Pembiayaan Syariah.

Perbandingan Pendapatan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jumlah pendapatan Perseroan mengalami penurunan sebesar 16,36% menjadi Rp53.383.338.884 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari sebelumnya Rp63.823.087.731 pada periode yang sama tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pembiayaan sebesar Rp4.998.672.256 dari sejumlah Rp41.982.286.869 pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi Rp36.983.614.613 periode yang sama di tahun 2020. Perubahan yang cukup signifikan ini disebabkan oleh Pelunasan yang dilakukan sebelum jatuh tempo dengan mayoritas *Corporate Account* dan juga Perseroan yang melakukan penghentian sementara untuk pembiayaan baru untuk pembiayaan konsumen pada produk multiguna dan mikro produktif UMKM sebesar Rp1.106.572.013 (13%) selama terjadinya awal pandemi di tahun 2020 dari bulan April 2020 sampai dengan September 2020.

Selain itu, penurunan pendapatan Perseroan juga disebabkan oleh penurunan pendapatan atas sewa pembiayaan dari Rp6.137.167.823 pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi Rp1.742.302.861 pada periode yang sama di tahun 2020. Penurunan sejumlah Rp4.394.864.962 ini disebabkan oleh Penghapusan sewa pembiayaan atas pembiayaan bermasalah yang mana jaminannya telah dikuasai Perseroan dan dikategorikan sebagai Aset Yang Diambil Alih (AYDA).

Penghasilan Komprehensif lain mengalami peningkatan senilai Rp630.719.692 dibanding tahun 2019 merupakan kenaikan atas laba pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti yang dihitung oleh Aktuaria sebesar Rp813.428.583 dan dikurangi pajak atas pos yang tidak akan direklasifikasi senilai Rp182.708.891.

Total Penghasilan Komprehensif yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 1352% atau senilai Rp20.652.807.796 di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan peningkatan laba bersih sebesar Rp20.022.088.104 dan laba komprehensif atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti senilai 630.719.692.

Beban

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli		31 Desember	
	2021 (Audit)	2020 (Reviu)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
BEBAN				
Beban umum dan administrasi	10.364.408.405	10.422.480.047	17.714.960.689	14.522.406.589
Beban pemasaran	80.676.868	37.240.464	51.358.264	33.482.260
Penyisihan (pemulihan) penurunan nilai piutang	(5.489.632.459)	(29.376.696.639)	(43.197.696.605)	16.712.819.847
Penyisihan penurunan nilai agunan yang diambil alih	-	-	4.938.068.773	-
Beban bunga dan keuangan	19.622.123.208	14.197.216.833	22.214.078.916	30.299.198.460
Beban lain-lain	5.679.240.016	14.901.089.146	22.565.565.866	62.621.366
Jumlah Beban	30.256.816.038	10.181.329.851	24.286.335.903	61.630.528.522

Perbandingan Beban untuk Periode tujuh bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2021 dan 2020 (Tidak diaudit)

Jumlah beban Perseroan mengalami peningkatan sebesar 197% atau menjadi senilai Rp30.256.816.039 untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2021, dari sebelumnya sebesar Rp10.181.329.851 pada periode yang sama tahun 2020. Kontribusi terbesar dari tingginya pemulihan pada posisi Juli 2020 senilai Rp29.376.696.639 yang merupakan dampak atas perubahan saldo laba awal tahun 2020 sebagai dampak atas penerapan PSAK 71 pada tahun 2020. Disamping itu beban bunga dan keuangan yang mengalami kenaikan senilai Rp 5.424.906.375 atau sebesar 38,21% pada 31 Juli 2021 yang disebabkan oleh pembayaran bunga atas MTN dengan penyerapan yang tinggi di tahun 2021.

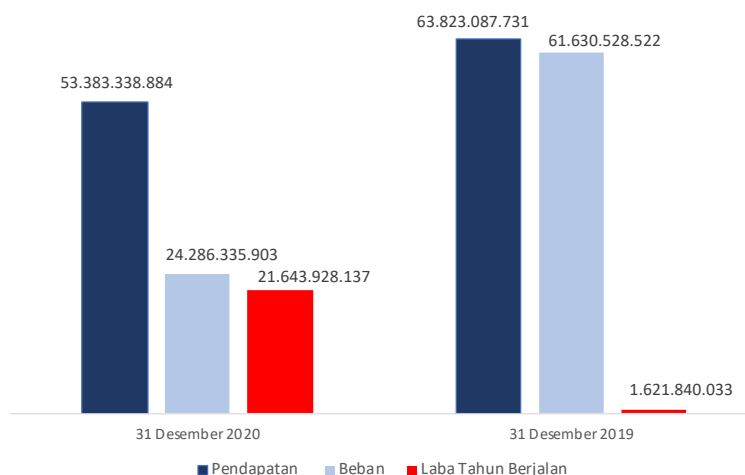
Perbandingan Beban untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jumlah beban Perseroan mengalami penurunan sebesar 60,59% menjadi Rp24.286.335.903 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari sebelumnya Rp61.630.528.522 pada periode yang sama tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh terdapatnya pemulihan sehubungan dengan cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp59.910.516.452 atau sekitar 358,47% yang disebabkan oleh kebijakan Perseroan dalam meningkatkan kualitas pembiayaan dengan melakukan pengambil alihan jaminan atas piutang bermasalah. Di sisi lain, beban lain-lain meningkat 35.934,93% yang disebabkan beban yang terjadi atas proses pelunasan yang dilakukan sebelum jatuh tempo dan proses pengambil alihan Asset yang dijaminan nasabah.

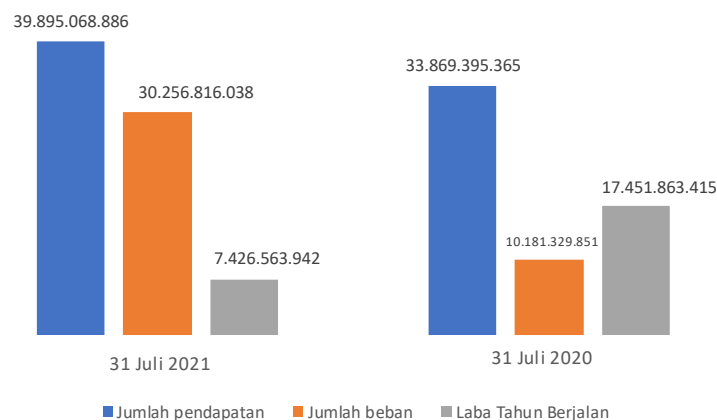
Berikut ini gambaran mengenai perkembangan pendapatan, beban dan laba tahun berjalan Perseroan sepanjang tahun berjalan Perseroan sepanjang tahun 2020 dan 2019:

Laba Tahun Berjalan

**Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba Tahun Berjalan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**
(dalam Rupiah)



**Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba Tahun Berjalan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)**



Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi Perseroan, termasuk perincian dan persentase dari tiap komponen pendapatan dan beban terhadap jumlah pendapatan untuk masing-masing periode di bawah ini:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli		31 Desember	
	2021 (Audit)	2020 (Reviu)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
Jumlah pendapatan	39.895.068.886	33.869.395.365	53.383.338.884	63.823.087.731
Jumlah beban	30.256.816.038	10.181.329.851	24.286.335.903	61.630.528.522
LABA TAHUN BERJALAN	7.426.563.942	17.451.863.415	21.643.928.137	1.621.840.033

Perbandingan Laba untuk Periode tujuh bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2021 dan 2020

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar 57,45% menjadi Rp 7.426.563.942 dari sebelumnya Rp17.451.863.415 pada periode yang sama tahun 2020 dikarenakan adanya penurunan beban atas dampak Implementasi PSAK 71 terkait penyisihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Ditambah lagi dengan adanya kenaikan beban bunga dan keuangan yang diakibatkan oleh penambahan jumlah penyerapan surat hutang jangka menengah.

Pada periode tujuh bulan sampai dengan 31 Juli 2021, Perseroan tetap fokus pada aktivitas “collection dan recovery” termasuk melakukan penjualan atas AYDA dan juga menjaga kualitas pembiayaan dengan target “Non Performing Loan” untuk akun yang tertunggak lebih dari 90 hari berada di bawah 2% serta tetap melakukan pembiayaan baru untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan dengan cara yang lebih selektif sehingga pertumbuhan pembiayaan selama semester pertama tahun 2021 hanya bertumbuh sebesar 17% dan diharapkan akan bertumbuh signifikan pada semester kedua tahun 2021 setelah mulai meredanya pandemi Covid-19 dengan adanya jumlah masyarakat yang divaksin memenuhi target yang dicanangkan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang membaik.

Perbandingan Laba untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami kenaikan sebesar 1.135% menjadi Rp 21.643.928.137 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari sebelumnya Rp.1.621.840.033 pada periode yang sama tahun 2019. Kenaikan yang signifikan ini terutama disebabkan adanya penurunan beban atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp59.910.516.452 atau sekitar 358,47% yang disebabkan oleh kebijakan Perseroan dalam meningkatkan kualitas pembiayaan dengan melakukan intensitas “collection dan recovery” dengan melakukan pengambil alihan assets jaminan atas piutang bermasalah menjadi Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

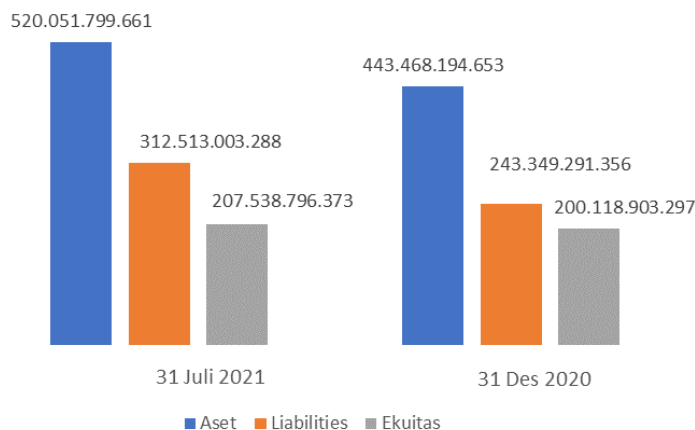
Dampak pandemi sepanjang tahun 2020 mengakibatkan jumlah pendapatan Perseroan mengalami penurunan karena tidak tumbuhnya pembiayaan baru terutama di pembiayaan mikro produktif UMKM dan multiguna pada bulan Maret hingga September 2020 walaupun masih terjadi pertumbuhan di sektor pembiayaan perumahan menengah bawah. Dalam hal ini sepanjang tahun 2020 Perseroan melakukan fokus pada penanganan nasabah yang bermasalah dengan melakukan pemulihan penyisihan cadangan

kerugian piutang melalui aktivitas “recovery” atas piutang pembiayaan yang bermasalah melalui Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sehingga nilai AYDA meningkat signifikan sebesar Rp38.834.337.700 pada posisi neraca per 31 Desember 2020 dari sebelumnya sebesar Rp 3.820.939.354 pada posisi per 31 Desember 2019.

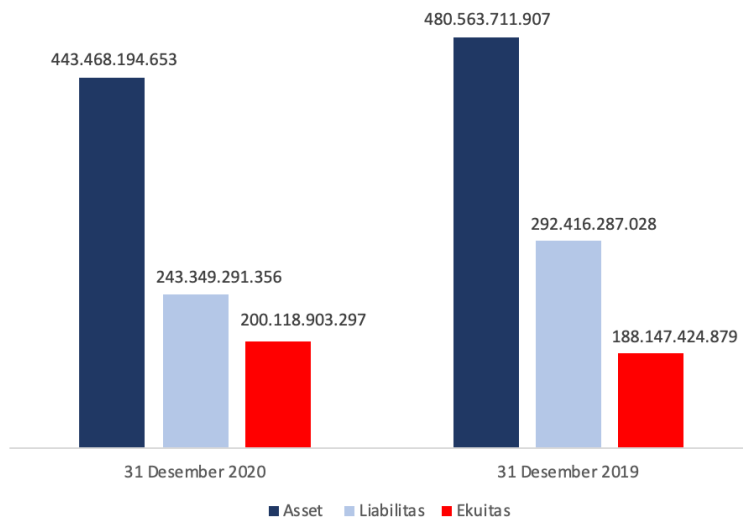
b. Analisis Posisi Keuangan

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan periode 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019:

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam Rupiah)



Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam Rupiah)



Aset

Tabel berikut ini menjelaskan rincian aset Perseroan per tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli	31 Desember	
	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
ASET			
Kas dan bank	7.437.094.502	1.366.472.701	9.095.178.837

Piutang pembiayaan - bersih	211.977.241.980	235.385.442.279	314.904.934.178
Piutang sewa pembiayaan - bersih	642.979.331	1.543.839.242	26.146.535.613
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	78.889.882.941	76.153.728.119	42.067.246.514
Piutang pembiayaan syariah - bersih	84.897.292.403	51.422.962.937	73.080.026.944
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	70.584.779.635	7.000.000.000	4.000.000.000
- Pihak ketiga	35.127.275.528	21.737.853.812	2.280.270.598
Pajak dibayar dimuka	-		
Biaya dibayar dimuka	2.291.324.130	223.796.463	223.585.908
Aset pajak tangguhan	194.237.400	1.596.212.481	4.170.794.084
Aset tetap	2.442.607.638	2.945.364.206	620.727.377
Aset hak guna	1.414.017.000	1.844.370.000	-
Agunan yang diambil alih	20.116.958.903	38.834.337.700	3.820.939.354
Klaim lebih bayar pajak	3.752.108.270	3.129.814.713	-
Aset lain-lain	284.000.000	284.000.000	153.472.500
JUMLAH ASET	520.051.799.661	443.468.194.653	480.563.711.907

Perbandingan Total Aset pada Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020

Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 17,27% menjadi Rp520.051.799.661 per 31 Juli 2021 dari sebelumnya sebesar Rp443.468.194.653 per 31 Desember 2020. Penyebab utama kenaikan aset tersebut adalah adanya kenaikan jumlah piutang sebesar 23% atau senilai Rp 88.875.625.429 pada 31 Juli 2021 dibandingkan posisi per 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pada piutang pembiayaan Syariah sebesar Rp 33.474.329.466.

Perbandingan Total Aset pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan mengalami penurunan sebesar 7,72% menjadi Rp443.468.194.653 per 31 Desember 2020 dari sebelumnya Rp480.563.711.907 per 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank dan piutang pembiayaan.

- Kas dan bank. Saldo kas dan bank Perseroan menurun sebesar 84,98% menjadi Rp1.366.472.701 per 31 Desember 2020 dari sebelumnya Rp9.095.178.837 per 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama sejalan dengan adanya pembayaran surat utang jangka menengah.
- Piutang Pembiayaan. Saldo piutang pembiayaan Perseroan menurun sebesar 25,25% menjadi Rp235.385.442.279 per 31 Desember 2020 dari sebelumnya Rp314.904.934.178 per 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penghapusan atas pembiayaan bermasalah dengan melakukan pengambil alihan jaminan dan ada sebagian pembiayaan yang telah lunas.

Liabilitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian liabilitas Perseroan per tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli	31 Desember	
	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
LIABILITAS			
Surat utang jangka menengah	249.514.685.654	181.533.639.195	235.035.313.737
Utang pajak	1.444.942.451	1.402.347.594	2.151.105.617
Pinjaman yang diterima	28.893.138.261	28.571.512.931	37.434.499.513
Beban akrual	3.382.948.718	2.558.552.746	1.246.275.568
Liabilitas lain-lain	28.394.390.929	28.496.340.944	15.146.219.808
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	882.897.275	786.897.946	1.402.872.785
JUMLAH LIABILITAS	312.513.003.288	243.349.291.356	292.416.287.028

Perbandingan Total Liabilitas pada Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 28,42% menjadi Rp312.513.003.289 per 31 Juli 2021 dari sebelumnya sebesar Rp243.349.291.356 per 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan jumlah surat utang jangka menengah milik Perseroan senilai 37,45% atau sebesar Rp 67.981.046.459 dari Rp 181.533.639.195 menjadi Rp 249.514.685.654

Perbandingan Total Liabilitas pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 16,78% menjadi Rp243.349.291.356 per 31 Desember 2020 dari sebelumnya Rp292.416.287.028 per 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan adanya pembayaran surat utang jangka menengah yang sudah jatuh tempo.

Pinjaman Perseroan Yang Masih Terutang Pada Tanggal Laporan Keuangan Terakhir

Berikut ini pinjaman yang masih terutang yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 antara lain:

No	Bank/Lembaga Keuangan	Jenis	Outstanding
Jangka Pendek			
1	PT Agung Kentjana Abadi	Pinjaman Musyarakah	Rp 3.000.000.000,00
2	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Refinancing KPR	Rp 2.727.062.777,00
3	PT Bank Central Asia Tbk	Angsuran	Rp 5.353.347.423,00
Sub Jumlah jangka pendek			Rp 11.080.410.200,00
Jangka Panjang			
1	PT Bank Central Asia Tbk	Angsuran	Rp 6.428.139.004,00
2	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Refinancing KPR	Rp 8.062.963.727,00
3	Koperasi Jasa Gramindo Berkah Madani	Pinjaman Musyarakah	Rp 3.000.000.000,00
Sub Jumlah jangka panjang			17.491.102.731,00
Jumlah			Rp 28.571.512.931,00

Pinjaman jangka pendek Perseroan mempunyai jangka waktu 12 bulan sedangkan pinjaman jangka panjang yang diterima merupakan fasilitas angsuran dan Refinancing KPR dengan jangka waktu diatas 1 tahun. Usaha Perseroan juga tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman.

Berikut ini adalah Analisa jatuh tempo pinjaman pada 31 Desember 2020 :

Jatuh Tempo	Outstanding
Kurang dari 1 tahun	Rp 11.080.410.200,00
1-2 tahun	Rp 8.357.444.487,00
2-3 tahun	Rp 9.133.658.244,00
Jumlah	Rp 28.571.512.931,00

Berikut ini pinjaman yang masih terutang yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Juli 2021 antara lain:

No	Bank/Lembaga Keuangan	Jenis	Outstanding
Jangka Pendek			
1	PT Unicorn Teknologi Indonesia	Pinjaman Musyarakah	Rp 8.000.000.000,00
2	PT Bank Central Asia Tbk	Angsuran	Rp 5.370.557.373,00
3	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Refinancing KPR	Rp 2.870.479.860,00
Sub Jumlah jangka pendek			Rp 16.241.037.233,00
Jangka Panjang			
1	PT Bank Central Asia Tbk	Angsuran	Rp 3.294.155.392,00
2	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Refinancing KPR	Rp 6.357.945.636,00
3	Koperasi Jasa Gramindo Berkah Madani	Pinjaman Musyarakah	Rp 3.000.000.000,00
Sub Jumlah jangka panjang			12.652.101.028,00
Jumlah			Rp 28.893.138.261,00

Pinjaman jangka pendek Perseroan mempunyai jangka waktu 12 bulan sedangkan pinjaman jangka panjang yang diterima merupakan fasilitas angsuran dan Refinancing KPR dengan jangka waktu diatas 1 tahun. Usaha Perseroan juga tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman.

Berikut ini adalah Analisa jatuh tempo pinjaman pada 31 Juli 2021 :

Jatuh Tempo		Outstanding
Kurang dari 1 tahun	Rp	16.241.037.233,00
1-2 tahun	Rp	6.428.267.585,00
2-3 tahun	Rp	6.223.833.443,00
Jumlah	Rp	28.893.138.261,00

Ekuitas

Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli	31 Desember	
	2021 (Audit)	2020 (Audit)	2019 (Audit)
EKUITAS			
Ekuitas yang diatribusikan			
Modal saham	133.000.000.000	133.000.000.000	133.000.000.000
Tambahan modal disetor	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Saldo laba	74.508.796.373	67.088.903.297	55.117.424.879
JUMLAH EKUITAS	207.538.796.373	200.118.903.297	188.147.424.879

Perbandingan Ekuitas pada Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 3,71% menjadi Rp207.538.796.373 per 31 Juli 2021 dari sebelum nya sebesar Rp200.118.903.297 per 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan saldo laba ditahan Perseroan yang berasal dari laba bersih kegiatan Perseroan untuk periode yang berakhir 31 Juli 2021

Perbandingan Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar 6,36% menjadi Rp200.118.903.297 per 31 Desember 2020 dari sebelumnya Rp188.147.424.879 per 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan saldo laba ditahan Perseroan yang berasal dari laba bersih kegiatan usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Imbal Hasil Atas Aset

Tingkat imbal hasil atas aset menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimiliki Perseroan, yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset yang dimiliki Perseroan. Tingkat imbal hasil atas aset untuk tahun yang berakhir 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah 1,43%, 4,88%, dan 0,34%.

Imbal Hasil Atas Ekuitas

Tingkat imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah 3,58%, 10,82% dan 0,86%.

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali kewajiban pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang mengandung beban bunga (*interest bearing*). Salah satu pengukur solvabilitas ini adalah rasio kewajiban yang mengandung beban bunga terhadap ekuitas (*gearing ratio*) atau tingkat perbandingan kewajiban yang mengandung beban bunga dengan ekuitas. Rasio tersebut pada tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 1,25 kali, 1,01 kali dan 1,32 kali.

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Sumber likuiditas utama Perseroan adalah surat utang jangka menengah dan pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan non bank yang hanya digunakan Perseroan untuk kegiatan pembiayaan. Saat ini belum ada sumber likuiditas lainnya diluar modal pendanaan tersebut akan tetapi jika dibutuhkan maka bisa dilakukan tambahan pendanaan melalui tambahan modal

disetor atau pinjaman dari pemegang saham sesuai kebutuhan Perseroan.

Sumber likuiditas utama Perseroan adalah surat utang jangka menengah yang hanya digunakan Perseroan untuk kegiatan pembiayaan. Sumber likuiditas lainnya secara material yang masih belum digunakan saat ini adalah dari dana surat utang jangka menengah yang ini masih belum digunakan untuk pemberian pembiayaan baru dan dicatat sebagai MTN stock di buku Perseroan. Perseroan saat ini tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan dikarenakan dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajemen perseroan memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Penerbitan Obligasi akan turut menambah sumber likuiditas Perseroan untuk kegiatan pembiayaan. Kebutuhan pendanaan untuk kegiatan pembiayaan secara historis cenderung meningkat dan Perseroan berkeyakinan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mengantisipasi lonjakan permintaan tersebut. Dalam hal terjadi fluktuasi atas permintaan pembiayaan Perseroan selalu menerapkan kebijakan untuk “matching concept antara sumber dana yang diterima dengan produk pembiayaan” dengan kerangka model likuiditas sebagai berikut :

	MORTGAGE		PRODUCTIVE		MULTIPURPOSE
Sub Product	Corporate/ Working Capital	Consumer	Micro	SME	Cash Fund Facility & Employee Loan
Tenure	1-2 Years	5 – 10 Years	1 Year	3 Years	1 Year
Source of Fund	Bank	SMF	Bonds	Bonds	Bonds
	Bonds	Bonds	Equity	Banks	Equity
Collateral	Land & Building		Credit Default Insurance	• Land & Building • Vehicle • Invoice	Credit Default Insurance
Portfolio Target Allocation	50%		30%		20%
Pricing Strategy	12% – 15%		16% – 20%		18% - 36%

Berikut ini rincian arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Keterangan	31 Juli		
	2021	%	2020
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(61.139.858.191)	(158)	105.805.201.051
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	(77.919.000)	49	(151.570.660)
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	67.288.398.992	159	(113.489.950.571)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk Perseroan dari aktivitas operasi mencapai Rp(61.139.858.191) untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 dibanding kas bersih yang diperoleh dari Perseroan untuk aktivitas operasi sebesar Rp105.805.201.051 untuk periode yang sama pada tahun 2020. Hal ini terutama dikarenakan meningkatnya pembiayaan dan meningkatnya pembayaran bunga pinjaman baik kepada lembaga bank dan non perbankan, serta pembayaran bunga surat hutang jangka menengah.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk Perseroan dari aktivitas investasi mencapai (Rp77.919.000) untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 dibanding kas bersih yang digunakan untuk Perseroan dari aktivitas Investasi sebesar Rp(151.570.660) untuk periode yang sama pada tahun 2020. Hal ini terutama dikarenakan adanya pembelian aset tetap berupa laptop yang digunakan untuk karyawan guna melaksanakan produktivitas yang akan digunakan untuk Work From Home (WFH).

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari Perseroan untuk aktivitas Rp67.288.398.992 untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 dibanding kas bersih yang digunakan untuk Perseroan dari aktivitas Pendanaan sebesar (Rp113.489.950.571) untuk periode yang sama pada tahun 2020. Hal ini terutama dikarenakan peningkatan jumlah nilai surat hutang jangka pendek.

Berikut ini rincian arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	%	2019
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	67.194.281.192	913	6.630.181.675
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi	(2.682.034.956)	(1683)	169.442.500
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(72.240.952.372)	364	(15.565.957.793)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh Perseroan dari aktivitas operasi meningkat sebesar 913,46% menjadi Rp67.194.281.192 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari sebelumnya sebesar Rp6.630.181.675 untuk periode yang sama pada tahun 2019. Hal ini terutama dikarenakan menurunnya pencairan untuk pembiayaan dari sebelumnya Rp204.920.000.000 pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 menjadi Rp73.171.769.069 pada periode yang sama tahun 2020.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang diperoleh Perseroan dari aktivitas investasi menurun sebesar 1.682,86% menjadi (Rp2.682.034.956) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dari sebelumnya sebesar Rp169.442.500 untuk periode yang sama pada tahun 2019. Hal ini terutama dikarenakan adanya pembelian aset tetap yang digunakan untuk renovasi kantor dan pembelian kendaraan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan Perseroan dari aktivitas pendanaan meningkat sebesar 364,10% menjadi (Rp72.240.952.372) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dari sebelumnya sebesar (Rp15.565.957.793) untuk periode yang sama pada tahun 2019. Hal ini terutama dikarenakan adanya peningkatan pembayaran surat utang jangka menengah dan pinjaman yang diterima.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk membeli aset-aset Perseroan berupa inventaris kantor, kendaraan dan renovasi kantor. Belanja modal Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.682.034.956 dan Rp152.057.500. Sumber dana belanja modal Perseroan diperoleh dari kas internal Perseroan.

Sesuai dengan rencana bisnis Perseroan di tahun 2021 dalam rangka pengembangan IT infrastruktur sudah direncanakan untuk pengembangan aplikasi IT dan pendukungnya dengan nilai proyeksi sebesar Rp2.000.000.000 walaupun belum dibuat komitmen kepada pihak manapun secara tertulis.

Aset Moneter Dalam Mata Uang Asing

Perseroan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing karena terdapat transaksi yang didenominasi mata uang asing, seperti piutang pembiayaan yang didenominasi dalam Dolar Amerika Serikat. Tabel di bawah ini meringkas instrumen Perseroan yang didominasi dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Juli 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	Mata Uang asing	Ekuivalen Rupiah	Mata uang asing	Ekuivalen Rupiah	Mata uang asing	Ekuivalen Rupiah
Piutang pembiayaan USD	-	-	1.045.788	14.750.841.229	1.446.375	20.106.048.095
Jumlah Aset	-	-		14.750.841.229		20.106.048.095

Per 31 Juli 2021, Perseroan tidak memiliki exposure terhadap fluktuasi nilai tukar mata asing karena piutang pembiayaan tersebut telah dilunasi dan kedepannya Perseroan tidak melakukan transaksi pembiayaan dalam mata uang asing.

Atas aset dalam mata uang asing, jumlah laba/(rugi) selisih kurs yang diakui dalam laporan laba rugi pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp177.133.512, Rp361.088.973 dan Rp1.479.966.565.

Analisis Rasio Keuangan Tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019

Keterangan	31 Juli	31 Desember	
	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)			
EBITDA	(22,7)	(27,7)	(14,8)
Net Interest Margin (NIM)	4,73	8,04	7,02
Gross Profit Margin (GPM)	18,5	22,0	28,0
Rasio Usaha(%)			
FAR	72,38	82,19	94,93
DER	150,58	121,60	155,42
Rasio Likuiditas (X)			
Current Ratio	2,43	3,82	4,36
Quick Ratio	1,89	2,78	4,08
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	1,58	2,53	3,33

Rasio Pertumbuhan

- 1) EBITDA Perseroan pada posisi 31 Juli 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan posisi 31 Juli 2020 sebesar Rp 8.624.906.292 atau senilai 22,77%, kenaikan EBITDA [ada periode ini diakibatkan oleh meningkatnya pendapat bunga dan margin bagi hasil dari pembiayaan yang telah disalurkan. EBITDA Perseroan mengalami penurunan masing – masing sebesar Rp 13.6 Milyar atau 28% di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dan Rp 9 Milyar atau 15% dari tahun 2018 ke 2019 endisebabkan adanya penurunan pendapatan Perseroan sebesar 16% serta kenaikan beban umum dan administrasi sebesar 22% di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya dan penurunan pendapatan sebesar 7% serta kenaikan umum dan administrasi sebesar 40% di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan beban umum dan administrasi ini sejalan dengan strategi Perseroan yang sejak tahun 2019 dan dilanjutkan di tahun 2020 untuk fokus di pembiayaan retail yang membutuhkan lebih banyak SDM
- 2) Net Interest Margin (NIM) meningkat sebesar 0,56% pada posisi 31 Juli 2021 jika dibandingkan posisi 31 Juli 2020 peningkatan penyaluran pembiayaan merupakan hal yang paling mempengaruhi perubahan NIM tersebut, kenaikan penyaluran pembiayaan ini juga terbesar adalah Piutang Pembiayaan Syariah. Kenaikan sebesar 15% dari sebelumnya 7% menjadi 8% terjadi ditahun 2020 disebabkan dalam kondisi terjadi penurunan total piutang pembiayaan sebaliknya pembiayaan konsumen baik di pembiayaan perumahan menengah bawah yang memiliki NIM lebih tinggi dibandingkan pembiayaan modal kerja korporasi dan pembiayaan sewa mengalami kenaikan sebesar Rp 34 Milyar atau 81%
- 3) Gross Profit Margin Perseroan pada posisi 31 Juli 2021 mengalami penurunan sebesar 12,61% dari sebelumnya pada 31 Juli 2021 sebesar 21,17% menjadi 18,5% , penurunan ini salah satunya disebabkan oleh naiknya pembayaran bunga pinjaman dikarenakan kenaikan pinjaman Perseroan baik dalam bentuk Surat Hutang Jangka Pendek, Pinjaman kepada Lembaga Bank nan non bank. Pada periode 31 Desember 2020 mengalami penurunan masing – masing sebesar 22% di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dan 15% dari tahun 2018 ke 2019 disebabkan adanya penurunan pendapatan Perseroan seperti dijelaskan diatas sementara beban pemasaran dan operasional relatif sama dari tahun sebelumnya.

Rasio Usaha

- 1) Financing To Asset Ratio mengalami penurunan sebesar 9,82% pada posisi 31 Juli 2021 dan 13% di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya kondisi pandemi dimana Perseroan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan baru terutama untuk pembiayaan produktif UMKM dan pembiayaan multiguna yang bekerjasama dengan perusahaan keuangan berbasis teknologi
- 2) Debt To Equity Ratio Perseroan masih masuk kategori sangat baik masing – masing 1,5 kali di periode 31 Juli 2021, 0.9 kali di tahun 2020 dan 1.2 kali di tahun 2019 dimana jauh di bawah rata – rata industri pembiayaan yang biasa menggunakan leverage ratio dengan Gearing Ratio (Total Hutang dibagi dengan Ekuitas) sebesar 2 kali dan secara regulasi bisa sampai 10 kali

Rasio Likuiditas

- 1) Current Ratio Perseroan masih masuk kategori sangat baik masing–masing 2,43 kali pada posisi 31 Juli 2021, 3.82 kali di tahun 2020 dan 4.36 kali di tahun 2019 dimana Perseroan selalu menjaga likuiditas Perseroan dalam memenuhi semua kewajiban jangka pendek Perseroan
- 2) Quick Ratio Perseroan masih masuk kategori sangat baik masing–masing 1,89 kali pada posisi 31 Juli 2021, 2.78 kali di tahun 2020 dan 4.08 kali di tahun 2019 dimana Perseroan selalu menjaga posisi Kas dan Bank serta semua Piutang Yang Jatuh Tempo kurang dari satu tahun selalu dapat memenuhi semua kewajiban jangka pendek Perseroan
- 3) DSCR Perseroan terjaga sangat baik masing – masing 1,58 pada posisi 31 Juli 2021, 2.5 kali di tahun 2020 dan 3.3 kali di tahun 2019 menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba kas dalam memenuhi semua kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka pendek

Dampak Covid-19 Terhadap Kondisi Keuangan Serta Mitigasi Dari Perseroan

Dampak dari COVID-19 mengakibatkan Perseroan membatasi kegiatan operasional di seluruh jaringan kantor serta Perseroan juga memutuskan memperketat dalam penyaluran pembiayaan dan memberikan fasilitas kredit secara selektif. Dampak dari COVID-19 sebagian nasabah yang berdampak terhadap COVID-19 ini mengajukan Restrukturisasi kepada Perseroan. Sehingga

Perseroan harus mengupayakan pengajuan tersebut sesuai himbauan dari OJK, tentu dengan Persyaratan yang sudah ditentukan oleh OJK. Perseroan memberikan kebijakan untuk jenis restrukturisasi yaitu adalah Perpanjangan Tenor, dan penangguhan angsuran, dimana kebijakan ini akan memberikan kemudahan bagi nasabah yang terdampak sehingga penerimaan pembayaran kewajiban oleh nasabah tetap terjaga. Hingga semester I 2021 PPKM Mikro masih diterapkan oleh Pemerintah, dan berdampak pada masih dibatasinya kegiatan Operasional perseroan. Kebijakan relaksasi masih diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Perseroan tetap mengikuti segala kebijakan Pemerintah dan Otoritas.

VI. FAKTOR RISIKO

1. Risiko Yang Berkaitan Dengan Usaha Perseroan

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko. Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk berinvestasi, para calon investor harus terlebih dahulu secara cermat dan hati-hati mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot yang di hadapi Perseroan dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. Risiko Utama

Risiko Kredit / Pembiayaan

Risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan. Termasuk akibat kegagalan debitur antara lain:

- Risiko Konsentrasi Kredit, merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan.
- *Counterparty credit risk*, merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.
- *Settlement risk*, merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrument keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepekat dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.

Parameter atau indikator yang digunakan, antara lain:

- Strategi penyaluran pembiayaan;
- Komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi;
- Kualitas piutang pembiayaan dan kecukupan pencadangan; dan
- Faktor eksternal

B. Risiko Usaha

Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain:

- Kelemahan sumber daya manusia;
- Kelemahan proses internal;
- Sistem dan infrastruktur yang kurang memadai; dan
- Kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Perseroan.

Parameter atau indikator yang digunakan dalam menilai Risiko Operasional, antara lain:

- Kompleksitas Organisasi dan Kegiatan Usaha;
- Sumber daya manusia;
- Sistem teknologi dan informasi;
- Risiko Fraud;
- Gangguan terhadap bisnis dan organisasi; dan
- Tingkat interaksi dan ketergantungan Perseroan.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, yaitu antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas dan risiko ekuitas.

Parameter atau indikator yang digunakan, antara lain:

- Strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar;
- Volume dan komposisi portofolio aset yang terekspos risiko pasar; dan
- Volume dan komposisi portofolio liabilitas yang terekspos risiko pasar

Dalam hal terjadi perubahan harga terutama jika terjadi kenaikan suku bunga dan tingkat inflasi maka dampaknya terhadap Perseroan adalah terjadinya penurunan margin dan kenaikan biaya operasional yang menyebabkan turunnya laba bersih Perseroan.

Untuk itu Perseroan menjalankan strategi dengan melakukan :

- melakukan “matching” antara- arus kas pendanaan (baik pokok maupun bunga yang dibayar) yang bersifat tetap atau tidak berfluktuasi dengan model pembiayaan kepada nasabah
- melakukan “matching” antara tenor dari sisi kewajiban dan juga pembiayaan kepada nasabah
- tidak memberikan pembiayaan dalam mata uang asing kedepannya

Risiko Likuiditas

Risiko yang timbul akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas/kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perseroan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*)

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen perseroan memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Parameter atau indikator yang digunakan, antara lain:

- Komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening administratif;
- Pengelolaan arus kas;
- Kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
- Akses pada sumber pendanaan

Risiko Hukum

Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

Risiko hukum dapat timbul karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga.

Parameter atau indikator yang digunakan, antara lain:

- Ketidadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan;
- Kelemahan dalam perikatan atau kerjasama; dan
- Proses penyelesaian sengketa

Risiko Kepatuhan – Tata Kelola

Risiko yang timbul akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.

Parameter atau indikator yang digunakan, antara lain:

- Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
- Frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau *track record* kepatuhan Perseroan;
- Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar bisnis yang berlaku umum; dan
- Tindak lanjut atas pelanggaran.

Risiko Reputasi

Risiko yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.

Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perseroan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perseroan yang kurang efektif.

Parameter atau indikator yang digunakan, antara lain:

- Pengaruh reputasi pengurus, pemilik dan grup;
- Pelanggaran etika bisnis;
- Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis;
- Frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif; dan
- Frekuensi dan materialitas keluhan debitur.

Risiko Strategis

Risiko yang muncul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Sumber Risiko Strategis dapat disebabkan antara lain:

- Penetapan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perseroan;
- Analisa lingkungan strategis yang tidak komprehensif;
- Terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antar level strategis; dan
- Kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan

Parameter atau indikator yang digunakan dalam menilai Risiko Strategis, antara lain:

- Kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha
- Pencapaian realisasi bisnis Perseroan
- Posisi strategis Perseroan di Industri Pembiayaan
- Pemilihan strategi bisnis Perseroan

C. Risiko Umum

Risiko Perekonomian

Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Risiko ini mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada Perseroan seperti misalnya penyaluran kredit, kualitas aset produktif, biaya pendanaan yang selanjutnya berdampak pada kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan

Risiko Perubahan Kurs

Dengan adanya perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap valuta asing lainnya dalam jangka waktu yang relatif lama akan berdampak langsung terhadap sebagian harga. Apabila terjadi kenaikan harga akibat dari perubahan nilai tukar tersebut maka hal ini mempengaruhi daya beli masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah yang merupakan salah satu pangsa pasar Perseroan. Sebagai akibat dari semakin melemahnya daya beli tersebut akan berdampak kepada kegiatan pembiayaan Perseroan

Risiko Sosial dan Keamanan

Gejolak sosial, seperti pandemi virus Covid19 dan keamanan dapat berdampak luas pada sektor ekonomi. Gejolak ini mengakibatkan turunnya berbagai kegiatan di berbagai sektor industri termasuk sektor kendaraan bermotor. Apabila hal tersebut terjadi maka mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan menurunkan pendapatan Perseroan

Risiko Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dapat mempengaruhi kondisi sumber dana maupun penggunaan dana. Kebijakan uang ketat mengakibatkan sumber dana mengecil yang kemudian dapat mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga. Deregulasi akan melonggarkan sumber dana yang selanjutnya mengakibatkan turunnya tingkat bunga. Situasi tersebut akan menurunkan aktifitas Perseroan maupun hasil usaha yang dapat diperoleh

Risiko Dampak Akibat Krisis Global

Krisis ekonomi global akibat pandemic Covid 19 yang diantaranya ditandai menurun hampir seluruh pertumbuhan ekonomi dinegara dunia baik negara maju ataupun negara berkembang, akibat hal tersebut adalah likuiditas yang ketat di dunia perbankan dan menurunnya daya beli masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan yang tercermin dari nilai peningkatan pembiayaan yang terhambat di tahun 2020 dan juga fokus perseroan pada perbaikan kualitas pembiayaan termasuk melakukan restrukturisasi akibat pandemi serta selektif dalam melakukan pembiayaan.

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan pemerintah (dalam hal ini kebijakan dari sisi regulator jasa keuangan, kebijakan di bidang

fiskal, kebijakan di sektor produktif UMKM, perumahan) sudah tercermin dalam rencana bisnis Perseroan dan sebagian tercermin dalam laporan keuangan perseroan terutama dari sisi perubahan segmentasi pembiayaan Perseroan dari 2019 dan 2020 dan semester pertama 2021.

Dampak dari perubahan bisnis model perseroan berdampak pada meningkatnya biaya operasional terutama pada penambahan jumlah karyawan terkait perbaikan tata kelola dan pemisahan tugas terutama dengan fokus pada segmen pembiayaan yang sebelumnya hanya fokus pada pembiayaan Corporate maka perseroan perlu menyiapkan sumber daya yang cukup terutama untuk peningkatan pelayanan pada nasabah pembiayaan konsumen secara langsung untuk pembiayaan perumahan menengah bawah dan juga tambahan masing – masing “Person In Charge” untuk melayani mitra – mitra dalam penyaluran pembiayaan di mikro produktif UMKM dan pembiayaan konsumen multiguna.

Dampak lain terkait kebijakan pemerintah dalam hal meringankan masyarakat dan pelaku usaha dalam masa pandemi dengan memberikan kelonggaran bagi nasabah yang dimasukkan dalam program restrukturisasi pada perusahaan pembiayaan juga mendorong Perseroan melakukan hal tersebut pada tahun 2020 terutama pada pembiayaan konsumen sehingga beberapa nasabah diberikan keringanan dalam pembayaran angsuran atas pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan walau dalam hal; ini tidak mengganggu kondisi likuiditas dan kinerja perseroan secara keseluruhan. Kebijakan relaksasi masih diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan kebijakan Pemerintah dalam mendukung

2. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 6 Oktober 2021, sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran, yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 dan laporan keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, masing-masing telah diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan (Parker Randall International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Yansyafrin (Izin Akuntan Publik No. AP.1482) dan KAP Heliantono & Rekan (Parker Randall International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Yansyafrin (Izin Akuntan Publik No. AP.1482) dan KAP Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens International) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 19 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Suharsono (Izin Akuntan Publik No. AP.0003).

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. Perseroan didirikan dengan nama "PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation" sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation No. 38 tanggal 12 Mei 1989, yang dibuat di hadapan M.M.I. Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.7473.HT.01.01-Th'89 tanggal 15 Agustus 1989 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1130/1989 tanggal 22 Agustus 1989 ("Akta Pendirian").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000,-	
Nama Pendiri/Pemegang Saham:			
1. Juska Sudarto Halim	2.500	2.500.000.000,-	50,00
2. Gino Sakiris	1.000	1.000.000.000,-	20,00
3. Johnny Widjaja	750	750.000.000,-	15,00
4. Martina Widjaja	750	750.000.000,-	15,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000	5.000.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000,-	-

Perubahan nama Perseroan dari PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation menjadi PT Nation Capital Finance berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation No. 2 tanggal 2 Desember 2002, yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") melalui Keputusan No.C-00394 HT.01.04.TH.2003 tanggal 9 Januari 2003 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 090516545378 tanggal 11 Maret 2004.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan UUPT yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nation Capital Finance No. 7 tanggal 10 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Lanawati Dewi Soegianto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-51209.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0071063.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 096 tanggal 30 November 2021 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 037363.

Adapun perubahan nama Perseroan dari PT Nation Capital Finance menjadi PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT Nation Capital Finance No. 17 tanggal 25 September 2012, yang dibuat di hadapan Aryani, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Keputusan No. AHU-53399.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090561.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012, serta telah diumumkan pada BNRI No. 096 tanggal 30 November 2021 dan TBNRI No. 037360.

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 28 tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai Keputusan No. AHU-0056263.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("SABH") di bawah No. AHU-AH.01.03-0349739 tanggal 14 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah No. AHU-0134301.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 063 dan Tambahan BNRI No. 025054 tanggal 6 Agustus 2021, yaitu mengenai perubahan dan pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("Akta No. 28/2020") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia Sebagai Pengganti Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 20 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Dra. Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai Keputusan No. AHU-0005054.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 21

Januari 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. No. AHU-AH.01.03-030046428 tanggal 21 Januari 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0014182.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 Januari 2022, yaitu mengenai perubahan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan ("Akta No. 18/2022").

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 18/2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pembiayaan baik konvensional dan syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan Usaha Pembiayaan Konvensional 64911:
Mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu: pembiayaan investasi; pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna; dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan konvensional dalam kelompok ini dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
2. Menjalankan usaha Pembiayaan Syariah 64913:
Mencakup kegiatan unit kerja dari kantor pusat perusahaan pembiayaan yang melaksanakan kegiatan pembiayaan Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah.

Adapun sejak Perseroan berdiri, kegiatan usaha utama perseroan adalah melakukan berbagai jenis pembiayaan, yang antara lain meliputi:

- Sewa Guna Usaha;
- Modal Ventura;
- Perdagangan Surat Berharga;
- Anjak Piutang;
- Pembiayaan Konsumen;
- Mendirikan Perseroan-perseroan lain dengan maksud untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mendirikan atau melakukan investasi di perusahaan dalam segala bidang usaha.

B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Pemegang Saham			
1. Juska Sudarto Halim	2.500	2.500.000.000,-	50,00
2. Gino Sakiris	1.000	1.000.000.000,-	20,00
3. Johnny Widjaja	750	750.000.000,-	15,00
4. Martina Widjaja	750	750.000.000,-	15,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	5.000	5.000.000.000	

Berikut ini merupakan perkembangan kepemilikan saham Perseroan dalam periode 2 (dua) tahun terakhir yang juga merupakan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan, yaitu sebagai berikut:

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 56 tanggal 19 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0303830 tanggal 26 Juli 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0120456.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Reliance Capital Management	113.000	113.000.000.000,-	84,97
2. PT Asuransi Reliance Indonesia	20.000	20.000.000.000,-	15,03

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	133.000	133.000.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	267.000	267.000.000.000,-	

Catatan:

1. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, berdasarkan pernyataan dari Perseroan, Perseroan belum memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT mengenai cadangan yang diwajibkan, dikarenakan sampai dengan saat ini Perseroan memutuskan penggunaan laba bersih untuk dimasukkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan pada tahun buku yang berakhir pada tahun buku 2020. Namun demikian, Perseroan akan tetap berupaya untuk melakukan penyisihan dari laba bersih untuk cadangan dan akan dilakukan secara bertahap sampai cadangan terkait mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dan selama cadangan terkait belum mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
2. Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018") sebagaimana yang tercatat saat ini pada sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Anton Budidjaja dan Perseroan telah melakukan pelaporan atas Pemilik Manfaat tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan No. 009/BOD-REFI/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021, bahwa penetapan Anton Budidjaja sebagai pemilik manfaat dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (d), (e), (f) dan (g) Perpres No. 13/2018, yaitu:

- i. memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- ii. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- iii. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- iv. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

C. Perizinan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memperoleh perizinan yang cukup sesuai dengan bidang kegiatan usahanya, yaitu sebagai berikut:

Izin	Masa Berlaku	Keterangan
Perizinan Sehubungan Kegiatan Usaha dan Operasional		
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1080/KMK.013/1989 tanggal 26 September 1989 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation. Izin ini telah diperpanjang dan diubah beberapa kali antara lain dengan Keputusan Menteri sebagai berikut:	Berlaku sejak tanggal ditetapkan	-
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-590/KM.10/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1080/KMK.013/1989 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation; dan		
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-629/KM.10/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1080/KMK.013/1989 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation.		
Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-87/NB.223/2017 tanggal 28 Juli 2017	-	-

Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120114081285 tanggal 18 Oktober 2019 dengan kode dan nama KBLI 64910 - Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi.	Selama Perseroan melakukan kegiatan usahanya	-
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 547/27.1BU.1/31.71.07.1003/- 071.562/e/2017 tanggal 13 April 2017, yang terdaftar a.n Perseroan.	13 April 2017 s/d 13 April 2022	-
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.64.45378 tanggal 21 Mei 2018 yang terdaftar a.n. Perseroan.	21 Mei 2018 s/d 15 Maret 2023	-
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.336.255.3-015.000, yang terdaftar atas nama Perseroan sejak tanggal 17 Desember 2002.	-	-
Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-01603/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 19 Oktober 2012	-	-
Perizinan dan Dokumen Sehubungan Ketenagakerjaan		
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No. 1338 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan Periode 2021-2023	7 Mei 2021 s.d 7 Mei 2023	-
Sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) No. 73/SER/0901/0721 tanggal 5 Juli 2021	1 Juli 2021 s/d 30 Juni 2022	-
Sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Nomor JJ081616 tanggal 13 Oktober 2005	-	-
Wajib Laport Ketenagakerjaan No. 10220.20201207.0010 *)	s/d 07 Desember 2021 (tanggal pendaftaran kembali *)	-

*) **Catatan:** Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Wajib Laport Ketenagakerjaan Perseroan masih dalam proses pendaftaran kembali di instansi ketenagakerjaan berwenang setempat.

D. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan, Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia" No. 23 tanggal 16 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Dra. Rr. Hariyanti Poerbiantari, S.H, Notaris di Jakarta, yang diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0384497 tanggal 18 Juni 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0107706.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021 (**Akta No. 23/2021**), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anton Budidjaja
Komisaris Independen : Braman Setyo

Direksi

Direktur Utama : Iman Pribadi
Direktur : Fajar Satritama
Direktur : Ira Rakhmawati

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2026.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

Dewan Komisaris

Anton Budidjaja

Komisaris Utama, 52 tahun Warga Negara Indonesia



Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan pada tahun 2012. Menyelesaikan pendidikan di California State University Jurusan Finance pada tahun 1991. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan
2018 - sekarang	Komisaris PT Reliance Capital Management
2015 – sekarang	Komisaris Utama PT Reliance Modal Ventura
2012 – sekarang	Komisaris Utama PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia
2012 – sekarang	Komisaris Utama PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia
2011 – 2018	Direktur Utama PT Reliance Capital Management
2010 – 2014	Dewan Pembina Yayasan Pendidikan President University
2002 – sekarang	Presiden Komisaris PT Reliance Capital Management
2002 – 2015	Presiden Komisaris PT Asuransi Reliance Indonesia
2002 – 2013	Komisaris PT Jababeka, Tbk
2000 – 2002	Managing Partner PT Victoria Investindo Advisory
1993 – 2000	Vice President PT Pan Indonesia Bank Tbk (Panin Group)
1992 – 1993	Branch Manager PT Bank Pelita
1991 – 1992	Asisten Manajer Kredit PT Bank Susila Bhakti

Braman Setyo

Komisaris Independen, 63 tahun Warga Negara Indonesia



Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Jember di Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen Perusahaan, pada tahun 1984, kemudian melanjutkan pendidikan Magister di Universitas 17 Agustus 1994, jurusan Ilmu Administrasi pada tahun 1998. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan
2020 - Sekarang	Komisaris PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia
2018 - 2020	<i>Plt. Dirut LPDB Kementerian Koperasi dan UKM</i>
2017 - 2018	<i>Direktur Utama LPDB - KUMKM</i>
2015 - 2017	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Pembiayaan
2014 - 2017	Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
2013 - 2015	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
2011 - 2013	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Produksi
2006 - 2011	<i>Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim</i>
2005 - 2006	<i>Kepala Biro Umum Setda Pemprov Jatim</i>
2003 - 2005	<i>Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Jatim</i>
2001 - 2003	Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Pemprov Jatim
1994 - 2001	Kasubag Penyusunan Program Pemprov Jatim
1992 - 1994	Kasubag Penyusunan Rencana Pemprov Jatim
1991 - 1992	Kasubag Perhubungan (Biro Ekonomi) Pemprov Jatim

Dewan Direksi

Iman Pribadi

Direktur Utama, 50 tahun
Warga Negara Indonesia



Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi pada tahun 1995. Kemudian melanjutkan Pendidikan *Master of Business Administration* di *Monash University, Australia* pada tahun 2004. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan
2020 - Sekarang	Direktur Utama PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia
2020	Direktur Utama <i>Fairbanc Technologies Indonesia</i>
2017 - 2020	Direktur LPDB - KUMKM
2016 - 2017	Komisaris PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia (AJRI) Komisaris Utama PT Asuransi Reliance Indonesia (ARI) Direktur Utama PT Reliance Modal Ventura (RMV) Direktur Keuangan PT Reliance Capital Management (RCM)
2014 - 2015	Direktur Utama PT Al Ijarah Indonesia Finance
2011 - 2014	Direktur Manajemen Risiko dan IT PT CIMB Niaga Utama Finance
2011	<i>Senior Manager Strategic & Performance</i> PT Gunung Sewu Kencana
2007 - 2011	Kepala Divisi Audit dan Kepatuhan PT Astra Sedaya Finance
1997 - 2007	Kadiv Manajemen Risiko dan Bisnis; Kadiv Keuangan & Bisnis PT Astra CMG Life

Ira Rakhmawati

Direktur, 39 tahun
Warga Negara Indonesia



Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018. Menyelesaikan studi di Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 2006. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan
2018 – Sekarang	Direktur PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia
2018 – 2018	Head of Legal PT Reliance Capital Management
2015 – 2016	Legal Consultant Ashurst LLP Singapore
2011 – 2017	Senior Associate Oentoeng Suria and Partners
2009 – 2011	Senior Associate Susanto and Partners
2006 – 2009	Associate Bahar and Partners
2005 – 2005	Internship - Legal Credit PT BRI Cabang Naripan, Bandung

Fajar Satritama

Direktur, 49 tahun
Warga Negara Indonesia



Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia tahun 1989. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan
2018 - Sekarang	Direktur PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia
2017 - 2018	Kepala Divisi Corporate, SME & Value Chain PT Bank Ganesha Tbk
2011 - 2017	<i>Head of Corporate Banking III Dept</i> PT Bank ICBC Indonesia
2000 - 2010	<i>Team Leader Corporate Finance</i> PT Bank OCBC NISP Tbk
1996 - 1999	<i>Senior Account Officer Cabang Matraman</i> PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola berbagai usaha untuk mencapai obyektif Perseroan dan memastikan aset Perseroan digunakan dengan semestinya untuk kepentingan para pemegang saham. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan dan juga kondisi- kondisi internal dan eksternal. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, seluruh Direksi Perseroan menetap di Indonesia dan tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada perusahaan pembiayaan lain.

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris sejak 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Juli 2021.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Anton Budidjaja	Komisaris Utama	14	100%
2.	Braman Setyo	Komisaris Independen	8	57,1%

Catatan:

Komisaris Independen baru bergabung di Perseroan dan mulai mengikuti Rapat Dewan Komisaris bulan Desember 2020

Rapat Direksi

Rapat Direksi sejak 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Juli 2021.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Iman Pribadi	Direktur Utama	8	57,1%
2.	Ira Rakhmawati	Direktur	14	100%
3.	Fajar Satritama	Direktur	14	100%

Catatan:

Direktur Utama baru bergabung di Perseroan dan mulai mengikuti Rapat Direksi bulan Desember 2020.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

No	Program Kerja	Realisasi
1	Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) <i>Evaluate and approve the Sustainable Financial Action Plan</i>	√
2	Menelaah Laporan Tahunan 2020 <i>Reviewing the 2020 Annual Report</i>	√
3	Mengikuti pelatihan <i>Take training</i>	√
4	Melakukan pengawasan kebijakan <i>Supervise policies</i>	√
5	Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Risiko Perusahaan berdasar Laporan Profil Risiko Perusahaan <i>Evaluation and Monitoring of Company Risk Management based on Company Risk Profile Report</i>	√
6	Review Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration review and Nomination</i>	√
7	Pembahasan mengenai penunjukan AP dan KAP <i>Discussion on the appointment of AP and KAP</i>	√
8	Memberikan arahan perubahan organisasi <i>Provide organizational change direction</i>	√

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dibayarkan oleh selaku pemegang saham utama Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.336.740.322 dan tahun yang berakhir pada tanggal- tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.938.998.262.

Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya, Dewan Komisaris secara rutin turut serta dalam pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, termasuk yang berhubungan dengan penerapan GCG.

Program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Nama Pengembangan Kompetensi	Penyelenggara
Anton Budidjaja	Komisaris Utama	Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan Tahun 2020"	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Anton Budidjaja	Komisaris Utama	Seminar Nasional "Multifinance Road to Recovery"	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Braman Setyo	Komisaris Independen	Seminar Nasional "Multifinance 2021 bertumbuh ditengah Pandemi"	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Braman Setyo	Komisaris Independen	Penguatan Peran Direksi dan Dewan Komisaris Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank Dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program APU PPT	Otoritas Jasa Keuangan

Program Pelatihan Dan Peningkatan Kompetensi Direksi

Perseroan senantiasa mendorong semua anggota Direksi untuk terus mengembangkan kemampuan dan kompetensinya agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan dengan mengikutsertakan Direksi dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup kerjanya. Program-program yang telah diikuti Direksi antara lain:

Nama	Jabatan	Nama Pengembangan Kompetensi	Penyelenggara
Iman Pribadi	Direktur Utama	Seminar Online "Multifinance 2021 Bertumbuh ditengah Pandemi"	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Ira Rakhmawati	Direktur	Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan Tahun 2020"	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Ira Rakhmawati	Direktur	Webinar Nasional "Pemulihan Kesehatan Industri Pembiayaan"	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Ira Rakhmawati	Direktur	Seminar Online "Multifinance 2021 Bertumbuh ditengah Pandemi"	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Ira Rakhmawati	Direktur	Pertemuan terkait Penghapusan tanda "R" atas pelaporan data debitur restrukturisasi	Otoritas Jasa Keuangan
Fajar Satritama	Direktur	Webinar "Multifinance Road To Recovery"	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Fajar Satritama	Direktur	Webinar Nasional "Pemulihan Kesehatan Industri Pembiayaan"	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit Perseroan didasarkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan sebagai berikut:

- Anggaran Dasar Perseroan
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/ POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/ POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Surat Keputusan Komisaris No. 010/BOC-REFI/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Surat Keputusan Pembentukan Komite Audit.

Fungsi utama Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas pengawasan dan metodologi dan proses dari pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit dan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengangkatan Komite Audit berlaku untuk 2 (dua) tahun dan setiap anggota Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Braman Setyo
Anggota : Alan Yazid
Anggota : Saleh Basir

Susunan Komite Audit tersebut diatas telah diangkat berdasarkan Surat keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 010/BOC-REFI/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Komite Audit PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia (selanjutnya disebut Perseroan) adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas hal-hal berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Riwayat Singkat Anggota Komite Audit

Braman Setyo

Menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan sejak tahun 2020. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Jember di Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen Perusahaan, pada tahun 1984, kemudian melanjutkan pendidikan Magister di Universitas 17 Agustus 1994, jurusan Ilmu Administrasi pada tahun 1998. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan
2020 - Sekarang	Komisaris PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia
2018 - 2020	<i>Plt. Dirut LPDB Kementerian Koperasi dan UKM</i>
2017 - 2018	<i>Direktur Utama LPDB - KUMKM</i>
2015 - 2017	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Pembiayaan
2014 - 2017	Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
2013 - 2015	Kementrian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
2011 - 2013	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Produksi
2006 - 2011	<i>Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim</i>
2005 - 2006	<i>Kepala Biro Umum Setda Pemprov Jatim</i>
2003 - 2005	<i>Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Jatim</i>
2001 - 2003	Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Pemprov Jatim
1994 - 2001	Kabag Penyusunan Program Pemprov Jatim
1992 - 1994	Kasubag Penyusunan Rencana Pemprov Jatim
1991 - 1992	Kasubag Perhubungan (Biro Ekonomi) Pemprov Jatim

Alan Yazid

Alan Yazid menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan sejak 4 Oktober 2021. Memiliki gelar *Master of Business Administration* dari Bowling State University, Ohio, US. Sebelumnya memiliki pengalaman sebagai *Risk Monitoring Committee* di PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero).

Tahun	Perusahaan
2021 - Sekarang	<i>Risk Monitoring Committee</i> di PT. Jasa Asuransi Indonesia (Persero)
2019 - Sekarang	<i>Working Group Committee in Developing Governance Risk and Compliance (GRC)</i> OJK.
2018 - Sekarang	<i>Formulation Team in Developing Risk Management Syllabus for Non-Bank Industry (IKNB)</i> OJK.
2017 - Sekarang	<i>Formulation Team in Developing Risk Management Syllabus for Risk Director Based on POJK 18/2016.</i>
2016 - 2018	<i>BSMR Member in Developing OJK's Multifinance Risk Management Based on POJK 01/2015</i>

Saleh Basir

Saleh Basir menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan sejak 4 Oktober 2021. Memiliki gelar Sarjana Ekonomi dan Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Sebelumnya memiliki pengalaman sebagai *Partner* di Granada Law Firm.

Tahun	Perusahaan
2021 - Sekarang	<i>Partner</i> di Granada Law Firm
2014 - 2016	<i>Secretary of Supervisory Board</i> di BPJS Kesehatan
2012 - 2014	<i>Member of Audit Committee</i> di BPJS Kesehatan
2004 - 2012	<i>Member of Audit Committee</i> di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit sejak 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Juli 2021.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Braman Setyo	Ketua Komite Audit	8	100%
2.	Alan Yazid	Anggota Komite Audit	-	
3.	Saleh Basir	Anggota Komite Audit	-	

Catatan:

Alan Yazid dan Saleh Basir menjadi anggota Komite Audit pada tanggal 5 Oktober 2021

Laporan Komite Audit.

Laporan Komite Audit sepanjang 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Juli 2021 adalah:

1. Laporan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit tahun buku 2019.
2. Rekomendasi penunjukan KAP untuk tahun buku 2020.
3. Laporan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit tahun buku 2020

Komite Pemantau Risiko

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Fungsi utama Komite Pemantau Risiko adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya terhadap metodologi dan proses manajemen risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta implementasi tata kelola perusahaan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Braman Setyo
Anggota : Saleh Basir

Susunan Komite Pemantau Risiko tersebut diatas telah diangkat berdasarkan Surat keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.009/BOC-REFI/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Sebagaimana ditetapkan dalam Surta Keputusan Pembentukan Komite Pemantau Risiko, Komite Risiko Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dewan komisaris atas hal-hal berikut:

1. Melakukan pendidikan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko;
2. Menilai efektivitas manajemen risiko termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perseroan;
3. Melakukan pendidikan aktif terhadap Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Mencakup kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko;
5. Mencakup pendidikan sistem informasi manajemen risiko; dan
6. Mencakup pengendalian internal yang menyeluruh.

Riwayat Singkat Anggota Komite Pemantau Risiko

Braman Setyo

Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Perseroan sejak tahun 2020. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Jember di Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen Perusahaan, pada tahun 1984, kemudian melanjutkan pendidikan Magister di Universitas 17 Agustus 1994, jurusan Ilmu Administrasi pada tahun 1998. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan
2020 – Sekarang	Komisaris PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia
2018 – 2020	Plt. Dirut LPDB Kementerian Koperasi dan UKM
2017 – 2018	Direktur Utama LPDB - KUMKM
2015 – 2017	Kementerian Koperasi dan UKM Deputy Bidang Pembiayaan
2014 – 2017	Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
2013 – 2015	Kementrian Koperasi dan UKM Deputy Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
2011 – 2013	Kementerian Koperasi dan UKM Deputy Bidang Produksi
2006 – 2011	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim
2005 – 2006	Kepala Biro Umum Setda Pemprov Jatim
2003 – 2005	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Jatim
2001 – 2003	Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Pemprov Jatim
1994 – 2001	Kabag Penyusunan Program Pemprov Jatim
1992 – 1994	Kasubag Penyusunan Rencana Pemprov Jatim
1991 – 1992	Kasubag Perhubungan (Biro Ekonomi) Pemprov Jatim

Saleh Basir

Saleh Basir menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan sejak 4 Oktober 2021. Memiliki gelar Sarjana Ekonomi dan Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Sebelumnya memiliki pengalaman sebagai *Partner* di Granada Law Firm.

Tahun	Perusahaan
2021 – Sekarang	<i>Partner</i> di Granada Law Firm
2014 – 2016	<i>Secretary of Supervisory Board</i> di BPJS Kesehatan
2012 – 2014	<i>Member of Audit Committee</i> di BPJS Kesehatan
2004 – 2012	<i>Member of Audit Committee</i> di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko sejak 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Juli 2021.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Braman Setyo	Ketua Komite Pemantau Risiko	6	100%
2.	Saleh Basir	Anggota Komite Pemantau Risiko		

Catatan:

Saleh Basir menjadi anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 5 Oktober 2021

Laporan Komite Pemantau Risiko

Laporan Komite Pemantau Risiko sepanjang 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Juli 2021 adalah:

1. Laporan Evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Semester I tahun 2020
2. Laporan Evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko Tahun 2020

Unit Audit Internal

Mengacu pada dan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk dan memiliki Piagam Internal Audit dan telah mengangkat Sdr. Bayu Putra Harvianto selaku Kepala Unit Audit Internal terhitung sejak 2 Oktober 2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 007/BOC-REFI/X/2019 tentang Pembentukan Unit Audit Internal yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 011/BOC-REFI/X/2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal tertanggal 5 Oktober 2021.

Bayu Putra Harvianto

Bayu Putra Harvianto menjabat sebagai Unit Audit Internal Perseroan sejak 2 Oktober 2019. Memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Riau. Sebelumnya memiliki pengalaman sebagai *Section Head of Internal Audit & Anti Fraud* di PT. MNC Finance.

Tahun	Perusahaan
2019 - Sekarang	<i>Internal Audit & Anti Fraud Ass. Manager</i> di PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia
2018 - 2019	<i>Internal Audit & Anti Fraud Section Head</i> di PT MNC Finance
2015 - 2018	<i>Regional Audit Team Leader</i> di PT Wahana Ottomitra Multiartha

Tugas dan Tanggung Jawab berdasarkan Piagam Internal Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan endid manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Piagam Audit Internal Perseroan telah ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 2021 oleh masing-masing anggota Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Nominasi Remunerasi

Mengacu pada dan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 28 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah menyusun Komite Perseroan sejak tanggal Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut:

Ketua	: Braman Setyo
Anggota	: Anton Budidjaja
Anggota	: Angga Gunawan

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 019/BOC-REFI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Pengangkatan Komite Nominasi Dan Remunerasi.

Riwayat Singkat Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Braman Setyo

Menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2020. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Jember di Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen Perusahaan, pada tahun 1984, kemudian melanjutkan pendidikan Magister di Universitas 17 Agustus 1994, jurusan Ilmu Administrasi pada tahun 1998. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan
2020 – Sekarang	Komisaris PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia
2018 – 2020	<i>Plt. Dirut LPDB Kementerian Koperasi dan UKM</i>
2017 – 2018	<i>Direktur Utama LPDB - KUMKM</i>
2015 – 2017	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Pembiayaan
2014 – 2017	Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
2013 – 2015	Kementrian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
2011 – 2013	Kementerian Koperasi dan UKM Deputi Bidang Produksi
2006 – 2011	<i>Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim</i>
2005 – 2006	<i>Kepala Biro Umum Setda Pemprov Jatim</i>
2003 – 2005	<i>Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Jatim</i>
2001 – 2003	Kepala Bagian Penyusunan Program Setda Pemprov Jatim
1994 – 2001	Kabag Penyusunan Program Pemprov Jatim
1992 – 1994	Kasubag Penyusunan Rencana Pemprov Jatim
1991 – 1992	Kasubag Perhubungan (Biro Ekonomi) Pemprov Jatim

Anton Budidajaja

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tahun 2020. Menyelesaikan pendidikan di California State University Jurusan Finance pada tahun 1991. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan
2018 – sekarang	Komisaris PT Reliance Capital Management
2015 – sekarang	Komisaris Utama PT Reliance Modal Ventura
2012 – sekarang	Komisaris Utama PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia
2012 – sekarang	Komisaris Utama PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia
2011 – 2018	Direktur Utama PT Reliance Capital Management
2010 – 2014	Dewan Pembina Yayasan Pendidikan President University
2002 – sekarang	Presiden Komisaris PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
2002 – 2015	Presiden Komisaris PT Asuransi Reliance Indonesia
2002 – 2013	Komisaris PT Jababeka, Tbk
2000 – 2002	Managing Partner PT Victoria Investindo Advisory
1993 – 2000	Vice President PT Pan Indonesia Bank Tbk (Panin Group)
1992 – 1993	Branch Manager PT Bank Pelita
1991 – 1992	Asisten Manajer Kredit PT Bank Susila Bhakti

Angga Gunawan

Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2021. Menyelesaikan Pendidikan di Universitas Budi Luhur, Jakarta dengan gelar Sarjana Ekonomi. Sebelumnya memiliki pengalaman sebagai *Human Resources, Compensation & Benefits* di beberapa perusahaan sawit

Tahun	Perusahaan
2020 – sekarang	HR Manager di PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia
2018 – 2020	Spv HR Operation & Bussiness Partner di Eagle High Plantations Tbk
2015 – 2018	Sr Staff Compensation & Benefits di Eagle High Plantations Tbk
2009 – 2015	Staf Corporate Services di PT BW Plantation Tbk

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Tentang Pengangkatan Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; dan
 - Program pengembangan untuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; dan
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan fungsi dalam bidang Remunerasi antara lain:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - o Struktur remunerasi untuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
 - o Kebijakan atas remunerasi untuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
 - o Bentuk dan besaran remunerasi bagi untuk anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
3. Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan dan besaran remunerasi setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun.

Surat Keputusan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2020 oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi sejak 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Juli 2021.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1.	Braman Setyo	Ketua Komite	4	100%
2.	Anton Budidjaja	Anggota	4	100%
3.	Jessica Tambunan	Anggota	4	100%
4.	Angga Gunawan	Anggota	0	0

Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi

Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Juli 2021 adalah:

1. Laporan Evaluasi Kinerja anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2019
2. Memberikan usulan calon Komisaris Independen dan calon Direktur Utama
3. Laporan Evaluasi Kinerja anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2020

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan survey pasar pada perusahaan sejenis dan sekelas Perseroan.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris melakukan pembahasan untuk kemudian diusulkan dalam RUPS
4. RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran Remunerasi.

Sekretaris Perusahaan

Mengacu pada dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Sdr. Frans Victor Kailola sebagai *Corporate Secretary* Perseroan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi dan memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs website Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan dan Stakeholders.

Nama : Frans Victor Kailola
 Nomor Telepon : (021) 2119 2288
 E-mail : corsec@reliance-finance.com
 Alamat : SOHO West Point Lantai 2 Jl. Macan Kav. 4-5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510

Berikut adalah riwayat singkat dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan:

Frans Victor Kailola
 Sekretaris perseroan, 48 Tahun
 Warga Negara Indonesia

Beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Kristen Satya Wacana sebagai Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi pada tahun 1996. Bergabung dengan perseroan sejak 2015 dan terhitung sejak 02 Oktober 2019 diangkat sebagai Sekretaris perseroan dengan dasar penunjukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 010/BOD-REFI/X/2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan.

Pengembangan dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan.

Judul Kegiatan	Waktu dan Pelaksanaan	Penyelenggara
Diklat Sertifikasi APPI	Jakarta, 21 January 2020	APPI
Inovasi Layanan Keuangan saat New Normal Bank Tradisional vs. Challenger Bank	Jakarta, 15 June 2020	LPPI
Penggunaan Akad Mudharabah bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	Jakarta, 07 December 2020	OJK
Sosialisasi Enhancement Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	Jakarta, 18 December 2020	OJK
Sosialisasi Perlindungan Konsumen	Jakarta, 27 April 2021	OJK
Pencegahan Penyuapan di Industri Jasa Keuangan	Jakarta, 18 September 2021	OJK

Komite Manajemen Risiko

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Ira Rakhmawati
Anggota : Iman Pribadi
Daniel Rahandri
Frans Victor Kailola

Pembentukan dan pengangkatan Komite Manajemen Risiko tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 020/DIR-REFI/VII/2021 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko tanggal 6 Juli 2021.

Penerapan Manajemen Risiko

Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.**
Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektifitas penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan Risiko – Risiko yang dihadapi Perusahaan dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Perusahaan. Selain itu Dewan Komisaris dan Direksi juga memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing bagian, serta kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko.**
Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas dan sejalan dengan visi dan misi Perusahaan. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko dan tingkat Risiko yang akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan / atau praktek pembiayaan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki Perusahaan harus didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM. Dalam rangka pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Perusahaan harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dan dilengkapi dengan toleransi Risiko dan limit Risiko. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi Perusahaan secara keseluruhan.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko.**
Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko merupakan bagian utama dari proses Penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktifitas bisnis Perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya. Selanjutnya, Perusahaan perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran Risiko, Perusahaan perlu menetapkan unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah Risiko. Selain itu, efektifitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan Risiko.
- Sistem Informasi Manajemen Risiko.**
Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko merupakan bagian utama dari proses Penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktifitas bisnis Perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya. Selanjutnya, Perusahaan perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran Risiko, Perusahaan perlu menetapkan unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah Risiko. Selain itu, efektifitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan Risiko.

5. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Perusahaan menjaga aset Perusahaan, menjamin tersediannya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Perusahaan yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Internal Control.

Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Perseroan telah mengangkat M. Faisal Muchtar sebagai Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para Pemegang Saham PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia No. 215 tanggal 31 Mei 2017.

Selanjutnya, M. Faisal Muchtar telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah di Perseroan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-4/NB.22/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan M. Faisal Muchtar selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah perusahaan PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia.

Riwayat Singkat Dewan Pengawas Syariah

M. Faisal Muchtar

Menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak tahun 2017. Mendapatkan gelar Master Program Major in Ushul Fiqh, di Al-Azhar University di Cairo, Mesir. Dan juga gelar Master Degree dalam Islamic Economy dari Islamic University, Indonesia. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan
2017 – Sekarang	Dewan Pengawas Syariah PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia.
2014 – Sekarang	Risk Management committee member & Audit committee member of pr. BTPN Syariah
2014 – 2015	Work as Corporate legal & Corporate communication Head of PT. Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF)
2008 – 2013	shariah Expert at Dhewanto capital (Private Equity company) ih central Jakarta - Indonesia

Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah

Perseroan telah membentuk Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Wisna Aksi Budaya
Anggota	: Daniel Rahandri Indra Arya Putra Hilman Syarief

Pembentukan dan pengangkatan Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 001/DIR/REFI/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Pembentukan Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah Perseroan.

Riwayat Singkat Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah

Wisna Aksi Budaya

Menjabat sebagai Ketua Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah sejak tahun 2019. Mendapatkan gelar Sarjana Teknik Informatika dari Universitas Atma Jaya di Yogyakarta. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan
2016 – sekarang	Pimpinan Unit Syariah di PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia
2013 – 2015	RM Kredit Komersial di PT Bank Victoria Syariah
2007 – 2013	Subbranch Kredit Manager di PT Bank Mega Tbk

Daniel Rahandri

Menjabat sebagai Anggota Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah sejak tahun 2020. Mendapatkan gelar magister of Science In Syariah Financial dari Universitas Trisakti. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan
2020 – Sekarang	Risk Departemen Head PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia.
2020 – 2020	Risk Management and Credit Analyst Consultant di BPR Cahaya ArtaSejati
2014 – 2019	Risk Management Unit Head and Credit Review Head di PT Bank Dinar Indonesia, Tbk
2013 – 2014	Accounting Manager - PT Bank Dinar Indonesia, Tbk

Indra Arya Putra

Menjabat sebagai Anggota Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah sejak tahun 2019. Mendapatkan gelar Bachelor of Economics dari Universitas Padjajaran, Bandung. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan
2016 – Sekarang	Product and Development PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia.
2013 – 2016	Product & Marketing Manager – Unsecured Loan di Bank CTBC Indonesia
2012 – 2013	Business Analyst & Project-Direct Marketing Division di AIA Financial Indonesia
2011 – 2012	Business Intelligent Unit & Risk Dept Head di PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk.

Hilman Syarif

Menjabat sebagai Anggota Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah sejak tahun 2021. Mendapatkan gelar Master of Notary dan Bachelor of Law dari Universitas Diponogoro. Pengalaman kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tahun	Perusahaan
2021 – Sekarang	Compliance PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia
2017 – 2021	Legal Supervisor di PT Indosurya Inti Finance
2015 – 2017	Legal Supervisor di PT Bank Mayora
2012 – 2015	Legal Officer di PT Bank Danamon
2011 – 2012	Legal Staff di PT Bank Permata

D. Sumber Daya Manusia

Pada Semester I Tahun 2021, Perseroan telah menjalankan program rekrutmen dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam rangka meraih sukses dan menjadi kunci dalam mempertahankan produktifitas Perseroan. Sumber Daya Manusia merupakan hal yang penting dalam mendukung kinerja dan menjadi modal yang sangat penting bagi Perseroan sebagai Perusahaan Pembiayaan yang dapat diandalkan (*Reliable*).

Rekrutmen

Sebagai perusahaan pembiayaan yang dapat diandalkan di Indonesia, Perseroan senantiasa melakukan percepatan dan perluasan bisnis guna menghadapi dinamika bisnis pembiayaan yang semakin ketat di Indonesia. Guna mendukung seluruh kegiatan usaha Perseroan tersebut, maka sangat diperlukan Sumber Daya Manusia yang dapat diandalkan untuk mendukung pencapaian bisnis Perseroan.

Proses rekrutmen yang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu proses seleksi, tes dan wawancara. Proses rekrutmen disesuaikan dengan *Man Power Planning (MPP)* yang ada di Perseroan. Proses rekrutmen mengedepankan asas keterbukaan, kewajaran dan kesetaraan dengan mempertimbangkan kebutuhan Perseroan dan kompetensi yang dimiliki oleh calon karyawan. Kandidat yang memiliki kualifikasi administrasi direkrut melalui iklan dan referensi.

Periode Januari – Juli 2021, Perseroan melakukan rekrutmen dan seleksi dengan beberapa cara, antara lain:

- Internal Perseroan
Dilakukan dengan seleksi karyawan internal group untuk mengisi lowongan jabatan pada suatu unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan terbuka bagi karyawan di Reliance Group.
- Eksternal Perseroan
Pencarian kandidat dilakukan melalui pemasangan iklan dan referensi.

Komposisi

Pada 31 Juli 2021, Perseroan memiliki karyawan tetap sebanyak 32 orang yang bekerja di Kantor Pusat dan di Kantor Perwakilan kota Medan. Secara Rinci komposisi karyawan Perseroan yang diklasifikasikan berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan dan usia sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Juli 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Sekolah Dasar	-	-	-
SLTP	1	1	1
SLTA	1	2	2
Diploma	1	1	1
Sarjana, Magister dan Pasca			
Sarjana	29	22	10
Total	32	26	14

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Juli 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Staff	10	10	4
Supervisor	13	9	3
Manager	9	7	7
Total	32	26	14

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Juli 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
18 - 25	2	2	-
26 - 35	16	12	1
36 - 45	7	5	6
46 - 50	3	3	3
>50	4	4	4
Total	32	26	14

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Juli 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kantor Pusat	31	25	13
Kantor Cabang	-	-	-
POS	1	1	1
Total	32	26	14

Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	31 Juli 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Tetap	32	23	14
Kontrak	15	17	20
Total	47	40	34

Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki Tenaga Kerja Asing.

Tenaga Ahli

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai yang dengan ketidak-beradaannya, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

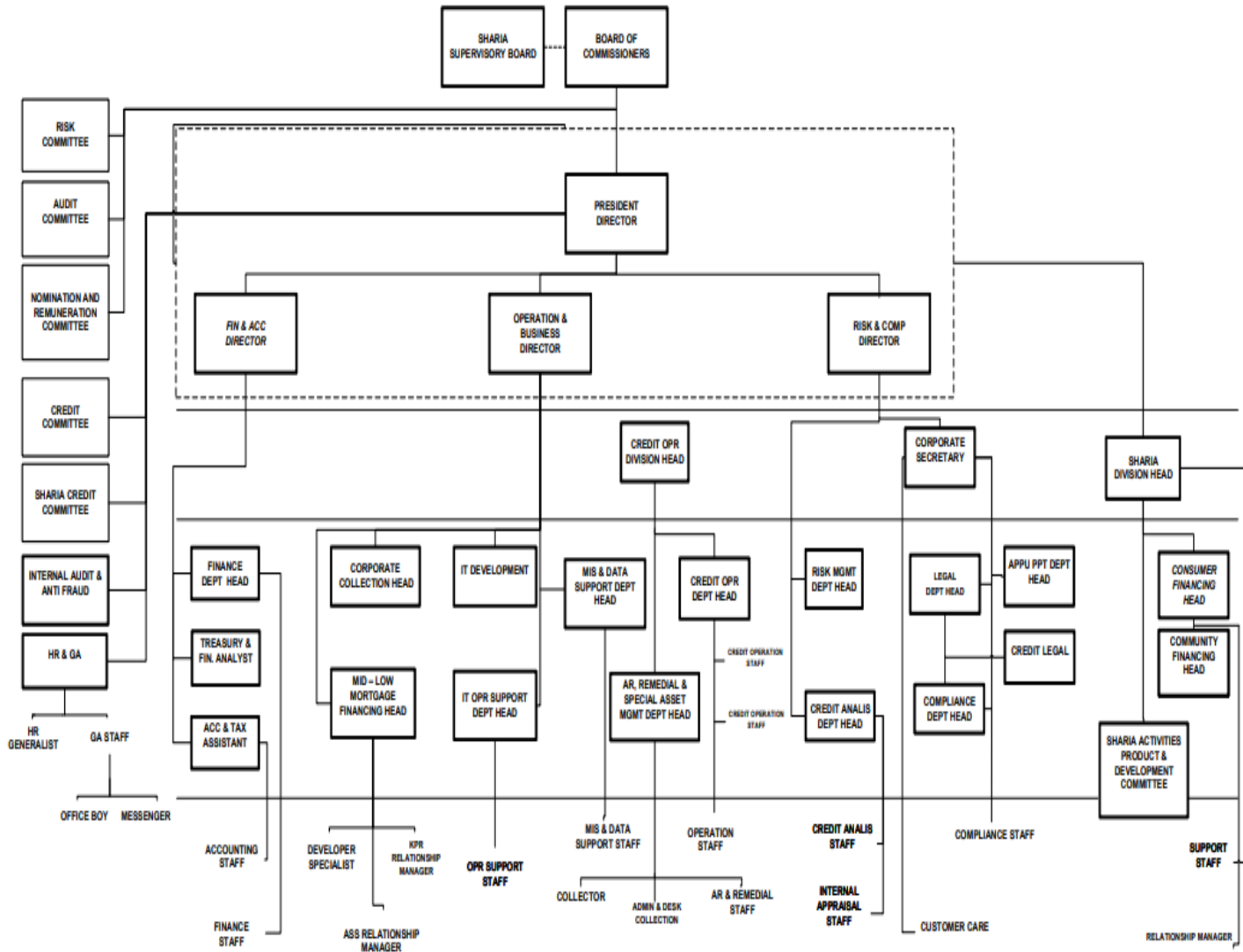
Rencana Pengembangan Organisasi dan Sumber daya Manusia

Tahun 2021, untuk pengembangan dan pelatihan karyawan, Perseroan telah mengaggarkan biaya sebesar Rp.253.600.000 (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu). Pengembangan dan pelatihan karyawan tersebut akan diprioritaskan pengembangan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Webinar, Seminar dan/atau Pelatihan.

Selain itu, pengembangan dan pelatihan karyawan juga diprioritaskan untuk peningkatan kompetensi dengan program program sertifikasi melalui Lembaga yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan.

E. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak, dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

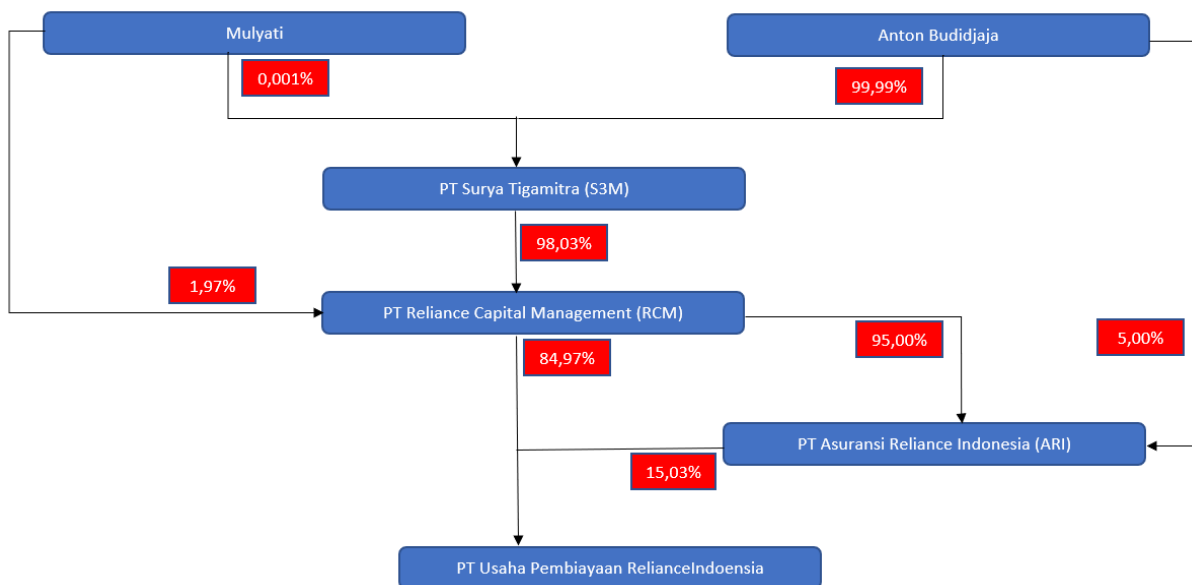
Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	PT Reliance Capital Management
Anton Budidjaja	Komisaris Utama	Komisaris Utama
Braman Setyo	Komisaris Independen	-
Iman Pribadi	Direktur Utama	-
Ira Rakhmawati	Direktur	-
Fajar Satritama	Direktur	-

F. Diagram kepemilikan

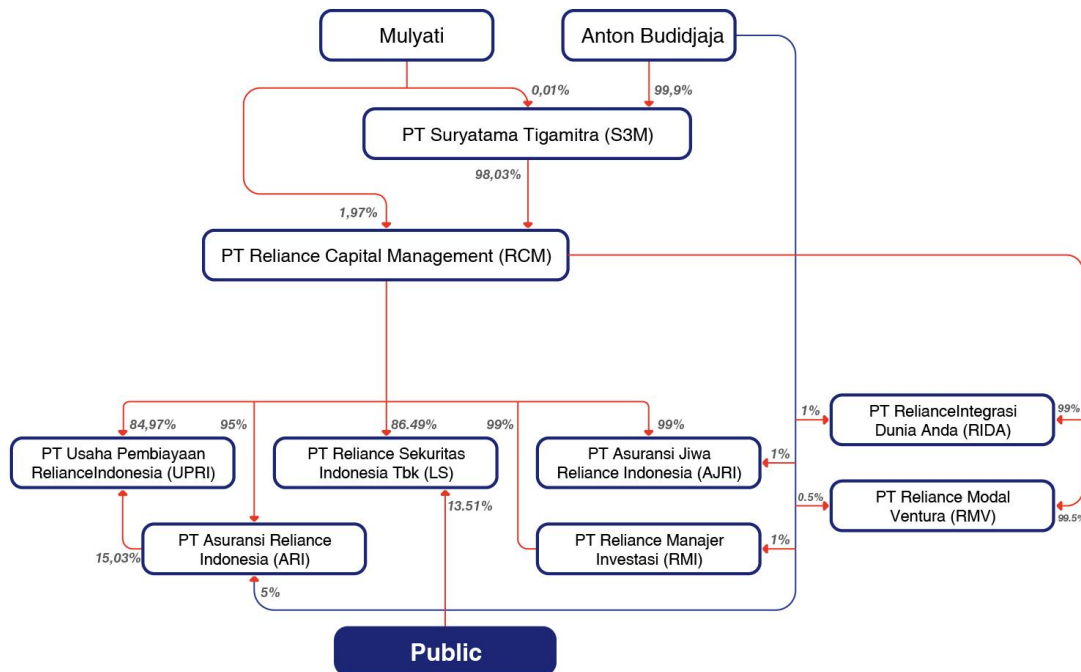
Diagram di bawah ini menjelaskan diagram kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan :

Sesuai dengan diagram kepemilikan saham dibawah maka susunan pemegang saham utama perseroan adalah PT Reliance Capital Management, dimana pemegang saham terbesar PT Reliance Capital Management adalah PT Suryatama Tigamitra.



Struktur Kelompok Usaha Reliance (Reliance Group)

Reliance Group Structure



Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Pengendali dan Penerima Manfaat Terakhir (*Ultimate Beneficiary Owner*) dari Perseroan adalah Anton Budidjaja.

G. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum

PT Reliance Capital Management

a. Pendirian dan Perubahan

PT Reliance Capital Management didirikan dengan nama “PT Nuansa Citra Bersama” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nuansa Citra Bersama No. 14 April 1999, yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-16741 HT.01.01.Th.99 tanggal 22 September 1999 serta telah didaftarkan di Kantor Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 288/BH.09.03/XI/99 tanggal 24 November 1999, dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1738, Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 7 April 2000 (“Akta Pendirian RCM”).

Anggaran Dasar RCM telah diubah untuk menyesuaikan dengan UUPT sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nuansa Citra Bersama No. 159 tanggal 29 Mei 2009, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai Keputusannya No. AHU-30532.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 3 Juli 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0039739.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 3 Juli 2009.

Selanjutnya Anggaran Dasar RCM telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Reliance Capital Management No. 01 tanggal 1 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Herlina Latief, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0006257.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0073631 tanggal 7 Februari 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0019856.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Februari 2019 (“**Akta No. 01/2019**”), tentang perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar RCM mengenai ketentuan Maksud dan Tujuan RCM dan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar RCM mengenai Direksi.

b. Pengurus dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi RCM sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Reliance Capital Management No. 150 tanggal 25 September 2018, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0248155 tanggal 1 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129418.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 1 Oktober 2018 *junctis* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Reliance Capital Management Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Dra. RR. Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0144728 tanggal 5 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042231.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Maret 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Reliance Capital Management Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tanggal 9 April 2021, yang dibuat dihadapan Dra. RR. Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0261660 tanggal 26 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075875.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 26 April 2021, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Mulyati
Direktur : Gatot Subagio

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anton Budidjaja
Komisaris : Michael Jude Fernades

c. Permodalan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam RCM sebagaimana termaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Reliance Capital Management No. 598 tanggal 30 Desember 2014, yang dibuat dihadapan Rosita Rianauli Sianipar, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-AH.0006036.AH.01.03 Tahun 2015 tanggal 29 Januari 2015 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0011190.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 29 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000,-	
Pemegang Saham			
1. Suryatama Tigamitra	3.793.750.000	379.375.000.000,-	98,03
2. Mulyati	76.250.000	7.625.000.000,-	1,97
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.870.000.000	387.000.000.000,-	100
Saham Dalam Portepel	4.130.000.000	413.000.000.000,-	

d. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Reliance Capital Management sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01/2019, maksud dan tujuan PT Reliance Capital Management adalah menjalankan usaha dalam bidang:

- Aktivitas Perusahaan Holding
- Trust, Pembiayaan, Entitas Keuangan Sejenis; dan
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Namun, Kegiatan Usaha Utama PT Reliance Capital Management yang saat ini telah berjalan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Kepemilikan sekelompok anak perusahaan dan menguasai aset dari kelompok tersebut;
- Mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, pembiayaan investasi *open-end*, pembiayaan investasi *close-end*, *trust*, *estates* atau perantara account, unit pembiayaan investasi trust; dan
- Memberikan nasihat, bimbingan dan operasional usaha.

PT Asuransi Reliance Indonesia

a. Pendirian dan Perubahan

PT Asuransi Reliance Indonesia didirikan dengan nama "PT Sagita Sarana Raharja" sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas "PT Sagita Sarana Raharja" No. 25 tanggal 10 Januari 1975, yang dibuat di hadapan Warda Sungkar Alurmei, S.H., pengganti Abdul Latief, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri

Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/75/19 tanggal 17 April 1975.

Anggaran Dasar ARI telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar ARI terakhir kali sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Reliance Indonesia No. 02 tanggal 17 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0173631 tanggal 18 Maret 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0050570.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 18 Maret 2021, yang isinya antara lain mengubah ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Anggaran Dasar ARI.

b. Pengurus dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi ARI sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Asuransi Reliance Indonesia Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 04 tanggal 14 September 2021, yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database SABH Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHUAH.01.03-0450926 tanggal 21 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0161811.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 September 2021, adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Mardiana
Direktur : Wibisono Julianto Somad
Direktur : Armon Trifery

Komisaris

Komisaris Utama : Mulyati
Komisaris : Basuki Soedjarno
Komisaris Independen : I Nyoman Sutedja
Komisaris Independen : Turino Agustriadi

c. Permodalan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam ARI sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Reliance Indonesia No. 10 tanggal 3 November 2009, yang dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.10-21167 tanggal 25 November 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0078543.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 25 November 2009 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	750.000	75.000.000.000,-	
Pemegang Saham			
1. PT Reliance Capital Management	475.000	47.500.000.000,-	95,00
2. Anton Budidjaja	25.000	2.500.000.000,-	5,00
Modal Ditempatkan dan Disetor	500.000	50.000.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	250.000	25.000.000.000,-	

d. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PT Asuransi Reliance Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta No. 02 tanggal 19 Februari 2019, yang dibuat dihadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Keputusan No. AHU-0011244.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0034544.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 28 Februari 2019, maksud dan tujuan PT Asuransi Reliance Indonesia adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi.

Namun, Kegiatan Usaha Utama PT Asuransi Reliance Indonesia yang saat ini telah berjalan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Asuransi Non Jiwa Konvensional

Kelompok ini mencakup usaha perasuransian yang khusus menanggung risiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan

bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan.

b. Asuransi Non Jiwa Syariah

Kelompok ini mencakup usaha perasuransian dengan prinsip syariah yang khusus menanggung risiko atas kerugian, kehilangan harta benda/milik termasuk juga tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin terjadi terhadap benda/milik tertanggung karena sebab-sebab tertentu dengan suatu nilai pertanggungan yang besarnya telah ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang dicantumkan dalam surat perjanjian. Ketentuan jasa asuransi selain asuransi jiwa, seperti kecelakaan dan asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi properti, asuransi transportasi, kendaraan bermotor, kapal dan penerbangan dan asuransi pertanggungjawaban dan kehilangan keuangan.

H. Keterangan Singkat Tentang Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak.

I. Perjanjian-Perjanjian Dalam Rangka Penerimaan Fasilitas Kredit/Pinjaman

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki perjanjian-perjanjian kredit dan/atau pinjaman, baik dari pihak afiliasi ataupun pihak ketiga, antara lain sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

I.1 Perjanjian-perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

No.	Perihal	Keterangan
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Penjaminan Penerbitan <i>Medium Term Notes</i> UPRI No. 21A/REFI/MTN/X/2018 Tanggal 29 Oktober 2018
	Para Pihak	1. Perseroan (" Penerbit "); dan 2. PT Reliance Capital Management (" Penjamin ")
	Ruang Lingkup Perjanjian dan/atau Hak dan Kewajiban Para Pihak	Penawaran terbatas (<i>private placement</i>) <i>Medium Term Notes</i> ("MTN") dengan nama <i>Medium Term Notes</i> UPRI IVB Tahun 2019 sebesar Rp300.000.000.000,-, yang terdiri dari: <i>Medium Term Notes</i> Pertama sebesar Rp100.000.000.000,- dengan nama "<i>Medium Term Notes</i> UPRI IV Tahun 2018" yang telah dilunasi keseluruhan pokok dan bunganya pada Oktober 2021; dan <i>Medium Term Notes</i> Kedua sebesar Rp200.000.000.000,- dengan nama "<i>Medium Term Notes</i> UPRI IVB Tahun 2019". Bunga MTN 10% (sepuluh persen) belum termasuk pajak dihitung atas Pokok MTN. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penerbitan <i>Medium Term Notes</i> dengan nama: <i>Medium Term Notes</i> UPRI IVB Tahun 2019 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk Modal kerja usaha pembiayaan yang menjadi kegiatan usaha utama dari Penerbit. Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Penerbit, antara lain: - Memenuhi kewajiban pembayaran Pokok MTN dan/atau bunga MTN selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok MTN dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga MTN pada rekening yang ditunjuk Pemegang MTN; - Senantiasa memenuhi, mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Dokumen Transaksi yang mana Penerbit sebagai pihak; - Senantiasa mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat Penerbit; - Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan mengenai usaha yang dijalankan oleh Penerbit sesuai dengan dan menurut prinsip-prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang diterapkan secara terus menerus; - Menjaga dan memelihara harta kekayaan dan usaha Penerbit serta keberlakuan semua hak, izin dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Penerbit untuk pelaksanaan dan efektifitas Dokumen Transaksi; - Menginformasikan Pemegang MTN secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: - Terjadi tuntutan perkara perdata dan/atau pidana terhadap Penerbit; - Timbul suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara

		Penerbit dengan suatu badan pemerintahan; c) Terjadi kelalaian atau kejadian lain yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi kelalaian; d) Terjadi perubahan yang dapat merugikan atas asset atau kegiatan usaha Penerbit; e) Penerbit mengikat diri sebagai penjamin/avails untuk menjamin hutang orang/pihak lain manapun juga (kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari); f) Penerbit menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, menjamin/mengagunkan sebagian besar atau seluruh piutang pembiayaan Penerbit dengan cara bagaimanapun juga dan kepada orang/pihak manapun juga kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; g) Penerbit melakukan penggabungan usaha/merger atau konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh asset atau saham dari perusahaan lain; h) Penerbit membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Penerbit kepada Penerbit; i) Penerbit memberikan dan/atau menerima pinjaman, kecuali terhadap pinjaman yang diberikan dan/atau diterima dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari; j) Penerbit melakukan penerbitan surat hutang kepada pihak ketiga; k) Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Penerbit selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Penerbit; dan l) Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Penerbit selama bunga MTN belum dibayar dan Pokok MTN belum dilunasi oleh Penerbit. 7. Melakukan penatausahaan atas penerbitan MTN; dan 8. Memastikan bahwa jumlah Pemegang MTN tidak menjadi lebih dari 49 (empat puluh sembilan) pihak sehingga dapat dianggap sebagai penawaran public yang wajib didaftarkan pada otoritas pasar modal di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan melakukan fungsi pengawasan terhadap tindakan pengalihan MTN oleh Pemegang MTN sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
	Pembatasan	Menginformasikan Pemegang MTN secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: - Penerbit memberikan dan/atau menerima pinjaman, kecuali terhadap pinjaman yang diberikan dan/atau diterima dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari; dan - Penerbit melakukan penerbitan surat hutang kepada pihak ketiga
	Jangka Waktu	1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender sejak: i. tanggal 29 Oktober 2018 s/d 29 Oktober 2021 untuk MTN Pertama *); dan ii. tanggal 27 Februari 2019 s/d 27 Februari 2022 untuk MTN Kedua; atau akan berakhir dengan sendirinya saat Jumlah Terutang dibayar lunas dan seluruh kewajiban Wali Amanat dan Perseroan selesai.
	Catatan	*) Pada tanggal Prospektus ini, berdasarkan dokumen Medium Term Notes UPRI IV Tahun 2018 sebesar Rp100.000.000.000,- (MTN Pertama), telah dibayarkan dan dilunasi oleh Penerbit dengan tata cara sebagai berikut: (i) sebesar Rp33.000.000.000,- disepakati pembayaran dengan cara konversi saham Perseroan yang diambil bagian oleh PT Reliance Capital Management sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 56 tanggal 19 Juli 2019, dibuat di hadapan Dr. Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta; (ii) sebesar Rp468.384.932,- yang dibuktikan dengan salinan bukti pembayaran BCA – Cash Management System dengan No. Referensi 21102600363801 tanggal 26 Oktober 2021, yang diterbitkan PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”); dan (iii) sebesar Rp67.000.000.000,- untuk pelunasan MTN ini yang dibuktikan dengan salinan bukti pembayaran BCA – Cash Management System dengan No. Referensi 21102900512536 tanggal 29 Oktober 2021 yang diterbitkan BCA.

		Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini, atas penerbitan Obligasi I REFI Tahun 2022 tidak dibutuhkan adanya persetujuan dari pemegang MTN, namun terdapat kewajiban untuk melakukan pembaritahuan kepada pemegang MTN dalam waktu 14 hari kerja setelah dilakukannya transaksi penerbitan Obligasi I REFI Tahun 2022 ini.
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Penyediaan Fungsi Aplikasi RELI.ID Untuk Produk Pembiayaan Antara PT RelianceIntegrasi Dunia Anda Dengan PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia No. 001/PKS/REFI-RIDA/VII/2020 dan No. 001/PKS/RELI.ID/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, sebagaimana yang telah diubah oleh Addendum I Penyediaan Fungsi Aplikasi RELI.ID Untuk Produk Pembiayaan Antara PT RelianceIntegrasi Dunia Anda Dengan PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia No. 001/PKS/REFI-RIDA/VII/2020 dan No. 001/PKS/RELI.ID/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2021
	Para Pihak	1. PT RelianceIntegrasi Dunia Anda (" Pihak Pertama "); dan 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")
	Ruang Lingkup Perjanjian dan/atau Hak dan Kewajiban Para Pihak	1. Para Pihak sepakat atas penyediaan fungsi aplikasi RELI.ID oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk memperlancar pelayanan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Pihak Kedua kepada pelanggan. 2. Para Pihak sepakat akan menyusun Standard Operating Procedure untuk pelaksanaan Perjanjian ini dalam dokumen terpisah dari Perjanjian ini. Pihak Pertama berhak mendapatkan imbal jasa sebesar Rp1.000.000.000,- untuk tahun pertama (harga tersebut belum termasuk PPN). Hak dan kewajiban Para Pihak, antara lain: <u>Pihak Pertama:</u> 1. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, berupa komisi dari setiap produk Pihak Kedua yang berhasil dijual yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini (<i>commission structure</i>), berlaku surut sesuai dengan terjadinya transaksi; 2. Pihak Pertama wajib untuk menerapkan ukuran, persyaratan dan benchmark dari Pihak Kedua untuk pemberian produk pembiayaan kepada pelanggan yang layak untuk mendapatkan produk pembiayaan Pihak Kedua untuk dijalankan pada aplikasi RELI.ID; dan 3. Pihak Pertama wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait menjaga kerahasiaan data nasabah produk pembiayaan Pihak Kedua. <u>Pihak Kedua:</u> 1. Pihak Kedua berhak untuk meminta data dari Pihak Pertama mengenai pelaksanaan pemberian produk pembiayaan melalui aplikasi RELI.ID; 2. Pihak Kedua berhak untuk memantau dan memonitor pelaksanaan penyediaan aplikasi RELI.ID yang disediakan oleh Pihak Pertama; dan 3. Pihak Kedua berhak untuk menyimpan data nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Pihak Kedua di aplikasi RELI. ID dan menggunakan data tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
	Pembatasan	Tidak ada
	Jangka Waktu	21 Juli 2020 s/d 21 Juli 2025

I.2 Perjanjian-perjanjian Dengan Pihak Ketiga

No.	Perihal	Keterangan
1.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit No. 69 tanggal 30 Januari 2018 , yang dibuat Gunawan Tedjo, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Pusat
	Para Pihak	1. PT Bank Central Asia, Tbk. (" BCA "); dan 2. Perseroan (" Debitor ")
	Ruang Lingkup Perjanjian dan/atau Hak dan Kewajiban Para Pihak	Para Pihak setuju bekerjasama dalam rangka pemberian Fasilitas Installment Loan untuk modal kerja, dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah). Kecuali apabila BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitor wajib untuk antara lain: 1. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitor, baik perdata, tata usaha Negara, tuntutan

		pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun kekayaan Debitor; 2. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris dan/atau pemegang saham Debitor; 3. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun fasilitas kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan; 4. Mempertahankan Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitor; 5. Menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku; 6. Piutang yang dibiayai oleh fasilitas I/L tidak boleh dijaminkan ke pihak diluar BCA (negative pledge); 7. Menyerahkan laporan kolektabilitas piutang bulanan maksimal tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berikutnya; 8. Meminta persetujuan BCA apabila akan melakukan penarikan deviden lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari laba berjalan tahun sebelumnya. Penarikan deviden diperkenankan apabila tidak terdapat tunggakan fasilitas di BCA dan syarat rasio keuangan terpenuhi; 9. Menjaga rasio keuangan sebagai berikut: • Gearing Ratio (hutang bank + hutang berbunga lainnya/ekuitas) tidak melebihi 5 (lima) kali; • % NPF maksimal 2% (dua persen); 10. Memberitahukan secara tertulis ke BCA apabila terdapat perubahan susunan pengurusan dan pemegang saham sepanjang Bapak Anton Budijaja masih menjadi ultimate shareholder Debitor. Apabila tidak maka wajib minta persetujuan tertulis ke BCA; 11. Memberitahukan secara tertulis ke BCA apabila terdapat penambahan pinjaman berbunga baik dari bank/lembaga keuangan lainnya ataupun penerbitan medium term notes; dan 12. Aktivitas keuangan tetap dipusatkan di BCA.
	Pembatasan	Selama Debitor belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BCA, Debitor tidak diperkenankan untuk atara lain untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain. Memberitahukan secara tertulis ke BCA apabila terdapat penambahan pinjaman berbunga baik dari bank/lembaga keuangan lainnya ataupun penerbitan medium term notes.
	Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas per penarikan sesuai jangka waktu pembiayaan yang tertera pada surat persetujuan pembiayaan, yaitu maksimal selama 5 (lima) tahun (mana yang lebih pendek) *) *) Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah melakukan penarikan fasilitas kredit ini sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu sebagai berikut: 1. Penarikan tahap I, yaitu tanggal 6 Juli 2018, sehingga akan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2023; 2. Penarikan tahap II, yaitu tanggal 27 Juli 2018, sehingga akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juli 2023; dan 3. Penarikan tahap III, yaitu tanggal 15 Oktober 2018, sehingga akan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2023.
	Catatan	Fasilitas kredit yang diberikan kepada Perseroan oleh BCA berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan Tanggal Pemeriksaan masih berlaku, dan sesuai dengan Surat BCA No. 268/SPPK/SBK-W08/17 tanggal 15 November 2017 perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, memuat ketentuan terkait jangka waktu fasilitas kredit ini, dimana jangka waktu penarikan fasilitas kredit yaitu sejak tanggal 8 Februari 2019 s/d 30 Januari 2019, sedangkan jangka waktu fasilitas yang diberikan sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah selama 5 (lima) tahun

		terhitung sejak tanggal tiap penarikan fasilitas. - Berdasarkan Surat Perseroan No. 050/UPRI/DIR/IV/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Penerbitan Obligasi PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia dan surat elektronik (e-mail) Perseroan tertanggal 5 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Penerbitan Obligasi PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia, Perseroan telah mengajukan surat permohonan untuk persetujuan kepada BCA sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi I PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia Tahun Tahun 2021 ("Obligasi I REFI Tahun 2022"). Selanjutnya, Pihak BCA telah menanggapi surat tersebut melalui surat elektronik (e-mail) tertanggal 13 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa atas rencana Obligasi I REFI Tahun 2022 ini Perseroan hanya cukup untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada BCA terkait dengan rencana tersebut dan tidak membutuhkan adanya persetujuan dari BCA. - Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 009/BOD-REFI/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021, bahwa selama berlangsungnya Perjanjian ini dan dengan adanya penerbitan Obligasi I REFI Tahun 2022 ini Perseroan tidak akan melanggar pembatasan rasio keuangan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.
--	--	---

2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pemberian Pinjaman Dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Kepada PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia No. 175/PP/SMF-UPRI/X/2019 dan No. 027/PPP/REFI-SMF/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019
	Para Pihak	1. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua")
	Ruang Lingkup Perjanjian dan/atau Hak dan Kewajiban Para Pihak	Para Pihak setuju untuk bekerjasama dalam rangka penyediaan fasilitas pinjaman oleh Pihak Pertama sebesar Rp2.641.261.367,- (dua miliar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh Rupiah) yang akan digunakan untuk <i>refinancing</i> Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan agunan portofolio KPR yang telah disalurkan oleh Pihak Kedua. Bunga fasilitas pinjaman ini adalah sebesar 8,75% per tahun <i>fixed</i> selama jangka waktu Perjanjian. 1. Selama Pihak Kedua masih berhutang kepada Pihak Pertama, karena sebab apapun juga, maka Pihak Kedua, antara lain: - Selambat-lambatnya dalam waktu 130 (seratus tiga puluh) Hari Kalender sejak ditutupnya tahun fiskal/tahun buku, memberikan data laporan keuangan sesuai format serta struktur data sebagaimana tersebut pada lampiran perjanjian, dengan merujuk pada data-data Laporan Keuangan audited untuk tahun buku tersebut yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik; - Selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sesudah berakhirnya setiap triwulan, memberikan data-data laporan interim; - Memberikan keterangan kepada Pihak Pertama dan/atau pihak yang ditunjuknya mengenai keadaan keuangan dan kegiatan usaha Pihak Kedua termasuk pada isi laporan keuangan, penyaluran Pinjaman dan Agunan; - Memberikan laporan secara periodik (bulanan) kepada Pihak Pertama; - Memberitahukan Pihak Pertama apabila menghadapi proses perdata, pidana, administratif, arbitrase, sengketa pajak atau proses gugatan lainnya yang mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; - Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham mayoritas selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengesahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham mayoritas; - Dalam hal terdapat perubahan pada akta pendirian perusahaan, akta perubahan anggaran dasar, akta perubahan susunan direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, akta perubahan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham beserta surat penerimaan perubahan data perusahaan/persetujuan perubahan anggaran dasar yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bukti pengumuman di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari perubahan anggaran dasar/perubahan data

		perusahaan tersebut, hasil pemeringkatan perusahaan, kartu identitas direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, alamat domilisi pemegang saham badan usaha, alamat domilisi dan kartu identitas pemegang saham perorangan, dokumen pembaharuan seluruh izin atau persetujuan yang diperlukan bagi Pihak Kedua dalam menjalankan usahanya, Pihak Kedua wajib menyampaikan dalam bentuk Laporan sesuai format dalam lampiran Perjanjian ini; dan h) Melakukan pengurangan modal disetor atau modal ditempatkan pada Pihak Kedua tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. 2. Selama Pihak Kedua masih berhutang kepada Pihak Pertama karena sebab apapun juga, Pihak Kedua juga dilarang untuk melakukan pengurangan modal disetor/modul ditempatkan pada Pihak Kedua, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
	Pembatasan	Tidak ada
	Jangka Waktu	5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak tanggal 31 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2024

3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pemberian Pinjaman Dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Kepada PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia No. 005/PP/SMF-UPRI/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tanggal 13 Januari 2020
	Para Pihak	1. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (" Pihak Pertama "); dan 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")
	Ruang Lingkup Perjanjian dan/atau Hak dan Kewajiban Para Pihak	Para Pihak setuju untuk bekerjasama dalam rangka penyediaan fasilitas pinjaman oleh Pihak Pertama sebesar Rp5.151.841.949,- (lima miliar seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh sembilan Rupiah) yang akan digunakan untuk <i>refinancing</i> Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan agunan portofolio KPR yang telah disalurkan oleh Pihak Kedua. Bunga fasilitas pinjaman ini adalah sebesar 8,60% per tahun <i>fixed</i> selama jangka waktu Perjanjian. 1. Selama Pihak Kedua masih berhutang kepada Pihak Pertama, karena sebab apapun juga, maka Pihak Kedua, antara lain: - Selambat-lambatnya dalam waktu 130 (seratus tiga puluh) Hari Kalender sejak ditutupnya tahun fiskal/tahun buku, memberikan data laporan keuangan sesuai format serta struktur data sebagaimana tersebut pada lampiran perjanjian, dengan merujuk pada data-data Laporan Keuangan audited untuk tahun buku tersebut yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik; - Selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sesudah berakhirnya setiap triwulan, memberikan data-data laporan interim; - Memberikan keterangan kepada Pihak Pertama dan/atau pihak yang ditunjuknya mengenai keadaan keuangan dan kegiatan usaha Pihak Kedua termasuk pada isi laporan keuangan, penyaluran Pinjaman dan Agunan; - Memberikan laporan secara periodik (bulanan) kepada Pihak Pertama; - Memberitahukan Pihak Pertama apabila menghadapi proses perdata, pidana, administratif, arbitrase, sengketa pajak atau proses gugatan lainnya yang mempengaruhi kemampuan Pihak Kedua dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; - Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham mayoritas selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengesahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham mayoritas; - Dalam hal terdapat perubahan pada akta pendirian perusahaan, akta perubahan anggaran dasar, akta perubahan susunan direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, akta perubahan pemegang saham/komposisi kepemilikan saham beserta surat penerimaan perubahan data perusahaan/persetujuan perubahan anggaran dasar yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bukti pengumuman di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dari perubahan anggaran dasar/perubahan data perusahaan tersebut, hasil pemeringkatan perusahaan, kartu identitas direksi/dewan komisaris/dewan pengawas syariah, alamat domilisi pemegang saham badan usaha, alamat domilisi dan kartu identitas pemegang saham perorangan, dokumen pembaharuan seluruh izin atau

		persetujuan yang diperlukan bagi Pihak Kedua dalam menjalankan usahanya, Pihak Kedua wajib menyampaikan dalam bentuk Laporan sesuai format dalam lampiran Perjanjian ini; dan h) Melakukan pengurangan modal disetor atau modal ditempatkan pada Pihak Kedua tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. 2. Selama Pihak Kedua masih berhutang kepada Pihak Pertama karena sebab apapun juga, Pihak Kedua juga dilarang untuk melakukan pengurangan modal disetor/modal ditempatkan pada Pihak Kedua, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
	Pembatasan	Tidak ada
	Jangka Waktu	14 Januari 2020 s/d 14 Januari 2025

J. Perjanjian-Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan dalam menjalankan dan menunjang kegiatan usahanya telah mengadakan kerjasama dan perjanjian, baik dari pihak afiliasi ataupun pihak ketiga, antara lain sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

J.1 Perjanjian-Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

No.	Perihal	Keterangan
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Bantuan Teknis Nomor 018/RCM/DI/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 sebagaimana yang telah diubah oleh Addendum Perjanjian Bantuan Teknis Nomor add.I.018/RCM/DI/I/2015 tanggal 14 Juli 2017, dan terakhir diubah dengan Perjanjian Konsultasi Manajemen Dan Pengembangan SDM Internal tertanggal 21 Juli 2020
	Para Pihak	1. PT Reliance Capital Management (" Pihak Pertama "); dan 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")
	Ruang Lingkup Perjanjian dan/atau Hak dan Kewajiban Para Pihak	Pihak Pertama setuju untuk memberikan bantuan teknis dan jasa konsultasi manajemen teknis dan pengembangan sumber daya manusia secara internal kepada Pihak Kedua, antara lain di bidang (a) Konsultasi Manajemen yaitu menyediakan support, bantuan, saran, petunjuk dan rekomendasi untuk Perseroan pada berbagai aspek persoalan manajemen dan operasional, persoalan organisasi dan manajemen lainnya, dan (b) Manajemen Bisnis yaitu menyediakan support, bantuan, saran dan rekomendasi untuk Perseroan dalam hal meakukan pengusahaan strategi atau perencanaan strategis atau perencanaan organisasional yang adaptif terhadap kondisi market, serta memenuhi standar bisnis sesuai dengan persyaratan investor, regulasi ataupun persyaratan internasional (jika ada). Pihak Pertama wajib menyediakan jasa selama jangka waktu Perjanjian ini dalam bentuk opini, konsultasi, monitoring, bantuan teknis dan administrasi, sumber daya manusia secara internal yang dapat berupa pelatihan sebagaimana relevan sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua. Imbal jasa atas bantuan teknis berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar Rp440.000.000,- untuk tahun pertama, dan imbal jasa untuk tahun kedua serta seterusnya akan ditentukan kemudian sesuai kesepakatan Para Pihak dalam addendum perjanjian tersendiri. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut: 1. Pihak Pertama wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beritikad baik; 2. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan Imbal Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini; 3. Pihak Pertama wajib untuk melaksanakan semua keahlian professional dan teknis yang tepat, keterampilan, dan ketekunan yang wajar serta penilaian sebagaimana diharapkan dengan bijaksana dan kompeten untuk jasa serupa; dan 4. Pihak Pertama bertindak untuk kepentingan terbaik dari Pihak Kedua pada khususnya dan grup Reliance pada umumnya dengan maksud mencapai win-win solution atau meminimalisir pengeluaran, biaya maupun konflik.

		Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut: 1. Pihak Kedua wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan beritikad baik; 2. Pihak Kedua memastikan seluruh personel di dalam Perseroan bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dengan Pihak Kedua serta memberikan informasi dan data yang akurat dan benar beserta dokumen pendukung jika diperlukan; 3. Pihak Kedua menggunakan upaya yang wajar untuk segera menanggapi permintaan, undangan rapat ataupun informasi dari Pihak Pertama dalam kaitannya dengan jasa; dan 4. Pihak Kedua menggunakan upaya terbaik untuk menerapkan saran, rekomendasi atau rencana yang dirumuskan oleh Pihak Pertama.
	Pembatasan	Tidak Ada
	Jangka Waktu	21 Juli 2020 s/d 21 Juli 2025

2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pemberian Layanan Jasa Kustodian tertanggal 29 Oktober 2018
	Para Pihak	1. PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (" Pihak Pertama "); dan 2. Perseroan (" Pihak Kedua ")
	Ruang Lingkup Perjanjian dan/atau Hak dan Kewajiban Para Pihak	Pihak Pertama setuju untuk memberikan jasa kustodian bagi Pihak Kedua dalam rangka penerbitan MTN Pihak Kedua, dengan biaya jasa sebesar 1% dari nilai nominal MTN untuk tahun pertama, dan besaran imbal jasa untuk tahun kedua dan ketiga akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Pihak Pertama bertanggung jawab antara lain: 1. mengadministrasikan dan menyimpan Surat Konfirmasi untuk setiap pembelian dan/atau penjualan kembali MTN serta sertifikat atas nama MTN IV; 2. mengirimkan laporan-laporan kepada Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam prosedur operasional dan/atau pihak ketiga dan ketentuan hukum yang berlaku; dan 3. Memberikan konfirmasi mengenai pembagian hasil penjabatan MTN sebagaimana diatur dalam prosedur operasional (jika ada). Pihak Kedua bertanggung jawab antara lain: 1. memberikan instruksi-instruksi berkaitan dengan MTN sebagaimana diatur dalam prosedur operasional; dan 2. menyediakan dana untuk keperluan penjualan kembali dan/atau pembagian bunga untuk dibayarkan kepada pemegang MTN; 3. sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pihak Kedua wajib memberikan kepada Pihak Pertama informasi dan laporan lengkap dan benar sehubungan dengan pemegang MTN; dan 4. Mematuhi segala ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia sehubungan dengan kewajibannya selaku penerbit MTN untuk melaksanakan kewajibannya yang terdapat dalam Prospektus dan Perjanjian ini.
	Pembatasan	Tidak Ada
	Jangka Waktu	Berlaku sejak ditandatangani Perjanjian dan akan berakhir sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penutupan Reliance Group Term Life No. 01/AJRI-PKS/III/2013 tanggal 28 Maret 2013
	Para Pihak	1. Perseroan (" Pihak Pertama ") 2. PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia (" Pihak Kedua ").
	Ruang Lingkup Perjanjian dan/atau Hak dan Kewajiban Para Pihak	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan asuransi jiwa berupa Asuransi Jiwa Kredit bagi Peserta Pihak Kedua. Hak dan kewajiban Pihak Pertama, antara lain: 1. Pihak Pertama harus mengirimkan surat permohonan asuransi jiwa dan syarat keterangan lainnya kepada Pihak Kedua. 2. Pihak Pertama berkewajiban untuk melaksanakan Prosedur Customer Dilligence, yaitu tindakan mengidentifikasi dan memverifikasi dokumen pendukung yang diterima para pihak dari calon peserta, yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pemerintah mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.

		Hak dan Kewajiban Pihak Kedua, antara lain: 1. Pihak Kedua berhak menolak permohonan asuransi jiwa dari Pihak Pertama apabila berdasarkan keterangan pemeriksaan kesehatan calon peserta tidak memenuhi persyaratan seleksi yang ditentukan. 2. Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan Prosedur Customer Dilligence, yaitu tindakan mengidentifikasi dan memveridikasi dokumen pendukung yang diterima para pihak dari calon peserta, yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pemerintah mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah.
	Pembatasan	Tidak Ada
	Jangka Waktu	Berlaku sejak tanggal 28 Maret 2013, dan terus berlaku sampai dengan salah satu pihak bermaksud mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerjasama.

J.2 Perjanjian-perjanjian Dengan Pihak Ketiga

No.	Perihal	Keterangan
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT Multi Artha Griya Dengan PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia No. 004/SOHO-WP/MAG/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020
	Para Pihak	1. PT Multi Artha Griya ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua").
	Ruang Lingkup Perjanjian dan/atau Hak dan Kewajiban Para Pihak	Pihak Pertama menyewakan kepada Pihak Kedua sebagian dari bangunan kantor yang terletak Soho Westpoint, Kota Kedoya, Jl. Macan Kav. 4-5, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510, seluas semigross ±414m2 yang dipergunakan sebagai kantor Pihak Kedua, dengan harga sewa sebesar Rp135.000,- per m2 (semi gross) per bulan (belum termasuk PPN 10%), dan dibayarkan untuk 3 tahun di muka oleh Pihak Kedua.
	Pembatasan	Tidak ada
	Jangka Waktu	3 tahun, sejak 1 Juli 2020 s/d 30 Juni 2023

2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Antara PT Finnet Indonesia Dengan PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia Tentang Penyediaan Fungsi Aplikasi RELI.ID Untuk Produk Pembiayaan No. 024/PKS-001/FINNET-01/IV/2019 dan No. 012/PKS/REFI-FINNET/IV/2019 tanggal 29 April 2019
	Para Pihak	1. PT Finnet Indonesia ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua").
	Ruang Lingkup Perjanjian dan/atau Hak dan Kewajiban Para Pihak	Para Pihak sepakat atas penyediaan fungsi aplikasi RELI.ID oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk memperlancar pelayanan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Pihak Kedua kepada pelanggan. Imbal jasa sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari setiap pencairan melalui aplikasi RELI.ID Hak dan kewajiban para pihak: Pihak Pertama, antara lain: 1. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan imbal jasa; dan 2. Pihak Pertama wajib untuk menerapkan ukuran, persyaratan dan benchmark dari Pihak Kedua untuk pemberian produk pembiayaan kepada pelanggan yang layak untuk mendapatkan produk pembiayaan Pihak Kedua untuk dijalankan pada aplikasi RELI.ID Pihak Kedua, antara lain: 1. Pihak Kedua berhak untuk meminta data dari Pihak Pertama mengenai pelaksanaan pemberian produk pembiayaan melalui aplikasi RELI.ID; dan 2. Pihak Kedua berhak untuk memantau dan memonitor pelaksanaan penyediaan aplikasi RELI.ID yang disediakan oleh Pihak Pertama.
	Pembatasan	Tidak ada
	Jangka Waktu	29 April 2019 s/d 29 April 2024

3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pemasaran Asuransi Citra Jiwa Proteksi Kredit Ultima Antara PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia Dan PT Asuransi Ciputra Indonesia No. 026/PKS/REFI/ACI/IX/2019 dan No. 148/DIR-ACI/PKS/IX/2019 tanggal 30 September 2019
----	-----------------	--

	Para Pihak	1. Perseroan ("Pihak Pertama"); dan 2. PT Asuransi Ciputra Indonesia ("Pihak Kedua").
	Ruang Lingkup Perjanjian dan/atau Hak dan Kewajiban Para Pihak	Kerjasama pemasaran Produk Asuransi milik Pihak Kedua melalui model bisnis referensi, yang mana akan dijalankan oleh Pihak Pertama kepada konsumen atau nasabahnya. Imbal jasa 25% (dua puluh lima persen) dari Premi yang dibayarkan oleh Tertanggung. Hak dan kewajiban para pihak: Pihak Pertama, antara lain: 1. Menerima laporan Tertanggung yang telah mengajukan Klaim dan disetujui oleh Pihak Kedua untuk selanjutnya Pihak Pertama akan menerima manfaat Klaim Tertanggung sesuai dengan Lampiran Perjanjian; 2. Mendapatkan komisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dari Perjanjian ini; 3. Mereferensikan Produk kepada Tertanggung yang akan membeli properti dari kelompok usaha Pihak Kedua; 4. Melakukan pendebitan pembayaran biaya Premi pada rekening Tertanggung yang berhasil diikutsertakan pada Produk sesuai dengan laporan rekapitulasi aktivasi yang dibuat oleh Pihak Kedua dan telah disetujui oleh Para Pihak; dan 5. Menyetorkan Premi yang telah dibayarkan oleh Tertanggung kepada Pihak Pertama kedalam rekening Pihak Kedua. Pihak Kedua, antara lain: 1. Berhak menentukan kriteria atas calon Tertanggung Pihak Pertama yang akan menerima penawaran Produk; 2. Berhak menerima atau menolak calon Tertanggung karena tidak sesuai dengan kriteria dan ketentuan underwriting yang diatur dalam Lampiran 1 dari Perjanjian ini; 3. Menolak membayar Klaim karena hal-hal yang tidak sesuai atau dilanggar atau dikecualikan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Polis Induk; 4. Melakukan proses underwriting dan mekukan aktivasi keikutsertaan Produk dan bertanggung jawab atas semua keputusan terkait underwriting dan Klaim; dan 5. Mengirimkan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi kepada Pihak Pertama.
	Pembatasan	Tidak ada
	Jangka Waktu	30 September 2019 s/d 29 September 2020. *) *) Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian ini telah dan akan diperpanjang secara otomatis selama tidak ada pengakhiran oleh Para Pihak dan masih berlaku serta mengikat Para Pihak.

4.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Antar Kreditur No. 02 tanggal 11 September 2019 yang dibuat dihadapan Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta
	Para Pihak	1. Perseroan ("Pihak Pertama"); 2. PT Reliance Modal Ventura ("Pihak Kedua"); dan 3. Koperasi Jasa Gramindo Berhak Madani ("Pihak Ketiga").
	Ruang Lingkup Perjanjian dan/atau Hak dan Kewajiban Para Pihak	Para Pihak sepakat melakukan kerja sama untuk: a. penyaluran pembiayaan jual beli kepada enduser (<i>channeling</i>) sesuai dengan kaidah Syariah oleh Pihak Pertama kepada Pihak Ketiga; dan b. Pemberian modal penyertaan dan pembiayaan mezzanine dari Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga.
	Pembatasan	Tidak ada
	Jangka Waktu	5 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Dan Pemberian Jaminan No. 022/PKS/REFI-LKM-ATM/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019
	Para Pihak	1. Perseroan ("Pihak Pertama"); 2. PT Limas Kencana Mandiri ("Pihak Kedua"); 3. PT Anugerah Tirta Mandalawangi ("Pihak Ketiga").
	Ruang Lingkup Perjanjian dan/atau Hak dan Kewajiban Para Pihak	Kerjasama antara Pihak Pertama selaku perusahaan pembiayaan dengan Pihak Pertama dan Pihak Ketiga (Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya akan

		disebut sebagai “Pihak Developer”) selaku developer yang bermaksud untuk memasarkan dan menjual rumah kepada konsumen, dimana Pihak Pertama akan menyediakan kepada fasilitas pembiayaan konsumen kepada para konsumen dari Pihak Developer. Pihak Pertama akan memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada konsumen untuk pembelian rumah dalam proyek yang dikelola oleh Pihak Developer, dengan syarat: - Konsumen telah melakukan pembayaran uang muka sesuai ketentuan Pihak Pertama; - Fasilitas pembiayaan tersebut akan memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama; dan - Pihak Pertama bersedia untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada konsumen dari dana yang telah dialokasikan, sampai dengan maksimal 90% dari harga jual Pihak Developer yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah dikurangi diskon (apabila ada) atau sesuai dengan program pembiayaan Pihak Pertama yang disetujui Pihak Developer.
	Pembatasan	Tidak ada
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku selama tidak ada pembatalan dari salah satu pihak yang terikat dalam Perjanjian ini. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak oleh Pihak Pertama berdasarkan pertimbangan Pihak Pertama, bahwa Pihak Developer telah melakukan kelalaian berdasarkan Perjanjian ini, atau karena alasan-alasan lainnya, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Developer dalam jangka waktu 30 hari sebelumnya *). *) Catatan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, selama tidak ada pengakhiran dari Para Pihak, Perjanjian ini masih berlaku dan mengikat Para Pihak

K. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

a. Tanah

No	No SHGB	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Lokasi	Luas (m ²)
1.	20316	09-04-2019	28-01-2037	Tangerang, Banten	74

Aset tersebut saat ini digunakan oleh Perseroan untuk penyimpanan dokumen-dokumen dan perlengkapan / peralatan kantor yang sudah tidak terpakai.

b. Kendaraan Bermotor

No.	Kendaraan	Tahun	No. Polisi	No. BPKB
1.	Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T	2016	B 1639 PYO	M-7757238
2.	Toyota Harrier 2.4 A/T	2013	B 1702 FJC	L-08531578
3.	Toyota Avanza G 1.3 M/T	2021	B 2188 POI	R-02511866

Kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk kegiatan operasional kantor.

L. Perkara-Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Pengadilan	No. Perkara	Posisi Perseroan	Tingkat Peradilan	Uraian Perkara	Nilai Tuntutan Perkara (Rupiah)
Pengadilan Negeri Jakarta Barat	325/Pdt.9/2021/P N.Jkt.Br t tanggal 16 April 2021	Turut Tergugat	Pengadilan Negeri	Hildegard S. Sosrowibowo selaku Penggugat menggugat PT Multi Artha Griya (Tergugat) dan Perseroan (Turut Tergugat) atas jual beli 1 (satu) unit apartemen yang berlokasi di Apartemen West Point Lantai 15 Unit 1502 seluas 27 m2. Bahwa spesifikasi	Rp716.872.840,- (kerugian material Penggugat) dan Rp5.000.000.000,- (kerugian imateriil Penggugat)

Pengadilan	No. Perkara	Posisi Perseroan	Tingkat Peradilan	Uraian Perkara	Nilai Tuntutan Perkara (Rupiah)
				dari unit/obyek yang dibeli oleh Penggugat tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan dan telah disepakati dalam Surat Pemesanan Apartemen No. 1608000688 tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat telah melakukan sebagian pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati. Turut Tergugat dalam hal ini merupakan pihak yang dalam kapasitasnya sebagai lembaga pembiayaan (leasing) yang melakukan pembiayaan atas pembelian unit apartemen yang dibeli oleh Penggugat. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim antara lain: - Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata; - Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan serah terima unit apartemen No. 1501 kepada Penggugat berdasarkan PPJB Westpoint No. 040/2019, segera setelah putusan perkara a quo diucapkan; - Menghukum dan memerintah Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian materiil sebesar atas selisih beda luas apartemen kepada Penggugat sebesar Rp716.872.840,-; - Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,-; - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta tidak bergerak milik tergugat sesuai domisili Tergugat, antara lain: - Gedung Centro City Residence Tower A Unit Roof Top (Lantai 13) Kav. 4-5, Gang Macan Daan Mogot, RT 010/RW 001, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta; dan - Menara Batavia Lantai 27, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah	

Pengadilan	No. Perkara	Posisi Perseroan	Tingkat Peradilan	Uraian Perkara	Nilai Tuntutan Perkara (Rupiah)
				Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	
				Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, status perkara saat ini sedang dalam proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri (Jakarta Barat. Selama proses persidangan telah dilaksanakan proses antara lain pembacaan gugatan pada tanggal 9 November 2021 lalu, sidang tanggapan atas keberatan (Eksepsi) pada tanggal 23 November 2021, sidang tanggapan atas jawaban (“ Replik ”) pada tanggal 30 November 2021 dan 7 Desember 2021 serta sidang tanggapan terhadap Replik (Duplik) pada tanggal 14 Desember 2021 yang kemudian diundur menjadi tanggal 28 Desember 2021 dan 11 Januari 2022 dengan Agenda yang sama, dan terakhir sidang pembuktian dari Penggugat pada tanggal 18 Januari 2022, yang mana statusnya saat ini telah dijadwalkan mundur menjadi tanggal 15 Februari 2022 dengan Agenda yang sama .	

Sampai tanggal prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 18 Januari 2022, Perkara hukum yang dihadapi Perseroan sebagaimana tersebut di atas tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Obligasi ini. Perseroan tidak pula sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak juga terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali atas perkara perdata sebagaimana diuraikan pada kolom diatas.

Sampai tanggal prospektus ini diterbitkan dan turut didukung oleh Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang seluruhnya tertanggal 18 Januari 2022 bahwa masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perkara apapun, baik di hadapan pengadilan maupun di luar pengadilan dan/atau instansi yang berwenang di Indonesia yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

M. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

N. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan dalam beberapa jenis asuransi sebagai berikut :

No.	Perihal	Uraian
1	Dokumen Asuransi No. Polis & Tanggal Polis Penanggung Obyek Tanggungan Total Pertanggungan Periode Asuransi	: Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan Reliance Health Care : HJK10021050020800 / 26 April 2021 : PT Asuransi Reliance Indonesia : Karyawan / Karyawan Beserta Keluarga (89 Orang) : Rp. 250.102.725,- : 1 Mei 2021 s/d 30 April 2022

2	Dokumen Asuransi No. Polis & Tanggal Polis Penanggung Obyek Tanggungan Total Pertanggungan Periode Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor : JK-V01-00-2021-09-00017105-000 : PT Asuransi Reliance Indonesia : 1 unit kendaraan mobil yang digunakan untuk operasional kantor Perseroan : Rp. 270.000.000,- : 25 September 2021 s/d 25 September 2022
3	Dokumen Asuransi No. Polis & Tanggal Polis Penanggung Obyek Tanggungan Total Pertanggungan Periode Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor : JK-V01-00-2021-07-00008319-000 / 5 Juli 2021 : PT Asuransi Reliance Indonesia : 1 unit kendaraan mobil yang digunakan untuk operasional kantor Perseroan : Rp. 173.886.500,- : 11 Juli 2021 s/d 11 Juli 2022
4	Dokumen Asuransi No. Polis & Tanggal Polis Penanggung Obyek Tanggungan Total Pertanggungan Periode Asuransi	: Asuransi Kendaraan Bermotor : JK-V01-00-2021-12-00011247/ 1 Desember 2021 : PT Asuransi Reliance Indonesia : 1 unit kendaraan mobil yang digunakan untuk operasional kantor Perseroan : Rp. 181.700.000,- : 1 Desember 2021 s/d 1 Desember 2024
5	Dokumen Asuransi No. Polis & Tanggal Polis Penanggung Obyek Tanggungan Total Pertanggungan Periode Asuransi	: Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia : JK-R03-00-2021-07-00009232-000 : PT Asuransi Reliance Indonesia : Ruko Operasional Perusahaan di Kuta Jaya, Pasar Kemis, Tangerang : Rp. 660.000.000,- : 2 Juli 2021 s/d 2 Juli 2022
6	Dokumen Asuransi No. Polis & Tanggal Polis Penanggung Obyek Tanggungan Total Pertanggungan Periode Asuransi	: <i>Property All Risk Insurance Policy</i> : JK-R02-00-2021-07-00009227-000 : PT Asuransi Reliance Indonesia : Ruko Operasional Perusahaan di Kuta Jaya, Pasar Kemis, Tangerang : Rp. 660.000.000,- : 2 Juli 2021 s/d 2 Juli 2022
7	Dokumen Asuransi No. Polis & Tanggal Polis Penanggung Obyek Tanggungan Total Pertanggungan Periode Asuransi	: <i>Property All Risk Insurance Policy</i> : JKR02-00-2021-11-00008835-000 : PT Asuransi Reliance Indonesia : Kantor Perseroan yang berlokasi di West Point Apartement and Office Lt. 2, Jl. Daan Mogot Gg. Macan No. 4, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta : Rp660.000.000,- : 2 Juli 2021 s/d 2 Juli 2022

O. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pada dasarnya, tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik terhadap lingkungan, karyawan, konsumen, komunitas, maupun pemegang saham. Kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan diwujudkan dalam berbagai program, diantaranya kami sampaikan dibawah ini:

1. Pemeriksaan Swab antigen kepada karyawan Perseroan minimal 2 kali dalam sebulan dimulai sejak Januari 2021 – Agustus 2021.
2. Pemeriksaan PCR kepada karyawan Perseroan dimulai sejak Januari 2021 – Agustus 2021 (untuk karyawan yang memiliki hasil tes Antigen Positif)
3. Kegiatan Vaksinasi buat masyarakat sekitar Perseroan dimulai sejak 30 Juli 2021.

2. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha Perseroan

A. Umum

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation pada tahun 1989. Perseroan memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-1080/KM.013/1989 tanggal 26 September 1989, No. KEP-165/KM.6/2004 tanggal 4 Mei 2004, No. KEP-590/KM.10/2012 tanggal 17 Oktober 2012, dan berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-629/KM.10/2012 tertanggal 12 Nopember 2012 perseroan mendapatkan pemberian izin usaha di bidang lembaga pembiayaan sehubungan perubahan nama menjadi PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia.

Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1989. Perseroan juga memperoleh izin pembukaan Unit Usaha Syariah dari Dewan Komisiner OJK Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah dalam Surat Keputusan No. KEP- 87/NB.223/2017 tanggal 28 Juli 2017

B. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan dan kegiatan usaha pembiayaan syariah sebagai berikut:

1. Menjalankan kegiatan Pembiayaan Investasi untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur dengan cara:
 - a. **Sewa pembiayaan** yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perseroan untuk digunakan oleh debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai;
 - b. **Jual dan sewa balik** yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perseroan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama;
 - c. **Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual** yaitu transaksi anjak piutang usaha dimana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual;
 - d. **Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran** yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran;
 - e. **Pembiayaan Proyek** yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan pengadaan beberapa jenis barang modal dan/atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut;
 - f. **Pembiayaan Infrastruktur** dan/atau yaitu pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa untuk pembangunan infrastruktur;
 - g. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Menjalankan kegiatan Pembiayaan Modal Kerja untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dengan cara:
 - a. **Jual dan sewa balik** yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perseroan yang disertai dengan menyewa pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama;
 - b. **Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual** yaitu transaksi anjak piutang usaha dimana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual;
 - c. **Fasilitas Modal Usaha** yaitu pembiayaan modal kerja yang dibayarkan langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa;
 - d. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Menjalankan kegiatan Pembiayaan Multiguna untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dalam jangka waktu yang diperjanjikan melalui cara pembiayaan:
 - a. **Sewa pembiayaan** yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perseroan untuk digunakan oleh debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai;
 - b. **Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran** yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran;
 - c. **Fasilitas Dana** yaitu pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produksi dalam jangka waktu yang diperjanjikan.
 - d. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Menjalankan kegiatan Pembiayaan Jual Beli dengan Prinsip Syariah, dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan akad pembiayaan syariah yaitu:
 - a. **Murabahah** yaitu jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - b. **Salam** yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh;
 - c. **Istishna** yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.
5. Menjalankan kegiatan Pembiayaan Investasi dengan Prinsip Syariah dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati para pihak. Akad pembiayaan yang digunakan adalah:
 - a. **Mudharabah** yaitu kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (Perseroan) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara pihak pertama (Perseroan) dan pihak kedua dengan kesepakatan para pihak;

- b. **Musyarakah** yaitu kerjasama antara Perseroan dengan beberapa pihak untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - c. **Mudharabah Musytarakah** yaitu kerjasama bentuk Mudharabah dimana pengelola dana (pihak kedua) turut menyertakan modal dalam kerjasama dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - d. **Musyarakah Mutanaqishah** yaitu kerjasama secara Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan secara bertahap oleh pihak lainnya.
6. Menjalankan kegiatan Pembiayaan Jasa dengan Prinsip Syariah dalam bentuk pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad pembiayaan yang digunakan adalah:
 - a. **Ijarah** yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
 - b. **Ijarah Muntahiyah Bittamlik** yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan setelah masa sewa selesai;
 - c. **Hawalah** yaitu pengalihan utang dari suatu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya;
 - d. **Hawalah bil Ujrah** yaitu pengalihan utang dari suatu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya dengan pengenaan imbal jasa;
 - e. **Wakalah** yaitu pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi;
 - f. **Wakalah bil Ujrah** yaitu pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa mendapatkan imbal jasa dan tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi;
 - g. **Kafalah** yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung;
 - h. **Kafalah bil Ujrah** yaitu jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung dengan pengenaan imbal jasa;
 - i. **Ju'alah** yaitu janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan;
 - j. **Qardh** pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
7. Selain kegiatan usaha Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Pembiayaan Jual Beli dengan Prinsip Syariah, Pembiayaan Investasi dengan Prinsip Syariah dan Pembiayaan Jasa dengan Prinsip Syariah, Perseroan juga melakukan kegiatan pembiayaan lainnya yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pemasaran dan Pelanggan

Untuk mendukung *Core Business* Perseroan kegiatan pemasaran Perseroan memegang peranan yang penting dalam penambahan jumlah Pembiayaan yang disalurkan oleh Perseroan.

Pemasaran produk-produk Pembiayaan Perseroan dilakukan melalui model "Business To Business To Consumer" (B2B2C) dengan model distribusi sebagai berikut :

- Produk pembiayaan *Mid Low Mortgage*, Produk ini dipasarkan dengan bekerja sama dengan para pengembang perumahan ("B2B") dalam skala usaha kelas menengah dengan target masyarakat dengan pendapatan menengah dan rendah, serta yang memiliki keterbatasan akses ke Perbankan. Pembiayaan yang dilakukan untuk produk ini adalah :
 - 1) Para pengembang tersebut tadi juga akan menjadi target pemasaran untuk produk Pembiayaan Modal Kerja dalam mengembangkan usahanya.
 - 2) Untuk saluran pemasaran Perseroan kepada nasabah individual ("B2C") juga memanfaatkan Kerjasama dengan Reli ID sebagai *fintech aggregator* (Inovasi Keuangan Digital) untuk memudahkan pemasaran Produk mid low mortgage ini dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- Pembiayaan Multiguna, Produk Pembiayaan Multiguna ini dipasarkan bekerja sama dengan Perusahaan berbasis finansial teknologi atau *fintech aggregator* ("B2B") yang memiliki segmen individual konsumen ("B2C") dengan pendapatan menengah dan rendah baik di sektor formal maupun informal.
- Pembiayaan Produktif, Produk ini dipasarkan dipasarkan bekerja sama dengan komunitas yang bernaung dibawah institusi koperasi, ekosistem berbasis teknologi dan Perusahaan berbasis finansial teknologi ("B2B") yang pembiayaannya diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah ("UMKM") baik individual maupun institusi-institusi yang masih belum *bankable*. Saat ini Perseroan menjalin kerjasama dengan pelaku-pelaku utama kredit komunitas seperti Koperasi berbentuk Simpan Pinjam dengan Grameen Model dan berbagai institusi untuk memberikan pembiayaan ke sektor antara lain pertanian, perikanan dan sektor produktif skala UMKM lainnya.

Dengan model dan cara pemasaran seperti tersebut diatas, Daerah Pemasaran Perseroan menjadi lebih luas dan menyebar di berbagai wilayah, keterbatasan jaringan yang dimiliki Perseroan dapat diatasi dengan adanya inovasi pada sistem teknologi informasi dan pemanfaatan jaringan pemasaran milik Mitra Usaha Perseroan. Sehingga jangkauan daerah Pemasaran Perseroan menjadi lebih luas.

Fokus wilayah pemasaran produk pembiayaan Perseroan saat ini masih di wilayah Jabodetabek tetapi dengan Kerjasama melalui para mitra B2B luas jangkauan wilayah pemasaran meliputi seluruh wilayah di Indonesia.

Berikut ini komposisi Penyaluran Pembiayaan Perseroan berdasarkan daerah Pemasaran dalam 2 tahun terakhir.

WILAYAH	2019		2020		31 Juli 2021	
	Nilai (Rp ribuan)	%	Nilai (Rp ribuan)	%	Nilai (Rp ribuan)	%
Jabodetabek	386.332.914	84,69%	316.037.735	86,70%	354.421.870	85,04%
Jawa Barat	9.121.320	2,00%	9.022.627	2,48%	2.198.093	0,53%
Jawa Tengah & DIY	17.634.405	3,87%	22.794.480	6,25%	31.267.190	7,50%
Jawa Timur	6.058.669	1,33%	9.829.510	2,70%	20.947.755	5,03%
Sumatera	30.540.455	6,69%	3.943.062	1,08%	6.329.276	1,52%
Bali & Nusa Tenggara	1.389.985	0,30%	222.096	0,06%	184.049	0,04%
Kalimantan	2.391.577	0,52%	1.187.262	0,33%	1.216.676	0,29%
Sulawesi	2.253.833	0,49%	242.041	0,07%	173.563	0,04%
Lainnya	475.585	0,10%	1.227.160	0,34%	30.363	0,01%
TOTAL	456.198.743	100%	364.505.973	100%	416.768.836	100%

Komposisi Penyaluran Pembiayaan Mid low Mortgage berdasarkan daerah Pemasaran dalam 2 tahun terakhir :

Mid low Mortgage

WILAYAH	2019		2020		31 Juli 2021	
	Nilai (Rp ribuan)	%	Nilai (Rp ribuan)	%	Nilai (Rp ribuan)	%
Jabodetabek	115.899.874	82,72%	94.811.321	85,58%	120.600.273	95,11%
Jawa Barat	2.736.396	1,95%	2.706.788	2,44%	816.409	0,64%
Jawa Tengah & DIY	10.499.106	7,49%	9.141.191	8,25%	1.035.815	0,82%
Jawa Timur	1.817.601	1,30%	2.948.853	2,66%	304.874	0,24%
Sumatera	9.162.137	6,54%	1.182.919	1,07%	4.037.469	3,18%
Bali & Nusa Tenggara	-	-	-	-	-	-
Kalimantan	-	-	-	-	-	-
Sulawesi	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-
TOTAL	140.115.113	100%	110.791.071	100%	126.794.839	100%

Komposisi Penyaluran Pembiayaan Multiguna berdasarkan daerah Pemasaran dalam 2 tahun terakhir :

Multiguna

WILAYAH	2019		2020		31 Juli 2021	
	Nilai (Rp ribuan)	%	Nilai (Rp ribuan)	%	Nilai (Rp ribuan)	%
Jabodetabek	77.266.583	84,69%	63.207.547	86,70%	13.978.820	65,69%
Jawa Barat	1.824.264	2,00%	1.804.525	2,48%	1.349.800	6,34%
Jawa Tengah & DIY	3.526.881	3,87%	4.558.896	6,25%	1.205.382	5,66%
Jawa Timur	1.211.734	1,33%	1.965.902	2,70%	1.716.915	8,07%
Sumatera	6.108.091	6,69%	788.612	1,08%	2.260.942	10,63%
Bali & Nusa Tenggara	277.997	0,30%	44.419	0,06%	181.602	0,85%
Kalimantan	478.315	0,52%	237.452	0,33%	382.003	1,80%
Sulawesi	450.767	0,49%	48.408	0,07%	173.563	0,82%
Lainnya	95.117	0,10%	245.432	0,34%	30.363	0,14%
TOTAL	91.239.749	100%	72.901.195	100%	21.279.390	100%

Komposisi Penyaluran Pembiayaan Produktif berdasarkan daerah Pemasaran dalam 2 tahun terakhir :

Produktif

WILAYAH	2019		2020		31 Juli 2021	
	Nilai (Rp ribuan)	%	Nilai (Rp ribuan)	%	Nilai (Rp ribuan)	%
Jabodetabek	193.166.457	85,91%	158.018.868	87,39%	220.675.546	82,13%
Jawa Barat	4.560.660	2,03%	4.511.314	2,50%	31.883	0,01%
Jawa Tengah & DIY	8.817.203	3,92%	11.397.240	6,30%	29.025.994	10,80%
Jawa Timur	3.029.335	1,35%	4.914.755	2,72%	18.925.966	7,04%
Sumatera	15.270.228	6,79%	1.971.531	1,09%	30.865	0,01%
Bali & Nusa Tenggara	-	-	-	-	2.447	0,00%
Kalimantan	-	-	-	-	1.905	0,00%
Sulawesi	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-
TOTAL	224.843.882	100%	180.813.707	100%	268.694.606	100%

TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Pihak-pihak afiliasi dan sifat hubungan dengan Perseroan adalah sebagai berikut

Pihak Berelasi	Sifat dari Hubungan	Sifat dari Transaksi
PT Reliance Capital Management	Pemegang Saham	Piutang lain-lain, Surat utang jangka menengah, Beban umum dan administrasi, Beban bunga dan beban keuangan lainnya
PT Asuransi Reliance Indonesia	Pemegang Saham	Beban umum dan administrasi, Beban bunga dan beban keuangan lainnya
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Surat utang jangka menengah, Beban umum dan administrasi, Beban bunga dan beban keuangan lainnya
PT Reliance Modal Ventura	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Surat utang jangka menengah, Beban bunga dan beban keuangan lainnya
PT RelianceIntegrasi Dunia Anda	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Piutang lain-lain, Surat utang jangka menengah, Beban bunga dan beban keuangan lainnya
PT Andalan Piranti Indonesia**)	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Beban umum dan administrasi
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi *)	Entitas sepengendali	Kas dan bank
PT Andaland Jaya Propertindo *)	Entitas sepengendali	Pendapatan bunga pembiayaan, Pendapatan administrasi
PT Multi Artha Griya	Entitas sepengendali	Piutang pembiayaan, Surat utang jangka menengah, Pendapatan bunga pembiayaan, Beban umum dan administrasi, Beban bunga dan beban keuangan lainnya
PT Viva Medika **)	Entitas sepengendali	Pendapatan bunga pembiayaan, Pendapatan administrasi, Beban umum dan administrasi
PT Suryatama Tigamitra	Entitas sepengendali	Surat utang jangka menengah, Beban umum dan administrasi, Beban bunga dan beban keuangan lainnya
Anton Budidjaja	Komisaris utama Perseroan	Surat utang jangka menengah, Beban bunga dan beban keuangan lainnya
Nurwati Tunggal ***)	Karyawan kunci Grup Perseroan	Piutang pembiayaan konsumen, Pendapatan pembiayaan konsumen

*) Pada tanggal 31 Desember 2020 sudah tidak memiliki hubungan berelasi dan tidak ada transaksi lagi dengan Perseroan.

**) Pada tanggal 31 Desember 2020, sudah tidak memiliki transaksi lagi dengan Perseroan.

***) Pada tanggal 31 Desember 2020, sudah tidak lagi menjadi karyawan kunci Group Perseroan

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi tertentu dengan pihak afiliasi yang meliputi antara lain:

- Perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan berupa pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dengan PT Andaland Jaya Propertindo, PT Multi Artha Griya dan PT Viva Medika. Piutang ini berjangka waktu 2-9 tahun, dikenakan bunga 12% per tahun dan dijamin dengan tanah, tanah dan bangunan, apartemen serta mesin dan perlengkapan. Pada tahun 2020 perjanjian dengan PT Andaland Jaya Propertindo dan PT Viva Medika sudah berakhir.
- Perseroan telah mengasuransikan asset tetap kepada PT Asuransi Reliance Indonesia
- Perseroan menandatangani perjanjian sewa menyewa ruangan kantor dengan PT Suryatama Tigamitra dengan beban sewa tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp356.400.000 dan Rp653.400.000, jangka waktu sewa selama 82 bulan. Pada tahun 2020 Perseroan menandatangani perjanjian sewa menyewa ruangan kantor dengan PT Multi Artha Griya untuk jangka waktu 36 bulan. Beban amortisasi sewa hak guna untuk tahun 2020 sebesar Rp368.874.000.
- Perseroan mengadakan perjanjian pemberian layanan jasa kustodian dengan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sehubungan penerbitan MTN. Perseroan akan membayar jasa tersebut sebesar 0,5% - 1% dari nilai nominal MTN. Pada tahun 2020 dan 2019, beban jasa professional yang diakui masing-masing sebesar Rp1.691.801.733 dan Rp1.338.843.926.
- Perseroan mengadakan perjanjian jasa teknis dengan PT Reliance Capital Management untuk memberikan bantuan teknis dan advisory. Berdasarkan addendum perjanjian No. Add.I.018/RCM/DI/I/2015 tanggal 14 Juli 2017, perjanjian tersebut berjangka waktu 3 tahun sampai dengan 6 Juli 2020. Perjanjian tersebut kemudian diubah dengan perjanjian bantuan teknis dan manajemen No. 6/RCM/INT/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, dimana Perseroan akan membayar biaya jasa berdasarkan persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun efektif sejak tanggal perjanjian.
- Pada tanggal 28 Desember 2018, Perseroan mengadakan perjanjian bantuan teknis dan konsultasi dengan PT Andalan Piranti Indonesia, dimana Perseroan akan membayar biaya jasa berdasarkan persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam

perjanjian. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun efektif sejak tanggal pinjaman. Pada tanggal 3 Januari 2020 Perseroan telah mengakhiri perjanjian kerjasama dengan PT Andalan Piranti Indonesia.

- Aset milik PT Suryatama Tigamitra dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterima Perseroan
- PT Reliance Capital Management, PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, PT Asuransi Reliance Indonesia, PT Suryatama Tiga Mitra, PT Reliance Capital Management, PT Reliance Modal Ventura, PT Multi Artha Griya, PT Reliance Integrasi Dunia Anda dan Anton Budidjaja merupakan pemegang surat utang jangka menengah (MTN) yang diterbitkan oleh Perseroan.
- Piutang lain-lain dari PT Reliance Capital Management (RCM) merupakan pemberian pinjaman tanpa bunga, jaminan dan jangka waktu pembayaran.
- Perseroan mengadakan perjanjian penyediaan fungsi aplikasi reli.id untuk produk pembiayaan antara PT RelianceIntegrasi Dunia Anda dengan PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana yang telah diubah oleh addendum I penyediaan fungsi aplikasi reli.id untuk produk pembiayaan antara PT RelianceIntegrasi Dunia Anda dengan PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia tanggal 24 Agustus 2021. Perjanjian dilangsungkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2020 dan akan berakhir pada tanggal 21 Juli 2025 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang akan disepakati kemudian.

C. Prospek Usaha

Pada kuartal III/2021 kondisi perekonomian nasional dimasa pandemi masih belum mengalami pemulihan. Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan Per September 2021, dari 164 perusahaan pembiayaan dengan total asset sebesar Rp 430,7 triliun menurun sebesar 10,17% dari nilai Rp 474,6 triliun pada posisi September 2020. Jumlah pembiayaan netto pada posisi September 2021 adalah sebesar Rp 359,08 triliun menurun sebesar 7,58% atau senilai Rp 27,2 triliun jika dibandingkan dengan posisi September 2020 yang senilai Rp 386,3 triliun. Sampai dengan bulan Oktober 2021 pemulihan di sektor pembiayaan kegiatan masyarakat pun masih melambat disebabkan oleh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sehingga menahan lajunya perekonomian nasional.

Secara terperinci pembiayaan produktif pada posisi September 2021 mengalami penurunan dimana piutang pembiayaan investasi yang mencapai Rp 111,6 triliun, turun sebesar 6,54% atau senilai Rp 7,30 triliun dibandingkan posisi bulan September 2020 yang sejumlah Rp 118,9 triliun sedangkan untuk piutang pembiayaan modal kerja mencapai Rp 27,59 triliun atau naik sebesar 15,10% dibandingkan posisi September 2020 yang senilai Rp 23,42 triliun Sedangkan untuk pembiayaan multiguna yang didominasi dengan pembiayaan kendaraan bermotor mencapai Rp 207,5 triliun mengalami penurunan senilai 11,44% atau sebesar Rp 4,1 triliun dibandingkan posisi September 2020 yang berjumlah Rp 231,2 triliun. Secara umum pelaku industri pembiayaan masih optimis pembiayaan akan mengalami pertumbuhan.

Sesuai dengan model bisnis yang dijalankan Perseroan masih meyakini bahwa prospek pembiayaan di sektor perumahan, Produktif UMKM dan Pembiayaan multiguna untuk masyarakat menengah bawah masih akan mengalami pertumbuhan di Kuartal IV 2021 dan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya dengan dasar sudah ada pemulihan atas kondisi pandemi Covid-19 dan jumlah penduduk yang di vaksin mencapai target yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Di sektor perumahan berdasarkan data Kementerian PUPR masih terdapat kekurangan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 11.4 juta dengan nilai sebesar Rp2.865 triliun, sehingga pemerintah menargetkan untuk penyediaan perumahan sebanyak 1.25 juta untuk menutupi kekurangan tersebut. Sedangkan di wilayah JABOTABEK baru mencapai 51% kepemilikan rumah, dengan asumsi nilai pembiayaan rata rata Rp1 juta, maka potensial pembiayaan perumahan adalah sebesar Rp17,4 triliun. Disektor pembiayaan perumahan hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan pembiayaan. Dengan kondisi tersebut, maka salah satu fokus pembiayaan Perseroan adalah Pembiayaan Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Berdasarkan data Direktorat Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 30 September 2021, capaian Program Sejuta Rumah tercatat telah menembus angka 763.127 unit rumah di seluruh wilayah Indonesia. Program Sejuta Rumah, merupakan sebuah kerjasama untuk melibatkan para pemangku kepentingan bidang perumahan baik Kementerian/ Lembaga terkait, pemerintah daerah, pengembang, perbankan dan masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk membangun rumah yang layak huni sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dengan target minimal satu juta unit rumah per tahun. (<https://perumahan.pu.go.id/news/akhir-september-capaian-psr-tembus-763127-unit>)

Di sektor pembiayaan UMKM dan dalam rangka mendukung peningkatan peranan UMKM di dalam pertumbuhan perekonomian nasional yang berdasarkan data menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha UMKM bisa mencapai 98% dari pelaku usaha di Indonesia. Saat ini diperkirakan 46.6 juta pelaku usaha UMKM belum memiliki akses kredit atau pembiayaan dimana penyaluran pembiayaan kepada UMKM belum banyak dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dan pelaku usaha UMKM juga saat ini mengalami suatu kendala dalam pengajuan pembiayaan modal kerja melalui perbankan dimana mereka banyak terbentur pada pemenuhan persyaratan yang ketat dari perbankan.

Peluang ini yang dilihat oleh Perseroan dimana Perseroan saat ini memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM melalui kerjasama dengan komunitas, koperasi, dan Perusahaan Finansial Teknologi.

Dimasa pemulihan perekonomian nasional, kebutuhan pendanaan jangka pendek bagi masyarakat sangat tinggi dimana setiap

tahunnya mencapai Rp1.600 triliun per tahun. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital, maka Perseroan dalam penyaluran produk pembiayaan multiguna menggunakan platform digital bekerjasama dengan Perusahaan berbasis Finansial teknologi termasuk digital platform yang dikembangkan oleh Reliance Group melalui PT RelianceIntegrasi Dunia Anda (Reli:ID). Segmen masyarakat yang diberikan pembiayaan multiguna adalah masyarakat berpenghasilan tetap dengan skema B2B2C dimana terlebih dahulu dilakukan kerjasama dengan Perseroan. Dengan semakin besarnya bisnis dan jumlah pelanggan Perseroan dan Group, Perseroan melihat adanya peluang untuk memanfaatkan database pelanggan sebagai upaya untuk melakukan strategi *repeat order*, *upselling*, maupun *cross selling* untuk meningkatkan pertumbuhan Perseroan secara efisien. Perseroan juga akan lebih mengoptimalkan menggarap *customer based* RCM Group baik terutama *existing customer* asuransi.

Rencana Pengembangan Jaringan Kantor

Pada tahun 2021 dimana Era Digitalisasi sedang bertumbuh, maka perkembangan industri pembiayaan tidak lagi membutuhkan jaringan kantor cabang yang banyak, tetapi peningkatan pelayanan kepada nasabah melalui digitalisasi. Perseroan akan fokus pada peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

Jumlah Jaringan Kantor

No	Kantor	Alamat	Wilayah
1	Pusat	Menara Batavia Lt. 27. Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126. Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Indonesia - 10220	DKI Jakarta
2	Operasional	SOHO West Point Lantai 2 Jl. Macan Kav. 4-5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510	DKI Jakarta
3	Perwakilan	Jl. T. Amir Hamzah No.48-O, Sei Agul, Kec. Medan Baru., Kota Medan, Sumatera Utara 20117	Sumatera Utara

Proyeksi Finansial dan Rasio-Rasio

Tahun 2021, perseroan menargetkan:

	2021
Total AR	715.894
Total Asset	689.126
Total Liabilities	515.247
Total Equity	173.878

(dalam presentase Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2021
ROE	10,04
ROA	3,38
Gearing Ratio (x)	2,9
BOPO	74,55
NIM	5,99
FAR	99,51
NPF	2,00
Rasio Saldo Piutang Pembiayaan Netto terhadap Total Pendanaan	141

Asumsi

- Penggunaan tingkat suku pinjaman tidak terdapat perubahan yang signifikan.
- Suku bunga pembiayaan minimal 16%
- Pencatatan masih menggunakan PSAK 71.

Rencana Permodalan

Dalam jangka Panjang (tahun 2025) Perseroan merencanakan untuk melakukan penambahan modal sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah), rencana penambahan modal ini adalah salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan pendanaan Perseroan sebagai salah satu sumber pendanaan internal Perseroan

Rencana Pendanaan

Dalam rangka pemenuhan pendanaan untuk kegiatan usaha Perseroan, maka sumber pendanaan melalui:

- a. Penerbitan Obligasi
 Perseroan berencana menerbitkan Obligasi dengan total Nilai setinggi tingginya Rp.400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah).
- b. Pinjaman Bank
 Sumber pendanaan utama Perseroan saat ini bersumber dari Modal Sendiri dan MTN. Pada Tahun 2019, Perseroan melakukan perluasan sumber pendanaan melalui fasilitas pinjaman bank. Sesuai dengan Rencana Bisnis tahun 2022, Perseroan menargetkan fasilitas pinjaman bank pada tahun 2022 ini mencapai Rp. 50 miliar melalui produk pinjaman modal kerja, *Channeling* ataupun *Joint Financing*.
- c. Pinjaman Industri Keuangan non Bank
 Di tahun 2022 Perseroan juga akan menambah fasilitas pendanaan yang berasal dari Industri Keuangan non Bank, baik dari PT Sarana Multigriya Financial (Persero) yang sudah eksisting atau dari Lembaga /Badan lain dari Industri Keuangan non Bank.

Persaingan Usaha

Dalam industri pembiayaan, Perseroan memiliki beberapa pesaing baik itu Perseroan yang bergerak dalam bidang pembiayaan maupun lembaga perbankan yang menyediakan jasa Pembiayaan. Dalam kategori Perusahaan Pembiayaan Perseroan masuk kedalam kategori Perusahaan Pembiayaan beraset Rp 100 Milyar s/d dibawah Rp 500 Milyar, dengan pesaing antara lain Trust Finance Indonesia, Sarana Global Finance Indonesia, Asia Multidana, Asiatic Sejahtera Finance, Fuji Finance Indonesia (sumber : Infobanknews). Keunggulan Perseroan dalam persaingan adalah bisnis model Perseroan yang masuk dalam strategi “blue ocean” atau memiliki differensiasi dibandingkan Perusahaan Pembiayaan lainnya karena Perseroan fokus kepada core business Mid-low Mortgage, Pembiayaan Multiguna, dan Pembiayaan Produktif.

Beberapa strategi Perseroan untuk memenangkan persaingan usaha:

- Melakukan sinergi dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam grup Reliance Capital Management (“RCM”) yang beroperasi di industry asuransi, *asset management*, perbankan dan modal ventura. Sinergi dilakukan dengan cara melakukan penawaran untuk pembiayaan bagi nasabah-nasabah Perseroan yang tergabung dalam RCM tersebut (saat ini RCM grup sudah melayani lebih dari 7.500.000 nasabah). Produk-produk pembiayaan Perseroan juga dipasarkan di cabang-cabang perusahaan yang tergabung di RCM (saat ini RCM grup telah memiliki 37 lokasi kantor di 24 kota besar di seluruh Indonesia).
- Untuk memperkuat pendanaan bagi penyaluran pembiayaan Perseroan,
- Bekerjasama dengan komunitas yang membutuhkan pembiayaan khususnya dalam bentuk Koperasi yang berbasis tanggung renteng (“Grameen Model”) dan menggunakan digital platform untuk bisa memperluas jangkauan terhadap nasabah
- Bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang *peer-to-peer lending* (FINTECH) untuk dapat terus menjaring nasabah retail baru tanpa harus membuka banyak cabang di Indonesia, sehingga membuat biaya operasional Perseroan menjadi dapat dikelola dengan baik.
- Melakukan strategi repeat order, upselling, maupun cross selling untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara efisien. Perseroan juga akan lebih mengoptimalkan menggarap customer based RCM Group baik terutama existing nasabah asuransi
- Bekerjasama dengan PT Sarana Multigriya Financial (Persero) dalam hal pendanaan dan sekaligus Perseroan sebagai penyalur pembiayaan ke sektor perumahan.

Ketergantungan Usaha

Dalam industri pembiayaan terdapat beberapa Perusahaan Pembiayaan memiliki ketergantungan baik kepada pemasok, pelanggan ataupun kontrak industrial dan lain-lain. Usaha Perseroan dalam hal ini memiliki debitur inti yang diklasifikasi kedalam 25 debitur terbesar pada tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp 258,53 Milyar atau sebesar 70,93% dimana nilai terbesar denitur inti tersebut adalah Rp 59,77 Miliar atau sebesar 16,40% dimana angka tersebut masih dibawah aturan Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan (BMPP) yang dipersyaratkan oleh OJK. Terkait hal tersebut Perseroan melakukan Langkah-langkah pencegahan untuk menekan nilai pembiayaan kepada debitur inti tersebut dengan melakukan diversifikasi pembiayaan dan memperluas kerja sama dengan mitra-mitra usaha Perseroan untuk memfokuskan kepada pembiayaan untuk masyarakat dengan penghasilan sedang dan rendah serta pembiayaan kepada UMKM. Langkah lainnya adalah menambah mitra usaha Perseroan dengan basis komunitas, koperasi dan perusahaan fintech sehingga distribusi Pembiayaan Perseroan dalam lebih merata. Dalam hal pendanaan Perseroan tidak bergantung penuh kepada pihak ketiga, pendanaan yang diterima Perseroan saat ini didukung oleh beberapa Lembaga baik Perbankan ataupun non perbankan. Saat ini Perseroan terus melakukan usaha untuk mendapatkan mitra pembiayaan baik dari Lembaga perbankan dan non perbankan, serta didukung dengan penerbitan obligasi ini. Produk Pembiayaan yang dipasarkan oleh Perseroan tidak tergantung pada satu merek tertentu atau tidak bergantung pada ATPM tertentu karena *core business* Perseroan bukan seperti Perusahaan pembiayaan lain yang fokus pada pembiayaan kendaraan motor dengan merek dan type tertentu.

D. Strategi Usaha

Dengan melihat kondisi dan potensi pasar untuk industri pembiayaan di Indonesia, Perseroan memutuskan untuk fokus kepada *Core Business* yang terdiri dari:

Mid-low Mortgage

Bekerjasama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk memberikan kredit kepemilikan rumah kepada masyarakat berpendapatan menengah dan rendah dan pembiayaan modal kerja kepada pihak pengembang terkait terutama pengembang dalam skala Usaha Kelas Menengah

Pembiayaan Multiguna

Pemberian pembiayaan ke konsumen dengan menjalin kerjasama dengan pelaku-pelaku utama *consumer finance* yang memanfaatkan platform digital dan berbagai institusi untuk memberikan pembiayaan karyawan maupun mahasiswa.

Pembiayaan Produktif

Pemberian pinjaman kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (“UMKM”) dan individu-individu yang bernaung dibawah sebuah komunitas dan institusi-institusi. Dengan semangat pengembangan inklusi keuangan kami menjalin kerjasama dengan pelaku-pelaku utama kredit komunitas seperti Koperasi berbentuk Simpan dengan seperti Grameen Model dan berbagai institusi untuk memberikan pembiayaan ke sektor pertanian dan perikanan

Dengan semakin besarnya bisnis dan jumlah pelanggan Perseroan dan Group, Perseroan melihat adanya peluang untuk memanfaatkan database pelanggan sebagai upaya untuk melakukan strategi *repeat order*, *upselling*, maupun *cross selling* untuk meningkatkan pertumbuhan Perseroan secara efisien. Perseroan juga akan lebih mengoptimalkan menggarap *customer based RCM Group* baik terutama *existing customer* asuransi.

Perseroan memiliki 4 pillar untuk mencapai rencana jangka panjangnya:

1. **Model Bisnis yang Berkesinambungan.** Menjadi spesialis dalam memberikan pinjaman kepada individu dan pelaku usaha yang ‘tidak terlayani’ melalui Bisnis Inti Perseroan.
2. **Keseimbangan Pertumbuhan Bisnis dan Manajemen Risiko.** Menerapkan sistem manajemen risiko berbasis “3 lines of defense mechanism” yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan produk dan proses dengan sistem monitoring yang aktif.
3. **Pengembangan Produk yang Mengikuti Kebutuhan Pasar.** Pengembangan produk dan proses yang sesuai dengan kebutuhan para mitra bisnis Perseroan yang memiliki keahlian dan spesialisasi terhadap target dan market yang dibina oleh para mitra tersebut.
Sistem IT Terintegrasi. Menerapkan sistem IT berbasis digital yang terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

E. Keunggulan Teknologi Informasi

Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan sangat mengandalkan penggunaan teknologi informasi dalam seluruh kegiatan penyaluran pembiayaan dan operational Perseroan.

Bersama PT RelianceIntergrasi Dunia Anda (Reli:ID), Perseroan telah mengembangkan pembiayaan secara digital dimana setiap pengajuan pembiayaan dapat dilakukan melalui media smartphone. Saat ini pembiayaan untuk karyawan sudah dilayani secara digital melalui aplikasi Reli ID yang dapat di unduh melalui “google play”.

Perseroan juga memiliki *Credit Scoring System* yang saat ini dilakukan melalui analisa terhadap kekuatan finansial dan praktik proses bisnis dari calon nasabah untuk menentukan kelayakan pembiayaan yang akan diberikan. Berkenaan dengan persetujuan pemberian pembiayaan yang saat ini tersentralisasi di Kantor Pusat, maka konektivitas antar jaringan Perseroan dikoordinasikan langsung oleh bagian IT dan Direksi. Pada saat ini, Perseroan masih mengandalkan hasil *credit scoring* SLIK yang dimiliki oleh OJK untuk melakukan Analisa kekuatan finansial dan praktik proses bisnis calon nasabah. Untuk ke depan, Perseroan bermaksud untuk melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan penyedia *credit scoring* (seperti Pefindo Biro Kredit) untuk melakukan Analisa kekuatan finansial calon nasabah.

Saat ini Perseroan sedang dalam tahap pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi, semua proses bisnis akan menggunakan aplikasi IT yang terintegrasi sebagai berikut:

1. Core system untuk Reliance Finance: LOS (Input aplikasi, asset, sub-asset, nilai tukar, suku bunga, Produk, Aturan Produk, Aturan Persetujuan, dll), termasuk juga fungsi berikut:
 - Pelaporan (Internal, External (contoh: SLIK, SIPP))
 - Pencairan
 - Pembayaran
2. Accounting –terhubung dengan ERP
3. Gerbang Pembayaran, terintegrasi dengan Fintech
4. DRC (*Disaster Recovery Center*) dan BCP (*Business Continuity Plan*)

IX. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) Obligasi.
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AIKBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan hasil *Book Building* sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah).

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan (dalam jutaan Rupiah)				(%)
		Seri A	Seri B	Seri C	Jumlah	
1.	PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	Rp100.000,-	Rp100.000,-	Rp200.000,-	Rp400.000,-	100
	Jumlah	Rp100.000,-	Rp100.000,-	Rp200.000,-	Rp400.000,-	100

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**"), yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat bunga tetap pada Obligasi ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Wali Amanat** : **PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk**
 Sinarmas MSIG Tower Lt. 9
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
 Jakarta Selatan 12920
 Telepon : 021-5228737
 Faksimili : 021-52287378
 Email : trustee_custody@bankbjb.co.id
 STTD: 1/PM.2/STTD-WA/2016
 Pedoman Kerja: Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal, serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat. Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Penunjukan Wali Amanat No. 034/UPRI/DIR/IV/2021 tanggal 12 April 2021.
- Tugas Pokok** : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia Khususnya peraturan di bidang pasar modal.
- Notaris** : **Ir. Nanette Cahyanie S.H.,**
 Jl. Panglima Polim V No. 11
 Kebayoran Baru
 Jakarta 12160
- STTD: STTD.N-41/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018 atas nama Ir. Nanette Cahyanie, S.H.
 - Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 1123819721017
 - Pedoman Kerja: Peraturan Jabatan Notaris dan UUPM.
 - Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No. 024/UPRI/DIR/III/2021, tanggal 03 Maret 2021.
- Tugas Pokok:** : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta akta-akta pengubahannya.
- Akuntan Publik** : **Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan**
 Plaza Aminta
 Jl. TB Simatupang Lt 7
 Jakarta 12430
- Nama Rekan: Yansyafrin, CPA
 - No. STTD: STTD.AP-034/PM.223/2019
 - Tanggal STTD: 11 September 2019
 - Keanggotaan Asosiasi Institut Akuntan Publik Indonesia 3227
 - Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No.076-30/2.0459/KAP-EL/01/IV/2021 tanggal 01 April 2021.
- Pedoman Kerja: Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
- Tugas Pokok** : Melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum:	Tumbuan & Partners Jl Gandaria Tengah III No.8 Kebayoran Baru Jakarta 12130
	- STTD: STTD.KH-28/PM-22/2018 tanggal 14 Maret 2018 atas nama Jennifer Berendina Tumbuan. - Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan berdasarkan Surat Penunjukkan No. 036/UPRI/DIR/IV/2021 tanggal 13 April 2021, yang turut ditandatangani oleh Perseroan.
Tugas Pokok:	Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.
Perusahaan Pemeringkat Efek	PT Kredit Rating Indonesia Sinarmas Land Plaza Tower 3 Lanti 11 Jl. M.H Thamrin no 51, Kav 22. Jakarta Pusat, 10350
Tugas Pokok:	Memberikan hasil pemeringkat atas efek (<i>Instrument Rating</i>) dan Entitas (<i>Corporate Rating</i>) atas penerbitan Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang tercantum diatas bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DENGAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK SEBAGAI WALI AMANAT.

XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I REFI Indonesia Tahun 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, (selanjutnya disebut sebagai "bank **bjb**") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Bank **bjb** dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan No. 1/PM.2/STTD-WA/2016 tanggal 4 Januari 2016. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan bank **bjb**.

Bank **bjb** sebagai Wali Amanat menyatakan menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak terafiliasi 3120/TRE-KWA/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dan Wali Amanat saat ini tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari Pemegang Obligasi, sesuai dengan Peraturan POJK No. 19/2020 yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak mempunyai hubungan kredit 3121/TRE-KWA/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

Bank **bjb** sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan 3122/TRE-KWA/2021 tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

1. Umum

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dikenakan nasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yaitu N.V. Denis (De Eerste Nederlandsche Indische Shareholding) terkena ketentuan tersebut dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Bank telah mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Mei 1961.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1960, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat mendirikan Bank Karya Pembangunan, dengan Akta Notaris Noezar No. 152 tanggal 21 Maret 1961 dan No. 184 tanggal 13 Mei 1961 yang kemudian dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 7/GKDN/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 dengan nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972, kedudukan hukum PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dikukuhkan sebagai Perusahaan Daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1/DP-40/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat mendapat sebutan "Bank Jabar" dan logo baru berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 1995.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992, Bank memperoleh status sebagai bank devisa. Penyesuaian bentuk badan hukum Bank menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam Akta Notaris No. 4 tanggal 8 April 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Popy Kuntari Sutresna, S.H., M. Hum., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C27103.HT.01.01.TH.99 tanggal 16 April 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1999. Pada tanggal 12 September 2007, nama Bank diubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten berdasarkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. W8-02673 HT.01.04-TH.2007. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1065/SK/DIR - PPN/2007 tanggal 29 November 2007, Bank mengubah penyebutan nama menjadi "Bank Jabar Banten".

Berdasarkan Surat Bank Indonesia No.12/78/APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana Perubahan Logo Bank, serta Surat Keputusan Direksi No. 1337/SK/DIR-PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Perubahan Logo dan Penyebutan Nama serta pemberlakuan Brand Identity Guidelines, maka pada tanggal 2 Agustus 2010 perubahan penyebutan nama "Bank Jabar Banten" secara resmi diubah menjadi "bank **bjb**".

Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaimana tertuang di Akta Pendirian No. 4 tanggal 8 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan No. 8 tanggal 15 April 1999 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk No. 02 tanggal 1 September 2020 yang telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0383612 tanggal 08 September 2020, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk No. 10 tanggal 6 April 2021 yang telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0255714 tanggal 22 April 2021.

2. Permodalan Wali Amanat

Komposisi permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

		KEPEMILIKAN	
No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH LEMBAR SAHAM	% KEPEMILIKAN (TOTAL SAHAM)
SAHAM SERI A			
A.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	3.756.415.785	38,18%
	Provinsi Jawa Barat	3.756.415.785	38,18%
B.	Pemerintah Kota & Kab. se-Jawa Barat	2.363.812.461	24,03%
	Pemerintah Kota se-Jawa Barat	583.201.465	5,93%
1	Kota Bandung	116.000.006	1,18%
2	Kota Cirebon	17.837.704	0,18%
3	Kota Sukabumi	38.545.063	0,39%
4	Kota Bekasi	62.493.022	0,64%
5	Kota Bogor	46.737.809	0,48%
6	Kota Cimahi	104.000.000	1,06%
7	Kota Depok	93.777.672	0,95%
8	Kota Tasikmalaya	62.810.189	0,64%
9	Kota Banjar	41.000.000	0,42%
	Pemerintah Kabupaten se-Jawa Barat	1.780.610.996	18,10%
1	Kabupaten Bandung	712.485.914	7,24%
2	Kabupaten Cirebon	56.121.123	0,57%
3	Kabupaten Karawang	56.863.937	0,58%
4	Kabupaten Ciamis	32.721.097	0,33%
5	Kabupaten Tasikmalaya	130.953.800	1,33%
6	Kabupaten Sukabumi	86.889.260	0,88%
7	Kabupaten Subang	44.937.610	0,46%
8	Kabupaten Indramayu	87.986.270	0,89%
9	Kabupaten Bekasi	73.550.504	0,75%
10	Kabupaten Sumedang	46.052.684	0,47%
11	Kabupaten Bogor	202.523.232	2,06%
12	Kabupaten Cianjur	102.416.760	1,04%
13	Kabupaten Kuningan	28.797.110	0,29%
14	Kabupaten Majalengka	35.462.669	0,36%
15	Kabupaten Garut	26.366.698	0,27%
16	Kabupaten Purwakarta	51.219.171	0,52%
17	Kabupaten Bandung Barat	5.263.157	0,05%
C.	Pemerintah Provinsi Banten	520.589.856	5,29%
	Provinsi Banten	520.589.856	5,29%
D.	Pemerintah Kota & Kab. se-Banten	773.896.559	7,87%
	Pemerintah Kota se-Banten	185.749.520	1,89%
1	Kota Tangerang	125.117.942	1,27%
2	Kota Cilegon	60.631.578	0,62%
	Pemerintah Kabupaten se-Banten	588.147.039	5,98%
1	Kabupaten Serang	151.092.304	1,54%
2	Kabupaten Tangerang	289.306.189	2,94%
3	Kabupaten Lebak	37.586.022	0,38%
4	Kabupaten Pandeglang	110.162.524	1,12%
TOTAL SAHAM SERI A		7.414.714.661	75,36%
SAHAM SERI B			
	MASYARAKAT	2.424.072.500	24,64%
TOTAL SAHAM SERI B		2.424.072.500	24,64%
TOTAL SAHAM		9.838.787.161	100,00%

3. Pengurus dan Pengawasan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi bank **bjb** berdasarkan Akta tanggal 6 April 2021 No. 10, dibuat dihadapan Raden Tedy Suwarnan, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 22 April 2021 No. AHU-AH.01.03-0255714, susunan Dewan Komisaris dan Direksi bank **bjb** adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen: Farid Rahman
 Komisaris : Dedi Taufik
 Komisaris : Ir. H. Muhadi
 Komisaris Independen : Tubagus Raditya Indrajaya
 Komisaris Independen : Fahlino Fauzi Sjuib

Direksi

Direktur Utama	: Yuddy Renaldi
Direktur Kepatuhan	: Cecep Trisna
Direktur Operasional	: Tedi Setiawan
Direktur Information, Technology, Treasury, dan International Banking	: Rio Lanasier
Direktur Keuangan	: Nia Kania
Direktur Konsumer dan Ritel	: Suartini
Direktur Komersial dan UMKM	: Nancy Adistyasari

4. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, bank bjb didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha di bidang perbankan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, ruang lingkup kegiatan bank bjb antara lain adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikasi deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan Surat Pengakuan Utang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan perintah nasabahnya :
 - a. Surat – surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud;
 - b. Surat pengakuan Utang dan kertas dagang lainnya; yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat – surat dimaksud;
 - c. Kertas Perbendaharaan Negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. Obligasi;
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat oleh Bursa Efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat.
12. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh yang berwenang.
13. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan di bidang jasa keuangan lainnya atau mendirikan perusahaan baru sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.
15. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku.
16. Menyelenggarakan usaha – usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, sebagai bank pembangunan daerah, bank bjb juga membantu Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan institusi jasa keuangan lainnya milik pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Bank bjb, atau Bank bjb sama sekali tidak memiliki saham namun diminta untuk membantu pembinaan BPR dimaksud.

Selain Penghimpunan dan Penyaluran dana, bank bjb melayani jasa-jasa perbankan lainnya seperti Reksa dana, Bancasuranne, Trade Finance & Services, Produk Treasury, Kiriman Uang dan Western Union, Inkaso, BPDnet Online, bjb DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Transfer Kliring Antar Wilayah (Intercity Clearing), Jaminan Bank (Bank Garansi), Fasilitas Safe Deposit Box (SDB), Mobile Banking (M-ATM Bersama), Layanan Nasabah bjb Precious, Jasa layanan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan, Ibadah Haji (BPIH), Layanan Weekend Banking, Layanan Mobil Edukasi dan juga Jasa Pasar Modal (Jasa Kustodian dan Jasa Wali Amanat).

Bank bjb terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar dari OJK sebagai Wali Amanat No. 1/PM.2/STTD-WA/2016 tanggal 4 Januari 2016. Selain itu, juga melayani Jasa Agen Jaminan, Agen Pembayar dan Jasa Agen Rekening Penampungan.

Sebagai Bank Umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang telah go public, bank bjb telah memiliki imej yang kuat sebagai bank umum yang sedang berkembang dengan pesat dan menjadi bank nasional. Saat ini bank bjb telah memiliki jaringan kantor yang menyebar di 14 provinsi, terutama Jawa Barat serta Jakarta yang merupakan pusat perekonomian Indonesia. Dari sisi produk, layanan electronic banking (bjb DIGI) telah mendorong berkembangnya berbagai produk bank bjb. Untuk mengoptimalkan layanannya bagi seluruh nasabah, Bank bjb telah memperluas jaringan layanan perbankan di Indonesia. Saat ini kantor-kantor cabang bank bjb juga dapat dijumpai di berbagai kota besar seperti Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Lampung, Jakarta, Bandung, Tegal, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan dan Makassar. Selain itu, Bank bjb juga mengembangkan jaringan di bawahnya untuk membawa dirinya semakin dekat dengan nasabah. Bank bjb memiliki 65 kantor cabang, 315 kantor cabang pembantu, 346 kantor kas dan 213 payment point.

Pada 4 Januari 2016 bank bjb telah mendapatkan izin Wali Amanat sebagai pelaku penunjang Pasar Modal. Bank bjb adalah bank pembangunan daerah pertama yang telah mendapat izin tanda terdaftar sebagai Wali Amanat yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank bjb berperan aktif sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau sejak Tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

- Obligasi

No.	Nama Obligasi/Sukuk
1	Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap I Tahun 2020
2	Obligasi I Adhi Commuter Properti Tahun 2021 Seri A
3	Obligasi I Adhi Commuter Properti Tahun 2021 Seri B
4	Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A
5	Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri B
6	Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C
7	Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D
8	Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri A
9	Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri B
10	Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri C
11	Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2021
12	Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap II Tahun 2021
13	Obligasi I Utama Karya Tahun 2013 Seri C
14	Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2016
15	Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap II Tahun 2017
16	Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri A
17	Obligasi Berkelanjutan I Utama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri B
18	Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A
19	Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B
20	Obligasi Berkelanjutan II Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C
21	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A
22	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B
23	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri C
24	Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri A
25	Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri B
26	Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri A
27	Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri B
28	Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A
29	Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B

30	Sukuk Mudharabah I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri A
31	Sukuk Mudharabah I PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B
32	Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap II Tahun 2019
33	Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap III Tahun 2019
34	Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri A
35	Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri B
36	Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021
37	Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri A
38	Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri B
39	Obligasi Dengan Opsi Konversi Wika Realty Tahun 2019

- Medium Term Notes dan SUKUK

No.	Nama MTN/Sukuk
1	Perum PNRI MTN I Tahun 2018
2	MTN I Perum Perumnas Tahun 2017 Seri A
3	MTN I Perum Perumnas Tahun 2017 Seri B
4	MTN III Perum Perumnas Tahun 2018 Seri A
5	MTN III Perum Perumnas Tahun 2018 Seri B
6	MTN IV Perum Perumnas Tahun 2019
7	MTN V Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A
8	MTN V Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B
9	MTN VII Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A
10	MTN VII Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B
11	MTN VIII Perum Perumnas Tahun 2019
12	MTN XI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri A
13	MTN XI Perum Perumnas Tahun 2019 Seri B
14	MTN IX Perum Perumnas Tahun 2019
15	Surat utang Jangka Panjang Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas Perum Perumnas Tahun 2020 Seri A
16	Surat utang Jangka Panjang Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Terbatas Perum Perumnas Tahun 2020 Seri B
17	LTN Subordinasi I Bank Artha Graha Internasional Tahap I Tahun 2020
18	MTN Bintang Oto Global I Tahun 2021
19	MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri A
20	MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri B
21	MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap I Seri C
22	MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap II Seri A
23	MTN I HK Realtindo Tahun 2017 Tahap II Seri B
24	MTN V Hotel Indonesia Natour Tahun 2019
25	MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap I Seri A
26	MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap I Seri B
27	MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap II Seri A
28	MTN II LEN Industri Tahun 2016 Tahap II Seri B
29	MTN III LEN Industri Tahun 2016
30	MTN I Len Industri Tahun 2018 Seri A
31	MTN I Len Industri Tahun 2018 Seri B
32	MTN II Len Industri Tahun 2019 Seri A
33	MTN I MNC Leasing Tahun 2017 Seri A

34	MTN I MNC Leasing Tahun 2017 Seri B
35	MTN II MNC Leasing Tahun 2018
36	MTN Syariah Ijarah I MNC Pictures Tahun 2018
37	MTN Pacific Strategic Financial I Tahun 2021
38	MTN II PTPN V Tahun 2021
39	MTN IV PTPN XIII Tahun 2016
40	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri A
41	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri B
42	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri C
43	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIII Tahun 2017 Seri D
44	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri A
45	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri B
46	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri D
47	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIV Tahun 2017 Seri E
48	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVI Tahun 2017 Seri A
49	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVI Tahun 2017 Seri B
50	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVII Tahun 2018
51	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XVIII Tahun 2018 Seri A
52	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri A
53	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri B
54	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri C
55	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri D
56	MTN PT Permodalan Nasional Madani (Persero) XIX Tahun 2018 Seri E
57	Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri A
58	Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri B
59	Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Tahap I Seri A
60	Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri A
61	Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri D
62	Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri B
63	Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2020 Seri C
64	MTN II PT PNM Venture Capital tahun 2020
65	Sukuk Mudharabah I PT PNM Ventura Syariah Tahun 2021
66	MTN XIV PP Properti Tbk
67	MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri A
68	MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri B
69	MTN II Radana Bhaskara Finance Tahun 2016 Seri C
70	MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri A
71	MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri B
72	MTN I Radana Finance Tahun 2017 Seri C
73	MTN I SKL Tahun 2017 Terkait KIK DRPT Seri A
74	MTN II Tunas Baru Lampung Tahun 2017
75	MTN III Tunas Baru Lampung Tahun 2018
76	MTN Waskita Toll Road Tahun 2019
77	MTN II Waskita Toll Road Tahun 2019
78	MTN PT Waskita Karya Realty Tahun 2021
79	MTN PT Waskita Fim Perkasa Realti Tahun 2021

80	MTN IX Wika Realty Tahun 2019
81	MTN Pintar Nusantara Sejahtera I Tahun 2017

5. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, pada Pasal 3.2 tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat

- a. Mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20/POJK.04/2020 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam butir a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Emiten, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku Efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi yaitu pada Tanggal Emisi;
- c. Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- d. Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK. Tugas pokok dan tanggung jawab mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada pemodal.

6. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Perwaliamanatan, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, sebagai berikut:

1. Berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Emiten dengan ini menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk, berkedudukan di Bandung, untuk menjalankan tugas selaku Wali Amanat dalam rangka Emisi Obligasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan selanjutnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk, dengan ini menerima baik penunjukan sebagai Wali Amanat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban selaku Wali Amanat dalam suatu Emisi Obligasi.
2. penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - h. atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui mekanisme RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - i. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - j. timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 19/POJK.04/2020; atau
 - k. atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri karena Emiten tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Emiten atau apabila Emiten melakukan kelalaian/cidera janji dengan telah melalui proses sesuai dengan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Emiten
3. Apabila terjadi penggantian Wali Amanat karena salah satu sebab sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 3.7 butir 2) huruf a) sampai dengan huruf e) Perjanjian Perwaliamanatan, maka Emiten berkewajiban untuk segera mencari pengganti Wali Amanat baru dan menunjuk wali amanat pengganti dalam waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak kejadian tersebut, dan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender Emiten harus melakukan pengumuman RUPO untuk menyelenggarakan RUPO dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan, untuk pengukuhan wali amanat pengganti tersebut.
4. Penggantian Wali Amanat yang terjadi karena salah satu sebab sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 3.7 butir 2) huruf f) sampai dengan huruf h) Perjanjian Perwaliamanatan, maka Emiten berkewajiban untuk segera mencari pengganti Wali Amanat baru, penggantian Wali Amanat tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

5. Dalam hal terjadi salah satu sebab sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 3.7 butir 2) huruf i) sampai dengan huruf k) Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Emiten. Permohonan pengunduran diri tersebut harus diajukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya. Atas hal pengunduran diri tersebut Emiten bertanggung jawab untuk menunjuk wali amanat pengganti selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterima surat pengunduran diri tersebut, dalam hal Emiten belum menunjuk wali amanat pengganti, maka selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri Wali Amanat tersebut, Wali Amanat berhak mengusulkan wali amanat pengganti dirinya dan kemudian sesegera mungkin menyelenggarakan RUPO.
- Emiten berkewajiban menyelenggarakan RUPO, untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat, Wali Amanat baru dapat berhenti bertugas selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan setelah permohonan berhenti tersebut diterima oleh RUPO dan wali amanat yang menggantikannya mulai memangku jabatannya, dan Emiten wajib membayar imbalan jasa yang masih terutang merupakan kewajiban Emiten kepada Wali Amanat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan RUPO wajib ditanggung Emiten.
6. berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
- Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau dari Emiten, jika Emiten tidak menggunakan Agen Pembayaran;
 - Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian
 - Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Obligasi; atau
 - setelah diangkatnya wali amanat baru

7. LAPORAN KEUANGAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan bank **bjb** per 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian:

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Kas	3.689.045	3.160.771	2.929.207
Giro pada Bank Indonesia	8.046.403	6.512.341	9.981.495
Giro pada bank lain - pihak ketiga	881.541	535.268	611.796
Cadangan kerugian penurunan nilai	(71)	(66)	(72)
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - pihak ketiga	5.818.892	7.919.924	9.731.163
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.662)	(2.193)	(4.351)
Tagihan derivatif			76
Surat berharga - pihak ketiga	11.479.763	8.855.293	8.617.220
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	10.121.400	3.162.245	2.815.800
Wesel ekspor dan tagihan lainnya - pihak ketiga	740.396	908.060	798.117
Kredit yang diberikan			
- Pihak berelasi	217.937	261.564	821.825
- Pihak ketiga	89.232.997	81.625.682	74.528.024
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.755.670)	(705.300)	(646.522)
Pembiayaan dan piutang syariah - setelah dikurangi margin ditangguhkan - pihak ketiga	5.761.509	5.402.059	4.641.938
Cadangan kerugian penurunan nilai	(157.093)	(131.102)	(139.053)
Tagihan akseptasi	52.772	156.084	82.379
Penyertaan saham	42.124	42.124	42.124
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.303)	(1.303)	(1.303)
Aset tetap			
- Harga perolehan	5.970.602	4.609.769	4.363.927
- Akumulasi penyusutan	(1.555.254)	(1,.65.544)	(1.092.176)
Aset pajak tangguhan - neto	100.932	128.13	155.680
Bunga yang masih akan diterima	793.066	650.516	621.430
Aset lain-lain - neto	1.456.676	1.712.169	1.332.663
TOTAL ASET	140.934.002	12.536.474	120.191.387

KETERANGAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	1.830.150	1.816.918	1.488.621
Simpanan nasabah			
- Pihak berelasi	9.272.176	12.981.014	13.230.691
- Pihak ketiga	90.526.300	70.583.379	68.590.293
Simpanan nasabah - Syariah			
- Pihak berelasi	1	1	1
- Pihak ketiga	480.093	425.410	376.744
Simpanan dari bank lain			
- Pihak berelasi	94.279	423.938	166.117
- Pihak ketiga	2.024.805	1.132.690	4.094.603
Liabilitas derivative	10	-	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	3.792.336	3.852.844
Liabilitas akseptasi	52.802	156.084	82.379
Efek utang yang diterbitkan - neto	3.236.456	3.487.485	3.240.513
Pinjaman yang diterima - pihak ketiga	11.300.357	8.791.601	6.708.734
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	29.765	369	579
Utang pajak	77.354	44.323	79.258
Bunga yang masih harus dibayar	221.713	178.516	183.446
Liabilitas pajak tangguhan – neto	-	169.389	110.522
Liabilitas imbalan kerja	206.046	209.983	185.404
Liabilitas lain-lain	1.331.870	731.131	648.703
Obligasi subordinasi	1.992.707	996.424	996.468
TOTAL LIABILITAS	122.676.884	105.920.991	104.035.920
Dana syirkah temporer			
Bukan bank			
- Pihak berelasi	7.059	2.639	5.449
- Pihak ketiga	6.174.398	5.360.099	4.799.452
Bank			
- Pihak ketiga	69.861	210.116	65.251
Total dana syirkah temporer	6.251318	5.572.854	4.870.152
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk			
Modal saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	2.459.697	2.459.697	2.459.697
Tambahan modal disetor	1.058.541	1.058.541	1.058.541
Surplus dari revaluasi aset tetap	2.080.964	2.020.781	1.933.791
Keuntungan (Kerugian) dan perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual			
Pengukuran kembali program imbalan pasti	116.935	(1.514)	
- Setelah pajak tangguhan	(138.470)	(179.115)	(170.839)
Saldo laba			
-Telah ditentukan penggunaannya	3.073.730	3.725.378	5.043.407
- Belum ditentukan penggunaannya	3.308.127	2.909.072	911.978
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk	11.959.524	11.992.840	11.236.575
Kepentingan non-pengendali	46.276	49.789	48.740
TOTAL EKUITAS	12.005.800	12.042.629	11.285.315
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	140.934.002	123.536.474	120.191.387

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020	Tahun-tahun yang berakhir pada	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH			
Pendapatan bunga dan syariah	12.548.614	12.011.703	11.843.595
Pendapatan provisi dan komisi pembiayaan syariah	72.064	79.727	70.614
BEBAN BUNGA DAN BAGI HASIL SYARIAH	(6.123.414)	(6.008.924)	(5.415.178)
PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH NETO	6.497.264	6.082.506	6.499.031
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA			
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	641.022	599.296	580.577
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku	247.051	267.980	258.650
Keuntungan transaksi valuta asing - neto	54.658	13.143	15.676
Keuntungan dari penjualan surat berharga yang diperdagangkan - neto	424.289	58.092	8.847
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga yang diperdagangkan - neto	92.475	25.851	-
Lain-lain	(1.346)	50.341	70.714
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			
Beban umum dan administrasi	(2.499.005)	(2.281.455)	(2.276.047)
Beban tenaga kerja dan tunjangan	(2.639.268)	(2.024.828)	(2.160.020)
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan - neto Kerugian	(142.226)	(321.837)	(517.260)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar surat berharga yang diperdagangkan - neto	-	-	(28.823)
Pemulihan/(penyisihan) kerugian komitmen dan kontinjensi	2.853	(149)	1.504
Lain-lain	(465.641)	(409.447)	(394.452)
LABA OPERASIONAL	2.212.126	2.059.493	2.058.397
BEBAN NON-OPERASIONAL - NETO	(44.098)	(81.531)	(121.353)
LABA SEBELUM PAJAK	2.168.028	1.977.962	1.937.044
BEBAN PAJAK	(478.032)	(413.470)	(384.648)
LABA TAHUN BERJALAN	1.689.996	1.564.492	1.552.396
Akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	56.551	(10.160)	5.518
Revaluasi aset tetap	60.183	86.990	224.678
Pajak penghasilan	(15.958)	1.935	
Akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi			(1.419)
Keuntungan (Kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	118.449	(1.514)	-
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan –setelah pajak	219.225	77.251	228.777
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.909.221	1.641.743	1.781.173
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	1.687.218	1.558.651	1.548.249
Kepentingan non-pengendali	2.778	5.841	4.147
TOTAL LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	1.906.495	1.635.851	1.776.973
Kepentingan non pengendali	2.726	5.892	4.200

KETERANGAN	31 Desember 2020	Tahun-tahun yang berakhir pada	
		31 Desember 2019	31 Desember 2018
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (NILAI PENUH)	171.49	156.83	157,36

Wali Amanat
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
 Divisi Treasury
 Grup Kustodian dan Wali Amanat
 Sinarmas MSIG Tower Lt. 9
 Jl. Jend. Sudirman Kav.21
 Jakarta Selatan 12920
 Tel. (021) 5228737
 Faksimili: (021) 5228738
 Email : trustee_custody@bankbjb.co.id

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Sesuai dengan arahan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Penerapan *Social and Physical Distancing*, maka dihimbau bagi para calon investor dalam melakukan pemesanan Obligasi untuk turut serta menerapkan *Social and Physical Distancing* sesuai dengan anjuran Pemerintah yang berlaku.

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 3 Februari 2022 dan ditutup pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-008/OBL/KSEI/0122 tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 9 Februari 2022.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh, baik dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk softcopy yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani, baik secara hardcopy maupun softcopy melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi, sesuai dengan arahan pemerintah dalam menerapkan *Social* dan *Physical Distancing* selama masa Pandemi COVID-19. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 angka 1 huruf h. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 7 Februari 2022.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek dan Peraturan No IX.A.7 angka 1 huruf i sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

Bank : **BCA**
Cabang : **Bursa Efek Indonesia**
No. Rekening : **499-051-0151**
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 8 Februari 2022 pukul 10:00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi akan di transfer ke rekening Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Februari 2022 sebelum pukul 15.00 WIB (*in good funds*)

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 Februari 2022, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segara setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian

penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 1% selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Obligasi yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum:

- a. Jika Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya keputusan pembatalan Penawaran Umum tersebut dan jika Perseroan telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut.
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, maka Pembatalan Penawaran Umum hanya dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sesuai dengan arahan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Penerapan *Social and Physical Distancing*, maka dihimbau bagi para calon investor dalam melakukan pemesanan Obligasi untuk turut serta menerapkan *Social and Physical Distancing* sesuai dengan anjuran Pemerintah yang berlaku.

Maka dari itu, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh melalui Surat Elektronik oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dari tanggal 3 Februari 2022 hingga 4 Februari 2022 di Indonesia berikut ini:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi



PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk

SOHO West Point
Jl. Macan Kav 4-5, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk,
Jakarta Barat
Telepon: +6221 2952 0558
Faksimili: +6221 2952 0558
Website : <https://reliancesekuritas.com/>
Email : ib@reliancesekuritas.com

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

XVI. LAPORAN KEUANGAN

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Jakarta, 31 Januari 2022

No.: 032/T&P/I/22

Kepada

1. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710
u.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
2. **PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia**
SOHO WESTPOINT Lantai 2,
Jalan Macan Kav. 4-5,
Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat, 11510
u.p.: **Direksi**

Perihal : Pendapat Hukum sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi I REFI Tahun 2022

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), **PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**") bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**")), untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi I REFI Tahun 2022 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Obligasi Seri A sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 8% (delapan persen), dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;
2. Obligasi Seri B sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 9% (sembilan persen), dan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
3. Obligasi Seri C sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen), dan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.

(selanjutnya "**Penawaran Umum Obligasi I REFI Tahun 2022**") dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) disebut "**Obligasi I REFI Tahun 2022**").

Obligasi I REFI Tahun 2022 ini dijamin dengan jaminan berupa piutang dan penjaminan perusahaan (*corporate guarantee*), yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Piutang atau hak tagih milik Perseroan yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan, piutang mana belum jatuh tempo dan dengan kriteria status lancar serta usia penagihannya tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo masing-masing piutang sebagaimana yang tercantum dalam daftar piutang/berita acara dan/atau dokumentasi lain yang memuat nilai tagih dan kewajiban pembayaran oleh pengguna jasa kepada Perseroan, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:
- nilai yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia atas Piutang yang ditandatangani pada Tanggal Emisi adalah sekurang-kurangnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi; dan
 - dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, Perseroan wajib menambah Piutang hingga nilainya menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, perubahan mana akan disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam akta perubahan (addendum) jaminan fidusia atas Piutang.
- (b) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh PT Reliance Capital Management, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:
- nilai yang harus dimuat dalam akta jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang ditandatangani pada Tanggal Emisi, adalah sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi; dan
 - setelah nilai Jaminan Piutang milik Perseroan telah mencapai nilai sekurang-kurangnya sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi yang harus terpenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah Tanggal Emisi, maka nilai penjaminan perusahaan (*corporate guarantee*) akan diubah atau diturunkan nilainya menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, perubahan mana akan disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam akta perubahan (addendum) perjanjian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

Perseroan dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk senantiasa mempertahankan setiap saat jumlah nilai seluruh Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah dengan uang tunai jika nilai jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Sehubungan dengan jaminan berupa penjaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagaimana diuraikan di atas belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) UUPT oleh karena nilai jaminan yang diberikan tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT Reliance Capital Management selaku pemberi jaminan, namun demikian sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Reliance Capital Management, dan PT Reliance Capital Management telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris PT Reliance Capital Management atas pemberian jaminan tersebut sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Reliance Capital Management Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris No. Ref. 002/RCM-BOC/X/2021 tanggal 2 Desember 2021.

Lebih lanjut, PT Reliance Capital Management selaku pemberi jaminan perusahaan dalam rangka Obligasi I REFI Tahun 2022 dan juga sebagai pemegang saham Perseroan tidak akan menerima suatu keuntungan dalam bentuk apapun dalam kapasitasnya sebagai pemberi jaminan perusahaan, namun akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pemberi jaminan perusahaan sebagaimana diatur dalam perjanjian penjaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang akan ditandatangani kemudian oleh PT Reliance Capital Management dan Perseroan.

Obligasi I REFI Tahun 2022 dan penjaminan yang diberikan oleh Perseroan yang nilainya tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan audited yang berakhir pada 31 Juli 2021, sehingga oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan yang membutuhkan persetujuan dari RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) UUP. Namun demikian berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal Perseroan menjaminkan kekayaan Perseroan maka harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, dimana dalam hal ini Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris No. 001/BOC/REFI/I/2022 tanggal 18 Januari 2022. Di samping itu, dalam rangka pemenuhan kewajiban Pasal 73 Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah menyampaikan rencana Obligasi I REFI Tahun 2021 (yang saat ini telah berubah nama menjadi Obligasi I REFI Tahun 2022) kepada OJK IKNB yaitu dalam waktu paling lambat 3 bulan sebelum rapat umum pemegang saham untuk menyetujui penawaran umum sebagaimana termuat dalam Surat No. S-1349/NB.221/2021 pada tanggal 29 April 2021.

Sebagaimana diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Obligasi I REFI Tahun 2022 ("**Prospektus**"), yaitu seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

1. Melunasi Pokok Medium Term Notes MTN IV B Tahun 2019 sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur | |
| a) Pihak berelasi | : Rp163.200.000.000,- |
| b) Tidak berelasi | : Rp36.800.000.000,- |
| 2) Nilai MTN per tanggal 30/11/2021 | : Rp200.000.000.000,- |
| 3) Nilai MTN yang akan dibayarkan/dilunasi | : Rp200.000.000.000,- |
| 4) Nilai MTN Setelah Pembayaran | : Rp0,- |
| 5) Tingkat Kupon | : 10% p.a. |
| 6) Sumber Dana Pembayaran Kupon | : Internal Kas Perseroan |
| 7) Jatuh Tempo | : 27/02/2022 |
| 8) Tujuan Penggunaan Dana | |
| a) Pembiayaan KPR | : Rp70.000.000.000,- |
| b) Pembiayaan KPR Modal Kerja/Konstruksi | : Rp80.000.000.000,- |
| c) Pembiayaan UMKM | : Rp40.000.000.000,- |
| d) Pembiayaan Multiguna | : Rp10.000.000.000,-; dan |

Catatan:

Pihak berelasi yang memiliki MTN IV B Tahun 2019 yaitu PT Multi Artha Griya, PT Reliance Modal Ventura, PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk., PT Viva Medika, Anton Budidjaja, Bagus Abimanyu Lulu, Mulyati, Nathania Putri Budidjaja dan Peter Djuliar.

2. Sisanya, akan digunakan untuk peningkatan portofolio pembiayaan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib:

1. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi I REFI Tahun 2022 kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**");
2. memperoleh persetujuan dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO; dan
3. menyampaikan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK 30/2015**").

Obligasi I REFI Tahun 2022 ini telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Kredit Rating Indonesia ("**KRI**") dengan peringkat "**irBBB**" (*Triple B*) sebagaimana termaktub dalam Surat KRI No. RC-011/KRI-DIR/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana telah ditegaskan kembali sebagaimana termaktub dalam Surat No. RTG-002/KRI-DIR/II/2012 tanggal 18 Januari 2022 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi I REFI Tahun 2022 (Seri A, Seri B dan Seri C).

Penawaran Umum Obligasi I REFI Tahun 2022 akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk., selaku penjamin pelaksana emisi obligasi dan selaku penjamin emisi obligasi yang menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) (selanjutnya disebut sebagai "**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**" dan "**Penjamin Emisi Obligasi**") sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I REFI Tahun 2021 No. 13 tanggal 13 Oktober 2021 *juncto* Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I REFI Tahun 2021 No. 34 tanggal 15 November 2021 *juncto* Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I REFI Tahun 2021 No. 05 tanggal 8 Desember 2021 *juncto* Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I REFI Tahun 2021 No. 16 tanggal 12 Januari 2022 *juncto* Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi I REFI Tahun 2021 No. 61 tanggal 26 Januari 2022 dan sebagaimana yang telah diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi No. 66 tanggal 31 Januari 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Penjaminan Emisi**").

Wali amanat yang ditunjuk untuk Obligasi I REFI Tahun 2022 ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk (selanjutnya disebut "**Wali Amanat**") berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I REFI Tahun 2021 No. 12 tanggal 13 Oktober 2021 *juncto* Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I REFI Tahun 2021 No. 33 tanggal 15 November 2021 *juncto* Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I REFI Tahun 2021 No. 04 tanggal 8 Desember 2021 *juncto* Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I REFI Tahun 2021 No. 14 tanggal 12 Januari 2022 *juncto* Akta Addendum IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I REFI Tahun 2021 No. 59 tanggal 26 Januari 2022 dan sebagaimana yang telah diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan No. 64 tanggal 31 Januari 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Dalam hal ini, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, yaitu karena adanya hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama yaitu Anton Budidjaja, sedangkan Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan

Perseroan.

Obligasi I REFI Tahun 2022 ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dan pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-09038/BEI.PP1/11-2021 tanggal 30 November 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.

Sehubungan dengan Obligasi I REFI Tahun 2022, kami menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Perseroan No. 036/UPRI/DIR/IV/21 tanggal 13 April 2021 perihal Penunjukan Konsultan Hukum. Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar ("**STTD**") Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh OJK atas nama Jennifer Berendina Tumbuan, S.H., LL.M., STTD No. STTD.KH-28/PM.22/2018 tanggal 14 Maret 2018, Anggota HKHPM No. 200211.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum Obligasi I REFI Tahun 2022 ini adalah untuk memeriksa aspek hukum Perseroan dan menerbitkan pendapat dari segi hukum atas Perseroan dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM ("**Pendapat Hukum**").

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan atas dokumen-dokumen Perseroan sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 ("**LPSH**") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada UUPM dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Pendapat Hukum ini mencabut dan menggantikan Pendapat Hukum yang telah kami terbitkan sebelumnya yaitu Pendapat Hukum No. 026/T&P/I/22 tanggal 26 Januari 2022 dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu-satunya Pendapat Hukum yang berlaku.

I. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami;
2. semua informasi, data atau dokumen sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus maupun laporan pemeriksaan dari segi hukum dan Pendapat Hukum yang

telah dibuat dalam rangka Obligasi I REFI Tahun 2022 ini adalah benar dan kami tidak mempunyai alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;

3. semua pernyataan dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota dewan komisaris dan direksi, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;
4. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sama dengan aslinya;
5. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
6. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar; dan
7. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

II. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan sehubungan dengan Obligasi I REFI Tahun 2022 ini sebagai berikut:

1. Perseroan yang bernama PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia ("**Perseroan**") yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama "PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation", adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas "PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation No. 38 tanggal 12 Mei 1989, yang dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.7473.HT.01.01-Th'89 tanggal 15 Agustus 1989 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1130/1989 tanggal 22 Agustus 1989.
2. Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 28 tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Dra. Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Keputusannya No. AHU-0056263.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0349739 tanggal 14 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0134301.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14

Agustus 2020, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (“**BNRI**”) No. 063 dan Tambahan BNRI No. 025054 tanggal 6 Agustus 2021, yaitu mengenai perubahan beberapa ketentuan dan pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan (“**Akta No. 28/2020**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia Sebagai Pengganti Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 20 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Dra. Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusannya No. AHU-0005054.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 21 Januari 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0046428 tanggal 21 Januari 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0014182.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 21 Januari 2022, yaitu mengenai perubahan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan (“**Akta No. 18/2022**”).

Anggaran dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk UUPT serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang serta diumumkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk telah memperoleh bukti pengumuman Tambahan BNRI (“**TBNRI**”), kecuali atas:

- a. Akta No. 17 tanggal 15 Oktober 2021, dibuat di hadapan Dra. Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan
- b. Akta No. 18/2022,
yang belum diumumkan dalam TBNRI.

Selama pengumuman dalam TBNRI mengenai perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang selain mereka yang tersebut di atas, semisal kreditur bank yang memberikan pinjaman kepada Perseroan.

Oleh karena itu, apabila perubahan anggaran dasar yang mengatur perlunya persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan hukum tertentu (semula tidak ada), dan pembatasan tersebut tidak diberitahukan oleh Direksi kepada kreditur bank, maka kreditur bank harus dianggap sebagai pihak yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) UUPT, karena tidak dapat mengetahui perubahan anggaran dasar yang belum diumumkan dalam TBNRI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI mengenai akta pendirian perseroan terbatas dan setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan.

Anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28/2020 *juncto* Akta No. 18/2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UUPT dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”).

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah serta telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 56 tanggal 19 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Dr. Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0303830 tanggal 26 Juli 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0120456.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 063 dan TBNRI No. 025056 tanggal 6 Agustus 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000,-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Reliance Capital Management	113.000	113.000.000.000,-	84,97
2. PT Asuransi Reliance Indonesia	20.000	20.000.000.000,-	15,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	133.000	133.000.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	267.000	267.000.000.000,-	-

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan klarifikasi dari Perseroan dan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan oleh Perseroan, Perseroan belum memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT mengenai cadangan yang diwajibkan, dimana Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan penyisihan untuk cadangan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, yang mana penyisihan laba bersih tersebut dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, dan dalam hal cadangan tersebut belum mencapai jumlah tersebut di atas maka hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Namun demikian, sebagaimana perkembangan yang ada, Perseroan berkomitmen untuk berupaya memenuhi kewajiban tersebut selambat-lambatnya pada akhir tahun buku periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang akan diputuskan dan dilaksanakan pada RUPS Tahunan pada tahun 2022 ini.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, pihak pengendali langsung dalam Perseroan adalah Anton Budidjaja, selaku pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (d), l, (f) dan (g) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yaitu:

- memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau

iv. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Perseroan telah melakukan pelaporan atas Pemilik Manfaat Perseroan sebagaimana telah diuraikan di atas pada tanggal 21 Juli 2021 kepada Menkumham.

4. Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu berusaha dalam bidang pembiayaan baik konvensional dan syariah.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana diuraikan di atas, telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

5. Masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia No. 23 tanggal 16 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Dra. RR. Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03.0384497 tanggal 18 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0107706.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 18 Juni 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Iman Pribadi
Direktur	:	Fajar Satritama
Direktur	:	Ira Rakhmawati

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Anton Budidjaja
Komisaris Independen	:	Drs. Braman Setyo MSI

telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan telah diberitahukan serta diterima dan dicatat dalam *database* SABH serta telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan diperkuat dengan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (i) tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di muka pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Obligasi I REFI Tahun 2022.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014.

Selanjutnya seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Penjaminan ("**POJK 4/2013**") *junctis* Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("**POJK 34/2018**") dan Peraturan OJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas POJK 34/2018.

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi melalui Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi melalui Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 019/BOC-REFI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi Dan Remunerasi.

Pembentukan serta pengangkatan anggota Komite Audit Perseroan telah sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**") dan POJK 33/2014 yang mana persyaratan susunan komite audit telah dipenuhi oleh Perseroan yang susunannya paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) pihak luar dari Perseroan, yaitu sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 010/BOC-REFI/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Pembentukan Komite Audit.

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 35/2014**") dan telah menyesuaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai ketentuan dalam POJK 35/2014.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mempunyai Unit Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 007/BOC-REFI/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) 2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang telah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko Perseroan sebagaimana Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 009/BOC-REFI/X/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Jasa Keuangan Non-Bank ("**POJK 44/2020**").

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan syariahnya telah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang diangkat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan telah membentuk Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan Usaha Syariah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.

10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.

Selanjutnya Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan POJK 44/2020 dan Surat Edaran OJK No. 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, serta telah memiliki Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan POJK 44/2020.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh Perseroan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari Perseroan, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan izin-izin material tersebut masih berlaku serta telah memenuhi kewajiban-kewajiban pelaporan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin-izin material terkait.

Selain itu, Perseroan juga telah terdaftar sebagai anggota pada asosiasi-asosiasi terkait dengan kegiatan usahanya, salah satunya pada Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan keanggotaannya masih berlaku hingga saat ini, kecuali atas keanggotaan Perseroan pada PT Rapi Utama Indonesia (RAPINDO) yang saat ini masih dalam proses pendaftaran kembali keanggotaannya.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha serta telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha untuk 3 (tiga) bulan terakhir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan Perseroan dan didukung dengan surat pernyataan dari Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku dan Perseroan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawannya. Perseroan telah mendaftarkan tenaga kerjanya pada instansi ketenagakerjaan yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan ("UU WLK"). Perseroan juga telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan sampai tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan masih berlaku.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan berdasarkan sertifikat hak guna bangunan setelah diteliti bukti kepemilikannya adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan telah diperoleh sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Aset/harta kekayaan material Perseroan tersebut telah diasuransikan dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, polis asuransi aset/harta kekayaan

material tersebut masih berlaku serta jumlah pertanggungan asuransi atas aset/harta kekayaan material Perseroan tersebut telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan menguasai aset/harta kekayaan yang berasal dari Agunan Yang Diambil Alih (dikuasai) ("AYDA"). Penguasaan AYDA oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan AYDA.

Selanjutnya, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan tidak sedang dijamin untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga dan aset/harta kekayaan material Perseroan tersebut tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

9. Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan Perseroan, perjanjian-perjanjian penting yang telah ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan pihak lain tidak memuat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang sekiranya dapat menghalangi pelaksanaan Obligasi I REFI Tahun 2022 termasuk penggunaan dananya dan/atau merugikan kepentingan pemegang obligasi Perseroan.

Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban Perseroan selaku debitur (*affirmative covenants* dan/atau *negative covenants*) berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit yang diadakan oleh Perseroan dengan pihak bank, yang dapat membatasi Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi I REFI Tahun 2022, Perseroan:

- telah mengajukan permohonan persetujuan kepada PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") sehubungan dengan rencana Obligasi I REFI Tahun 2022, sebagaimana kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf (a) dari Akta Perjanjian Kredit No. 69 tanggal 30 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang berbunyi bahwa "Selama Perseroan belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BCA, Perseroan tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain". Atas hal tersebut Perseroan telah menyampaikan Surat No. 050/UPRI/DIR/IV/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Penerbitan Obligasi I REFI Tahun 2021 (yang saat ini telah berubah nama menjadi Obligasi I REFI Tahun 2022), dan surat elektronik (*e-mail*) Perseroan tertanggal 5 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Penerbitan Obligasi I REFI Tahun 2021 (yang saat ini telah berubah nama menjadi Obligasi I REFI Tahun 2022), Perseroan telah mengajukan surat permohonan untuk persetujuan kepada BCA sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi I REFI Tahun 2022.

Selanjutnya, melalui surat elektronik (*e-mail*) tertanggal 13 Oktober 2021, BCA menyatakan bahwa atas rencana Obligasi I REFI Tahun 2021 (yang saat ini telah berubah nama menjadi Obligasi I REFI Tahun 2022) ini kewajiban Perseroan hanya cukup untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada BCA.

Bahwa selama berlangsungnya perjanjian kredit dan dengan adanya penerbitan Obligasi I REFI Tahun 2022 ini, Perseroan tidak melanggar pembatasan rasio keuangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit yang dimiliki Perseroan.

- akan menyampaikan informasi/pemberitahuan kepada Pemegang MTN secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja setelah Perseroan melakukan penerbitan surat utang (Obligasi I REFI Tahun 2022) kepada pihak ketiga dan/atau sejak Perseroan menerima pinjaman, sebagaimana ketentuan Pasal 6.8 huruf (i) dan (j) Perjanjian Penjaminan Penerbitan Medium Term Notes UPRi No. 21A/REFI/MTN/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
10. Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penawaran umum Obligasi I REFI Tahun 2022, yaitu:
- Perjanjian Penjaminan Emisi;
 - Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Akta Pengakuan Utang Obligasi I REFI Tahun 2021 No. 15 tanggal 26 Januari 2022 sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Pengakuan Utang Obligasi I REFI Tahun 2022 No. 65 tanggal 31 Januari 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh Perseroan untuk pengakuan utang dalam Obligasi I REFI tahun 2022;
 - Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 62 tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan KSEI, dimana KSEI bertindak sebagai Agen Pembayaran atas utang pokok dan bunga Obligasi; dan
 - Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Di KSEI No. SP-008/OBL/KSEI/0122 tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan KSEI,
- telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
11. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, penerbitan Obligasi I REFI Tahun 2022 memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan oleh karena itu Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris No. 001/BOC/REFI/I/2022 tanggal 18 Januari 2022.
12. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap Perseroan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan No. 007/BOD-REFI/I/2022 tanggal 18 Januari 2022, sampai dengan tanggal ditandatanganinya surat pernyataan tersebut:
- a. Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan

- pengadila/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan, kecuali atas perkara perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang melibatkan Perseroan sebagai pihak Turut Tergugat, perkara mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 325/Pdt.9/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 16 April 2021 ("**Perkara PMH**") dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perkara tersebut masih dalam proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Atas Perkara PMH, Perseroan menyatakan bahwa tidak memiliki dampak negatif dan/atau material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Obligasi I REFI;
- b. Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun.

Berdasarkan uraian dan pernyataan Perseroan di atas, perkara PMH tersebut tidak memiliki dampak negatif ataupun material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Obligasi I REFI Tahun 2022 serta terhadap penggunaan dana dari Penawaran Umum Obligasi I REFI Tahun 2022.

13. Obligasi I REFI Tahun 2022 dijamin dengan jaminan berupa piutang dan penjaminan perusahaan (*corporate guarantee*), yaitu dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Piutang atau hak tagih milik Perseroan yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan, piutang mana belum jatuh tempo dan dengan kriteria status lancar serta usia penagihannya tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo masing-masing piutang sebagaimana yang tercantum dalam daftar piutang/berita acara dan/atau dokumentasi lain yang memuat nilai tagih dan kewajiban pembayaran oleh pengguna jasa kepada Perseroan, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - nilai yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia atas Piutang yang ditandatangani pada Tanggal Emisi adalah sekurang-kurangnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi; dan
 - dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, Perseroan wajib menambah Piutang hingga nilainya menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, perubahan mana akan disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam akta perubahan (addendum) jaminan fidusia atas Piutang.
 - (b) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh PT Reliance Capital Management, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - nilai yang harus dimuat dalam akta jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang ditandatangani pada Tanggal Emisi, adalah sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi; dan
 - setelah nilai Jaminan Piutang milik Perseroan telah mencapai nilai sekurang-

kurangnya sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi yang harus terpenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah Tanggal Emisi, maka nilai penjaminan perusahaan (*corporate guarantee*) akan diubah atau diturunkan nilainya menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, perubahan mana akan disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam akta perubahan (addendum) perjanjian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

Perseroan dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk senantiasa mempertahankan pada setiap saat jumlah nilai seluruh Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan berkewajiban untuk menambah dalam bentuk uang tunai jika nilai jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan tersebut kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi I REFI Tahun 2022 dan penjaminan yang diberikan oleh Perseroan yang nilainya tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan *audited* yang berakhir pada 31 Juli 2021, sehingga oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan yang membutuhkan persetujuan dari RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) UUP. Namun demikian berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal Perseroan menjaminkan kekayaan Perseroan maka harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, dimana dalam hal ini Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris No. 001/BOC/REFI/II/2022 tanggal 18 Januari 2022.

Sehubungan dengan jaminan berupa penjaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagaimana diuraikan di atas belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) UUP oleh karena nilai jaminan yang diberikan tidak mencapai 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT Reliance Capital Management selaku pemberi jaminan, namun demikian berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PT Reliance Capital Management pemberian jaminan tersebut membutuhkan persetujuan dari Dewan Komisaris, dan persetujuan tersebut telah diperoleh dari Dewan Komisaris PT Reliance Capital Management sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Reliance Capital Management Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris No. Ref. 002/RCM-BOC/X/2021 tanggal 2 Desember 2021.

Lebih lanjut, PT Reliance Capital Management selaku pemberi jaminan perusahaan dalam rangka Obligasi I REFI Tahun 2022 dan juga sebagai pemegang saham Perseroan tidak akan menerima suatu keuntungan dalam bentuk apapun dalam kapasitasnya sebagai pemberi jaminan perusahaan, namun akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pemberi jaminan perusahaan sebagaimana diatur dalam perjanjian penjaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang akan ditandatangani kemudian oleh PT Reliance Capital Management dan Perseroan.

14. Pada tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, rencana penggunaan dana Obligasi I REFI Tahun 2022 adalah sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Prospektus, yaitu seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

1. Melunasi Pokok Medium Term Notes MTN IV B Tahun 2019 sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur
 - a) Pihak berelasi : Rp163.200.000.000,-
 - b) Tidak berelasi : Rp36.800.000.000,-
- 2) Nilai MTN per tanggal 30/11/2021 : Rp200.000.000.000,-
- 3) Nilai MTN yang akan dibayarkan/dilunasi : Rp200.000.000.000,-
- 4) Nilai MTN Setelah Pembayaran : Rp0,-
- 5) Tingkat Kupon : 10% p.a.
- 6) Sumber Dana Pembayaran Kupon : Internal Kas Perseroan
- 7) Jatuh Tempo : 27/02/2022
- 8) Tujuan Penggunaan Dana:
 - a) Pembiayaan KPR : Rp70.000.000.000,-
 - b) Pembiayaan KPR Modal Kerja/Konstruksi : Rp80.000.000.000,-
 - c) Pembiayaan UMKM : Rp40.000.000.000,-
 - d) Pembiayaan Multiguna : Rp10.000.000.000,-; dan

Catatan:

Pihak berelasi yang memiliki MTN IV B Tahun 2019 yaitu PT Multi Artha Griya, PT Reliance Modal Ventura, PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk., PT Viva Medika, Anton Budidjaja, Bagus Abimanyu Lulu, Mulyati, Nathania Putri Budidjaja dan Peter Djuliar.

2. Sisanya, akan digunakan untuk peningkatan portofolio pembiayaan.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan sebagaimana ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), yang mana akan dilaporkan untuk pertama kali pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek bersifat utang dan selanjutnya wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan setiap tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember. Lebih lanjut, apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan akan meminta persetujuan RUPO terlebih dahulu dan melaporkan hal tersebut kepada OJK dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 POJK No. 30/2015.

15. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan Wali Amanat serta Surat Pernyataan PT Kredit Rating Indonesia ("**KRI**"), Perseroan juga tidak mempunyai hubungan afiliasi dan hubungan kredit dengan Wali Amanat serta tidak terafiliasi dengan KRI sebagai perusahaan pemeringkat efek berkaitan dengan Obligasi I REFI Tahun 2022.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

16. Informasi yang disajikan dalam Prospektus sepanjang yang terkait dengan aspek hukum telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana diungkapkan dalam LPSH.

III. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam penawaran umum Obligasi I REFI Tahun 2022 yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak memaksa), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan penawaran umum Obligasi berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdara khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara; dan
2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan penawaran umum Obligasi I REFI Tahun 2022 tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

IV. PENUTUP

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Hormat kami,
TUMBUAN & PARTNERS



Jennifer B. Tumbuan
Senior Partner

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

XVI. LAPORAN KEUANGAN



PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA

**Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (reviu) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-
tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

***Financial Statements
With Independent Auditors' Report
For the Seven-month
Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019***

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
LAPORAN KEUANGAN
Beserta Laporan Auditor Independen
Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020 dan 2019

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
FINANCIAL STATEMENT
With Independent Auditor Report
For the Seven-month
Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019

Daftar Isi/ Table of Contents

	<u>Halaman/ Page</u>	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Board of Director's' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan.....	1 - 2	 <i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain.....	3	 <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	4 - 5	 <i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas.....	6	 <i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan.....	7 – 108	 <i>Notes to the Financial Statements</i>

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 JULI 2021 DAN 31 DESEMBER
2020 DAN 2019 DAN UNTUK PERIODE
TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 JULI 2021 DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA

DIRECTOR'S STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF JULY 31, 2021 AND DECEMBER 31,
2020, AND 2019 AND FOR THE SEVEN-MONTH
PERIOD ENDED JULY 31, 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020, AND 2019

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Iman Pribadi	:	Name
Alamat Kantor	:	Soho Westpoint Kota Kedoya Jln. Macan, Kav 4-5 Kedoya Utara, Kebon Jeruk Jakarta Barat 11510, Indonesia	:	Office Address
Alamat Rumah	:	Pangadengan Utara IV- A/21 Pancoran, Jakarta	:	Residential Address
Telepon	:	(021) 21192288	:	Telephone
Jabatan	:	Direktur Utama	:	Position

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|---|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia; | 1. We are responsible for the preparation and presentation of financial statements of PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia; |
| 2. Laporan keuangan PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The financial statements of PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia have been prepared and presented in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information in the financial statements of PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia have been disclosed in a complete and truthful manner; |
| b. Laporan keuangan PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The financial statements of PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact; |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia. | 4. We are responsible for the internal control system of PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on behalf of the Board of Directors:



Iman Pribadi
(Direktur Utama/President Director)
6 Oktober 2021 / October 6, 2021

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report
Per 31 Juli 2021 / *July 31, 2021***

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00825/2.0459/AU.1/09/1482-1/1/X/2021

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tersebut dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Independent Auditor's Report

Report No. 00825/2.0459/AU.1/09/1482-1/1/X/2021

**The Shareholders, Boards of Commissioners and
Directors
PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia**

We have audited the accompanying financial statements of PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia (the "Company"), which comprise of statement of financial position as of July 31, 2021 and December 31, 2020 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the seven-month period ended July 31, 2021 and for the year ended December 31, 2020, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for The Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determine is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards of Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatements.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amount and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatements of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessment, the auditor consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstance, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of entity's internal control. An audit also includes evaluating of appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.



Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia di Bursa Efek Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 40 atas laporan keuangan terlampir, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00225/2.0459/AU.1/09/1482-1/1/IV/2021 tanggal 16 April 2021 dan No. 00687/2.0459/AU.1/09/1482-1/1/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Seperti yang diungkapkan dalam Catatan 40 atas laporan keuangan, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum efek utang, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut di atas dengan beberapa tambahan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan dan penambahan laba per saham dasar pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Laporan keuangan PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 19 Mei 2020.

Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, kami juga mengaudit tambahan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana yang dijelaskan pada Catatan 41 atas laporan keuangan terlampir yang diterapkan untuk mengungkapkan dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum efek utang. Menurut opini kami, tambahan pengungkapan tersebut adalah wajar dan telah diterapkan dengan semestinya.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia as of July 31, 2021 and December 31, 2020, and its financial performance and cash flows for the seven-month period ended July 31, 2021, and for the year ended December 31, 2020, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed public offering of the debt securities of PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia on Indonesia Stock Exchange, as discussed in Note 40 to the accompanying financial statements, and is not intended to be and should not be used for any other purpose.

We have previously issued Independent Auditors' Report No. 00225/2.0459/AU.1/09/1482-1/1/IV/2021 dated April 16, 2021 and No. 00687/2.0459/AU.1/09/1482-1/1/VII/2021 dated July 28, 2021 on the financial statements of the Company as of December 31, 2020, and for the year then ended. As disclosed in Note 40 to the financial statements, in relation to the Company's plan to propose public offering of the debt securities, the Company reissued the above-mentioned financial statements with additional disclosures in the notes to the financial statements and additional of earnings per share in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The financial statements of PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia as of December 31, 2019 and for the year then ended were audited by other independent auditors' who expressed an unmodified opinion on those statements on May 19, 2020.

As part of our audit of the Company's financial statements as of December 31, 2020 and for the year then ended, we also audited additional disclosures in the notes to the financial statements as described in Note 41 to the accompanying financial statements that apply to the disclosures in the financial statements as of December 31, 2019 and for the year then ended in connection with the Company's plan to conduct a public offering of debt securities. In our opinion, these additional disclosures are appropriate and have been properly implemented.



HELIANTONO & REKAN

Parker Randall International

Registered Public Accountants

Namun kami tidak melakukan perikatan untuk melaksanakan audit, reviu, atau menerapkan prosedur apapun atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut selain yang berkaitan dengan tambahan pengungkapan tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini maupun bentuk keyakinan lain atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut secara keseluruhan.

However, we have not engaged to perform an audit, review, or apply any procedures to the financial statements as of December 31, 2019 and for the year then ended other than those relating to the additional disclosures and, accordingly, we do not express an opinion or other form of assurance on the financial statements as of December 31, 2019 and for the year then ended as a whole.

Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountant
Heliantono & Rekan



HELIANTONO & REKAN

Parker Randall International

Registered Public Accountants

Yansyafrin, CPA

Izin Akuntan Publik No. AP.1482 / Public Accountant License No. AP. 1482

6 Oktober 2021 / October 6, 2021

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim /
Report on Review of Interim Financial Information
Per 31 Juli 2020 / *July 31, 2020*



Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim

Laporan No. 00062/2.0459/RA/09/1482-1/1/X/2021

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia**

Kami telah mereviu informasi keuangan interim PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas interim untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar informasi keuangan interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas informasi keuangan interim ini berdasarkan reviu kami.

Ruang lingkup reviu

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" ("SPR2410"), yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Kesimpulan

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa informasi keuangan interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas interim PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Report on Review of Interim Financial Information

Report No. 00062/2.0459/RA/09/1482-1/1/X/2021

**The Shareholders, Boards of Commissioners and
Directors
PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia**

We have reviewed the accompanying interim financial information of PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia (the "Company"), which comprise the interim statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the seven-month period ended July 31, 2020, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Management is responsible for the preparation and fair presentation of this interim financial information in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on this interim financial information based on our review.

Scope of review

We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity" ("SRE2410"), established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently, does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Conclusion

Based on our review, nothing has come to our attention that cause us to believe that the accompanying interim financial information does not present fairly, in all material respects, the interim financial performance and cash flows of PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia for the seven-month period ended July 31, 2020, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia di Bursa Efek Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 40 atas laporan keuangan terlampir, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Other matter

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed public offering of the debt securities of PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia on Indonesia Stock Exchange, as discussed in Note 40 to the accompanying financial statements, and is not intended to be and should not be used for any other purpose.

Kantor Akuntan Publik / Registered Public Accountant
Heliantono & Rekan



HELIANTONO & REKAN
Parker Randall International
Registered Public Accountants

Yansyafrin, CPA

Izin Akuntan Publik No. AP.1482 / Public Accountant License No. AP. 1482

6 Oktober 2021 / October 6, 2021

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
AUDITED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of July 31, 2021 and
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020	2019	
ASET					ASSETS
Kas dan bank	4,28	7.437.094.502	1.366.472.701	9.095.178.837	Cash on hand and in banks
Piutang pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp343.542.804, Rp4.159.008.802 dan Rp19.622.596.604 pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	5,28	211.977.241.980	235.385.442.279	314.904.934.178	Financing receivables - net of allowance for impairment of Rp343,542,804, Rp4,159,008,802 and Rp19,622,596,604 as of July 31 2021, December 31, 2020 and 2019, respectively
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp289.521, Rp11.378.441 dan Rp13.932.458.699 pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	6	642.979.331	1.543.839.242	26.146.535.613	Finance lease receivables net of allowance for impairment of Rp289,521, Rp11,378,441 and Rp13,932,458,699 as of July 31 2021, December 31, 2020 and 2019, respectively
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp2.479.579.160, Rp3.893.501.731 dan Rp3.563.874.391 pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	7,28	78.889.882.941	76.153.728.119	42.067.246.514	Consumer financing receivables - net of allowance for impairment of Rp2,479,579,160, Rp3,893,501,731 and Rp3,563,874,391 as of July 31, 2021, December 31, 2020 and 2019, respectively
Piutang pembiayaan syariah - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp394.189.390, Rp733.518.418 dan Rp891.202.341 pada 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	8	84.897.292.403	51.422.962.937	73.080.026.944	Sharia financing receivables - net of allowance for impairment of Rp394,189,390, Rp733,518,418 and Rp891,202,341 as of July 31, 2021, December 31, 2020 and 2019, respectively
Piutang lain-lain					Other receivables
Pihak berelasi	9, 28	70.584.779.635	7.000.000.000	4.000.000.000	Related party
Pihak ketiga	9	35.127.275.528	21.737.853.812	2.280.270.598	Third parties
Biaya dibayar dimuka		2.291.324.130	223.796.463	223.585.908	Prepaid expense
Aset pajak tangguhan	27d	194.237.400	1.596.212.481	4.170.794.084	Deferred tax asset
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp2.213.492.532, Rp1.745.458.624 dan Rp1.388.060.497 pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019	10	2.442.607.638	2.945.364.206	620.727.377	Fixed Assets - net of accumulated depreciation of Rp2,213,492,532, Rp1,745,458,624 and Rp1,388,060,497 as of July 31, 2021, December 31, 2020 and 2019, respectively
Aset hak guna					Right of use assets
akumulasi penyusutan sebesar Rp799.227.000 dan Rp368.874.000 pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020	11	1.414.017.000	1.844.370.000	-	accumulated depreciation of Rp799,227,000 and Rp368,874,000 as of July 31, 2021 and December 31, 2020, respectively
Agunan yang diambil alih	12	20.116.958.903	38.834.337.700	3.820.939.354	Repossessed assets
Klaim lebih bayar pajak		3.752.108.270	3.129.814.713	-	Claim for tax refund
Aset lain-lain		284.000.000	284.000.000	153.472.500	Other assets
JUMLAH ASET		520.051.799.661	443.468.194.653	480.563.711.907	TOTAL ASSETS

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
AUDITED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of July 31, 2021 and
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Surat utang jangka menengah	13	249.514.685.654	181.533.639.195	235.035.313.737	Medium term notes
Utang pajak	27a	1.444.942.451	1.402.347.594	2.151.105.617	Taxes payable
Pinjaman yang diterima	14	28.893.138.261	28.571.512.931	37.434.499.513	Loans received
Beban akrual	15	3.382.948.718	2.558.552.746	1.246.275.568	Accrued expenses
Liabilitas lain-lain	16	28.394.390.929	28.496.340.944	15.146.219.808	Other liabilities
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	26	882.897.275	786.897.946	1.402.872.785	Long-term employee benefits liability
Jumlah Liabilitas		312.513.003.288	243.349.291.356	292.416.287.028	Total Liabilities
EKUITAS					EQUITY
Modal saham -					Capital stock -
nilai nominal Rp 1.000.000 per saham					Rp 1,000,000 par value per share
Modal dasar - 400.000 saham					Authorized - 400,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor - 133.000 saham	18	133.000.000.000	133.000.000.000	133.000.000.000	Issued and paid up - 133,000 shares
Tambahan modal disetor		30.000.000	30.000.000	30.000.000	Additional paid-in capital
Saldo laba		74.508.796.373	67.088.903.297	55.117.424.879	Retained earnings
Jumlah Ekuitas		207.538.796.373	200.118.903.297	188.147.424.879	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		520.051.799.661	443.468.194.653	480.563.711.907	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN AUDITAN
Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (reviu) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
AUDITED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Seven-month
Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Notes	31 Juli/July 31, 2020		31 Desember/December 31,		
		2021	(Reviu/Review)	2020	2019	
PENDAPATAN						REVENUE
Bunga						Interest
Pembiayaan	20	17.727.893.521	20.094.439.671	36.983.614.613	41.982.286.869	Financing
Sewa pembiayaan	21	115.219.169	1.306.123.298	1.742.302.861	6.137.167.823	Finance lease
Pembiayaan konsumen	22	5.693.464.140	6.205.395.431	5.569.578.304	5.857.239.672	Consumer financing
Marjin/bagi hasil	23	13.902.386.539	4.144.873.875	7.234.532.142	8.341.104.155	Margin/revenue sharing
Bank		10.005.151	77.429.943	81.412.945	276.605.301	Bank
Administrasi		491.371.511	416.632.742	1.144.840.133	1.741.128.399	Administrative
Denda		491.579	10.442.283	11.286.262	559.639.265	Penalty
Asuransi		19.609.205	116.997.504	139.091.287	79.127.840	Insurance
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - bersih		177.133.512	984.473.633	361.088.973	(1.479.966.565)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap	10	(56.526.037)	-	-	235.925.000	Gain (loss) on sales fixed assets
Lainnya		1.814.020.596	512.586.986	115.591.364	92.829.972	Others
Jumlah Pendapatan		39.895.068.886	33.869.395.366	53.383.338.884	63.823.087.731	Total Revenue
BEBAN						EXPENSES
Beban umum dan administrasi	25	10.364.408.405	10.422.480.047	17.714.960.689	14.522.406.589	General and administrative expenses
Beban pemasaran		80.676.868	37.240.464	51.358.264	33.482.260	Marketing expense
Penyisihan (pemulihan) penurunan nilai piutang	5,6,7,8	(5.489.632.459)	(29.376.696.639)	(43.197.696.605)	16.712.819.847	Provision for (recovery of) impairment losses on receivables
Penyisihan penurunan nilai agunan yang diambil alih		-	-	4.938.068.773	-	Provision for impairment of repossessed assets
Beban bunga dan keuangan	24	19.622.123.208	14.197.216.833	22.214.078.916	30.299.198.460	Interest expenses and financial charges
Beban lain-lain		5.679.240.016	14.901.089.146	22.565.565.866	62.621.366	Other expense
Jumlah Beban		30.256.816.038	10.181.329.851	24.286.335.903	61.630.528.522	Total Expenses
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		9.638.252.848	23.688.065.515	29.097.002.981	2.192.559.209	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Beban pajak penghasilan	27b	(2.211.688.906)	(6.236.202.100)	(7.453.074.844)	(570.719.176)	Income tax expense
LABA TAHUN BERJALAN/PERIODE		7.426.563.942	17.451.863.415	21.643.928.137	1.621.840.033	PROFIT FOR THE YEAR/PERIOD
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	26	(8.552.392)	401.493.855	688.275.181	(125.153.402)	Remeasurement of defined benefit liability
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi		1.881.526	(88.328.648)	(151.420.540)	31.288.351	Tax relating to item that will not be reclassified
Laba (rugi) komprehensif lain - setelah pajak		(6.670.866)	313.165.207	536.854.641	(93.865.051)	Other comprehensive income (loss) - net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN/PERIODE		7.419.893.076	17.765.028.622	22.180.782.778	1.527.974.982	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR/PERIOD
LABA PER SAHAM - DASAR						EARNINGS PER SHARE - BASIC
(dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)	19	55.839	131.217	162.736	12.194	(Expressed in full amount of Rupiah)

Lihat catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS AUDITAN
Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Juli 2021 dan 2020 (reviu) dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
AUDITED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review)
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<i>Catatan/ Notes</i>	<i>Modal Saham/ Capital Stock</i>	<i>Tambahan modal disetor/ Additional Paid-in Capital</i>	<i>Saldo Laba/ Retained Earnings</i>	<i>Jumlah Ekuitas/ Total Equity</i>	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019		100.000.000.000	30.000.000	53.589.449.897	153.619.449.897	Balance as of January 1, 2019
Laba tahun berjalan		-	-	1.621.840.033	1.621.840.033	Profit for the year
Penambahan modal disetor	18	33.000.000.000	-	-	33.000.000.000	Additional paid in capital
Rugi Komprehensif Lain Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	26	-	-	(93.865.051)	(93.865.051)	Other Comprehensive Loss Remeasurement of long-term employee benefits liability
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019		133.000.000.000	30.000.000	55.117.424.879	188.147.424.879	Balance as of December 31, 2019
Dampak penerapan awal PSAK 71 setelah pajak tangguhan	2b	-	-	(10.209.304.360)	(10.209.304.360)	Impact of initial implication of PSAK 71 net of deferred tax
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020		133.000.000.000	30.000.000	44.908.120.519	177.938.120.519	Balance as of January 1, 2020
Laba tahun berjalan		-	-	21.643.928.137	21.643.928.137	Profit for the year
Laba Komprehensif Lain Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	26	-	-	536.854.641	536.854.641	Other Comprehensive Income Remeasurement of long-term employee benefits liability
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		133.000.000.000	30.000.000	67.088.903.297	200.118.903.297	Balance as of December 31, 2020

Lihat catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS AUDITAN
Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Juli 2021 dan 2020 (reviu) dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
AUDITED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review)
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<i>Catatan/ Notes</i>	<i>Modal Saham/ Capital Stock</i>	<i>Tambahan modal disetor/ Additional Paid-in Capital</i>	<i>Saldo Laba/ Retained Earnings</i>	<i>Jumlah Ekuitas/ Total Equity</i>	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019		133.000.000.000	30.000.000	55.117.424.879	188.147.424.879	Balance as of December 31, 2019
Dampak penerapan awal PSAK 71 setelah pajak tangguhan	2b	-	-	(10.209.304.360)	(10.209.304.360)	Impact of initial implication of PSAK 71 net of deferred tax
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020		133.000.000.000	30.000.000	44.908.120.519	177.938.120.519	Balance as of January 1, 2020
Laba periode berjalan		-	-	17.451.863.415	17.451.863.415	Profit for the period
Laba Komprehensif Lain Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	26	-	-	313.165.207	313.165.207	Other Comprehensive Income Remeasurement of long-term employee benefits liability
Saldo pada tanggal 31 Juli 2020		133.000.000.000	30.000.000	62.673.149.141	195.703.149.142	Balance as of July 31, 2020
Saldo pada tanggal 1 Januari 2021		133.000.000.000	30.000.000	67.088.903.297	200.118.903.297	Balance as of January 1, 2021
Laba periode berjalan		-	-	7.426.563.942	7.426.563.942	Profit for the period
Rugi Komprehensif Lain Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang	26	-	-	(6.670.866)	(6.670.866)	Other Comprehensive Loss Remeasurement of long-term employee benefits liability
Saldo pada tanggal 31 Juli 2021		133.000.000.000	30.000.000	74.508.796.373	207.538.796.373	Balance as of July 31, 2021

Lihat catatan atas Laporan Keuangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the
Financial Statements which are an integral part of
the Financial Statements

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
LAPORAN ARUS KAS AUDITAN
Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir
pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (reviu) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
AUDITED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Seven-month
Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	31 Juli/July 31, 2020 (Reviu/Review)		31 Desember/December 31, 2020 2019		
	2021	(Reviu/Review)	2020	2019	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:					Cash received from:
Pembiayaan	55.018.540.639	177.308.382.891	203.864.407.833	317.192.807.180	Financing
Sewa pembiayaan	1.142.387.169	5.469.454.653	6.806.334.312	5.757.359.999	Finance leasee
Pembiayaan konsumen	13.840.489.610	15.821.838.303	35.030.136.558	11.598.805.466	Consumer financing
Syariah	21.905.966.268	44.993.888.741	50.722.473.854	8.341.104.155	Sharia
Administrasi	491.371.511	416.632.742	1.144.840.133	1.741.128.399	Administration
Jumlah penerimaan kas	92.398.755.197	244.010.197.330	297.568.192.690	344.631.205.199	Total cash received
Pengeluaran kas untuk:					Cash paid for:
Pembiayaan	(53.741.934.514)	(71.127.715.913)	(73.171.769.069)	(204.920.000.000)	Financing
Sewa pembiayaan	(115.219.169)	-	-	-	Finance leasee
Pembiayaan konsumen	(14.133.810.151)	(29.536.953.268)	(69.023.988.968)	(19.733.285.724)	Consumer financing
Syariah	(52.791.601.884)	(2.186.803.385)	(41.130.776.995)	(64.633.588.932)	Sharia
Pemasok dan karyawan	(9.665.221.039)	(6.552.954.262)	(11.133.897.234)	(12.063.993.067)	Suppliers and employees
Bunga dan keuangan	(19.588.896.870)	(14.197.216.833)	(22.148.421.180)	(30.148.007.232)	Interest and financial charges
Lain-lain	(2.114.398.761)	(11.479.657.169)	(8.693.124.634)	(1.506.889.401)	Others
Jumlah pengeluaran kas	(152.151.082.388)	(135.081.300.830)	(225.301.978.080)	(333.005.764.356)	Total cash paid
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) operasi	(59.752.327.191)	108.928.896.500	72.266.214.610	11.625.440.843	Net cash flows provided by (used in) operating
Pembayaran pajak penghasilan	(1.387.531.000)	(3.123.695.449)	(5.071.933.418)	(4.995.259.168)	Income tax paid
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(61.139.858.191)	105.805.201.051	67.194.281.192	6.630.181.675	Net Cash Flows Provided by (used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap	10 37.000.000	-	-	321.500.000	Proceed from sale of fixed assets
Perolehan aset tetap	10 (114.919.000)	(151.570.660)	(2.682.034.956)	(152.057.500)	Acquisitions of fixed assets
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(77.919.000)	(151.570.660)	(2.682.034.956)	169.442.500	Net Cash Flows Provided by (used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran surat utang jangka menengah	13, 35 (38.500.000.000)	(122.600.000.000)	(162.350.000.000)	(192.000.000.000)	Payment of medium term notes
Penerimaan dari penjualan surat utang jangka menengah	13, 35 105.500.000.000	23.500.000.000	107.500.000.000	183.750.000.000	Proceeds from issuance of medium term notes
Pembayaran biaya penerbitan surat utang jangka menengah	-	(2.490.000.000)	(2.490.000.000)	(2.820.000.000)	Payment of issued medium term notes
Pembayaran kepada pihak berelasi	-	(1.475.496.000)	(5.972.308.054)	(2.499.797.216)	Payment to related party
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	14, 35 9.440.508.099	5.151.841.949	7.953.412.515	23.141.261.367	Proceeds from loans
Pembayaran pinjaman yang diterima	14, 35 (9.152.109.107)	(15.576.296.520)	(16.882.056.833)	(25.137.421.944)	Payment of loans
Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	67.288.398.992	(113.489.950.571)	(72.240.952.372)	(15.565.957.793)	Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	6.070.621.801	(7.836.320.180)	(7.728.706.136)	(8.766.333.618)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN/PERIODE	4 1.366.472.701	9.095.178.837	9.095.178.837	17.861.512.455	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR/PERIOD
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN/PERIODE	4 7.437.094.502	1.258.858.657	1.366.472.701	9.095.178.837	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE YEAR/PERIOD

Lihat catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of the Financial Statements

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation berdasarkan akta No. 38 tanggal 12 Mei 1989 dari Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2.7473.HT.01.01-Th' 89 tanggal 15 Agustus 1989. Perusahaan beberapa kali melakukan perubahan nama dan terakhir kali berubah nama menjadi PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia berdasarkan Akta No.17 tanggal 25 September 2012 dari Aryani, S.H., M.Kn., notaris di Tangerang Selatan. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-53399.AH.01.02 tanggal 16 Oktober 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 62 tanggal 29 Desember 2020 dari Dra. RR. Hariyanti Poerbiantari, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0005181 tanggal 6 Januari 2021.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan utama Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, pembiayaan jasa dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perusahaan juga memperoleh izin pembukaan Unit Usaha Syariah dari Dewan Komisiner OJK Direktorat Industri Keuangan Non Bank Syariah dalam Surat Keputusan No. KEP87/NB.223/2017 tanggal 28 Juli 2017.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia (the Company) was established under name of PT Sebaru Sejahtera Finance Corporation based on Notarial Deed No. 38 dated May 12, 1989 of Miryam Magdalena Indrani Wiardi, S.H., notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic Indonesia in his Decision Letter No. C2.7473.HT.01.01-Th' 89 dated August 15, 1989. The Company's name has been amended several times, most recently changed its name to PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia by Deed No. 17 dated September 25, 2012 of Aryani S.H., M.Kn., notary in Tangerang Selatan. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-53399.AH.01.02 dated October 16, 2012.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No. 62 dated December 29, 2020 by Dra. RR. Hariyanti Poerbiantari, S.H., notary in Jakarta, regarding changes of Directors and Commissioners. This amendment deed was approved by the Ministry of Laws and Human Rights with Letter No. AHU-AH.01.03.0005181 dated January 6, 2021.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the Company is engaged in financing and sharia financing which is a Business Unit of Sharia, which include investment financing, working capital financing, multipurpose financing, service financing and other financing business activities based on approval from Financial Service Authority (OJK).

The Company also obtained license for opening Business Unit of Sharia from Board of OJK Director Industry Finance Non Bank Sharia in its Decision Letter No. KEP-87/NB.223/2017 dated July 28, 2017.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. U M U M (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor terletak di SOHO West Point Lt. 2, Jl. Macan, Kav 4-5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Reliance Capital Management. Pemegang saham akhir Perusahaan adalah Anton Budidjaja yang berdomisili di Indonesia.

b. Karyawan, Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing berdasarkan Akta No. 38 tanggal 16 Juni 2021 dari Dra. RR. Hariyanti Poerbiantari, S.H., notaris di Jakarta, Akta No. 62 tanggal 29 Desember 2020 dari Dra. RR Hariyanti Poerbiantari, S.H., notaris di jakarja dan Akta No. 44 tanggal 15 Oktober 2019 dari Dra. RR Hariyanti Poerbiantari, S.H., notaris di Jakarta, adalah Sebagai Berikut:

	<u>31 Juli 2021/ July 31, 2021</u>	<u>31 Des 2020/ Dec 31, 2020</u>	<u>31 Des 2019/ Dec 31, 2019</u>
<u>Dewan Komisaris</u>			
Komisaris			
Utama	Anton Budidjaja	Anton Budidjaja	Anton Budidjaja
Komisaris	Drs. Braman	Drs. Braman	
Independen	Setyo, MSI	Setyo, MSI *)	Lando Simatupang
<u>Dewan Direksi</u>			
Direktur Utama	Iman Pribadi	Iman Pribadi *)	Fajar Satritama
Direktur	Fajar Satritama	Fajar Satritama	Ira Rakhmawati
Direktur	Ira Rakhmawati	Ira Rakhmawati	Refky Saputra
Direktur		Wisna Aksi	-
		Budaya	

*) Telah efektif sejak diterimanya Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan terkait Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai Direktur dan Komisaris Perusahaan pada tanggal 29 Maret 2021.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The Company is domiciled in Jakarta with its office is located at SOHO West Point Fl. 2, Jl. Macan, Kav 4-5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk.

The Company operate under Reliance Capital Management group business. The ultimate parent of the Company is Anton Budidjaja who is domiciled In Indonesia.

b. Employees, Boards and Directors

As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and 2019, respectively, based on Deed No. 38 dated June 16, 2021 from Dra. RR. Hariyanti Poerbiantari, S.H., notary in Jakarta, Deed No. 62 dated December 29, 2020 from Dra. RR Hariyanti Poerbiantari, S.H., notary in Jakarta and Deed No. 44 dated October 15, 2019 from Dra. RR Hariyanti Poerbiantari, S.H., a notary in Jakarta, the Company's management consist of the following:

Board of Commissioners
President
Commissioner
Independent
Commissioner

Board of Directors
President Director
Director
Director
Director

*) It has been effective since the receipt of the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority regarding the results of the Fit and Proper Test as Directors and Commissioners of the Company on March 29, 2021.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M (lanjutan)

c. Dewan Pengawas Syariah

Pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 and 2019, Dewan Pengawas Syariah Perusahaan adalah M. Faisal Muchtar.

Pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 jumlah karyawan Perusahaan masing-masing sebanyak 47 karyawan, 40 karyawan dan 34 karyawan (tidak diaudit).

Laporan keuangan PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 6 Oktober 2021. Direksi Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and 2019 and For the Seven-month Periods Ended July 31, 2021 and 2020 (review) and For the Years Ended December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

c. Sharia Supervisory Board

As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and 2019, the Company's Sharia Supervisory Board is M. Faisal Muchtar.

As of July 31, 2021, December 31, 2020 and 2019, the Company had 47 employees, 40 employees and 34 employees, respectively (unaudited).

The financial statements of PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia for the seven-month periods end July 31, 2021 were completed and authorized for issuance on October 6, 2021 by the Company's Directors. Company's Directors are responsible for the preparation and presentation of the financial statements.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards "FAS", which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI), and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and regulations issued by Financial Service Authority (OJK).

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

**a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran
Laporan Keuangan (lanjutan)**

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan ("BAPEPAM-LK") No. VIII.G.7 yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
**NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS**
*As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

**a. Basis of Financial Statements
Preparation and Measurement
(continued)**

The financial statements have been also prepared and presented in accordance with Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK") rule No. VIII.G.7, Attachment to Decision of BAPEPAM-LK Chairman No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, on the "Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuers or Public Companies".

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the seven-month period ended July 31, 2021 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the years ended December 31, 2020.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Rupiah (Rupiah) which is also the functional currency of the Company.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Pengungkapan

Perusahaan telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2020, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Perusahaan, yaitu:

- a. PSAK No. 71 "Instrumen keuangan", mengatur klasifikasi dan pengukuran keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
- b. Amandemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan", fitur pembayaran di muka dengan kompensasi. Amandemen ini mengklarifikasikan bahwa aset keuangan melewati kriteria "semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang" terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menyebabkan pemutusan awal kontrak dan terlepas dari pihak mana membayar atau menerima kompensasi yang wajar untuk awal pemutusan kontrak.
- c. PSAK No. 73, "Sewa", menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan menyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 (dua) pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (1) sewa jangka pendek dan (2) sewa yang aset dasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

b. Changes In Accounting Policies And Disclosure

The Company has implemented accounting standards on January 1, 2020, which are considered relevant to the Company's financial statements, are as follows:

- a. SFAS No. 71 "Financial instruments", regulate the classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of the entity's contractual cash flows and business model; the expected credit loss method for impairment that results in information that is more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedges that better reflect the entity's risk management by introducing more general terms based on management's judgment.
- b. Amendments to SFAS No. 71, "Financial Instruments", features prepayment with negative compensation. The amendments clarify that financial assets pass the criterion of "solely payment of principal and interest on the principal amount owed" regardless of the event or circumstances that caused the initial termination of the contract and regardless of which party paid or received reasonable compensation for the initial termination of the contract
- c. SFAS No. 73, "Leases", establishes the principles for recognizing, measuring, presenting and disclosing leases by introducing a single accounting model which requires the recognition of right-of-use assets and lease liabilities. There are 2 (two) optional exceptions to the recognition of leased assets and liabilities, namely: (1) short-term leases and (2) leases with low underlying assets.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

**b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan
Pengungkapan (lanjutan)**

- d. PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" dan PSAK No. 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan": Definisi material Amandemen ini mengklarifikasi definisi material dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

Penerapan PSAK di atas, tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan, kecuali untuk penerapan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan sebagai berikut:

PSAK 71 : Instrumen Keuangan

Perusahaan telah mengadopsi PSAK No. 71: Instrumen Keuangan yang disahkan pada 26 Juli 2017 dan amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Pelunasan dengan Kompensasi Negatif yang disahkan pada 29 Desember 2017 dengan tanggal penerapan awal adalah 1 Januari 2020. PSAK No. 71 ini secara signifikan mengubah PSAK No. 55: Instrumen Keuangan – Pengakuan, terutama persyaratan terkait klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

**b. Changes In Accounting Policies And
Disclosure (continued)**

- d. SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements" and PSAK No. 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors": Definition of material of this amendment clarifies the definition of material with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and several related SFAS. Apart from that, it also provides clear guidance regarding the definition of material in the context of reducing excessive disclosure due to changes in material definition thresholds.

The application of SFAS above, did not cause significant changes to the financial reporting and disclosures in the financial statements, except for the application of SFAS No. 71: Financial Instruments as follows:

SFAS 71: Financial Instruments

The company has adopted SFAS No. 71: Financial Instruments ratified on July 26, 2017 and amendments to SFAS 71: Financial Instruments concerning Repayment Features with Negative Compensation which was ratified on December 29, 2017 with the initial application date being January 1, 2020. SFAS No. 71 this significantly changes SFAS No. 55: Financial Instruments – Recognition, particularly requirements relating to the classification and measurement of financial assets, impairment and hedge accounting.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Pengungkapan (lanjutan)

b. Changes In Accounting Policies And Disclosure (continued)

Ringkasan utama atas dampak adopsi PSAK 71 terhadap kebijakan akuntansi adalah sebagai berikut:

The main summary of the impact of the adoption of SFAS 71 on accounting policies are as following:

	Saldo Laba/ Retained Earnings	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	55.117.424.879	<i>Balance as of December 31, 2019</i>
Dampak penerapan awal PSAK 71 setelah pajak tangguhan	<u>(10.209.304.360)</u>	<i>Impact of initial implication of SFAS 71 net of deferred tax</i>
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020	<u>44.908.120.519</u>	<i>Balance as of January 1, 2020</i>

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Classification of financial assets and financial liabilities

PSAK No. 71 memperkenalkan pengaturan klasifikasi dan pengukuran aset keuangan berdasarkan karakteristik kontraktual arus kas dan bisnis model. Klasifikasi aset keuangan secara prinsip dapat dibagi menjadi 3, yaitu: diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi. PSAK No. 71 mengeliminasi klasifikasi berdasarkan PSAK No. 55 berikut: kredit yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. Dalam PSAK No. 71, kontrak utama pada melekat yang masuk dalam ruang lingkup PSAK No. 71 tidak dipisahkan dan dianalisis secara keseluruhan untuk menentukan klasifikasinya.

SFAS No. 71 introduced arrangements for the classification and measurement of financial assets based on the contractual characteristics of cash flows and business models. Classification of financial assets can be divided in principle into 3, namely: measured at fair value through profit or loss, fair value through other comprehensive income and amortized cost. SFAS No. 71 eliminated the classification under SFAS No. 55 following: loans and receivables, held to maturity and available for sale. In SFAS No. 71, the main contract in an embedded derivative that is included in the scope of SFAS No. 71 were not separated and analyzed as a whole to determine their classification.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

**b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan
Pengungkapan (lanjutan)**

Secara garis besar, PSAK No. 71 mempertahankan persyaratan PSAK No. 55 perihal klasifikasi liabilitas keuangan. Namun demikian, dalam PSAK No. 71 perubahan nilai wajar atas liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi pada umumnya disajikan sebagai berikut:

- Nilai yang berasal dari perubahan nilai wajar atas liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit disajikan dalam penghasilan komprehensif lain; dan
- Jumlah sisa yang berasal dari perubahan nilai wajar atas liabilitas keuangan disajikan dalam laba rugi.

Dalam PSAK No. 55, semua perubahan nilai wajar atas liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan dalam laba rugi.

Penurunan nilai aset keuangan

PSAK No. 71 memperkenalkan model kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss impairment model*) yang lebih melihat ke depan dalam mengukur kerugian penurunan nilai keuangan. Berbeda dengan PSAK 55 yang mengakui kerugian kredit pada saat peristiwa kerugian kredit terjadi, metode yang diperkenalkan PSAK 71 ini mensyaratkan setiap tanggal pelaporan Perusahaan menilai apakah risiko kredit atas keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal menggunakan informasi *forward-looking* yang wajar dan didukung.

Model kerugian kredit ekspektasian ini juga diterapkan pada komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan tertentu, serta tidak berlaku untuk ekuitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

**b. Changes In Accounting Policies And
Disclosure (continued)**

Broadly speaking, SFAS No. 71 maintains the requirements of SFAS No. 55 regarding the classification of financial liabilities. However, in SFAS No. 71 changes in fair value of financial liabilities designated at fair value through profit or loss are generally presented as follows:

- Value arising from changes in fair value of financial liabilities attributable to changes in credit risk are presented in other comprehensive income; and
- The remaining amount resulting from changes in fair value of financial liabilities is presented in profit or loss.

In SFAS No. 55, all changes in fair value of financial liabilities designated at fair value through profit or loss are presented in profit or loss.

Impairment of financial assets

SFAS No. 71 introduced an expected credit loss impairment model that is more forward looking in measuring impairment losses on financial instruments. In contrast to SFAS 55 which recognizes credit losses when a credit loss event occurs, the method introduced by SFAS 71 requires that at each reporting date, the Company assesses whether the credit risk on financial instruments has increased significantly since initial recognition using forward-looking information that is reasonable and supported.

This expected credit loss model also applies to certain loan commitments and financial guarantee contracts, and does not apply to equity instruments.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

**b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan
Pengungkapan (lanjutan)**

Transisi

Perubahan kebijakan akuntansi karena adopsi PSAK No. 71 telah diterapkan secara retrospektif, dengan pengecualian sebagai berikut:

- Periode komparatif tidak disajikan Kembali.

Selisih antara nilai tercatat aset keuangan sebagai dampak penerapan PSAK No. 71 diakui dalam saldo laba per 1 Januari 2020. Dengan demikian, periode tahun 2019 tidak mencerminkan persyaratan PSAK No. 71, sehingga tidak komparatif dengan periode tahun 2020.

- Penilaian berikut ini dibuat berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan awal (1 Januari 2020):
 - Penentuan model bisnis
 - Menetapkan suatu investasi dalam ekuitas yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan untuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
- Jika risiko kredit dari keuangan tersebut dinilai rendah, maka Perusahaan mengasumsikan bahwa risiko kredit atas aset keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak tanggal pengakuan awal.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
**NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS**
*As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

**b. Changes In Accounting Policies And
Disclosure (continued)**

Transition

Changes in accounting policies due to the adoption of SFAS No. 71 has been applied retrospectively, with the following exceptions:

- *The comparative period is not restated.*

The difference between the carrying value of financial assets as a result of the application of SFAS No. 71 are recognized in retained earnings as of January 1, 2020. Therefore, the 2019 period does not reflect the requirements of SFAS No. 71, so it is not comparative with the 2020 period.

- *The following judgments are made based on facts and circumstances that existed at the date of initial application (January 1, 2020):*
 - *Determination of the business model*
 - *Determine an investment in an equity instrument that is held not for trading to be measured at fair value through other comprehensive income.*
- *If the credit risk of the financial instrument is assessed as low, the Company assumes that the credit risk on the financial asset has not increased significantly since the date of initial recognition.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Pengungkapan (lanjutan)

Transisi (lanjutan)

Berikut adalah ikhtisar PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) – IAI yang relevan untuk PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia, Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021:

- a. PSAK No. 22 (Amandemen 2019), "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis", Amandemen ini yang diadopsi dari Amandemen IFRS 3 Business Combinations: Definition of Business merupakan hasil dari joint project antara International Accounting Standards Board (IASB) dan US Financial Accounting Standards Board (FASB). Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset.

Perusahaan sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan.

c. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

b. Changes In Accounting Policies And Disclosure (continued)

Transition (continued)

The following is a summary of the SFAS and ISAK issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB) and the Sharia Accounting Standard Board (FASB) – IAI that are relevant for PT Usaha Pembiayaan RelianceIndonesia, Effective valid on or after January 1, 2021:

- a. SFAS No. 22 (Amendment 2019), "Business Combinations about Business Definitions", This amendment adopted from the IFRS Amendment 3 Business Combinations: Definition of Business is the result of a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the US Financial Accounting Standards Board (FASB). This amendment clarifies the definition of a business with the aim of assisting the entity in determining whether a transaction should be accounted for as a business combination or an asset acquisition.

The Company is currently evaluating and has not yet determined the impact of these standards and interpretations on the financial statements.

c. Foreign Currency Translation

Functional and Reporting Currencies

Items included in the Company's financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency).

The financial statements are presented in Rupiah which is the Company's functional and presentation currency.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

c. Penjabaran Mata Uang Asing (lanjutan)

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi. Kecuali jika ditangguhkan dalam ekuitas sebagai arus kas yang memenuhi syarat atau lindung nilai investasi bersih. Aset non-moneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun non-moneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia, yang digunakan oleh Perusahaan adalah masing-masing sebesar Rp14.491, Rp14.105 dan Rp13.901 per US\$ 1.

d. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Orang atau entitas dikategorikan sebagai pihak berelasi Perusahaan apabila memenuhi definisi pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Semua transaksi signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

c. Foreign Currency Translation (continued)

Transactions and Balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss, except when deferred in equity as qualifying cash flow or net investment hedges. Nonmonetary assets that are measured at fair value are translated using the exchange rate at the date that the fair value was determined. Translation differences on equities and similar non-monetary items measured at fair value are recognized in profit or loss.

As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and 2019, the conversion rates used by the Company were the middle rates of Bank Indonesia had Rp14.491, Rp14.105 and Rp13,901 per US\$ 1, respectively.

d. Transaction With Related Parties

A person or entity is considered a related party of the Company if it meets the definition of a related party in SFAS No. 7 "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the financial statements.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan

Aset keuangan

Klasifikasi

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan sebagian keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas keuangan dan akuntansi lindung nilai. Perusahaan mengklasifikasikan keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi dan pengukuran keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual – apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Manajemen menentukan klasifikasi keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

e. Financial Instruments

Financial assets

Classification

Since from January 1, 2020, the Company has applied PSAK 71, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting. The Company classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
- Financial assets measured at amortized cost.

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows – whether from solely payment of principal and interest. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial application.

Initial recognition and measurement

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- Financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flow; and;
- The contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Perusahaan dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur sebagai yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok sebagian keuangan dikelola sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Initial recognition and measurement
(continued)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- Financial assets are managed in a business model that aims to obtain contractual cash flow and sell financial assets; and
- The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

At initial recognition, the Company can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if the determination eliminates or significantly reduces the measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

Valuation of business models

The business model is defined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve specific business objectives.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Perusahaan;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi;
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran setelah pengukuran awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Valuation of business models (continued)

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following:

- How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Company's key management personnel;
- What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and;
- How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

Financial liabilities

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- Financial liabilities at amortized cost;
- Financial liabilities at Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL) or Other Comprehensive Income (FVOCI).

Subsequent measurement

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengukuran awal
(lanjutan)

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha, piutang lain-lain, investasi bersih dalam sewa pembiayaan dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

e. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Impairment of financial asset

At each reporting date, the Company assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Company compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Company applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables, other receivables, net investment in finance lease and contract assets without significant financing component.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan disalinghapuskan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

f. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Ketika Perusahaan menggunakan teknik penilaian, maka Perusahaan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

e. Financial Instruments (continued)

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

f. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *in the principal market for the asset or liability or;*
- *in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The Company must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

When the Company uses valuation techniques, it maximizes the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

f. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 – harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 – teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Perusahaan menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian level nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan.

g. Piutang Pembiayaan

Piutang pembiayaan terdiri dari piutang pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.

Piutang pembiayaan dikategorikan sebagai pinjaman diberikan dan piutang dinyatakan pada biaya perolehan diamortisasi dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan modal kerja yang dibayarkan langsung oleh perusahaan pembiayaan kepada penyedia barang dan/atau jasa dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

f. Fair Value Measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- *Level 1 – quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 – valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;*
- *Level 3 – valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by reassessing categorization at the end of each reporting period.

g. Financing Receivables

Financing receivables consist of working capital financing receivables and investment financing receivables.

Financing receivables is categorized as loans and receivables are stated at amortized cost less allowance for any impairment losses.

Working capital financing receivables are working capital financing, which directly paid by financing company to supplier goods and/or services over maximum period of 2 (two) years.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

g. Piutang Pembiayaan (lanjutan)

Piutang pembiayaan dihapusbukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan pada saat manajemen berpendapat bahwa konsumen tersebut harus dihapuskan karena secara operasional konsumen sudah tidak mampu membayar atau sulit untuk ditagih.

h. Sewa

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020. Perusahaan telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui dampak kumulatif dari awal penerapan PSAK 73.

Dengan demikian, informasi komparatif yang disajikan untuk tahun 2019 tidak disajikan kembali sebagaimana dilaporkan sebelumnya, pada PSAK 30 dan interpretasi terkait. Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non-sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri. Namun, untuk sewa real estat di mana Perusahaan merupakan penyewa, ia telah memilih untuk tidak memisahkan komponen sewa dan non-sewa dan sebagai gantinya memperhitungkannya sebagai komponen sewa tunggal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

g. Financing Receivables (continued)

Financing receivable are written off through allowance for impairment losses when management believes that the accounts should be written off because the consumers are unable to pay or difficult to be collected.

h. Lease

From January 1, 2020, the Company has applied SFAS 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'. This policy is applied to contracts entered into or changed, on or after January 1, 2020. The Company has adopted this SFAS 73 uses a modified retrospective approach that recognizes impacts cumulative from the beginning of the application of SFAS 73.

Accordingly, comparative information is presented for 2019 not restated as previously reported, in SFAS 30 and related interpretations. Determination whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

Contracts may contain both lease and non-lease components based on their relative stand-alone prices. However, for leases of real estate for which the Company is a lessee, it has elected not to separate lease and non-lease components and instead accounts for these as a single lease component.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

h. Sewa (lanjutan)

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apa pun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Perusahaan. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode. Aset hak pakai didepresiasi selama periode yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa sewa dengan metode garis lurus.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa
- Pembayaran sewa yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai.
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu
- Harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- Pembayaran untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
**NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS**
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

h. Lease (continued)

Lease terms are negotiated on an individual bases and contain a wide range of different terms and conditions. The lease agreements do not impose any covenants other than the security for borrowing purposes.

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date at which the leased asset is available for use by the Company. Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period. The right-of-use asset is depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis.

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- Fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable.
- Variable lease payment that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date.
- Amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees.
- The exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option, and.
- Payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

h. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Perusahaan, suku bunga pinjaman incremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Perusahaan:

- Jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
- Menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Perusahaan, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga saat ini, dan
- Membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, negara, mata uang dan keamanan.

Perusahaan dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai dan disesuaikan dengan aset hak guna.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

h. Lease (continued)

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Company, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Company:

- *Where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;*
- *Uses a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit risk for leases held by the Company which does not have recent third-party financing, and.*
- *Makes adjustments specific to the lease eg term, country, currency and security.*

The Company is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

h. Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima
- Biaya langsung awal, dan
- Biaya restorasi

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Perusahaan cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya. Sementara Perusahaan menilai tanah dan bangunannya yang ada di dalam aset tetap Perusahaan memilih untuk tidak melakukannya untuk bangunan hak guna yang dimiliki oleh Perusahaan.

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK No. 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK No. 30. Perusahaan akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini dicatat pada beban operasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
**NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS**
*As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

h. Lease (continued)

Lease payments are allocated between principal dan finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- *The amount of the initial measurement of lease liability*
- *Any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received*
- *Any initial direct costs, and*
- *Restoration costs.*

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Company is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying assets's useful life. While the Company revalues its land and buildings that are presented within fixed assets, it has chosen not to do so for the right-of-use buildings held by the Company.

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated by SFAS No. 73 will be treated the same as operating leases in SFAS No. 30. The Company will recognize these lease payments on a straight-line basis during the lease period on the statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under operating expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

h. Sewa (lanjutan)

Penerapan pencatatan PSAK No. 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

- a. Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
- b. Mencatat penurunan nilai hak-guna aset dan bunga pada liabilitas sewa di laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain; dan
- c. Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

i. Piutang Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Piutang pembiayaan konsumen dikategorikan sebagai pinjaman diberikan dan piutang dan dinyatakan pada biaya perolehan diamortisasi dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Pendapatan bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Piutang dinyatakan tidak tertagih apabila debitur sudah tidak mampu membayar dan atau sulit untuk ditagih, serta telah menunggak lebih dari 90 hari.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan yang timbul diakui dalam laba rugi periode berjalan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

h. Lease (continued)

The recording implementation of SFAS No. 73 is applied for all leases (except as stated earlier), as follows:

- a. Presents right-of-use assets as part of fixed assets and lease liabilities in the statement of financial position which measured at the present value of the future lease payments;*
- b. Records depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the statement of profit or loss and other comprehensive income; and*
- c. Separates the total amount of cash paid into a principal portion (presented within financing activities) and interest (presented within operating activities) in the statement of cash flows.*

i. Consumer Financing Receivables

Consumer financing is a financing activity for procurement of goods based on the needs of consumer with payment by installment.

Consumer financing receivables are being categorized as loans and receivables and are stated at amortized cost less any allowance for impairment losses. Interest income is recognized based on the effective interest rate method.

Receivables are deemed uncollectible if the debtors are unable to pay and have been delinquent for more than 90 days.

Early termination of a contract is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain is recognized in the current profit or loss.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

**i. Piutang Pembiayaan Konsumen
(lanjutan)**

Piutang pembiayaan konsumen akan dihapusbukukan berdasarkan penelaahan manajemen atas kasus per kasus. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima.

j. Piutang Pembiayaan Syariah

Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Perusahaan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen. Pada saat akad murabahah, piutang pembiayaan murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (margin). Keuntungan murabahah diakui selama periode akad berdasarkan margin yang disetujui dari piutang pembiayaan murabahah.

Akad murabahah secara substansi merupakan suatu pembiayaan, sehingga pengakuan margin dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan, seperti yang disebutkan di kebijakan pembiayaan konsumen.

Mudharabah

Pembiayaan dapat dilakukan dengan akad mudharabah. Akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (Perusahaan) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (Debitur) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan persentase tertentu yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

**i. Consumer Financing Receivables
(continued)**

Consumer financing receivables will be written-off based on management review of individual case. Receipts from written-off receivables are recognized as other income when received.

j. Sharia Financing Receivables

Murabahah

Murabahah is goods sell-buy contract with a selling price amounting to the acquisition cost plus agreed margin and the Company must disclose the acquisition cost to the consumer. When the murabahah contract is signed, murabahah financing receivables are recognized as at acquisition cost plus agreed margin. Murabahah margin is recognized over the period of the contract based on agreed margin of the murabahah financing receivables.

Substantially, murabahah contract is a financing, so that margin recognition is based on standards which regulate financing, as mentioned in consumer financing policy.

Mudharabah

Financing with profit sharing scheme can be in form of mudharabah. Mudharabah agreement is a co-operation agreement for a specific project between first party (the Company) as owner of fund and second party (Debitor) as fund manager whereas the profit sharing will be shared in the agreement, meanwhile losses will be borne by first party except if the second party does negligence, misconduct or violate the agreement.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
 PELAPORAN KEUANGAN PENTING
 (lanjutan)

j. Piutang Pembiayaan Syariah (lanjutan)

Mudharabah (lanjutan)

Pembiayaan dengan akad mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Apabila pembiayaan mudharabah mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian Perusahaan. Apabila pembiayaan mudharabah mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak, atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan mudharabah.

Musarakah Mutanaqisah

Musarakah Mutanaqisah adalah akad kerja sama antara Perusahaan dan konsumen. Ekuitas dari Perusahaan akan dibagi menjadi unit musarakah dan konsumen akan membeli unit yang dimiliki Perusahaan melalui pembayaran cicilan.

Pada akhir periode pelaporan, piutang pembiayaan Musarakah Mutanaqisah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang Musarakah Mutanaqishah dikurangi margin yang ditangguhkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
 AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
 (continued)

j. Sharia Financing Receivables
 (continued)

Mudharabah (continued)

Financing in form mudharabah is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses.

In the event that a portion of mudharabah financing is impaired prior to the start up of operations due to damage or any other reason, without course to negligence or error on the part of the fund manager, therefore the loss shall reduce the mudharabah financing balance and shall be as a loss borne by the Company. In the event that a portion of financing is loss, impair, or damage after the commencement of operations for reasons unrelated to negligence or error by the fund manager, the loss shall be distributed between parties upon the determination of profit or revenue sharing between the Company and the fund manager. Loss on financing for reasons related to negligence or error by the fund manager shall be charged to the fund manager and shall not reduce the mudharabah financing balance.

Musarakah Mutanaqisah

Musarakah Mutanaqishah is a joint ownership agreement between the Company and the customer. The equity of the Company will be divided into musarakah unit and the consumer will purchase the Company's unit through installment payments.

At the end of the reporting period, financing Musarakah Mutanaqishah receivables are stated at their net realizable value, i.e. the outstanding amounts of deferred Musarakah Mutanaqishah is reduced by margins and allowance for impairment losses.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (reviu) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Aset Tetap

Aset tetap, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight-line method*) selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun / Year
Bangunan	20
Peralatan kantor	4
Kendaraan	4 – 8
Renovasi Kantor	4

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method.

l. Fixed Assets

Fixed assets, are carried at cost, excluding day to day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value. Land is not depreciated and is stated at cost less any impairment in value.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the fixed assets to its working condition and location for its intended use.

Expenditures incurred after the fixed assets have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred. In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the fixed assets beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

Depreciation are computed on a straight-line method over the fixed assets useful lives as follows:

	Persentase/ Percentage	
	5%	<i>Building</i>
	25%	<i>Office equipment</i>
	12,5% - 25%	<i>Vehicles</i>
	25%	<i>Office Improvements</i>

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

l. Aset Tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

m. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih dinyatakan berdasarkan nilai realisasi bersih yaitu nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen terkait piutang pembiayaan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pasar atas jaminan yang dikuasai kembali. Piutang pembiayaan konsumen direklasifikasi menjadi agunan yang diambil alih ketika jaminan ditarik karena konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Selisih antara nilai tercatat piutang dengan nilai realisasi bersih dicatat sebagai "cadangan kerugian penurunan nilai" dari tagihan dari agunan yang diambil alih dan diakui sebagai beban pada laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

l. Fixed Assets (continued)

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the next major inspection activity.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or loss arising from derecognition of fixed assets is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The asset's residual values, if any, useful lives and depreciation and amortization method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

m. Repossessed Assets

Reposessed assets stated at net realizable value, which is the carrying value of related customer financing receivable deducted for impairment in market value of the reposessed assets. Customer financing receivable are reclassified as claims from collateral when collateral assets have been reposessed under the Company's authority because customers can not fulfil their obligations.

The difference between the carrying value of related claims and net realizable value is recorded as "impairment losses" in the profit or loss.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

m. Agunan yang Diambil Alih (lanjutan)

Selisih lebih antara hasil penjualan dengan nilai tercatat tagihan akan dikembalikan ke konsumen. Sedangkan selisih kurang antara nilai tercatat tagihan dengan hasil penjualan akan dihapuskan.

n. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Perusahaan menelaah apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat uji tahunan penurunan nilai aset perlu dilakukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dinyatakan mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penelaahan dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai aset yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam periode sebelumnya akan dipulihkan apabila nilai tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun nilai tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Setelah pemulihan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

m. Repossessed Assets (continued)

If the proceeds from sale of collateral is more than the outstanding balance of the receivable, the excess is refunded to the consumer. Otherwise, the excess of receivable over the proceeds from sale is written off.

n. Impairment of Non Financial Assets

The Company assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and impairment losses are recognized in profit or loss. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A Company previously recognized impairment loss for an asset is reversed in profit or loss to the extent that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

o. Surat Utang Jangka Menengah

Surat utang jangka menengah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan nilai perolehan surat utang jangka menengah dikurangkan dari jumlah surat utang jangka menengah.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan beban bunga diakui secara accrual dalam laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan administrasi yang terjadi sehubungan dengan transaksi pembiayaan diakui selama jangka waktu pembiayaan

Pendapatan margin pembiayaan murabahah diakui berdasarkan metode imbal hasil efektif selama jangka waktu kontrak.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat mudharabah berakhir, selisih antara pembiayaan mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian pembiayaan mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

o. Medium Term Notes

Medium term notes are classified as financial liabilities measured at amortized cost using the effective interest method. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of medium term notes are deducted from the amount medium term notes.

p. Revenue and Expense Recognition

Interest income and interest expense are recognized in profit or loss on an accrual basis using the effective interest rate method.

Administration income in relation financing transaction are recognized over the term of financing.

Margin income from murabahah financing is recognized based on effective return method during term of contract

Mudharabah financing income is when cash is received or in a period where the right of revenue sharing (nisbah) is due based on agreed portion.

Losses incurred in period before the mudharabah agreement ended as losses and allowance for investment losses. As mudharabah agreement ended, difference between mudharabah financing less allowance for investment losses and return of mudharabah financing is as gain or losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan)

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Keuntungan Musyarakah Mutanaqishah akan dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan persentase kepemilikan sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Pendapatan dan beban lainnya diakui pada saat terjadinya sesuai dengan masa manfaatnya (*accrual basis*).

q. Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang tak-terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar dan sebagai beban dalam laba rugi.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan pasca-kerja manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan pada saat pensiun yang dihitung menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti langsung diakui dalam laporan posisi keuangan dan penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi, namun menjadi bagian dari saldo laba. Biaya liabilitas imbalan pasti lainnya terkait dengan program imbalan pasti diakui dalam laba rugi.

r. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui pada laporan laba rugi kecuali untuk bagian yang langsung diakui di komponen ekuitas lainnya, dimana beban pajak yang terkait dengan bagian tersebut diakui di penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES (continued)

p. Revenue and Expense Recognition (continued)

Profit from Musyarakah Mutanaqishah will be shared according to agreed percentage, and losses will be born based on the percentage of ownership on the corresponding fund, from the total fund.

Other income (expenses) are recognized when earned (incurred) in accordance with their beneficial periods (accrual basis).

q. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits Liability

Short-term employee benefits are recognized at its undiscounted amount as a liability after deducting any amount already paid in the statement of financial position and as an expense in profit or loss.

Long-term Employee Benefits Liability

Long-term employee benefits liability represents post-employment benefits, unfunded defined-benefit plans which amounts are determined based on years of service and salaries of the employees at the time of pension that calculated using the Projected Unit Credit. Remeasurement is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur and not to be reclassified to profit or loss but reflected immediately in retained earnings. All other costs related to the defined-benefit plan are recognized in profit or loss.

r. Taxation

Income tax expense comprises of current and deferred tax. Income tax expense is in the statement of profit or loss except to the extent it relates to items directly in other equity components, in which case it is in other comprehensive income.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

r. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak kini adalah hutang pajak yang ditentukan berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang secara telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Perusahaan menerapkan metode aset dan liabilitas dalam menghitung beban pajaknya. Dengan metode ini, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui setiap tanggal pelaporan sebesar perbedaan temporer aset dan liabilitas untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak di masa akan datang, seperti kompensasi rugi, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar (*probable*). Tarif pajak yang berlaku atau yang secara telah berlaku pada tahun realisasi aset dan liabilitas pajak tangguhan, digunakan dalam menentukan pajak penghasilan tangguhan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Manajemen secara mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

r. Taxation (continued)

Current tax expense is the expected tax payable on the taxable income for the current year which is calculated using tax rates enacted or substantively enacted at reporting date.

The Company adopts the asset and liability method in determining its income tax expense. Under this method, deferred tax assets and liabilities are at each reporting date for temporary differences between the accounting and tax bases of assets and liabilities. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, to the extent that of such benefits is probable. Currently enacted or substantially enacted tax rates at the year of deferred tax assets or liabilities, are used in the determination of deferred income tax.

Deferred tax assets are only if it is probable that future taxable profit will be available to compensate the temporary differences which resulted in such deferred tax assets.

Management periodically evaluates positions taken in tax return with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. Management establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Current tax assets and current tax liabilities shall be offset and the net amount is presented in the statement of financial position when and only when, the Company has a legal enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

r. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46: "Pajak Penghasilan". Oleh karena itu, Perusahaan menyajikan beban pajak final sehubungan dengan deposito dan giro sebagai pos tersendiri.

s. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Perusahaan harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

t. Laba per Saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar selama tahun berjalan.

Laba per saham dilusian adalah sama dengan laba per saham dasar dikarenakan Perusahaan tidak memiliki saham dilusian atau instrumen.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
**NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS**
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

r. Taxation (continued)

Final tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied on the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction incur losses.

Final tax is not included in the scope of SFAS No. 46: "Income Taxes". Therefore, the Company presents all of the final tax arising from time deposits and current account a separate line item.

s. Provision

Provisions are recognized when the Company has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

t. Earnings per Share

Earnings per share are computed by dividing current year net income by the weighted average number of outstanding shares during the current year.

Diluted earnings per share are the same with basic earnings per share as the Company does not have dilutive shares or instrument.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

u. Segmen Operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama, yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Pengambil keputusan operasional Perusahaan adalah Dewan Direksi. Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional termasuk bagian yang dapat diatribusikan secara langsung kepada segmen dan juga yang dapat dialokasikan dengan basis yang wajar.

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk dan wilayah geografis.

Perusahaan menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

v. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa nonpenyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
**NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS**
*As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

u. Operating Segments

An operating segment is a component of the entity that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the entity's components, whose operating results are reviewed regularly by the chief operating decision maker to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available. The Company's chief operating decision maker are Board of Directors. Segment results that are reported to the chief operating decision maker include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

The Company manages its business activities and identifies its segments reported based on product categories and geographic area.

The Company determines and presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

v. Events After The Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang lingkungan ekonomi utama. Mata uang tersebut adalah yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

3. MANAGEMENT OF USE AND ESTIMATES, JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements management, is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The functional currency of the Company is the currency of the primary economic environment. It is the currency, among others, that mainly influences sales prices for goods and services, and of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods and services, and the currency in which funds from financing activities are generated.

b. Allowance for Impairment of Financial Assets

The Company assesses specifically at each statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectability or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (reviu) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

**b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Keuangan (lanjutan)**

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**3. MANAGEMENT OF USE AND ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Judgments (continued)

**b. Allowance for Impairment of Financial
Assets (continued)**

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Allowance is provided on accounts specifically identified as impaired. Written off loans and receivables are based on management's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be realized in whatsoever actions have been taken. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of allowance recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

The carrying value of the Company's loans and receivables as of July 31, 2021 and December 31, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Kas dan bank	7.437.094.502	1.366.472.701	9.095.178.837	Cash on hand and in banks
Piutang pembiayaan - bersih	211.977.241.980	235.385.442.279	314.904.934.178	Financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	642.979.331	1.543.839.242	26.146.535.613	Finance lease receivables - net
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	78.889.882.941	76.153.728.119	42.067.246.514	Consumer financing receivables - net
Piutang pembiayaan syariah - bersih	84.897.292.403	51.422.962.937	73.080.026.944	Sharia receivable - net
Piutang lain-lain	105.712.055.163	28.737.853.812	6.280.270.598	Other receivables
Aset lain-lain-uang jaminan	284.000.000	284.000.000	84.000.000	Other assets-security deposit
Jumlah	489.840.546.320	393.350.459.848	445.511.657.071	Total

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

c. Komitmen Sewa

**Komitmen Sewa Operasi – Perusahaan
Sebagai Lessee**

Perusahaan telah menandatangani sejumlah perjanjian sewa ruangan. Perusahaan menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa operasi karena Perusahaan tidak menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

**Komitmen Sewa Pembiayaan –
Perusahaan Sebagai Lessor**

Perusahaan telah menandatangani perjanjian sewa kendaraan dan mesin. Perusahaan menentukan bahwa sewa tersebut adalah sewa pembiayaan, karena lessee menanggung secara signifikan seluruh risiko dan manfaat dari kepemilikan aset-aset tersebut.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun.

**3. MANAGEMENT OF USE AND ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS
(continued)**

c. Lease Committee

**Operating Lease Commitments – The
Company as Lessee**

The Company has entered into various lease agreements for commercial spaces. The Company has determined that it is an operating lease since the Company does not bear substantially all the significant risks and rewards of ownership of the related assets.

**Finance Lease Commitments – The
Company as Lessor**

The Company has entered into vehicles and machinery lease agreement. The Company has determined that this is a finance lease since lessee bears substantially all the significant risks and benefits incidental to the ownership of these assets.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti-bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan diungkapkan pada Catatan 17.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Perusahaan diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang secara teknis atau komersial serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset.

Nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 diungkapkan pada Catatan 10.

**3. MANAGEMENT OF USE AND ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur:

a. Fair Value of Financial Assets and Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets are set out in Note 17.

b. Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The useful life of each of the item of the Company's fixed assets are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset.

The carrying values of these assets as of July 31, 2021 and December 31, 2020 and 2019 are disclosed in Note 10.

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

c. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Perusahaan.

Nilai tercatat dari aset-aset ini pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 diungkapkan dalam Catatan 10.

d. Imbalan Kerja Jangka Panjang

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dipengaruhi oleh asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah tersebut.

Asumsi-asumsi tersebut dijelaskan dalam Catatan 26 dan mencakup, antara lain, tingkat kenaikan gaji dan tingkat diskonto yang ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas bunga obligasi pemerintah berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang pembayaran imbalan dan memiliki jangka waktu yang mendekati estimasi jangka waktu liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi Perusahaan dibukukan pada penghasilan komprehensif lain dan dengan demikian, berdampak pada jumlah penghasilan komprehensif lain yang diakui dan liabilitas yang tercatat pada periode-periode mendatang.

**3. MANAGEMENT OF USE AND ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

c. Impairment of Non Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying value of these asset as of July 31, 2021 and December 31, 2020 and 2019 is disclosed in Note 10.

d. Long Term Employee Benefits

The determination of the long-term employee benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts.

Those assumptions are described in Note 26 and include, among others, rate of salary increase, and discount rate which is determined after giving consideration to interest rates of high-quality government bonds that are denominated in the currency in which the benefits are to be paid and have terms of maturity approximating the terms of the related employee benefits liability. Actual results that differ from the Company's assumptions are charged to comprehensive income and therefore, generally affect the recognized comprehensive income and recorded obligation in such future periods.

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN
DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

d. Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, liabilitas imbalan kerja jangka panjang masing-masing sebesar Rp882.897.275, Rp786.897.946 dan Rp1.402.872.785 (Catatan 26).

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika kemungkinan besar jumlah laba kena pajak akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui.

Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba kena pajak pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Aset pajak tangguhan diungkapkan pada Catatan 27.

**3. MANAGEMENT OF USE AND ESTIMATES,
JUDGEMENTS AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

d. Long Term Employee Benefits (continued)

Management believed that the Company's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of long-term employee benefits liability.

As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and 2019, long-term employee benefits liability amounted to Rp882,897,275, Rp786,897,946 and Rp1,402,872,785, respectively (Note 26).

e. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Deferred tax assets are disclosed in Note 27.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN BANK

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Kas	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Cash on hand
Bank				Cash in banks
Pihak berelasi (Catatan 28)				Related party (Note 28)
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	-	-	6.111.295.957	PT Bank Kesejahteraan Ekonomi
Pihak ketiga				Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk	2.562.063.484	338.875.686	173.498.183	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Central Asia Syariah	4.398.738.043	919.786.675	2.676.722.026	PT Bank Central Asia Syariah
PT Bank Victoria Syariah	253.421.397	100.810.340	126.662.671	PT Bank Victoria Syariah
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	215.871.578			PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Sub-jumlah	7.430.094.502	1.359.472.701	2.976.882.880	Sub-total
Jumlah	7.437.094.502	1.366.472.701	9.095.178.837	Total

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

5. PIUTANG PEMBIAYAAN

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Pembiayaan modal kerja				Working capital financing
Pihak berelasi (Catatan 28)	-	-	36.138.626.400	Related parties (Note 28)
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	-	-	(11.106.368.335)	Unearned finance income
Sub-jumlah	-	-	25.032.258.065	Sub-total
Pihak ketiga	103.778.547.811	69.089.919.811	90.995.227.606	Third parties
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(16.495.384.508)	(12.352.650.810)	(8.154.895.022)	Unearned finance income
Sub-jumlah	87.283.163.303	56.737.269.001	82.840.332.584	Sub-total
Jumlah	87.283.163.303	56.737.269.001	107.872.590.649	Total
Pembiayaan investasi				Investment financing
Pihak berelasi (Catatan 28)	-	62.585.674.802	183.971.636.713	Related parties (Note 28)
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	-	(2.809.353.342)	(41.841.918.309)	Unearned finance income
Sub-jumlah	-	59.776.321.460	142.129.718.404	Sub-total
Pihak ketiga	163.890.214.494	170.197.073.889	115.010.022.385	Third parties
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(38.852.593.013)	(47.166.213.269)	(30.484.800.656)	Unearned finance income
Sub-jumlah	125.037.621.481	123.030.860.620	84.525.221.729	Sub-total
Jumlah	125.037.621.481	182.807.182.080	226.654.940.133	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(343.542.804)	(4.159.008.802)	(19.622.596.604)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	211.977.241.980	235.385.442.279	314.904.934.178	Total - Net

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

- Suku bunga per tahun piutang Pembiayaan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, tahun 2020 dan tahun 2019 masing-masing berkisar 12% - 18%.
- Jangka waktu kontrak pembiayaan modal kerja berkisar antara 12 – 24 bulan, sedangkan jangka waktu pembiayaan investasi berkisar antara 24 – 108 bulan.
- Perusahaan mensyaratkan agunan sebagai bagian dari persyaratan kredit. Umumnya, Perusahaan menerima dalam bentuk barang modal, tanah dan bangunan, dan gadai piutang.
- Berikut ini disajikan rincian piutang pembiayaan berdasarkan jatuh temponya:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Jatuh tempo	20.045.604.822	483.790.000	28.369.812.351	Overdue
Belum jatuh tempo				Not overdue
Kurang dari atau sama dengan				
1 tahun	19.655.072.106	80.632.733.208	34.446.211.141	Less than or equal to 1 year
Lebih dari 1 tahun sampai dengan				
2 tahun	20.946.259.436	2.150.806.259	110.426.715.804	More than 1 year until 2 years
Lebih dari 2 tahun	151.673.848.420	156.277.121.614	161.284.791.486	More than 2 years
Jumlah	212.320.784.784	239.544.451.081	334.527.530.782	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(343.542.804)	(4.159.008.802)	(19.622.596.604)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	211.977.241.980	235.385.442.279	314.904.934.178	Total - Net

- Pengelompokkan kualitas piutang pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Lancar	207.507.500.910	183.895.021.037	267.274.486.728	Current
Dalam perhatian khusus	4.813.283.874	55.649.430.044	-	Spesial mention
Diragukan	-	-	16.178.702.161	Doubtful
Macet	-	-	51.074.341.893	Loss
Jumlah	212.320.784.784	239.544.451.081	334.527.530.782	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(343.542.804)	(4.159.008.802)	(19.622.596.604)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	211.977.241.980	235.385.442.279	314.904.934.178	Total - Net

5. FINANCING RECEIVABLES (continued)

- Interest rates per annum of finance lease receivables for the seven-month period ended July 31, 2021, and in 2020 and 2019 range from 12% - 18%, respectively.
- The period of working capital financing contracts ranged from 12 – 24 months, while the period of investment financing contracts range between from 24 – 108 months.
- The Company requires collateral as part of its credit requirement. Typically, the Company accepts capital good, land and building, and pledged receivables as collateral.
- The details of financing receivables based on its remaining period until maturity are as follows:

- The classification of the quality of financing receivables based on the accuracy of principal and/or interest payments is as follows:

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

- f. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020	2019	
Saldo awal tahun/periode	4.159.008.802	19.622.596.604	16.696.865.338	Balance at beginning of the year/period
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	-	14.141.090.806	-	Opening balance adjustment upon initial application of PSAK 71
Penambahan tahun berjalan/periode	40.029.863	2.863.078.748	18.075.731.266	Provision during the year/period
Pemulihan tahun berjalan/periode	(3.855.495.861)	(32.467.757.356)	(15.150.000.000)	Recovery during the year/period
Saldo akhir tahun/periode	343.542.804	4.159.008.802	19.622.596.604	Balance at the end of the year/period

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo piutang pembiayaan, manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul akibat dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan tersebut.

Based on management's evaluation of the collectability of the financing receivable, the management believe that the allowance for impairment is adequate to cover the possible losses which might arise from uncollectible accounts.

- g. Piutang pembiayaan digunakan sebagai jaminan dari surat utang jangka menengah (Catatan 13).
- h. Tidak terdapat piutang pembiayaan yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019.
- i. Piutang pembiayaan dari satu nasabah yang melebihi 10% dari jumlah piutang pembiayaan adalah sebagai berikut:

- g. Financing receivable are used as collateral on medium term notes (Note 13).
- h. There are no restructured financing receivables as of July 31, 2021 and December 31, 2020 and 2019.
- i. Financing receivable from any customer which exceeds 10% of the total financing receivables are as follows:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020	2019	
PT Multi Artha Griya	-	59.579.117.720	69.269.858.478	PT Multi Artha Griya
PT Bintang Cemerlang Suksesindo	40.503.177.619	39.783.937.516	39.663.870.968	PT Bintang Cemerlang Suksesindo
PT Trimulia Nusantara Energy	37.266.401.942	31.663.672.128	-	PT Trimulia Nusantara Energy
PT Planet Suplemen Indonesia	32.452.561.135	31.590.880.591	-	PT Planet Suplemen Indonesia
PT Anugrah Bumi Sion	21.863.816.057	-	-	PT Anugrah Bumi Sion
Jumlah - Bersih	132.085.956.753	162.617.607.955	108.933.729.446	Total - Net

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Piutang sewa pembiayaan	675.516.432	1.702.684.432	47.093.178.670	Finance Lease receivables
Nilai sisa yang terjamin	107.807.300	107.807.300	107.807.300	Guaranteed residual value
Penghasilan pembiayaan tangguhan	(32.247.580)	(147.466.749)	(7.014.184.358)	Unearned lease income
Simpanan jaminan	(107.807.300)	(107.807.300)	(107.807.300)	Security deposit
Cadangan kerugian penurunan nilai	(289.521)	(11.378.441)	(13.932.458.699)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	642.979.331	1.543.839.242	26.146.535.613	Total - Net

- Suku bunga per tahun piutang sewa pembiayaan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, tahun 2020 dan 2019 masing-masing berkisar 12% - 18%.
- Jenis aset yang dibiayai sehubungan dengan piutang sewa pembiayaan adalah mesin dan kendaraan.
- Piutang sewa pembiayaan dijamin dengan barang-barang yang dibiayai.
- Kisaran jangka waktu pembiayaan adalah 3 – 5 tahun.
- Piutang sewa pembiayaan digunakan sebagai jaminan dari surat utang jangka menengah (Catatan 13).
- Berikut ini disajikan rincian piutang sewa pembiayaan berdasarkan jatuh temponya:

- Interest rates per annum of finance lease receivables for the seven-month period ended July 31, 2021, and in 2020 and 2019 ranged from 12% - 18%, respectively.
- The types of assets financed in connection with finance lease receivables are machinery and vehicles.
- Finance lease receivables are secured by the financed item.
- Financing agreements have term of 3 – 5 years.
- Finance lease receivables are used as collateral for medium term notes (Note 13).
- The details of finance lease receivables based on its remaining period until maturity are as follows:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Jatuh tempo	-	-	6.789.543.363	Overdue
Belum jatuh tempo				Not overdue
Kurang dari atau sama dengan				
1 tahun	553.118.635	1.435.813.753	11.018.246.167	Less than or equal to 1 year
Lebih dari 1 tahun sampai dengan				
2 tahun	90.150.217	-	9.670.261.425	More than 1 year until 2 years
Lebih dari 2 tahun	-	119.403.930	12.600.943.357	More than 2 years
Jumlah	643.268.852	1.555.217.683	40.078.994.312	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(289.521)	(11.378.441)	(13.932.458.699)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	642.979.331	1.543.839.242	26.146.535.613	Total - Net

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (revisi) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

- g. Pengelompokkan kualitas piutang sewa pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Lancar	553.118.635	1.435.813.753	5.743.475.193	Current
Dalam perhatian khusus	90.150.217	119.403.930	-	Spesial mention
Macet	-	-	34.335.519.119	Loss
Jumlah	643.268.852	1.555.217.683	40.078.994.312	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(289.521)	(11.378.441)	(13.932.458.699)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	642.979.331	1.543.839.242	26.146.535.613	Total - Net

- h. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Saldo awal tahun/periode	11.378.441	13.932.458.699	1.311.509.893	Balance at beginning of the year/period
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	-	(170.849.909)	-	Opening balance adjustment upon initial application of PSAK 71
Penambahan tahun berjalan/periode	-	3.084.832	12.620.948.806	Provision during the year/period
Pemulihan tahun berjalan/periode	(11.088.920)	(13.753.315.181)	-	Recovery during the year/period
Saldo akhir tahun/periode	289.521	11.378.441	13.932.458.699	Balance at the end of the year/period

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo piutang sewa pembiayaan, manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai adalah memadai untuk menutup kerugian akibat dari tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan tersebut.

- i. Tidak terdapat piutang sewa pembiayaan yang direstrukturisasi pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019.

6. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

- g. The classification of the quality of finance lease receivables based on the accuracy of principal and/or interest payments is as follows:

- h. The changes in the allowance for impairment losses of finance lease receivable are as follows:

Based on management's evaluation of the finance lease receivables, the management believe that the allowance for impairment is adequate to cover the possible losses which might arise from uncollectible accounts.

- i. There are no restructured financing lease receivables as of July 31, 2021 and December 31, 2020 and 2019.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

- j. Piutang sewa pembiayaan dari satu nasabah yang melebihi 10% dari jumlah piutang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019	
PT Adyawinsa Telecommunication And Electrical	552.988.064	1.427.520.146	5.686.040.442
Rosita Rianauli Sianipar	89.991.267	-	-
PT Bridge Communication Indonesia	-	-	11.689.528.933
PT Shaftco Niaga Prima	-	-	8.770.966.239
Jumlah - Bersih	642.979.331	1.427.520.146	26.146.535.614

6. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

- j. Financing lease receivable from any customer which exceeds 10% of the total financing lease receivables are as follows:

PT Adyawinsa Telecommunication And Electrical	
Rosita Rianauli Sianipar	
PT Bridge Communication Indonesia	
PT Shaftco Niaga Prima	
Total - Net	

7. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019	
Pihak berelasi (Catatan 28)			
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	16.195.572
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	-	-	(669.224)
Sub-jumlah	-	-	15.526.348
Pihak ketiga			
Piutang pembiayaan konsumen	138.235.318.616	134.757.932.588	74.268.889.855
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(56.865.856.515)	(54.710.702.738)	(28.653.295.298)
Sub-jumlah	81.369.462.101	80.047.229.850	45.615.594.557
Jumlah	81.369.462.101	80.047.229.850	45.631.120.905
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.479.579.160)	(3.893.501.731)	(3.563.874.391)
Jumlah - Bersih	78.889.882.941	76.153.728.119	42.067.246.514

Related parties (Note 28)	
Consumer financing receivables	
Unearned consumer financing income	
Sub-total	
Third parties	
Consumer financing receivables	
Unearned consumer financing income	
Sub-total	
Total	
Allowance for impairment losses	
Total - Net	

- a. Suku bunga per tahun piutang pembiayaan konsumen untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, tahun 2020 dan 2019 masing-masing berkisar 12% - 18%.
- b. Aset yang dibiayai Perusahaan adalah kendaraan, apartemen dan perumahan dengan tenor pembiayaan adalah 2 – 15 tahun.

- a. Interest rates per annum of consumer financing receivables for seven-month period ended July 31, 2021, and in 2020 and 2019 ranged from 12% - 18%, respectively.
- b. Assets funded by the Company are vehicles, apartments, and buildings with period of financing ranged from 2-15 years.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN
(lanjutan)

- c. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi signifikan pada piutang pembiayaan konsumen.
- d. Piutang pembiayaan konsumen dijamin dengan kendaraan bermotor yang dibiayai oleh Perusahaan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan piutang pembiayaan konsumen untuk apartemen, tanah serta tanah dan bangunan dijamin dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atau Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS).
- e. Berikut ini disajikan rincian piutang pembiayaan konsumen berdasarkan jatuh temponya:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Jatuh tempo	218.180.068	3.000.000.000	1.440.120.335	Overdue
Belum jatuh tempo				Not overdue
Kurang dari atau sama dengan				
1 tahun	1.520.885.551	3.313.471.219	6.660.144.643	Less than or equal to 1 year
Lebih dari 1 tahun sampai dengan				
2 tahun	10.342.381.842	6.625.608.346	5.168.622.715	More than 1 year until 2 years
Lebih dari 2 tahun	69.288.014.640	67.108.150.285	32.362.233.211	More than 2 years
Jumlah	81.369.462.101	80.047.229.850	45.631.120.905	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.479.579.160)	(3.893.501.731)	(3.563.874.391)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	78.889.882.941	76.153.728.119	42.067.246.514	Total - Net

- f. Pengelompokkan kualitas piutang pembiayaan konsumen berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Lancar	71.170.552.732	64.615.362.595	32.219.540.923	Current
Dalam perhatian khusus	5.110.758.245	8.944.142.167	4.248.236.604	Special mention
Kurang lancar	-	2.427.890.515	-	Sub-standard
Diragukan	3.085.635.293	-	391.648.585	Doubtful
Macet	2.002.515.831	4.059.834.573	8.771.694.793	Loss
Jumlah	81.369.462.101	80.047.229.850	45.631.120.905	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.479.579.160)	(3.893.501.731)	(3.563.874.391)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	78.889.882.941	76.153.728.119	42.067.246.514	Total - Net

7. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES
(continued)

- c. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk in consumer financing receivables.
- d. The consumer financing receivables are secured by motor vehicles financed by the Company and Motor Vehicle of Ownership Book (BPKB) of the related vehicle. While consumer financing receivables related to apartment, land and land buildings are secured by Certificates of Ownership (SHM) or Certificates of Building Use Right (SHGB) or Certificates of Ownership of Mansions Unit (SHMASRS).
- e. The details of consumer financing receivables based on its remaining period until maturity are as follows:

- f. The classification of the quality of consumer financing receivables based on the accuracy of principal and/or interest payments is as follows:

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN
(lanjutan)

- g. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020	2019	
Saldo awal tahun/periode	3.893.501.731	3.563.874.391	3.288.936.957	Balance at beginning of the year/period
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	-	706.433.214	-	Opening balance adjustment upon initial application of PSAK 71
Penambahan tahun berjalan/periode	1.573.491.052	2.907.648.737	274.937.434	Provision during the year/period
Pemulihan tahun berjalan/periode	(2.987.413.623)	(3.284.454.611)	-	Recovery during the year/period
Saldo akhir tahun/periode	2.479.579.160	3.893.501.731	3.563.874.391	Balance at the end of the year/period

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo piutang pembiayaan konsumen, manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen tersebut.

- h. Piutang pembiayaan konsumen digunakan sebagai jaminan dari surat utang jangka menengah dan pinjaman yang diterima oleh Perusahaan (Catatan 13 dan 14).
- i. Piutang pembiayaan konsumen yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp7.225.217.422, Rp5.529.939.540 dan nihil.
- j. Tidak terdapat piutang pembiayaan konsumen dari satu nasabah yang melebihi 10% dari jumlah piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019.

7. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES
(continued)

- g. The changes of allowance for impairment losses of consumer financing receivables are as follows:

Based on management evaluation of the collectability of consumer financing receivables, the management believe that the allowance for impairment is adequate to cover the possible losses which might arise from uncollectible accounts.

- h. Consumer financing receivable used as collateral on medium term notes and loans (Notes 13 and 14).
- i. Restructured consumer financing receivables as of July 31, 2021 and 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp7,225,217,422, Rp5,529,939,540 and nil, respectively.
- j. There were no consumer financing receivable from any customer which exceeds 10% of the total consumer financing receivables as of July 31, 2021 and December 31, 2020 and 2019.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG PEMBIAYAAN SYARIAH

8. SHARIA FINANCING RECEIVABLE

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020	2019	
Murabahah	59.468.683.633	31.622.225.127	2.803.560.455	Murabahah
Pendapatan marjin yang belum diakui	(4.492.771.106)	(3.160.287.245)	(928.732.323)	Unearned margin income
Sub Jumlah	54.975.912.527	28.461.937.882	1.874.828.132	Subtotal
Musarakah mutanaqisah	28.451.476.940	23.623.960.599	6.395.613.640	Musarakah mutanaqisah
Pendapatan bagi hasil yang belum diakui	(12.139.490.864)	(10.422.309.613)	(3.332.283.350)	Unearned sharing revenue
Sub Jumlah	16.311.986.076	13.201.650.986	3.063.330.290	Subtotal
Mudharabah	12.675.618.881	9.133.705.338	77.828.785.035	Mudharabah
Pendapatan bagi hasil yang belum diakui	(186.551.820)	(132.828.980)	(8.795.714.172)	Unearned sharing revenue
Sub Jumlah	12.489.067.061	9.000.876.358	69.033.070.863	Subtotal
Investasi Musarakah	2.484.189.692	2.619.189.692	-	Musarakah investment
Pendapatan bagi hasil yang belum diakui	(969.673.563)	(1.127.173.563)	-	Unearned sharing revenue
Sub Jumlah	1.514.516.129	1.492.016.129	-	Subtotal
Jumlah	85.291.481.793	52.156.481.355	73.971.229.285	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(394.189.390)	(733.518.418)	(891.202.341)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	84.897.292.403	51.422.962.937	73.080.026.944	Total - Net

- Marjin bersih/tingkat bagi hasil per tahun pembiayaan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing berkisar 15% - 18%.
- Piutang yang dibiayai Perusahaan adalah pembiayaan jual beli, investasi dan fasilitas dana.
- Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi signifikan pada piutang pembiayaan syariah.
- Piutang musarakah mutanaqisah dan murabahah dijamin dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) serta surat kuasa potong gaji sedangkan piutang mudharabah tidak mempunyai jaminan.

- Net margin/unearned sharing revenue per annum of sharia financing receivables for the seven-month period ended July 31, 2021 and in 2020 and 2019 ranged from 15% - 18%.*
- Receivable funded by the Company are sale and purchase financing, investment and funding facilities.*
- Management believes that there are no significant concentrations of credit risk in sharia financing receivables.*
- Musarakah mutanaqisah and murabahah receivable are secured by Certificates of Ownership (SHM) or Certificates of Building Use Right (SHGB) or and a power of attorney for salary deductions while mudharabah receivables do not have collateral.*

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

e. Berikut ini disajikan rincian piutang syariah berdasarkan jatuh temponya:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Jatuh tempo	4.102.627.951	719.209.725	-	Overdue
Belum jatuh tempo				Not overdue
Kurang dari atau sama dengan 1 tahun	62.215.147.555	35.634.209.531	69.837.121.434	Less than or equal to 1 year
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	203.953.014	367.592.942	379.006.184	More than 1 year until 2 years
Lebih dari 2 tahun	18.769.753.273	15.435.469.157	3.755.101.667	More than 2 years
Jumlah - Bruto	85.291.481.793	52.156.481.355	73.971.229.285	Total - Gross
Cadangan kerugian penurunan nilai	(394.189.390)	(733.518.418)	(891.202.341)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	84.897.292.403	51.422.962.937	73.080.026.944	Total - Net

f. Pengelompokan kualitas piutang pembiayaan sebagian berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Lancar	77.447.553.857	49.767.764.101	70.183.978.072	Current
Dalam perhatian khusus	5.457.768.858	1.869.705.365	3.787.251.213	Special mention
Kurang lancar	543.600.000	-	-	Sub-standard
Diragukan	1.282.463.843	-	-	Doubtful
Macet	560.095.235	519.011.889	-	Loss
Jumlah	85.291.481.793	52.156.481.355	73.971.229.285	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(394.189.390)	(733.518.418)	(891.202.341)	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	84.897.292.403	51.422.962.937	73.080.026.944	Total - Net

g. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang syariah adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Saldo awal tahun/periode	733.518.418	891.202.341	-	Balance at beginning of the year/period
Penyesuaian saldo atas penerapan awal PSAK 71	-	(691.702.149)	-	Opening balance adjustment upon initial application of PSAK 71
Penambahan tahun berjalan/periode	86.186.188	685.662.855	891.202.341	Provision during the year/period
Pemulihan tahun berjalan/periode	(425.515.216)	(151.644.629)	-	Recovery during the year/period
Saldo akhir tahun/periode	394.189.390	733.518.418	891.202.341	Balance at the end of the year/period

**8. SHARIA FINANCING RECEIVABLE
(continued)**

e. The details of sharia financing receivables based on its remaining period until maturity are as follows:

f. The classification of the quality of sharia financing receivables based on the accuracy of principal and/or interest payments is as follows:

g. The changes in the allowance for impairment losses of sharia financing receivable are as follows:

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo piutang pembiayaan syariah, manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan Syariah tersebut.

- h. Piutang pembiayaan yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.479.401.446, Rp965.325.915 dan nihil.
- i. Tidak terdapat piutang dari satu nasabah yang melebihi 10% dari jumlah piutang pembiayaan pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019.

8. SHARIA FINANCING RECEIVABLE (continued)

Based on management evaluation of the collectability of sharia financing receivables, management believe that the allowance for impairment is adequate to cover the possible losses which might arise from uncollectible accounts.

- h. Restructured sharia financing receivables as of July 31, 2021 and 31 December 2020 and 2019 amounted to Rp1,479,401,446, Rp965,325,915 and nil, respectively.*
- i. There were no consumer sharia financing receivable from any customer which exceeds 10% of the total sharia financing receivables as of July 31, 2021 and December 31, 2020 and 2019.*

9. PIUTANG LAIN-LAIN

9. OTHER RECEIVABLES

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020	2019	
Pihak berelasi - bersih (Catatan 28)	70.584.779.635	7.000.000.000	4.000.000.000	Related parties - net (Note 28)
Pihak ketiga				Third parties
Dana kelolaan	32.261.510.157	19.251.200.605	-	Managed funds
Lain-lain	2.865.765.371	2.486.653.207	2.280.270.598	Others
Sub-jumlah	35.127.275.528	21.737.853.812	2.280.270.598	Sub-total
Jumlah	105.712.055.163	28.737.853.812	6.280.270.598	Total

Dana kelolaan merupakan dana yang ditempatkan pada rekening bersama yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Kerjasama Dengan Imbalan ("Akad Wakalah Bil Ujrah") dengan pihak ketiga, namun dana tersebut belum disalurkan kepada penerima pembiayaan. Berdasarkan perjanjian, Perusahaan menunjuk dan memberi kuasa kepada pihak ketiga sebagai kuasa Perusahaan dalam mencairkan fasilitas pembiayaan kepada pelanggan pihak ketiga tersebut.

Managed funds that are placed in a joint account established based on a Cooperation Agreement with Rewards ("Akad Wakalah Bil Ujrah") with a third party, but the funds have not been distributed to the recipient of the financing. Based on the agreement, the Company appoints and authorizes the third party as the Company's power to distribute the financing facility to the third party customers.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

31 Juli 2021/ July 31, 2021					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo Akhir <i>Ending Balance</i>	
Biaya perolehan					At cost
Tanah	21.090.000	-	-	21.090.000	Land
Bangunan	218.910.000	-	-	218.910.000	Building
Inventaris kantor	1.142.216.880	114.919.000	-	1.257.135.880	Office Equipment
Kendaraan	805.841.660	-	149.641.660	656.200.000	Vehicles
Renovasi kantor	2.502.764.290	-	-	2.502.764.290	Office Improvements
Jumlah	4.690.822.830	114.919.000	149.641.660	4.656.100.170	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	190.634.125	6.384.875	-	197.019.000	Building
Inventaris kantor	783.617.227	84.562.574	-	868.179.801	Office Equipment
Kendaraan	544.927.082	70.709.371	56.115.623	559.520.830	Vehicles
Renovasi kantor	226.280.190	362.492.711	-	588.772.901	Office Improvements
Jumlah	1.745.458.624	524.149.531	56.115.623	2.213.492.532	Total
Nilai buku bersih	2.945.364.206			2.442.607.638	Net book value

31 Desember 2020/ December 31, 2020					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo Akhir <i>Ending Balance</i>	
Biaya perolehan					At cost
Tanah	21.090.000	-	-	21.090.000	Land
Bangunan	218.910.000	-	-	218.910.000	Building
Peralatan kantor	930.907.874	211.309.006	-	1.142.216.880	Office Equipment
Kendaraan	656.200.000	149.641.660	-	805.841.660	Vehicles
Renovasi kantor	181.680.000	2.321.084.290	-	2.502.764.290	Office Improvements
Jumlah	2.008.787.874	2.682.034.956	-	4.690.822.830	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	179.688.625	10.945.500	-	190.634.125	Building
Inventaris kantor	731.123.530	52.493.697	-	783.617.227	Office Equipment
Kendaraan	387.325.000	157.602.082	-	544.927.082	Vehicles
Renovasi kantor	89.923.342	136.356.848	-	226.280.190	Office Improvements
Jumlah	1.388.060.497	357.398.127	-	1.745.458.624	Total
Nilai buku bersih	620.727.377			2.945.364.206	Net book value

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2019/ December 31, 2019					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo Akhir <i>Ending Balance</i>	
Biaya perolehan				At cost	
Tanah	21.090.000	-	-	21.090.000	Land
Bangunan	218.910.000	-	-	218.910.000	Building
Peralatan kantor	791.250.374	139.657.500	-	930.907.874	Office Equipment
Kendaraan	1.078.500.000	-	422.300.000	656.200.000	Vehicles
Renovasi kantor	169.280.000	12.400.000	-	181.680.000	Office Improvements
Jumlah	2.279.030.374	152.057.500	422.300.000	2.008.787.874	Total
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation	
Bangunan	168.743.125	10.945.500	-	179.688.625	Building
Inventaris kantor	658.047.676	73.075.854	-	731.123.530	Office Equipment
Kendaraan	551.148.012	172.901.988	336.725.000	387.325.000	Vehicles
Renovasi kantor	47.686.658	42.236.684	-	89.923.342	Office Improvements
Jumlah	1.425.625.471	299.160.026	336.725.000	1.388.060.497	Total
Nilai buku bersih	853.404.903			620.727.377	Net book value

Jumlah beban penyusutan sebesar Rp524.149.531, Rp357.398.127 dan Rp299.160.026 masing-masing untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan tahun 2020 dan 2019 dan dicatat sebagai bagian dari beban umum dan administrasi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 25).

Depreciation expense amounted to Rp524,149,531, Rp357,398,127 and Rp299,160,026 for the seven-month period ended July 31, 2021 and in 2020 and 2019, respectively, and recorded under general and administrative expenses in the statement of profit or loss and comprehensive income (Note 25).

Perusahaan memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas 74m² atas nama Perusahaan yang terletak di Tangerang dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan jatuh tempo tanggal 28 Januari 2037.

The Company own 1 (one) piece of land measuring 74m² on behalf of the Company, located in Tangerang with Building Used Rights, which will be due on January 28, 2037.

Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan HGB, karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Management believes that there will be no difficulty in the extension of HGB since all the land were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

The management believes that there is no impairment in values of the aforementioned fixed assets, as of July 31, 2021, December 31, 2020 and 2019,

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (revisi) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/For the Seven-month Period Ended July, 31		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31		
	2021	2020 (Revisi/ Review)	2020	2019	
Harga jual	37.000.000	-	-	321.500.000	Selling price
Nilai tercatat bersih	93.526.037	-	-	85.575.000	Net carrying value
Keuntungan (kerugian) penjualan	(56.526.037)	-	-	235.925.000	Gain (loss) on sale

Pada tanggal 31 Juli 2021, dan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, bangunan dan kendaraan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Reliance Indonesia, pihak berelasi terhadap berbagai risiko kerugian masing-masing sebesar Rp448.321.500, Rp1.533.500.000 dan Rp1.161.390.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul atas risiko-risiko tersebut atas aset dipertanggungkan.

As of July 31, 2021, December 31, 2020 and 2019, buildings and vehicles are insured with PT Asuransi Reliance Indonesia, a related party various risk of loss for Rp448.321.500, Rp1,533,500,000 and Rp1,161,390,000, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses rising from such risk on the assets insured.

Tidak ada aset tetap yang dijaminkan pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

There were no fixed assets use as collateral as of July 31, 2021, December 31, 2020 and 2019.

Nilai tercatat bruto dari masing-masing aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebagai berikut:

The gross carrying amount of each fixed assets that has been fully depreciated and is still being used is as follows:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Peralatan kantor	640.307.374	626.677.374	516.402.374	Office Equipment
Kendaraan	298.000.000	298.000.000	-	Vehicles
Renovasi kantor	17.100.000	17.100.000	17.100.000	Office Improvements
Jumlah	955.407.374	941.777.374	533.502.374	Total

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET HAK GUNA

Mutasi aset hak guna pada periode tujuh bulan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

31 Juli 2021/ July 31, 2021				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir Ending Balance
Biaya perolehan				
Bangunan	2.213.244.000	-	-	2.213.244.000
Jumlah	2.213.244.000	-	-	2.213.244.000
Akumulasi penyusutan:				
Bangunan	368.874.000	430.353.000	-	799.227.000
Jumlah	368.874.000	430.353.000	-	799.227.000
Nilai buku bersih	1.844.370.000			1.414.017.000
31 Desember 2020/ December 31, 2020				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir Ending Balance
Biaya perolehan				
Bangunan	-	2.213.244.000	-	2.213.244.000
Jumlah	-	2.213.244.000	-	2.213.244.000
Akumulasi penyusutan:				
Bangunan	-	368.874.000	-	368.874.000
Jumlah	-	368.874.000	-	368.874.000
Nilai buku bersih	-			1.844.370.000

Beban penyusutan aset hak guna yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp430.353.000 dan Rp368.874.000 dan dicatat sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (Catatan 25).

11. RIGHT OF USE ASSETS

The movement of the right of use assets for the seven-month period ended July 31, 2021 and for the year ended December 31, 2020 is as follows:

Depreciation expense right of use assets charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income for the seven-month period ended July 31, 2021 and for the years ended December 31, 2020 amounted to Rp430,353,000 and Rp368,874,000, respectively, and recorded as general and administrative expenses (Note 25).

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH

12. REPOSSESSED ASSETS

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020	2019	
PT Tunas Inti Agro Nusa	-	28.320.000.000	-	PT Tunas Inti Agro Nusa
PT Shaftco Niaga Prima	8.000.000.000	8.000.000.000	-	PT Shaftco Niaga Prima
Radi	1.457.613.492	-	-	Radi
Ayu Hasanah	-	-	3.820.939.354	Ayu Hasanah
Lain-lain	10.659.345.411	7.452.406.473	-	Others
Jumlah	20.116.958.903	43.772.406.473	3.820.939.354	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(4.938.068.773)	-	Allowance for impairment losses
Jumlah - Bersih	20.116.958.903	38.834.337.700	3.820.939.354	Total - Net

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih pada tanggal 31 Desember 2020 telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses on foreclosed assets as of December 31, 2020 is adequate to cover possible losses from uncollectible receivables.

Pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2019, manajemen berpendapat bahwa tidak ada peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai dalam nilai tercatat agunan yang diambil alih.

As of July 31, 2021 and December 31, 2019 management believes that there are no events or changes in circumstances that indicate an impairment in the carrying amount of foreclosed assets.

Realisasi penjualan aset agunan yang diambil alih untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

The realization of the sale of foreclosed assets for the seven-month period ended July 31, 2021 and 2020 and the year ended December 31, 2020 are as follows:

	Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ For the Seven-month Period Ended July, 31		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31		
	2021	2020 (Review/ Review)	2020	2019	
Harga jual	20.000.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	-	Selling price
Nilai tercatat bersih	23.381.931.227	3.820.939.354	3.820.939.354	-	Net carrying value
Rugi penjualan agunan yang diambil alih	(3.381.931.227)	(620.939.354)	(620.939.354)	-	Loss on sale of repossessed assets

Rugi penjualan agunan yang diambil alih dicatat sebagai bagian dari beban lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Loss on sale of repossessed assets were recorded as other expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH

13. MEDIUM TERM NOTES

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Nilai nominal:				Nominal value:
MTN IV Tahun 2018	50.500.000.000	49.500.000.000	45.000.000.000	MTN IV Year 2018
MTN IVB Tahun 2019	199.650.000.000	133.650.000.000	193.000.000.000	MTN IVB Year 2019
	250.150.000.000	183.150.000.000	238.000.000.000	
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(635.314.346)	(1.616.360.805)	(2.964.686.263)	Unamortized of transaction cost
Jumlah	249.514.685.654	181.533.639.195	235.035.313.737	Total

Rincian nilai nominal surat utang jangka menengah pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 menurut tahun jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The details of nominal value of the medium term notes as of July 31, 2021, December 31, 2020 and 2019 by year of maturity are as follow:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Tahun 2021	50.500.000.000	49.500.000.000	45.000.000.000	Year 2021
Tahun 2022	199.650.000.000	133.650.000.000	193.000.000.000	Year 2022
Jumlah	250.150.000.000	183.150.000.000	238.000.000.000	Total

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (revisi) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH
(lanjutan)

Rekonsiliasi MTN diterbitkan dengan MTN yang beredar pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020	2019	
Nilai nominal:				Nominal value:
MTN IV Tahun 2018	67.000.000.000	67.000.000.000	100.000.000.000	MTN IV Year 2018
MTN IVB Tahun 2019	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	MTN IVB Year 2019
	267.000.000.000	267.000.000.000	300.000.000.000	
Konversi surat utang jangka menengah menjadi modal saham	-	-	(33.000.000.000)	Conversion of medium term notes to share capital
Pembelian kembali - bersih	(16.850.000.000)	(83.850.000.000)	(29.000.000.000)	Buy back -net
Dipegang oleh pemegang MTN	250.150.000.000	183.150.000.000	238.000.000.000	Held by MTN holders

Perusahaan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah atau Medium Term Notes (MTN) UPRI III Tahun 2016, Medium Term Notes UPRI IV Tahun 2018 dan Medium Term Notes UPRI IVB Tahun 2019 dengan jumlah nilai pokok masing-masing sebesar Rp 200 miliar, Rp 100 miliar dan Rp 200 miliar.

Seluruh dana yang diperoleh digunakan untuk modal kerja Perusahaan.

Jangka waktu MTN tersebut adalah 3 (tiga) tahun atau jangka waktu yang lebih singkat jika dilakukan Opsi oleh Perusahaan. Tingkat bunga MTN ini adalah 10% (sepuluh persen) per tahun yang dibayarkan setiap bulan. MTN Perusahaan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2021 (MTN UPRI IV Tahun 2018) dan 27 Februari 2022 (MTN UPRI IVB Tahun 2019).

MTN ini tidak dijamin dengan agunan khusus namun dijamin dengan piutang pembiayaan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari (Catatan 5, 6 dan 7), dan tidak dicatatkan di bursa manapun.

Perusahaan menunjuk PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Reliance Capital Management, pihak-pihak berelasi, masing-masing sebagai kustodian dan penjamin MTN.

13. MEDIUM TERM NOTES (continued)

Reconciliations of the MTN issued with the outstanding MTN as of July 31, 2021, December 31, 2020 and 2021 are as follows:

The Company issued Medium Term Notes (MTN) of UPRI III Year 2016, MTN UPRI IV Year 2018 and MTN UPRI IVB Year 2019 with the total principal amounting to Rp 200 billion, Rp 100 billion, and Rp 200 billion, respectively.

All fund obtained will be used for the Company's working capital.

The availability of MTN is for three (3) years or may be shorten based on the option of the Company. The MTN bears interest rate at 10% (ten percent) per annum and paid by the Company on a monthly basis. The Company's MTN will be due on October 29, 2021 (MTN UPRI IV Year 2018), and February 27, 2022 (MTN UPRI IVB Year 2019), respectively.

These Medium Term Notes are not guaranteed by special collateral but are guaranteed by financing receivables, both existing and future. (Notes 5, 6 and 7), and are not listed in any stock exchange.

The Company has appointed PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk and PT Reliance Capital Management, a related parties, as a custodian and trustee for MTN, respectively.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. SURAT UTANG JANGKA MENENGAH
(lanjutan)

Beban bunga atas surat utang jangka menengah ini masing-masing sebesar Rp13.185.904.106, Rp17.323.150.687 dan Rp24.931.232.873 untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, tahun 2020 dan 2019.

MTN UPRI III telah dilunasi pada tanggal 27 Februari 2019.

Pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 Perusahaan melakukan pembelian MTN IV dan MTN IVB masing-masing sebesar nihil dan Rp38.500.000.000. Pada tahun 2020 Perusahaan melakukan pembelian MTN IV dan MTN IVB masing-masing sebesar Rp159.350.000.000 dan Rp3.000.000.000. Pada tahun 2019 Perusahaan melakukan pembelian kembali MTN IV dan MTN IVB masing-masing sebesar Rp18.000.000.000 dan Rp7.000.000.000 serta menyetujui konversi dari MTN IV yang dimiliki oleh PT Reliance Capital Management sebesar Rp 33.000.000.000 menjadi modal saham Perusahaan (Catatan 18).

13. MEDIUM TERM NOTES (continued)

Interest expense on medium term notes amounted to Rp13,185,904,106, Rp17,323,150,687 and Rp24,931,232,873 for the seven-month period ended July 31, 2021 and in 2020 and 2019, respectively.

MTN UPRI III has been settled on February 27, 2019.

For the seven-month period ended July 31, 2021 the Company repurchased MTN IV and MTN IVB amounting to nil and Rp 38,500,000,000, respectively. In 2020 the Company repurchased MTN IV and MTN IVB amounting to Rp159,350,000,000 and Rp3,000,000,000, respectively. In 2019, the Company repurchased MTN IV and MTN IVB amounting to Rp18,000,000,000 and Rp7,000,000,000, respectively and agreed to convert MTN IV owned by PT Reliance Capital Management amounting to Rp 33,000,000,000 to share capital (Note 18).

14. PINJAMAN YANG DITERIMA

14. LOANS PAYABLE

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020	2019	
Pinjaman bank				Bank loan
PT Bank Central Asia Tbk	8.664.712.765	11.781.486.427	18.863.993.423	PT Bank Central Asia Tbk
Pinjaman pihak ketiga				Third party loans
PT Sarana Multigriya Finansial	9.228.425.496	10.790.026.504	2.570.506.090	PT Sarana Multigriya Finansial
PT Wijaya Unggul Sentosa	-	-	1.500.000.000	PT Wijaya Unggul Sentosa
Pinjaman musyarakah	11.000.000.000	6.000.000.000	14.500.000.000	Musyarakah Loans
Jumlah	28.893.138.261	28.571.512.931	37.434.499.513	Total

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 30 Januari 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit berupa *installment loan* dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp 30 miliar. Fasilitas ini berjangka waktu 5 tahun dan dikenakan suku bunga sebesar 10,75% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan 2 unit ruang kantor milik PT Suryatama Tigamitra pihak berelasi, yang berlokasi di Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Juli 2021, dan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah saldo setelah dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp35.287.235, Rp68.513.573 dan Rp136.006.577.

Sehubungan dengan fasilitas di atas, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi batasan-batasan tertentu antara lain menjaga rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh bank yaitu menjaga *gearing ratio* maksimal 5 kali dan *Non Performing Financing (NPF)* maksimal 2%, selain itu juga tidak diperbolehkan menerima pinjaman dari pihak lain berhubungan dengan jaminan yang telah diberikan oleh Perusahaan kepada Bank, meminta persetujuan dari Bank apabila akan melakukan penarikan dividen lebih dari 30% dari laba berjalan sebelumnya, memberitahukan Bank apabila terdapat perubahan susunan pengurusan dan pemegang saham selama Anton Budidjaja masih sebagai *ultimate shareholders* Perusahaan dan memberitahukan apabila terdapat penambahan pinjaman dari pihak lain.

Pada tanggal 31 Juli 2021, dan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian, kecuali rasio *Non Performing Financing (NPF)* per 31 Desember 2019.

Pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, tahun 2020 dan 2019 Perusahaan telah melakukan pembayaran pinjaman bersih kepada PT Bank Central Asia Tbk masing-masing sebesar Rp3.150.000.000, Rp7.150.000.000 dan Rp8.400.000.000

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. LOANS PAYABLE (continued)

PT Bank Central Asia Tbk

On January 30, 2018, the Company obtained installment loan credit facility from PT Bank Central Asia Tbk amounting to Rp 30 billion. This facility has a term of 5 years and bears interest rate at 10.75% per annum. This loan is secured by 2 unit office space of PT Suryatama Tigamitra, a related party, which is located at Jl. KH Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta. The outstanding loan balance as of July 31, 2021, and of December 31, 2020 and 2019 is net of unamortized transaction costs amounting to Rp35,287,235, Rp68,513,573 and Rp136,006,577, respectively.

In relation with the above facility, the Company is required to fulfill certain covenants including maintaining financial ratios set by the bank, as follows maintaining a gearing ratio shall be maximum of 5 times and Non Performing Financing (NPF) shall be maximum of 2%, and not allowed to receive loans from others parties pertaining to collateral given by the Company to the Bank, request approval from bank for withdrawal dividend more than 30% of retained earnings, notify the bank if there is a change in the arrangement of management and shareholders as long as Anton Budidjaja is still the Company's ultimate shareholder and notifies if there are additional loans from other parties.

As of July 31, 2021, and of December 31, 2020 and 2019, the Company has complied with all financial ratios required to be maintained under the agreements, except for the ratio of Non Performing Financing (NPF) as of December 31, 2019.

For the seven-month period ended July 31, 2021, and in 2020 and 2019 the Company has repaid the net loan to PT Bank Central Asia Tbk amounting to Rp Rp3,150,000,000, Rp7,150,000,000 and Rp8,400,000,000, respectively.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Nilai tercatat pada biaya perolehan diamortisasi dari pinjaman bank adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020	2019	
Saldo pinjaman	8.700.000.000	11.850.000.000	19.000.000.000	Outstanding loan
Biaya perolehan yang belum diamortisasi	(35.287.235)	(68.513.573)	(136.006.577)	Unamortized transaction costs
Jumlah	8.664.712.765	11.781.486.427	18.863.993.423	Total

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman tanggal 9 November 2018, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) setuju memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp10 miliar yang digunakan untuk refinancing Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Fasilitas ini berjangka waktu satu tahun sejak tanggal pencairan pinjaman dan dikenakan suku bunga sebesar 9,5% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan fidusia tagihan KPR sebesar 125% (Catatan 7). Pada tanggal 18 November 2019, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman ke PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman tanggal 30 Oktober 2019, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) setuju memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp2.641.261.367 yang digunakan untuk refinancing KPR. Fasilitas ini berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan pinjaman dan dikenakan suku bunga sebesar 8,75% per tahun serta dijamin dengan fidusia tagihan KPR sebesar 100% (Catatan 7).

Berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman tanggal 13 Januari 2020, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) setuju memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp5.151.841.949 yang digunakan untuk refinancing KPR. Fasilitas ini berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan pinjaman dan dikenakan suku bunga sebesar 8,60% per tahun serta dijamin dengan agunan portofolio KPR (Catatan 7).

14. LOANS PAYABLE (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (continued)

The carrying amount of amortized cost of a bank loan is as follows:

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Based on credit agreement dated November 9, 2018, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) agreed to provide loan facility amounting Rp10 billion which were use for refinancing Home Ownership Credit (KPR). The term of this facility is for one year from the date of drawn down and bears interest rate at 9.5% per annum. This facility is collateralized by a fiduciary mortgage receivables at an amount of 125% (Note 7). As of November 18, 2019, the Company has fully paid loans to PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Based on credit agreement dated October 30, 2019, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) agreed to provide loan facility amounting Rp2,641,261,367 which were use for refinancing KPR. The term of this facility is for 5 (five) year from the date of drawn down and bears interest rate at 8.75% per annum. This facility is collateralized by a fiduciary mortgage receivables at an amount of 100% (Note 7).

Based on agreement dated January 13, 2020, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) agreed to provide a loan facility of Rp5,151,841,949 which is used for mortgage refinancing. This facility has a term of 5 (five) years from the date of loan disbursement and bears an interest rate of 8.60% per annum and is secured by collateral for the KPR portfolio (Note 7).

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
(lanjutan)

Berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman tanggal 29 Desember 2020, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) setuju memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp4.301.570.566 yang digunakan untuk refinancing KPR. Fasilitas ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencairan pinjaman dan dikenakan suku bunga sebesar 9,00% per tahun serta dijamin dengan agunan portofolio KPR (Catatan 7).

Pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 Perusahaan melakukan pembayaran pinjaman bersih kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp1.561.601.008, tahun 2020 Perusahaan menerima pinjaman bersih dari PT Sarana Multigriya (Persero) sebesar Rp8.221.355.682. Sedangkan pada tahun 2019 Perusahaan melakukan pembayaran pinjaman bersih kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp6.596.160.577.

PT Wijaya Unggul Sentosa

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 29 Juni 2019, PT Wijaya Unggul Sentosa setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 5 miliar secara bertahap yang digunakan untuk pengembangan usaha. Pinjaman ini dikenakan bunga 18% per tahun dan berjangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian ini.

Pada tanggal 6 Februari 2020, PT Wijaya Unggul Sentosa (Shopintar) telah memberitahukan pengakhiran pembiayaan dengan Perusahaan, dalam Surat Pemberitahuan Pengakhiran Kerjasama (SPPK) yang efektif per tanggal 7 Maret 2020. Seluruh kewajiban pembayaran atas fasilitas pokok beserta seluruh bunga telah diselesaikan pada tanggal 12 Maret 2020.

Pada tahun 2020 Perusahaan melakukan pembayaran pinjaman bersih dari PT Wijaya Unggul Sentosa sebesar Rp1.500.000.000. Sedangkan pada tahun 2019 Perusahaan menerima pinjaman bersih kepada PT Wijaya Unggul Sentosa sebesar Rp1.500.000.000.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. LOANS PAYABLE (continued)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
(continued)

Based on agreement dated December 29, 2020, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) agreed to provide a loan facility of Rp4,301,570,566 which is used for mortgage refinancing. This facility has a term of 3 (three) years from the date of loan disbursement and bears an interest rate of 9.00% per annum and is secured by collateral for the KPR portfolio (Note 7).

For the seven-month period ended July 31, 2021 the Company made a net loan repayment to PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) amounting to Rp1,561,601,008, in 2020 the Company received a net loan from PT Sarana Multigriya (Persero) amounting to Rp8,221,355.682. While in 2019 the Company made a net loan repayment to PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) amounting to Rp6,596,160,577.

PT Wijaya Unggul Sentosa

Based on credit agreement dated June 29, 2019, PT Wijaya Unggul Sentosa agreed to provide loan facility amounting Rp 5 billion on gradual basis which was used for business development. This loan bears interest rate at 18% per annum and term of this facility is for 1 (one) year from the date of draw down.

On Februari 6, 2020, PT Wijaya Unggul Sentosa (Shopintar) has notified the termination of financing cooperation with the Company, in Termination of Cooperation Letter (SPPK), which will be effective on March 7, 2020. All repayment of principal and interest financing have been settled on March 12, 2020.

In 2020 the Company made a net loan repayment from PT Wijaya Unggul Sentosa amounting to Rp1,500,000,000. Meanwhile, in 2019 the Company received a net loan to PT Wijaya Unggul Sentosa amounting to Rp1,500,000,000.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Pinjaman Musyarakah

Rincian fasilitas pinjaman musyarakah Perusahaan adalah sebagai berikut:

Shahibul Mall (Pemilik Dana) <i>Fund owner</i>	Jumlah pinjaman / <i>Total loan</i>			Nisbah Bagi Hasil per tahun/ <i>Revenue</i> <i>Sharing ratio per annum</i>	Jangka waktu/ <i>Terms</i>
	31 Juli 2021/ <i>July 31, 2021</i>	31 Desember/December 31, <i>2020</i>	2019		
Koperasi Jasa Gramindo Berkah Madani	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	17,5% - 19,5%	60 bulan/ <i>Months</i>
PT Unicorn Teknologi Indonesia	8.000.000.000	-	-	16% - 18%	12 bulan/ <i>Months</i>
PT Agung Kentjana Abadi	-	3.000.000.000	3.000.000.000	18% - 19%	12 bulan/ <i>Months</i>
PT Karya Widuri Utama	-	-	7.500.000.000	16% - 18%	12 bulan/ <i>Months</i>
PT Robot Rupiah Timur Baru	-	-	1.000.000.000	17,5% - 19,5%	12 bulan/ <i>Months</i>
Jumlah/Total	11.000.000.000	6.000.000.000	14.500.000.000		

Pada tanggal 6 Februari 2020, PT Karya Widuri Utama (Kredit Pintar) telah memberitahukan pengakhiran pembiayaan dengan Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Pengakhiran Kerjasama (SPPK) yang efektif per tanggal 7 Maret 2020. Seluruh kewajiban pembayaran atas fasilitas pokok beserta seluruh bunga telah diselesaikan pada tanggal 12 Maret 2020.

Pada tanggal 14 Maret 2020, Perusahaan dan PT Robot Rupiah Timur Baru sepakat untuk melakukan penangguhan pembiayaan, efektif per tanggal 30 April 2020. Seluruh kewajiban pembayaran atas fasilitas pokok beserta seluruh bunga telah diselesaikan pada tanggal 26 April 2020.

Pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 Perusahaan menerima pinjaman bersih dari Pinjaman Musyarakah sebesar Rp5.000.000.000. Pada tahun 2020 Perusahaan melakukan pembayaran pinjaman bersih dari Pinjaman Musyarakah sebesar Rp8.500.000.000. Pada tahun 2019 Perusahaan menerima pinjaman bersih dari Pinjaman Musyarakah sebesar Rp11.500.000.000.

14. LOANS PAYABLE (continued)

Musyarakah Loan

The details of the Company musyarakah loan are as follows:

On Februari 6, 2020, PT Karya Widuri Utama (Kredit Pintar) has notified the termination of financing cooperation with the Company in Termination of Cooperation Letter (SPPK), which will be effective on March 7, 2020. All repayment of principal and interest financing have been settled on March 12, 2020.

On March 14, 2020, the Company and PT Robot Rupiah Timur Baru agreed to financing partnership, effective of April 30, 2020. All repayment of principal and interest financing have been settled on April 26, 2020.

For the seven-month period ended July 31, 2021 the Company received a net loan from Musyarakah Loans amounting to Rp5,000,000,000. In 2020 the Company made a net loan repayment from the Musyarakah Loans amounting to Rp8,500,000,000. In 2019 the Company received a net loan from Musyarakah Loans amounting to Rp11,500,000,000.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. BEBAN AKRUAL

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Jasa manajemen (Catatan 28)	1.046.461.600	679.098.800	-	Management fee (Note 28)
Jasa profesional	577.832.200	480.708.800	196.354.400	Professional fee
Bunga	313.814.703	259.370.080	425.139.929	Interest
Asuransi tenaga kerja	-	39.315.070	-	Labor insurance
Lain-lain	1.444.840.215	1.100.059.996	624.781.239	Others
Jumlah	3.382.948.718	2.558.552.746	1.246.275.568	Total

16. LIABILITAS LAIN-LAIN

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Titipan konsumen	18.035.507.555	15.250.634.785	11.758.455.009	Consumer deposit
Utang kepada developer	10.358.883.374	13.245.706.159	3.387.764.799	Payable to developer
Jumlah	28.394.390.929	28.496.340.944	15.146.219.808	Total

Titipan konsumen merupakan uang yang diterima terlebih dahulu sehubungan dengan penerimaan angsuran piutang pembiayaan dan pembayaran premi asuransi dari konsumen.

Utang kepada developer merupakan utang kepada developer (pihak ketiga) yang membangun perumahan sehubungan dengan pembiayaan konsumen untuk perumahan. Utang kepada Developer tidak dikenakan bunga dan akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Consumer deposits are money received in advance relation with the receipt of installment financing receivables and payment of insurance premiums from consumers.

Payable to developer are payable to developer (third parties) who build housing in relation with consumer financing for housing. Payable to developer is not subject interest and shall be paid based on agreement.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Tabel berikut menyajikan pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas tertentu Perusahaan:

17. FAIR VALUE MEASUREMENT

The following table provides the fair value measurement of the Company's certain assets and liabilities:

31 Juli 2021/ July, 31 2021					
Pengukuran nilai wajar menggunakan/ Fair value measurement using:					

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (revisi) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

17. FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

31 Desember 2019/ December 31, 2019					
Pengukuran nilai wajar menggunakan/ Fair value measurement using:					
		Input signifikan yang dapat diobservasi (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)		Input signifikan yang dapat diobservasi (Level 2)/ Significant unob servable inputs (Level 2)	
Nilai Tercatat/ Carrying Values				Input signifikan yang tidak dapat diobsenasi (Level 3)/ Significant unob servable inputs (Level 3)	
Aset yang nilai wajarnya disajikan					
Piutang pembiayaan	314.904.934.178	-	314.904.934.178	-	Assets for which fair values are disclosed: Financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	26.146.535.613	-	26.146.535.613	-	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	42.067.246.514	-	42.067.246.514	-	Consumer financing receivables
Piutang pembiayaan syariah	73.080.026.944	-	73.080.026.944	-	Sharia financing receivables
Liabilitas yang nilai wajarnya disajikan:					
Surat utang jangka menengah	235.035.313.737	-	235.035.313.737	-	Liabilities for which fair values are disclosed: Medium term notes
Pinjaman yang diterima	37.434.499.513	-	37.434.499.513	-	Loans received

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Kuotasi harga pasar yang digunakan untuk aset keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan adalah harga penawaran (*bid price*) terkini. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh entitas. Jika seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. The quoted market price used for financial assets held by the Company is the current bid price. These instruments are included in hierarchy Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity's specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in hierarchy Level 2.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PENGUKURAN NILAI WAJAR (lanjutan)

Jika satu atau lebih input signifikan tidak diambil dari data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 3.

17. FAIR VALUE MEASUREMENT (continued)

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in hierarchy Level 3.

18. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2021, dan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

18. CAPITAL STOCK

The shareholder of the Company as of July 31, 2021, and of December 31, 2020 and 2019 is as follow:

<u>Nama Pemegang Saham/ Name of Stockholders</u>	<u>Jumlah Saham/ Number of shares</u>	<u>Persentase Pemilikan/ Percentage of ownership</u> %	<u>Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-Up Capital Stock</u>
PT Reliance Capital Management	113.000	85	113.000.000.000
PT Asuransi Reliance Indonesia	20.000	15	20.000.000.000
Jumlah	133.000	100	133.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 56 tanggal 19 Juli 2019 dari Dra. RR. Hariyanti Poerbiantari, S.H, notaris di Jakarta, para pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain konversi dari MTN IV (Catatan 13) yang dimiliki oleh PT Reliance Capital Management sebesar Rp 33.000.000.000 menjadi modal saham Perusahaan dan penerbitan saham baru Perusahaan sebanyak 33.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham.

Based on Notarial deed No. 56 dated July 19, 2019 from Dra. RR. Hariyanti Poerbiantari, S.H, a public notary in Jakarta, the shareholder agreed to convert of MTN IV (Note 13) owned by PT Reliance Capital Management amounting to Rp 33,000,000,000 to share capital and issuance of new shares of 33,000 shares with a nominal value of Rp 1,000,000 per share.

Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0303830 tanggal 26 Juli 2019.

This amendment has been reported to and recorded in database of the Legal Entity Administration System of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia with Letter No. AHU-AH.01.0303830 dated July 26, 2019.

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.

Capital Management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Company is not required to meet any capital requirements.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Manajemen Permodalan (lanjutan)

Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Perusahaan memantau modalnya dengan menggunakan analisa *gearing ratio* (rasio utang terhadap modal), yakni membagi utang bersih terhadap jumlah modal.

Rasio utang bersih terhadap modal pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020	2019
Utang bunga	267.407.823.914	204.105.152.126	257.969.813.250
Dikurangi: kas dan bank	7.437.094.502	1.366.472.701	9.095.178.837
Utang bunga - bersih	259.970.729.412	202.738.679.425	248.874.634.413
Ekuitas	207.538.796.373	200.118.903.297	188.147.424.879
Rasio utang bunga terhadap modal (<i>gearing ratio</i>)	1,25	1,01	1,32

Perusahaan telah memenuhi ketentuan *gearing ratio* sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.05/2014 tanggal 19 November 2014 yaitu setinggi-tingginya 10 kali.

18. CAPITAL STOCK (continued)

Capital Management (continued)

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. The Company monitors its capital using gearing ratios, by dividing net debt by total capital.

Ratio of net debt to equity as of seven-month period ended July 31, 2021 and of December 31, 2020 and 2019 are as follows:

Interest-bearing debts
Less: cash on hand and in banks
Net interest-bearing debts
Equity
Ratio of interest-bearing debt to equity (<i>gearing ratio</i>)

The Company's gearing ratio is in compliance with the requirements of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 29/PMK.05/2014 dated November 19, 2014 which is maximum of 10 times.

19. LABA PER SAHAM – DASAR

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar pada tahun bersangkutan.

	Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ For the Seven-month Period Ended July, 31	
	2020	
	2021	(Review/ Review)
Laba tahun/periode berjalan	7.426.563.942	17.451.863.415
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar	133.000	133.000
Laba per saham - dasar	55.839	131.217

19. EARNINGS PER SHARE – BASIC

Earnings per share is calculated by dividing income for the year by the weighted average number of shares outstanding during the year.

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31	
	2020	2019
Income for the year/period	21.643.928.137	1.621.840.033
Weighted average number of share outstanding	133.000	133.000
Earnings per share - basic	162.736	12.194

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. LABA PER SAHAM – DASAR (lanjutan)

Perusahaan tidak memiliki instrumen yang memberikan dampak efek dilusi pada laba per saham dasar.

19. EARNINGS PER SHARE – BASIC (continued)

The Company does not have instrument that gives impact of dilution effect on basic earning per share.

20. PENDAPATAN PEMBIAYAAN

	Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ For the Seven-month Period Ended July, 31	
	2020	
	2021	(Review/ Review)
Pihak berelasi (Catatan 28)	3.898.632.231	4.702.308.413
Pihak ketiga	13.829.261.290	15.392.131.258
Jumlah	17.727.893.521	20.094.439.671

20. FINANCING INCOME

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31	
	2020	2019
Pihak berelasi (Note 28)	7.806.767.446	14.961.240.355
Pihak ketiga	29.176.847.167	27.021.046.514
Jumlah	36.983.614.613	41.982.286.869

21. PENDAPATAN SEWA PEMBIAYAAN

Seluruh pendapatan sewa pembiayaan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan 2020, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah dari pihak ketiga masing-masing sebesar Rp115.219.169, Rp1.306.123.298, Rp1.742.302.861 dan Rp6.137.167.823.

21. FINANCE LEASE INCOME

All financial lease income for the seven-month period ended July 31, 2021 and 2020, and for the years ended December 31, 2020 and 2019 are from third parties amounting to Rp115,219,169, Rp1,306,123,298, Rp1,742,302,861 and Rp6,137,167,823, respectively.

22. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

	Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ For the Seven-month Period Ended July, 31	
	2020	
	2021	(Review/ Review)
Pihak berelasi (Catatan 28)	-	-
Pihak ketiga	5.693.464.140	6.205.395.431
Jumlah	5.693.464.140	6.205.395.431

22. CONSUMER FINANCING INCOME

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31	
	2020	2019
Pihak berelasi (Note 28)	-	3.985.348
Pihak ketiga	5.569.578.304	5.853.254.324
Jumlah	5.569.578.304	5.857.239.672

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (revisi) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. PENDAPATAN MARJIN / BAGI HASIL

	Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ For the Seven-month Period Ended July, 31	
	2020	
	2021	(Revisi/ Review)
Mudharabah	940.000.000	3.714.055.250
Musyarakah mutanaqisah	1.283.418.733	255.215.713
Murabahah	11.521.467.806	175.602.912
Investasi Musyarakah	157.500.000	-
Jumlah	13.902.386.539	4.144.873.875

23. MARGIN / REVENUE SHARING

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31	
	2020	2019
Mudharabah	6.338.956.750	7.778.082.034
Musyarakah mutanaqisah	511.342.536	332.511.666
Murabahah	302.216.727	230.510.455
Investasi Musyarakah	82.016.129	-
Total	7.234.532.142	8.341.104.155

24. BEBAN BUNGA DAN BIAYA KEUANGAN

	Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ For the Seven-month Period Ended July, 31	
	2020	
	2021	(Revisi/ Review)
Surat utang jangka menengah	13.185.904.106	11.271.041.097
Pinjaman yang diterima	6.436.219.102	2.926.175.736
Jumlah	19.622.123.208	14.197.216.833

24. INTEREST EXPENSES AND FINANCIAL CHARGES

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31	
	2020	2019
Medium term notes	17.323.150.687	24.931.232.873
Loan received	4.890.928.229	5.367.965.587
Total	22.214.078.916	30.299.198.460

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ For the Seven-month Period Ended July, 31	
	2020	
	2021	(Revisi/ Review)
Gaji dan tunjangan	5.676.058.206	4.200.207.104
Jasa profesional	1.547.087.625	3.677.189.896
Jasa Teknis (Catatan 28f dan 28g)	404.029.467	367.362.800
Amortisasi aset hak guna (Catatan 28d)	430.353.000	61.479.000
Penyusutan (Catatan 10)	524.149.531	181.974.107
Sewa kantor (Catatan 28d)	-	356.400.000
Perbaikan dan pemeliharaan	159.846.087	195.469.814
Imbalan kerja (Catatan 26)	87.446.937	125.191.477
Keanggotaan	146.412.007	144.242.371
Lain-lain	1.389.025.545	1.112.963.478
Jumlah	10.364.408.405	10.422.480.047

25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31	
	2020	2019
Salaries and allowances	8.023.662.967	7.179.323.091
Professional fees	5.371.448.051	3.036.161.692
Technical fees (Notes 28f and 28g)	629.764.800	1.259.529.600
Amortization of right of use assets (Note 28d)	368.874.000	-
Depreciation (Note 10)	357.398.127	299.160.026
Office rental (Note 28d)	356.400.000	653.400.000
Repair and maintenance	328.182.476	229.761.293
Employment benefits (Note 26)	214.613.961	301.848.748
Membership	249.105.092	299.116.883
Others	1.815.511.215	1.264.105.256
Total	17.714.960.689	14.522.406.589

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (revisi) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Pada tahun 2021 Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja jangka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2019 besarnya imbalan kerja jangka dihitung berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak terdapat pendanaan khusus yang dibentuk atas imbalan kerja jangka tersebut.

Perhitungan aktuaria terakhir atas liabilitas imbalan kerja jangka tersebut dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Muh Imam Basuki dan Rekan, aktuaris, dengan tanggal laporan 21 September 2021.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka tersebut masing-masing sebanyak 32, 26 dan 14 karyawan pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, tahun 2020 dan 2019.

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

	Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ For the Seven-month Period Ended July, 31		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31		
	2021	2020 (Revisi/ Review)	2020	2019	
Biaya jasa kini	54.626.735	65.861.649	112.905.684	222.803.227	Current service cost
Biaya bunga	32.820.202	59.329.828	101.708.277	79.045.521	Interest cost
Komponen biaya imbalan pasti yang diakui di laba rugi	87.446.937	125.191.477	214.613.961	301.848.748	Component of employee benefits cost recognized in profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	8.552.392	(401.493.855)	(688.275.181)	125.153.402	Remeasurement of defined benefit liability recognized in other comprehensive income
Jumlah	87.446.937	125.191.477	(473.661.220)	427.002.150	Total

Biaya jasa kini dan biaya bunga untuk tahun berjalan disajikan sebagai bagian dari "Beban umum dan administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 25).

26. LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

In 2021 the Company recognizes long-term employee benefits liability based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 of 2021. Meanwhile in 2020 and 2019 the amount of long-term employee benefits liability is calculated based on Law no. 13 of 2003 dated March 25, 2003. Was formed as a result of this long-term employee benefits.

The latest actuarial valuation for the long-term employee benefits liability was from Kantor Konsultan Aktuaria Muh Imam Basuki dan Rekan, an independent actuary, dated September 21, 2021.

Number of eligible employees are 32, 26 and 14 for the seven-month period ended July 31, 2021, and in 2020 and 2019, respectively.

Amounts recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of these employee benefits are as follows:

The current service cost and the interest cost for the year are included in the "General and administrative expenses" in the statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 25).

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (revisi) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Pengukuran sebagian atas liabilitas imbalan pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ For the Seven-month Period Ended July, 31		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31	
	2020			
	2021	(Revisi/ Review)	2020	2019
Saldo awal tahun/periode	786.897.946	1.402.872.785	1.402.872.785	975.870.635
Biaya jasa kini	54.626.735	65.861.649	112.905.684	222.803.227
Biaya bunga	32.820.202	59.329.828	101.708.277	79.045.521
Pembayaran imbalan pasca kerja	-	(142.313.619)	(142.313.619)	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	8.552.392	(401.493.855)	(688.275.181)	125.153.402
Saldo akhir tahun/periode	882.897.275	984.256.788	786.897.946	1.402.872.785

*Beginning balance of
year/period*
Current service cost
Interest cost
*Payment of post-employment
benefits*
*Remeasurement of defined
benefit liability*
***Balance at the end of
the year/period***

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan Liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebagai berikut:

*The principal actuarial assumptions used in
valuation of the long-term employee benefits liability
are as follows:*

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Tingkat diskonto	7,78%	7,15%	7,25%	<i>Discount rate per annum</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,0%	5,0%	5,0%	<i>Salary increment rate per annum</i>
Tingkat kematian	TMI IV	TMI III	TMI III	<i>Mortality rate</i>
Usia pensiun normal	57	56	55	<i>Normal retirement age</i>

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-
asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja
jangka panjang adalah sebagai berikut:

31 Juli 2021/July 31, 2021				
<u>Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on defined benefit liability</u>				
Perubahan asumsi/ <i>Change in assumptions</i>	Kenaikan asumsi/ <i>Increase in assumptions</i>	Penurunan asumsi/ <i>Decrease in assumptions</i>		
Tingkat diskonto	1%	(24.761.958)	26.428.952	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	24.375.903	(23.208.085)	Salary growth rate
31 Desember 2020/December 31, 2020				
<u>Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on defined benefit liability</u>				
Perubahan asumsi/ <i>Change in assumptions</i>	Kenaikan asumsi/ <i>Increase in assumptions</i>	Penurunan asumsi/ <i>Decrease in assumptions</i>		
Tingkat diskonto	1%	(23.936.462)	25.509.470	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	23.031.393	(22.059.017)	Salary growth rate
31 Desember/December 31, 2019				
<u>Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti/Impact on defined benefit liability</u>				
Perubahan asumsi/ <i>Change in assumptions</i>	Kenaikan asumsi/ <i>Increase in assumptions</i>	Penurunan asumsi/ <i>Decrease in assumptions</i>		
Tingkat diskonto	1%	(56.787.245)	62.813.695	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	59.853.971	(55.119.678)	Salary growth rate

27. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020 2019		
Pajak kini				Current tax
2019	-	-	432.123.692	2019
2017	686.422.838	686.422.838	686.422.838	2017
2016	423.435.910	423.435.910	423.435.910	2016
Pajak penghasilan				Income tax
Pasal 4 (2)	295.130.137	219.472.602	313.826.712	Article 4(2)
Pasal 21	35.429.490	72.491.244	38.138.050	Article 21
Pasal 23	4.524.076	525.000	1.409.582	Article 23
Pasal 25	-	-	255.748.833	Article 25
Jumlah	1.444.942.451	1.402.347.594	2.151.105.617	Total

27. TAXATION

a. Tax Payable

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (revisi) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Utang Pajak (lanjutan)

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terutangnya pajak, dengan beberapa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut.

b. Manfaat (Beban) Pajak

Manfaat (beban) pajak Perusahaan terdiri dari:

	Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ For the Seven-month Period Ended July, 31		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31		
	2021	2020 (Revisi/Review)	2020	2019	
Pajak kini	(807.832.300)	-	(1.254.246.180)	(4.466.257.250)	Current tax
Pajak tangguhan	(1.403.856.606)	(6.236.202.100)	(6.198.828.664)	3.895.538.074	Deferred tax
Jumlah	<u>(2.211.688.906)</u>	<u>(6.236.202.100)</u>	<u>(7.453.074.844)</u>	<u>(570.719.176)</u>	Total

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

27. TAXATION (continued)

a. Tax Payable (continued)

The filed tax returns are based on the Company's own calculation of tax liabilities (*self-assessment*). Based on the Law No. 28 Year 2007, regarding the third amendment of the General Taxation Provisions and Procedures' the time limit for the tax authorities to assess or amend taxes was reduced to 5 (five) years, subject to certain exceptions, in accordance with provisions of the Law.

b. Tax Benefit (Expense)

Tax benefit (expense) of the Company consists of the following:

c. Current Tax

A reconciliation between profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income of the Company is as follows:

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini (lanjutan)

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Badan masing-masing tahun tersebut yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan perhitungan pajak penghasilan di atas.

Pada tahun 2019, berdasarkan Undang undang No. 36 Tahun 2008, tarif pajak penghasilan Perusahaan menggunakan tarif tunggal yaitu 25%.

Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ("Undang-undang No. 2 Tahun 2020") mengatur mengenai adanya penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 – 2021 dan sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.

27. TAXATION (continued)

c. Current Tax (continued)

The calculation of income tax for the years ended December 31, 2020 and 2019 has been reported in the Annual Income Tax Return for the respective years which is reported to the Tax Service Office in accordance with the income tax calculation above.

In year 2019, based on Law No. 36 Year 2008, the tax rate being used to calculate the corporate income tax of the Company is using a single rate of 25%.

Based on Law No. 2 of 2020 dated May 18, 2020 regarding State Financial Policies and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability ("Law No. 2 of 2020") regulates the adjustment of the Income Tax rate for domestic Corporate Taxpayers and permanent business entity regarding the rate reduction of Article 17 paragraph (1) letter b for the Law on Income Tax to 22% (twenty two percent) effective for Fiscal Year 2020 – 2021 and 20% (twenty percent) which will be effective for Fiscal Year 2022.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset Pajak Tangguhan

Rincian Aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ Adjustment due to changes in tax rates	Penyesuaian periode lalu atas penerapan PSAK 71/ Prior period adjustment of PSAK 71 implementation	Dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif/ Credited to income for the year	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Juli 2021/ July 31, 2021	
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	514.479.802	-	-	(514.479.802)	-	-	Allowance for impairment losses on receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih	908.615.130	-	-	(908.615.130)	-	-	Allowance for impairment losses on repossessed assets
Liabilitas Imbalan pasca kerja	173.117.549	-	-	19.238.326	1.881.526	194.237.400	Post-employment benefits liability
Jumlah	1.596.212.481	-	-	(1.403.856.606)	1.881.526	194.237.400	Total

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ Adjustment due to changes in tax rates	Penyesuaian periode lalu atas penerapan PSAK 71/ Prior period adjustment of PSAK 71 implementation	Dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif/ Credited to income for the year	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	3.820.075.887	(911.489.219)	3.775.667.601	(6.169.774.467)	-	514.479.802	Allowance for impairment losses on receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih	-	-	-	908.615.130	-	908.615.130	Allowance for impairment losses on repossessed assets
Liabilitas Imbalan pasca kerja	350.718.197	(42.086.183)	-	15.906.075	(151.420.540)	173.117.549	Post-employment benefits liability
Jumlah	4.170.794.084	(953.575.402)	3.775.667.601	(5.245.253.262)	(151.420.540)	1.596.212.481	Total

	1 Januari 2019/ January 1, 2019	Dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif/ Credited to income for the year	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	-	3.820.075.887	-	3.820.075.887	Allowance for impairment losses on receivables
Liabilitas Imbalan pasca kerja	243.967.659	75.462.187	31.288.351	350.718.197	Post-employment benefits liability
Jumlah	243.967.659	3.895.538.074	31.288.351	4.170.794.084	Total

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (revisi) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ For the Seven-month Period Ended July, 31		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31		
	2021	2020 (Revisi/Review)	2020	2019	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	9.638.252.848	23.688.065.515	29.097.002.981	2.192.559.209	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak dengan tarif yang berlaku	(2.120.415.429)	(5.211.374.620)	(6.401.340.570)	(548.139.749)	Tax expense at effective tax rate
Pengaruh pajak atas perbedaan tetap	(91.273.477)	(71.252.078)	(98.158.872)	(22.579.427)	Tax effect of permanent differences
Dampak perubahan tarif pajak	-	(953.575.402)	(953.575.402)	-	Impact of changes in tax rates
Beban Pajak	(2.211.688.906)	(6.236.202.100)	(7.453.074.844)	(570.719.176)	Tax Expense

27. TAXATION (continued)

d. Deferred Tax Assets (continued)

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates is as follows:

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat Hubungan Pihak Berelasi

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship
PT Reliance Capital Management	Pemegang saham/Shareholders
PT Asuransi Reliance Indonesia	Pemegang saham/Shareholders
PT Reliance Sekuritas Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/Owner by the same controlling shareholder
PT Reliance Modal Ventura	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/Owner by the same controlling shareholder
PT RelianceIntegrasi Dunia Anda	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/Owner by the same controlling shareholder
PT Andalan Piranti Indonesia *)	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/Owner by the same controlling shareholder
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi *)	Entitas sepengendali/Entity under common control
PT Andaland Jaya Propertindo *)	Entitas sepengendali/Entity under common control
PT Multi Artha Griya	Entitas sepengendali/Entity under common control
PT Viva Medika	Entitas sepengendali/Entity under common control
PT Suryatama Tigamitra	Entitas sepengendali/Entity under common control
PT Bintang Cemerlang Suksesindo *)	Entitas sepengendali/Entity under common control
PT Mithaharum Abadi Jaya *)	Entitas sepengendali/Entity under common control
PT Nutrisi Depot Indonesia *)	Entitas sepengendali/Entity under common control
Anton Budidjaja	Komisaris utama perusahaan/President Commissioner of the Company
Nurwati Tunggal *)	Karyawan kunci Grup Perusahaan/Key Employee of the Company Group

*) Pada tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 sudah tidak memiliki hubungan berelasi lagi dengan Perusahaan.

28. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
Piutang lain-lain, Surat utang jangka menengah, Beban akrual, Beban umum dan administrasi, Beban bunga dan beban keuangan lainnya/Other receivables, Medium term notes, Accrued expenses, General and administrative expenses, Interest expenses and other financial charges
Beban umum dan administrasi, Beban bunga dan beban keuangan lainnya/General and administrative expenses, Interest expenses and other financial charges
Surat utang jangka menengah, Beban umum dan administrasi, Beban bunga dan beban keuangan lainnya/Medium term notes, General and administrative expenses, Interest expenses and other financial charges
Surat utang jangka menengah, Beban bunga dan beban keuangan lainnya/Medium term notes, Interest expenses and other financial charges
Piutang lain-lain, Surat utang jangka menengah, Beban bunga dan beban keuangan lainnya/Other receivables, Medium term notes, Interest expenses and other financial charges
Beban umum dan administrasi/General and administrative expenses
Kas dan bank/Cash on hand and in banks
Pendapatan bunga pembiayaan, Pendapatan administrasi/Financing interest income, Administrative income
Piutang pembiayaan, Piutang lain-lain, Surat utang jangka menengah, Pendapatan bunga pembiayaan, Beban umum dan administrasi, Beban bunga dan beban keuangan lainnya/Financing Receivables, Other receivables, Medium term notes, Financing interest income, General and administrative expenses, Interest expenses and other financial charges
Pendapatan bunga pembiayaan, Pendapatan administrasi, Beban umum dan administrasi/Financing interest income, Administrative income, General and administrative expenses
Surat utang jangka menengah, Beban umum dan administrasi, Beban bunga dan beban keuangan lainnya/Medium term notes, General and administrative expenses, Interest expenses and other financial charges
Piutang pembiayaan, Pendapatan bunga pembiayaan/Financing Receivables, Financing interest income
Piutang pembiayaan, Pendapatan bunga pembiayaan/Financing Receivables, Financing interest income
Piutang pembiayaan, Pendapatan bunga pembiayaan/Financing Receivables, Financing interest income
Surat utang jangka menengah, Beban bunga dan beban keuangan lainnya/Medium term notes, General and administrative expenses, Interest expenses and other financial charges
Piutang pembiayaan konsumen, Pendapatan pembiayaan konsumen/Consumer financing receivables, Consumer finance income

*) As of July 31, 2021 and December 31, 2020, he no longer has a related relationship with the Company.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi Dengan Pihak Berelasi

- a. Perusahaan mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, PT Reliance Manajer Investasi, PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia dan PT Asuransi Reliance Indonesia sehubungan dengan pembiayaan kendaraan. Piutang ini berjangka waktu 2 – 4 tahun, dikenakan bunga 17% dan dijamin dengan kendaraan yang bersangkutan.
- b. Perusahaan mengadakan perjanjian pembiayaan berupa pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dengan PT Andaland Jaya Propertindo, PT Multi Artha Griya dan PT Viva Medika. Piutang ini berjangka waktu 2-9 tahun, dikenakan bunga 12% per tahun dan dijamin dengan tanah, tanah dan bangunan, apartemen serta mesin dan perlengkapan. Pada tahun 2020 perjanjian dengan PT Andaland Jaya Propertindo dan PT Viva Medika sudah berakhir.
- c. Perusahaan telah mengasuransikan aset tetap kepada PT Asuransi Reliance Indonesia (Catatan 10).
- d. Perusahaan menandatangani perjanjian sewa menyewa ruangan kantor dengan PT Suryatama Tigamitra dengan beban sewa tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp356.400.000 dan Rp653.400.000, jangka waktu sewa selama 82 bulan. Pada tahun 2020 Perusahaan menandatangani perjanjian sewa menyewa ruangan kantor dengan PT Multi Artha Griya untuk jangka waktu 36 bulan. Beban amortisasi sewa hak guna untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp430.353.000 dan Rp368.874.000.

28. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transactions With Related Parties

- a. The Company entered consumer financing agreement with PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, PT Reliance Manajer Investasi, PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia and PT Asuransi Reliance Indonesia in relation to vehicle financing. This receivable has term of 2 – 4 years, with interest rate at 17% per annum, and secured by the related vehicle.
- b. The Company entered into financing agreement on working capital and investment with PT Andaland Jaya Propertindo, PT Multi Artha Griya and PT Viva Medika. This receivable has term of 2-9 years, with interest rate at 12% per annum, and secured by land, land and building, apartment, and machinery and equipment. In 2020 the agreement with PT Andaland Jaya Propertindo and PT Viva Medika has ended.
- c. The Company has insured its fixed assets with PT Asuransi Reliance Indonesia (Note 10).
- d. The Company stipulates that each lease office space with rent PT Suryatama Tigamitra with expenses for 2020 and 2019 amounting to Rp356,400,000 and Rp653,400,000, respectively, with a lease term of 82 months. In 2020 the Company leases office space with PT Multi Artha Griya for a period of 36 months. Amortization expense for lease rights for seven-month period ended July 31, 2021, and in 2020 amounted to Rp430,353,000 and Rp368,874,000, respectively.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi Dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

e. Perusahaan mengadakan perjanjian pemberian layanan jasa dengan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk sehubungan penerbitan MTN. Perusahaan akan membayar jasa tersebut sebesar 0,5% - 1% dari nilai nominal MTN. Pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dan tahun 2020 dan 2019, beban jasa professional yang diakui masing-masing sebesar Rp1.190.302.013, Rp1.691.801.733 dan Rp1.338.843.926.

f. Perusahaan mengadakan perjanjian jasa teknis dengan PT Reliance Capital Management untuk memberikan bantuan teknis dan advisory. Berdasarkan addendum perjanjian No. Add.I.018/RCM/DI/II/2015 tanggal 14 Juli 2017, perjanjian tersebut berjangka waktu 3 tahun sampai dengan 6 Juli 2020. Perusahaan akan membayar jasa teknis sebesar 8% dari laba bersih sebelum pajak dan biaya atau pendapatan lain-lain. Perjanjian tersebut kemudian diubah dengan perjanjian bantuan teknis dan manajemen No. 6/RCM/INT/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, dimana Perusahaan akan membayar biaya jasa berdasarkan persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun efektif sejak tanggal perjanjian.

Pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, tahun 2020 dan 2019, beban jasa teknis yang diakui masing-masing sebesar Rp404.029.467, Rp629.764.800 dan Rp629.764.800.

g. Pada tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian bantuan teknis dan konsultasi dengan PT Andalan Piranti Indonesia, dimana Perusahaan akan membayar biaya jasa berdasarkan persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun efektif sejak tanggal pinjaman. Pada tanggal 3 Januari 2020 Perusahaan telah mengakhiri perjanjian Sebagian dengan PT Andalan Piranti Indonesia.

28. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transactions With Related Parties (continued)

e. The Company entered into custodian services agreement with PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk in relation to issuance of MTN. The Company will pay fee of 0,5% - 1% from nominal value of MTN. Professional fee recognized for the seven-month period ended July 31, 2021, and in 2020 and 2019, amounted to Rp1.190,302,013, Rp1,691,801,733 and Rp1,338,843,926, respectively.

f. The Company entered into technical fee agreement with PT Reliance Capital Management to provide technical and advisory assistance. Based on Amendment No. Add.1.018/RCM/DI/II/2015 dated July 14, 2017, the agreement has term of 3 years until July 6, 2020. The Company will pay technical fee of 8% from net profit before tax and other expense or income. The agreement has been amended with technical assistant and management agreement No. 6/RCM/INT/XII/2018 dated December 28, 2018, where the Company will pay the fee based on certain percentage as stated in the agreement. This agreement has a term of 5 years effective from the date of agreement.

Technical fees recognized for the seven-month period ended July 31, 2021, and in 2020 and 2019, are amounted to Rp404,029,467, Rp629,764,800 and Rp629,764,800, respectively.

g. As of December 28, 2018, Company entered into technical fee and consultancy agreement with PT Andalan Piranti Indonesia, where the Company will pay the fee based on certain percentage as stated in the agreement. This agreement has a term of 5 years effective from the date of agreement. On January 3, 2020, the Company has terminated the cooperation agreement with PT Andalan Piranti Indonesia.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (revisi) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

- Beban jasa teknis tahun 2019 yang diakui adalah sebesar Rp 629.764.800.
- h. Aset milik PT Suryatama Tigamitra dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterima Perusahaan (Catatan 14).
- i. PT Reliance Capital Management, PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, PT Asuransi Reliance Indonesia, PT Suryatama Tiga Mitra, PT Reliance Capital Management, PT Reliance Modal Ventura, PT Multi Artha Griya, PT RelianceIntegrasi Dunia Anda dan Anton Budidjaja merupakan pemegang surat utang jangka menengah (MTN) yang diterbitkan oleh Perusahaan.
- j. Piutang lain-lain dari PT Reliance Capital Management (RCM) merupakan pemberian pinjaman tanpa bunga, jaminan dan jangka waktu pembayaran.
- k. Pada tanggal 21 Juli 2020 Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT RelianceIntegrasi Dunia Anda terkait penyediaan fungsi aplikasi RELI.ID untuk produk pembiayaan. Sehubungan dengan Kerjasama tersebut, maka PT RelianceIntegrasi Dunia Anda berhak untuk mendapatkan imbalan jasa sebesar Rp1.000.000.000 untuk tahun pertama. Untuk imbal jasa tahun berikutnya dan atas produk pembiayaan yang lain yang menggunakan aplikasi RELI.ID akan disepakati bersama kemudian dan dituangkan dalam suatu addendum perjanjian ini. Perjanjian dilangsungkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2020 dan akan berakhir pada tanggal 21 Juli 2025 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang akan disepakati kemudian. Piutang ini tidak dikenakan bunga.

28. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transactions with Related Parties (continued)

- Technical fees recognized in 2019 is amounted to Rp 629,764,800.*
- h. *Asset owned by of PT Suryatama Tigamitra are used as collateral for the Company's loans (Note 14).*
- i. *PT Reliance Capital Management, PT Reliance Sekuritas Indoensia Tbk, PT Asuransi Reliance Indonesia, PT Suryatama Tiga Mitra, PT Reliance Capital Management, PT Reliance Modal Ventura, PT Multi Artha Griya, PT RelianceIntegrasi Dunia Anda and Anton Budidjaja are the holders of medium term notes (MTN) issued by the Company.*
- j. *Other receivable from PT Reliance Capital Management (RCM) represent loans given with non-interest bearing, unsecured and have no fixed term payment.*
- k. *On July 21, 2020, the Company entered into an agreement with PT RelianceIntegrasi Dunia Anda regarding the provision of the RELI.ID application function for financing products. In connection with this collaboration, PT RelianceIntegrasi Dunia Anda is entitled to a fee Rp1,000,000,000 for the first year. For fees for the following year and for other financing products using the RELI.ID application. It will be mutually agreed later and set forth in an addendum to this agreement. The agreement is valid for a period 5 (five) years, commencing on July 21, 2020 and will expire on July 21, 2025 and can be extended for a period to be agreed later. This receivable is not subject to interest.*

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

- I. Piutang lain-lain kepada PT Multi Artha Griya (MAG) merupakan reklasifikasi dari piutang pembiayaan investasi kepada MAG. Berdasarkan perjanjian tanggal 27 Juni 2014, Perusahaan memberikan fasilitas pembiayaan investasi kepada MAG sebesar Rp80.000.000.000 dengan jangka waktu 84 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2021. Pada tanggal 21 Juni 2021, Perusahaan dan MAG menandatangani Addendum Perjanjian yang memuat beberapa perubahan di perjanjian sebelumnya, namun pada tanggal 9 Juli 2021 MAG mengajukan permohonan pembatalan atas Addendum Perjanjian tersebut dan mengajukan rencana pembayaran sebagai berikut:

1. MAG akan melunasi sebagian pokok pinjaman dari perjanjian awal sebesar Rp19.551.027.432 pada bulan September 2021.
2. MAG juga akan melunasi bunga berjalan dari bulan Desember 2020 sampai dengan Juni 2021 sebelum minggu ke 2 bulan September 2021.
3. Sisa pinjaman akan dilunasi selambat-lambatnya pada bulan Desember 2021.

Perusahaan menyetujui permohonan MAG dan melakukan reklasifikasi atas saldo piutang pembiayaan kepada MAG yang belum dilunasi ditambah piutang bunga dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp63.584.779.635 ke akun piutang lain-lain pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli 2021.

Pada bulan September 2021 MAG telah melakukan pembayaran sebesar Rp23.223.340.789 yang terdiri dari pokok pinjaman ditambah bunga sebagaimana rencana pembayaran di atas. Sisa piutang sebesar Rp40.361.438.846 akan dilunasi oleh MAG selambat-lambatnya pada bulan Desember 2021 sebagaimana rencana pelunasan.

28. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

- I. Other receivables to PT Multi Artha Griya (MAG) represent a reclassification of investment financing receivables to MAG. Based on the agreement dated June 27, 2014, the Company provided investment financing facility to MAG amounting to Rp80,000,000,000 with a term of 84 months and maturity date on June 27, 2021. On June 21, 2021, the Company and MAG signed an Addendum to the Agreement containing several amendments. In the previous agreement, but on July 9, 2021 MAG submitted a request for cancellation of the Addendum to the Agreement and proposed a payment plan as follows:

1. MAG will repay the remaining loan principal from the initial agreement amounting to Rp19,551,027,432 in September 2021.
2. MAG will also pay the current interest from December 2020 to June 2021 before the 2nd week of September 2021.
3. The remaining loan will be repaid no later than December 2021.

The Company approved MAG's application and reclassified the outstanding balance of financing receivables to MAG plus interest receivables totaling Rp63,584,779,635 to other receivables in the statement of financial position as of July 31, 2021.

In September 2021 MAG has made a payment of Rp23,223,340,789 which consists of the loan principal plus interest as stated in the payment plan above. The remaining receivables amounting to Rp40,361,438,846 will be repaid by MAG no later than December 2021 as planned for settlement.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

m. Rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Persentase terhadap Jumlah Aset/ Liabilitas							
Percentage to Total Assets/Liabilities							
	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 20202019		31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 20202019		
Aset							Assets
Kas dan bank							Cash on hand and in banks
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	-	-	6.111.295.957	0,00%	-	1,27%	PT Bank Kesejahteraan Ekonomi
Piutang pembiayaan							Financing receivables
PT Multi Artha Griya	-	59.776.321.460	69.969.554.018	0,00%	13,48%	14,56%	PT Multi Artha Griya
PT Mithaharum Abadi	-	-	25.032.258.065	0,00%	-	5,21%	PT Mithaharum Abadi
PT Bintang Cemerlang Suksesindo	-	-	40.064.516.129	0,00%	-	8,34%	PT Bintang Cemerlang Suksesindo
PT Nutrisi Depot Indonesia	-	-	32.095.648.257	0,00%	-	6,68%	PT Nutrisi Depot Indonesia
Piutang pembiayaan konsumen							Consumer financing receivables
Nurwati Tunggal	-	-	15.526.348	0,00%	-	0,003%	Nurwati Tunggal
Piutang lain-lain							Other receivables
PT Multi Artha Griya	63.584.779.635	-	-	12,23%	-	-	PT Multi Artha Griya
PT Reliance Capital Management	6.000.000.000	6.000.000.000	4.000.000.000	1,15%	1,35%	0,83%	PT Reliance Capital Management
PT RelianceIntegrasi Dunia Anda	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,19%	0,23%	-	PT RelianceIntegrasi Dunia Anda
Jumlah	70.584.779.635	66.776.321.460	177.288.798.774	13,57%	15,06%	36,89%	Total

Persentase terhadap Jumlah Aset/ Liabilitas							
Percentage to Total Assets/Liabilities							
	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 20202019		31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 20202019		
Liabilitas							Liabilities
Surat utang jangka menengah							Medium Term Notes
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	185.650.000.000	92.100.000.000	129.400.000.000	59,41%	37,85%	44,25%	PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
PT Suryatama Tigamitra	13.600.000.000	28.750.000.000	500.000.000	4,35%	11,81%	0,17%	PT Suryatama Tiga Mitra
PT Reliance Capital Management	600.000.000	500.000.000	-	0,19%	0,21%	-	PT Reliance Capital Management
PT Reliance Modal Ventura	650.000.000	50.000.000	-	0,21%	0,02%	-	PT Reliance Modal Ventura
PT Multi Artha Griya	-	1.000.000.000	-	0,00%	0,41%	-	PT Multi Artha Griya
PT RelianceIntegrasi Dunia Anda	-	50.000.000	-	0,00%	0,02%	-	PT RelianceIntegrasi Dunia Anda
Anton Budidjaja	-	750.000.000	2.750.000.000	0,00%	0,31%	0,94%	Anton Budidjaja
Beban akrual							Accrued expenses
PT Reliance Capital Management	1.046.461.600	679.098.800	-	0,33%	0,28%	-	PT Reliance Capital Management
Jumlah	201.546.461.600	123.879.098.800	132.650.000.000	64,49%	50,91%	45,36%	Total

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (revisi) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (lanjutan)

28. BALANCE AND TRANSACTION WITH
RELATED PARTIES (continued)

m. Rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

m. The accounts involving transactions with related parties are as follows: (continued)

Presentase terhadap Pendapatan/Beban yang Bersangkutan/ Percentage to Related Revenue/Expenses									
Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli For the Seven-month Period Ended July, 31		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31		Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli For the Seven-month Period Ended July, 31		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31			
2020				2020					
2021	(Reviul Review)	2020	2019	2021	(Reviul Review)	2020	2019		
Pendapatan									
Bunga									
Pembiayaan									
PT Multi Artha Griya	3.898.632.231	4.702.308.413	7.806.767.446	9.003.950.479	10,41%	14,81%	15,15%	21,45%	PT Multi Artha Griya
PT Mihaharum Abadi	-	-	-	1.479.299.031	-	-	-	3,52%	PT Mihaharum Abadi
PT Viva Medika	-	-	-	1.274.966.609	-	-	-	3,04%	PT Viva Medika
PT Bintang Cemerlang Suksesindo	-	-	-	2.082.089.912	-	-	-	4,96%	PT Bintang Cemerlang Suksesindo
PT Andaland Jaya Properindo	-	-	-	408.188.815	-	-	-	0,97%	PT Andaland Jaya Properindo
PT Nutrisi Depot Indonesia	-	-	-	712.745.509	-	-	-	1,70%	PT Nutrisi Depot Indonesia
Piutang pembiayaan konsumen									Consumer financing receivables
Nurwati Tunggal	-	-	-	3.985.348	-	-	-	0,068%	Nurwati Tunggal
Administrasi									
PT Viva Medika	-	-	-	11.113.043	-	-	-	0,64%	PT Viva Medika
PT Andaland Jaya Properindo	-	-	-	18.727.660	-	-	-	1,08%	PT Andaland Jaya Properindo
Presentase terhadap Pendapatan/Beban yang Bersangkutan/ Percentage to Related Revenue/Expenses									
Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli For the Seven-month Period Ended July, 31		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31		Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli For the Seven-month Period Ended July, 31		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31			
2020				2020					
2021	(Reviul Review)	2020	2019	2021	(Reviul Review)	2020	2019		
Beban umum dan administrasi									
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	1.190.302.013	1.236.724.213	1.691.801.733	1.338.843.926	11,48%	11,87%	9,55%	9,22%	PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
PT Suryatama Tigamitra	-	356.400.000	356.400.000	653.400.000	0,00%	3,42%	2,01%	4,50%	PT Suryatama Tigamitra
PT Andalan Piranti Indonesia	-	-	-	629.764.800	-	-	-	4,34%	PT Andalan Piranti Indonesia
PT Reliance Capital Management	404.029.467	367.362.800	629.764.800	629.764.800	3,90%	3,52%	3,55%	4,34%	PT Reliance Capital Management
PT Multi Artha Griya	430.353.000	175.122.000	368.874.000	-	4,15%	1,68%	2,08%	-	PT Multi Artha Griya
PT Asuransi Reliance Indonesia	166.897.924	105.940.569	218.257.600	-	1,61%	1,02%	1,23%	-	PT Asuransi Reliance Indonesia
PT Viva Medika	21.480.788	1.534.000	11.344.000	-	0,21%	0,01%	0,06%	-	PT Viva Medika
Beban bunga dan beban keuangan lainnya									
PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk	8.268.565.754	5.534.972.603	7.766.890.411	7.173.465.727	42,14%	38,99%	34,96%	23,68%	PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk
PT Reliance Capital Management	29.643.836	16.863.014	21.397.260	1.303.013.699	0,15%	0,12%	0,10%	4,30%	PT Reliance Capital Management
PT Asuransi Reliance Indonesia	-	-	-	586.301.371	-	0,00%	-	1,94%	PT Asuransi Reliance Indonesia
PT Suryatama Tiga Mitra	1.167.146.575	787.260.274	1.986.534.247	326.849.315	5,95%	5,55%	8,94%	1,08%	PT Suryatama Tiga Mitra
Anton Budidjaja	39.890.411	30.410.959	61.657.534	45.273.972	0,20%	0,21%	0,28%	0,15%	Anton Budidjaja
PT Reliance Modal Ventura	17.684.932	-	2.068.493	-	0,09%	-	0,01%	-	PT Reliance Modal Ventura
PT Multi Artha Griya	33.246.575	-	20.082.192	-	0,17%	-	0,09%	-	PT Multi Artha Griya
PT Reliance Sekuritas Integrasi	-	32.876.712	372.602.740	-	0,00%	0,23%	1,68%	-	PT Reliance Sekuritas Integrasi
PT Reliance Integrasi Dunia Anda	2.013.699	-	5.835.616	-	0,01%	-	0,03%	-	PT Reliance Integrasi Dunia Anda

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Kompensasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020	2019	
Dewan Komisaris	323.810.828	186.900.000	434.750.000	Board of Commissioners
Direksi	1.924.539.659	2.149.840.322	1.974.750.000	Directors

28. BALANCE AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

The compensation for the Board of Commissioners and the Board of Directors for the seven-month period ended July 31, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019 is as follows:

29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Pendahuluan dan Gambaran Umum

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan sebagai berikut:

- Risiko kredit
- Risiko nilai tukar
- Risiko suku bunga
- Risiko likuiditas
- Risiko operasional

Catatan ini menyajikan informasi mengenai eksposur Perusahaan terhadap setiap risiko di atas, tujuan, kebijakan dan proses yang dilakukan oleh Perusahaan dalam mengukur dan mengelola risiko.

Kerangka Manajemen Risiko

Sektor pembiayaan banyak dipengaruhi oleh risiko, baik risiko yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan, Perusahaan berupaya untuk mengelola berbagai risiko dengan sebaik-baiknya, dengan menerapkan manajemen risiko.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

a. Introduction and Overview

The Company is exposed to the following risks relating to its financial instruments:

- Credit risk*
- Foreign exchange risk*
- Interest risk*
- Liquidity risk*
- Operational risk*

This note provides information on the Company's exposure to any risk above, the objectives, policies and processes conducted by the Company in measuring and managing risk.

Frame of Risk Management

Financing sector is susceptible to various risks originating from internal and external factors. In order to improve the Company's performance, the Company strives to manage various risks as well as possible, by implementing risk management.

**29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**a. Pendahuluan dan Gambaran Umum
(lanjutan)**

Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

Direksi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh atas penetapan dan pengawasan kerangka manajemen risiko. Direksi telah menetapkan Departemen Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengawasan kebijakan manajemen risiko Perusahaan di masing-masing area tertentu. Departemen Manajemen Risiko melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Direksi Perusahaan secara berkala.

Berikut adalah uraian penerapan manajemen risiko Perusahaan :

1. Manajemen risiko kredit

Manajemen risiko yang diterapkan perusahaan adalah sebagai berikut:

- Kehati-hatian dalam pemberian kredit

Perusahaan melalui Departemen Manajemen Risiko menetapkan kriteria penerimaan calon nasabah yang direview secara berkala baik untuk calon nasabah Sewa, Pembiayaan Konsumen dan Anjak Piutang. Dalam memberikan kredit pembiayaan konsumen, Perusahaan menetapkan beberapa proses penilaian kredit dan scoring.

Perusahaan mengaplikasikan system penagihan melalui telepon untuk tagihan yang akan jatuh tempo dan memantau laporan overdue secara harian untuk menentukan tindak lanjut yang diperlukan dari setiap debitur lewat waktu. Usaha tersebut dalam rangka menjaga rasio kredit bermasalah, khususnya dalam masa krisis ekonomi global.

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

a. Introduction and Overview (continued)

Frame of Risk Management (continued)

Establishing and monitoring risk management is the overall responsibility of the Board of Directors. The Board of Directors has instructed the Risk Management Department to develop and oversee the risk management policies. The activities carried out by the Risk Management Department are regularly reported to the Board of Directors.

Description of the implementation of Company's risk management follows:

1. Credit risk management

Risk management applied by the company is as follows:

- *Prudence in granting credit*

The Company through the Risk Management Department determines the criteria for acceptance of prospective customers which are reviewed periodically for both prospective customers for Lease, Consumer Financing and Factoring. In providing consumer credit, the Company establishes several credit assessment and scoring processes.

The Company has applied the billing and collection system by phone for receivables that will mature and monitor over due accounts on a daily basis to ensure appropriate reminder has been sent to customer with default account. The Company exerts effort to keep the minimum ratio of non performing loans, particularly in the current global economic crisis.

**29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**a. Pendahuluan dan Gambaran Umum
(lanjutan)**

2. Manajemen risiko pendanaan

Manajemen risiko yang ditetapkan perusahaan adalah sebagai berikut:

- Pemantauan dan analisis kondisi usaha dan obyek pembiayaan

Perusahaan terus melakukan pemantauan berkala atas kondisi usaha dan industri debitur-debitur dan pengecekan obyek pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemampuan debitur dan kualitas piutang sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan penurunan kualitas kredit.

- Diversifikasi sumber pendanaan

Dalam rangka mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber pendanaan, Perusahaan melakukan diversifikasi pendanaan, antara lain dengan alternatif sumber dana dari pinjaman dari bank, pihak ketiga dan surat utang jangka menengah.

- Pengelolaan ketidaksesuaian suku bunga

Dalam mengantisipasi ketidaksesuaian suku bunga piutang dan suku bunga pinjaman yang diterima, Perusahaan menerapkan kebijakan pembatasan selisih maksimum (*maximum gap*) antara suku bunga tetap yang diberikan kepada debitur dengan pinjaman bunga tetap tidak melebihi jumlah ekuitas.

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

a. Introduction and Overview (continued)

2. Funding risk management

Risk management implemented by the Company follows:

- *Monitoring and analyzing the business conditions and the object of financing*

The Company conducts periodic monitoring of the condition of its debtor's business and industry condition and re-examine the object of financing. It aims to assess the capability of the debtor and the quality of receivables to prevent deterioration in credit quality.

- *Diversification of sources of funding*

In order to reduce the risk of dependence on one source of funding, the Company is into diversified funding, among others, with alternative sources of funds from loans from banks, third parties and medium term notes.

- *Management of interest rate mismatch*

In anticipation of interest rate mismatches on loans and receivable, the Company implemented a policy limiting the maximum difference (maximum gap) between the fixed rate that is given to borrowers with fixed rate loans do not exceed the total equity.

**29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**a. Pendahuluan dan Gambaran Umum
(lanjutan)**

2. Manajemen risiko pendanaan

- Pengelolaan risiko likuiditas

Dalam mengelola risiko likuiditas, Perusahaan menggunakan sumber dana jangka panjang untuk membiayai piutang jangka panjangnya. Perusahaan telah melakukan kerja sama dengan bank dan pihak ketiga untuk penyediaan sumber dana jangka panjang, guna memperkuat struktur pendanaan.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan *counterparty* untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya. Untuk meyakinkan bahwa penurunan nilai terdeteksi secara dini, portofolio kredit dimonitor secara aktif pada setiap tingkatan struktur risiko dan akan dikurangi melalui pelaksanaan strategi pemulihan.

Perusahaan mengantisipasi risiko kredit dengan penuh kehati-hatian dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko kredit. Selain penilaian kredit dengan penuh kehati-hatian, Perusahaan juga telah memiliki pengendalian intern yang kuat, manajemen penagihan yang baik dan secara berkala melakukan pemantauan dan analisa terhadap kondisi usaha debitur dan obyek pembiayaan sepanjang kontrak berjalan.

Berikut adalah ekposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019:

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

a. Introduction and Overview (continued)

2. Funding risk management

- Liquidity risk management

In managing liquidity risk, the Company uses the sources of longterm funding to finance long-term receivables. The Company has established cooperation with bank and third parties to provide long-term funding both in Rupiah, in order to strengthen the funding structure.

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from the customers or counter parties who failed to fulfill their contractual obligations. To ensure that the impairment is detected early, the receivables are monitored actively at every level and will be reduced through the implementation of recovery strategies.

The Company is prudent in anticipating the credit risk by applying policy in credit risk management. Besides providing prudent credit assessment, the Company also has an effective internal control, well collection management and continuously perform tight monitoring and analysis of the condition of the debtor's business and financed asset during the term of the contract.

The table below shows the statements of financial position's exposure to credit risk as of July 31, 2021, December 31, 2020 and 2019:

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

b. Risiko Kredit (lanjutan)

b. Credit Risk (continued)

31 Juli 2021/July 31, 2021					
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Not past due and unimpaired	Belum jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Not past due and impaired	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired	Jumlah/ Total		
Kas dan bank	7.437.094.502	-	-	7.437.094.502	Cash and in banks
Piutang pembiayaan	-	191.952.395.193	20.024.846.787	211.977.241.980	Financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	642.979.331	-	642.979.331	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	-	78.766.157.149	123.725.792	78.889.882.941	Consumer financing receivables
Piutang pembiayaan syariah	-	80.804.991.004	4.092.301.399	84.897.292.403	Sharia financing receivables
Piutang lain-lain	105.712.055.163	-	-	105.712.055.163	Other receivable
Aset lain-lain - uang jaminan	484.000.000	-	-	484.000.000	Other assets - security deposit
Jumlah	113.633.149.664	352.166.522.677	24.240.873.978	490.040.546.320	Total
31 Desember 2020/ December 31, 2020					
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Not past due and unimpaired	Belum jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Not past due and impaired	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired	Jumlah/ Total		
Kas dan bank	1.366.472.701	-	-	1.366.472.701	Cash and in banks
Piutang pembiayaan	-	234.905.385.267	480.057.012	235.385.442.279	Financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	-	1.543.839.242	-	1.543.839.242	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	-	73.212.332.325	2.941.395.794	76.153.728.119	Consumer financing receivables
Piutang pembiayaan syariah	12.348.654.838	38.361.488.978	712.819.121	51.422.962.937	Sharia financing receivables
Piutang lain-lain	28.737.853.812	-	-	28.737.853.812	Other receivable
Aset lain-lain - uang jaminan	284.000.000	-	-	284.000.000	Other assets - security deposit
Jumlah	42.736.981.351	348.023.045.812	4.134.271.927	394.894.299.090	Total
31 Desember 2019/ December 31, 2019					
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Not past due and unimpaired	Belum jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Not past due and impaired	Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai/ Past due and impaired	Jumlah/ Total		
Kas dan bank	9.088.178.837	-	-	9.088.178.837	Cash and in banks
Piutang pembiayaan	295.282.337.574	13.727.622.963	5.894.973.641	314.904.934.178	Financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	12.214.076.914	7.142.915.336	6.789.543.363	26.146.535.613	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan konsumen	38.503.372.123	2.123.754.056	1.440.120.335	42.067.246.514	Consumer financing receivables
Piutang pembiayaan syariah	72.188.824.603	891.202.341	-	73.080.026.944	Sharia financing receivables
Piutang lain-lain	6.280.270.598	-	-	6.280.270.598	Other receivable
Aset lain-lain - uang jaminan	84.000.000	-	-	84.000.000	Other assets - security deposit
Jumlah	433.641.060.649	23.885.494.696	14.124.637.339	471.651.192.684	Total

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

c. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko nilai tukar terutama terkait dengan piutang pembiayaan.

	31 Juli 2021/ July 31, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember/December 31, 2019	
	Setara dengan IDR/ Equivalent in IDR		Setara dengan IDR/ Equivalent in IDR		Setara dengan IDR/ Equivalent in IDR	
	US\$ / USD		US\$ / USD		US\$ / USD	
Aset						
Piutang pembiayaan	-	-	1.045.788	14.750.841.229	1.446.375	20.106.048.095
Jumlah Aset	-	-	1.045.788	14.750.841.229	1.446.375	20.106.048.095

Assets
Financing receivables
Total Assets

d. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan pinjaman yang diterima.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Perusahaan mengelola beban bunga melalui suku bunga tetap, dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang.

e. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Untuk mengurangi risiko pendanaan, Perusahaan mendiversifikasi sumber dana. Selain dari modal sendiri dan penerimaan angsuran pelanggan, Perusahaan memperoleh sumber dana dari pinjaman bank.

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

c. Foreign Exchange Risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposures to the foreign exchange risk relates primarily to net investment in financing receivables.

d. Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Company's exposures to the interest rate risk relates primarily to loans received.

To minimize interest rate risk, the Company manages interest cost through a fixed-rate, by evaluating market rate trends. Management also conducts assessments among interest rates offered by creditors to obtain the most favorable interest rate before takes any decision to enter a new loan agreement.

e. Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

To reduce the exposure to liquidity risk, the Company diversified its sources of funding. Apart from its own capital and receipt of customer payments, the Company obtains funds from bank loans.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

e. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

31 Juli 2021/ July 31, 2021					
	<= 1 tahun/ <= 1 Year	1-5 tahun/ 1-5 Years	Jumlah/ Total	Biaya transaksi/ Transaction Costs	Nilai Tercatat/ As Reported
Liabilitas					
Surat utang jangka menengah	250.150.000.000	-	250.150.000.000	(635.314.346)	249.514.685.654
Pinjaman yang diterima	8.000.000.000	20.928.425.496	28.928.425.496	(35.287.235)	28.893.138.261
Beban akrual	3.382.948.718	-	3.382.948.718	-	3.382.948.718
Liabilitas lain-lain	28.394.390.929	-	28.394.390.929	-	28.394.390.929
Jumlah	289.927.339.647	20.928.425.496	310.855.765.143	(670.601.581)	310.185.163.562
31 Desember 2020/ December 31, 2020					
	<= 1 tahun/ <= 1 Year	1-5 tahun/ 1-5 Years	Jumlah/ Total	Biaya transaksi/ Transaction Costs	Nilai Tercatat/ As Reported
Liabilitas					
Surat utang jangka menengah	49.500.000.000	133.650.000.000	183.150.000.000	(1.616.360.805)	181.533.639.195
Pinjaman yang diterima	11.127.062.778	17.512.963.729	28.640.026.507	(68.513.576)	28.571.512.931
Beban akrual	1.875.271.246	683.281.500	2.558.552.746	-	2.558.552.746
Liabilitas lain-lain	23.487.133.607	5.009.207.337	28.496.340.944	-	28.496.340.944
Jumlah	36.489.467.631	206.355.452.566	242.844.920.197	(1.684.874.381)	241.160.045.816
31 Desember 2019/December 31, 2019					
	<= 1 tahun/ <= 1 Year	1-5 tahun/ 1-5 Years	Jumlah/ Total	Biaya transaksi/ Transaction Costs	Nilai Tercatat/ As Reported
Liabilitas					
Surat utang jangka menengah	-	238.000.000.000	238.000.000.000	(2.964.686.263)	235.035.313.737
Pinjaman yang diterima	16.596.817.844	20.973.688.246	37.570.506.090	(136.006.577)	37.434.499.513
Beban akrual	1.246.275.568	-	1.246.275.568	-	1.246.275.568
Liabilitas lain-lain	15.146.219.808	-	15.146.219.808	-	15.146.219.808
Jumlah	32.989.313.220	258.973.688.246	291.963.001.466	(3.100.692.840)	288.862.308.626

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

e. Liquidity Risk (continued)

The table below analyzes the Company's financial liabilities based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows.

**29. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

f. Risiko Operasional

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Perusahaan menghadapi risiko kelalaian penerapan standar operasional dan prosedur maupun pengendalian yang tidak menunjang pertumbuhan Perusahaan, terutama dalam menganalisa kelayakan pembiayaan dan pengawasan terhadap penagihan piutang. Hal ini dapat mempengaruhi proses transaksi usaha dan akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi dan tingkat layanan kepada pelanggan dan pemasok, yang mempengaruhi kinerja dan daya saing Perusahaan.

Untuk meminimalisasi risiko operasional diatas, manajemen menekankan perlunya pemahaman setiap karyawan terhadap Standar Operasional Perusahaan (SOP) dan kebijakan kredit yang berlaku dengan melakukan pelatihan *on the job* yang memadai bagi setiap karyawan baru maupun seluruh karyawan disamping perlunya peran internal kontrol / internal audit Perusahaan untuk mendeteksi dan menganalisa setiap penyimpangan yang timbul agar tindakan perbaikan dan pengecekan dapat dilakukan.

Menyadari pentingnya setiap karyawan berpartisipasi dalam pelaksanaan SOP dan kebijakan Perusahaan, manajemen memasukkan unsur ketaatan SOP dan kebijakan tersebut dalam sistem penilaian kinerja karyawan.

30. LIABILITAS KONTINJENSI

Perusahaan tidak memiliki liabilitas kontinjensi yang signifikan pada tanggal 31 Juli 2021, 31 Desember 2020 dan 2019.

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

f. Operational Risk

In conducting its business, the Company faces the risk of negligent implementation of operational standards and procedures and controls that do not support the Company's growth, especially in analyzing the feasibility of financing and supervision of collection of receivables. This may affect the business transaction process and might result in disruption of the operations and quality of service to customers and suppliers, which affect the performance and competitiveness of the Company.

To minimize operational risks mentioned above, management emphasized the need for employee education of the Company Standard Operating Procedures (SOP) and credit policies by conducting training on the job for each new employee and all employees aside from the need for internal control / audit the Company to detect and analyze any deviation incurred for corrective action and checks can be done.

Realizing the importance of every employee who participates in the implementation of SOPs and Company's policies, management includes adherence to SOP and policy elements in employee performance appraisal system.

30. CONTINGENT LIABILITY

The Company does not have any significant contingent liability as of July 31, 2021, 31 December 2020 and 2019.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (reviu) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. KOMITMEN

Perusahaan mengadakan perjanjian sewa sebagai berikut:

Pihak lawan/ Counterparties	Item yang disewal/ Leased items	Periode perjanjian/ Period of agreement
PT Multi Artha Griya	Kantor pusat di Jakarta/ Head office at Jakarta	1 Juli 2020/July 1, 2020 - 30 Juni 2023/June 30, 2023

Perusahaan sudah melakukan pembayaran di muka beban sewa atas komitmen sewa tersebut diatas dan oleh karenanya tidak ada liabilitas sewa yang diakui di laporan posisi keuangan.

31. COMMITMENT

The Company has an agreement as follows:

The Company has made prepayments of rental expenses for the above lease commitments and therefore no lease liability has been recognized in the statement of financial position.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN – UNIT SYARIAH

32. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION SHARIA UNIT

	Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ For the Seven-month Period Ended July, 31		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31		
	2021	2020 (Review)	2020	2019	
Kas dan bank	4.868.031.018	735.630.032	1.020.597.015	2.803.384.697	Cash on hand and in banks
Dana kelolaan	32.261.510.157	-	19.251.200.605	-	Managed funds
Pinjaman diterima	11.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	14.500.000.000	Loans Payable
<u>Piutang pembiayaan mudharabah</u>					<u>Mudharabah financing receivables</u>
Piutang pembiayaan mudharabah - bruto	12.675.618.881	9.158.580.140	9.133.705.338	77.828.785.035	Mudharabah financing receivables - gross
Bagi hasil pembiayaan mudharabah yang belum diakui	(186.551.820)	(133.590.490)	(132.828.980)	(8.795.714.172)	Unearned revenue sharing
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.507.069)	(658.614.988)	(13.322.604)	(789.094.525)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan mudharabah - bersih	12.487.559.992	8.366.374.662	8.987.553.754	68.243.976.338	Mudharabah financing receivables - net
<u>PENDAPATAN</u>					<u>REVENUE</u>
Pendapatan bagi hasil	940.000.000	3.714.055.250	6.338.956.750	7.778.082.034	Revenue sharing
<u>Piutang pembiayaan musyarakah mutanaqisah</u>					<u>Musyarakah mutanaqisah financing receivables</u>
Piutang pembiayaan musyarakah mutanaqisah - bruto	28.451.476.940	6.204.392.362	23.623.960.599	6.395.613.640	Musyarakah mutanaqisah financing receivables - gross
Bagi hasil pembiayaan musyarakah mutanaqisah yang belum diakui	(12.139.490.864)	(3.077.067.637)	(10.422.309.613)	(3.332.283.350)	Unearned revenue sharing
Cadangan kerugian penurunan nilai	(309.831.035)	(83.797.346)	(491.829.650)	(67.227.906)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan musyarakah mutanaqisah - bersih	16.002.155.041	3.043.527.379	12.709.821.336	2.996.102.384	Musyarakah mutanaqisah financing receivables - net
<u>PENDAPATAN</u>					<u>REVENUE</u>
Pendapatan bagi hasil	1.283.418.733	255.215.713	511.342.536	332.511.666	Revenue sharing
<u>Piutang pembiayaan murabahah</u>					<u>Murabahah financing receivables</u>
Piutang pembiayaan murabahah - bruto	59.468.683.634	18.961.374.294	31.622.225.127	2.803.560.455	Murabahah financing receivables - gross
Marjin pembiayaan murabahah yang belum diakui	(4.492.771.106)	(2.003.153.669)	(3.160.287.245)	(928.732.323)	Unearned margin revenue
Cadangan kerugian penurunan nilai	(80.538.777)	(38.783.004)	(212.665.967)	(34.879.910)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan murabahah - bersih	54.895.373.751	16.919.437.621	28.249.271.915	1.839.948.222	Murabahah financing receivables - net
<u>PENDAPATAN</u>					<u>REVENUE</u>
Pendapatan marjin	11.521.467.806	175.602.912	302.216.727	230.510.455	Margin revenue
<u>Piutang investasi musyarakah</u>					<u>Musyarakah investment receivables</u>
Piutang investasi musyarakah - bruto	2.484.189.692	-	2.619.189.692	-	Musyarakah investment receivables - gross
Marjin investasi musyarakah yang belum diakui	(969.673.563)	-	(1.127.173.563)	-	Unrecognized musyarakah investment margin
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.312.510)	-	(15.700.197)	-	Allowance for impairment losses
Piutang investasi musyarakah - bersih	1.512.203.619	-	1.476.315.932	-	Musyarakah Investment receivables - net
<u>PENDAPATAN</u>					<u>REVENUE</u>
Pendapatan marjin	157.500.000	-	82.016.129	-	Margin income

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (revisi) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. SEGMENT OPERASI

Perusahaan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk dan wilayah geografis. Laba atau rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut:

33. OPERATING SEGMENT

The Company manages its business activities and identifies its reported segments based on product categories and geographic area. Profit or loss from each segment is used to measure performance of each segments' information concerning the main segments are set out as follows:

31 Juli 2021/July 31, 2021 (Dalam ribuan rupiah/In thousands of rupiah)					
	Perorangan/ Individual			Perusahaan/ Corporate	Jumlah/ Total
	Properti/ Property	Kebutuhan usaha/ Business needs	Konsumsi/ Consumptive		
Pendapatan pembiayaan	1.578.204	47.671	-	16.102.019	17.727.894
Pendapatan sewa pembiayaan	10.130	-	-	105.089	115.219
Pendapatan pembiayaan konsumen	5.689.147	-	4.317	-	5.693.464
Pendapatan margin / bagi hasil	1.015.021	10.767.592	1.962.274	157.500	13.902.387
Laba tahun berjalan	10.042.779	10.933.134	1.934.804	20.017.882	42.928.597
Penyisihan kerugian penurunan nilai					
Pembiayaan	94.295	(725)	-	3.631.723	3.725.292
Sewa pembiayaan	2.926	-	-	8.163	11.089
Pembiayaan konsumen	1.414.116	-	(193)	-	1.413.923
Margin / bagi hasil	238.940	118.596	(31.594)	13.388	339.329
Aset	127.537.438	52.639.144	21.279.390	215.312.864	416.768.836
					Financing income
					Financing lease income
					Consumer financing income
					Margin / revenue sharing
					Income for the year
					Provision for impairment losses
					Financing
					Financing lease
					Consumer financing
					Margin / revenue sharing
					Assets

31 Juli 2020/July 31, 2020 (Revisi/ Review) (Dalam ribuan rupiah/In thousands of rupiah)					
	Perorangan/ Individual			Perusahaan/ Corporate	Jumlah/ Total
	Properti/ Property	Kebutuhan usaha/ Business needs	Konsumsi/ Consumptive		
Pendapatan pembiayaan	1.284.353	-	-	18.810.087	20.094.440
Pendapatan sewa pembiayaan	8.990	-	-	1.297.133	1.306.123
Pendapatan pembiayaan konsumen	6.013.625	-	191.770	-	6.205.395
Pendapatan margin / bagi hasil	357.124	3.714.055	73.695	-	4.144.874
Laba (rugi) tahun berjalan	7.801.072	3.753.190	(447.238)	50.020.504	61.127.528
Penyisihan kerugian penurunan nilai					
Pembiayaan	388.837	-	-	16.772.891	17.161.728
Sewa pembiayaan	-	-	(267)	13.140.393	13.140.126
Pembiayaan konsumen	(212.989)	-	-	-	(212.989)
Margin / bagi hasil	(38.868)	39.135	(712.436)	-	(712.169)
Aset	75.700.037	15.086.942	8.922.132	232.192.553	331.901.665
					Financing income
					Financing lease income
					Consumer financing income
					Margin / revenue sharing
					Income (loss) for the year
					Provision for impairment losses
					Financing
					Financing lease
					Consumer financing
					Margin / revenue sharing
					Assets

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (reviu) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

33. OPERATING SEGMENT (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020 (Dalam ribuan rupiah/in thousands of rupiah)					
	Perorangan/ Individual			Perusahaan/ Corporate	Jumlah/ Total
	Properti/ Property	Kebutuhan usaha/ Business needs	Konsumsi/ Consumptive		
Pendapatan pembiayaan	2.619.623	-	-	34.363.991	36.983.615
Pendapatan sewa pembiayaan	17.715	-	-	1.724.588	1.742.303
Pendapatan pembiayaan konsumen	5.382.078	-	187.500	-	5.569.578
Pendapatan marjin / bagi hasil	572.315	5.776.457	803.744	82.016	7.234.532
Laba tahun berjalan	41.164.914	5.687.149	828.313	47.047.347	94.727.725
Penyisihan kerugian penurunan nilai					
Pembiayaan	32.465.541	-	-	(2.860.863)	29.604.679
Sewa pembiayaan	(3.085)	-	-	13.753.315	13.750.230
Pembiayaan konsumen	376.806	-	-	-	376.806
Marjin / bagi hasil	(266.079)	(89.308)	(162.931)	(15.700)	(534.018)
Aset	104.176.277	26.808.256	10.025.592	223.495.848	364.505.973

31 Desember 2019/December 31, 2019 (Dalam ribuan rupiah/in thousands of rupiah)					
	Perorangan/ Individual			Perusahaan/ Corporate	Jumlah/ Total
	Properti/ Property	Kebutuhan usaha/ Business needs	Konsumsi/ Consumptive		
Pendapatan pembiayaan	3.558.892	-	-	38.423.395	41.982.287
Pendapatan sewa pembiayaan	-	-	-	6.137.168	6.137.168
Pendapatan pembiayaan konsumen	4.696.018	575.000	586.222	-	5.857.240
Pendapatan marjin / bagi hasil	374.009	7.778.082	189.013	-	8.341.104
Laba tahun berjalan	7.462.780	8.353.082	775.235	29.013.882	45.604.980
Penyisihan kerugian penurunan nilai					
Pembiayaan	-	-	-	(2.925.731)	(2.925.731)
Sewa pembiayaan	-	-	-	(12.620.949)	(12.620.949)
Pembiayaan konsumen	(274.937)	-	-	-	(274.937)
Marjin / bagi hasil	(891.202)	-	-	-	(891.202)
Aset	66.513.657	11.756.052	57.211.869	320.717.165	456.198.743

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (revisi) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama berdasarkan wilayah geografis:

33. OPERATING SEGMENT (continued)

The following tables present information concerning the main segments based on geographic area:

31 Juli 2021/ July 31, 2021 (Dalam ribuan rupiah/In thousands of rupiah)										
Jabodetabek/ Jabodetabek	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah dan DIY/ Central Java and DIY	Jawa Timur/ East Java	Sumatera/ Sumatera	Bali dan Nusa Tenggara/ Bali and Nusa Tenggara	Kalimantan/ Kalimantan	Sulawesi/ Sulawesi	Lainnya/ Other	Jumlah/ Total	
Pendapatan pembiayaan	17.517.894	-	210.000	-	-	-	-	-	17.727.894	Financing income
Pendapatan sewa pembiayaan	115.219	-	-	-	-	-	-	-	115.219	Financing lease income
Pendapatan pembiayaan konsumen	5.196.174	52.250	38.073	13.171	336.218	-	57.578	-	5.693.464	Consumer financing income
Pendapatan marjin / bagi hasil	2.732.989	131.717	6.043.134	4.706.694	208.099	20.156	38.501	17.889	13.902.387	Margin / revenue sharing
Laba tahun berjalan	30.633.923	424.736	6.582.745	4.761.547	380.172	20.028	104.019	18.020	42.928.596	Income for the year
Penyisihan kerugian penurunan nilai										Provision for impairment losses
Pembiayaan	3.712.174	-	13.118	-	-	-	-	-	3.725.292	Financing
Sewa pembiayaan	11.089	-	-	-	-	-	-	-	11.089	Financing lease
Pembiayaan konsumen	1.169.067	239.618	162.456	(469)	(164.596)	-	7.846	-	1.413.923	Consumer financing
Marjin / bagi hasil	179.317	1.150	115.965	42.150	451	(129)	95	131	339.329	Margin / revenue sharing
Aset	354.421.870	2.198.093	31.267.190	20.947.755	6.329.276	184.049	1.216.676	173.563	416.768.836	Assets

31 Juli 2020/ July 31, 2020 (Revisi/ Review) (Dalam ribuan rupiah/In thousands of rupiah)										
Jabodetabek/ Jabodetabek	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah dan DIY/ Central Java and DIY	Jawa Timur/ East Java	Sumatera/ Sumatera	Bali dan Nusa Tenggara/ Bali and Nusa Tenggara	Kalimantan/ Kalimantan	Sulawesi/ Sulawesi	Lainnya/ Other	Jumlah/ Total	
Pendapatan pembiayaan	15.474.785	-	-	-	4.619.654	-	-	-	20.094.440	Financing income
Pendapatan sewa pembiayaan	1.306.123	-	-	-	-	-	-	-	1.306.123	Financing lease income
Pendapatan pembiayaan konsumen	5.261.766	194.531	-	-	732.151	16.947	-	-	6.205.395	Consumer financing income
Pendapatan marjin / bagi hasil	395.892	42.512	3.697.285	2.425	3.968	-	2.792	-	4.144.874	Margin / revenue sharing
Laba (rugi) tahun berjalan	39.607.441	191.341	3.722.608	(19.390)	17.615.817	15.286	(2.335)	(2.565)	61.127.529	Income (loss) for the year
Penyisihan kerugian penurunan nilai										Provision for impairment losses
Pembiayaan	4.190.546	-	-	-	12.971.182	-	-	-	17.161.728	Financing
Sewa pembiayaan	13.140.126	-	-	-	-	-	-	-	13.140.126	Financing lease
Pembiayaan konsumen	519.627	(36.862)	-	-	(695.172)	(582)	-	-	(212.989)	Consumer financing
Marjin / bagi hasil	(681.424)	(8.840)	25.324	(21.815)	(15.967)	(1.080)	(5.127)	(2.565)	(712.169)	Margin / revenue sharing
Aset	306.133.442	3.018.795	15.182.765	284.433	6.954.052	209.894	74.711	31.967	331.901.665	Assets

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (revisi) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

33. OPERATING SEGMENT (continued)

31 Desember 2020/December 31, 2020 (Dalam ribuan rupiah/in thousands of rupiah)									
Jabodetabek/ Jabodetabek	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah dan DIY/ Central Java and DIY	Jawa Timur/ East Java	Sumatera/ Sumatera	Bali dan Nusa Tenggara/ Bali and Nusa Tenggara	Kalimantan/ Kalimantan	Sulawesi/ Sulawesi	Lainnya/ Other	Jumlah/ Total
Pendapatan pembiayaan	30.746.927	-	240.806	-	5.995.881	-	-	-	36.983.615
Pendapatan sewa pembiayaan	419.685	-	-	-	-	1.322.618	-	-	1.742.303
Pendapatan pembiayaan konsumen	3.411.069	562.396	146.519	30.630	1.270.475	6.003	47.457	95.030	5.569.578
Pendapatan margin / bagi hasil	7.086.638	74.537	66.058	723	2.330	-	4.247	-	7.234.532
Labarugi tahun berjalan	42.584.107	354.511	131.078	(26.609)	36.530.994	4.226	15.064.690	(359)	94.727.725
Penjsihan kerugian penurunan nilai									
Pembiayaan	2.800.553	-	(17.395)	-	26.821.521	-	-	-	29.604.679
Sewa pembiayaan	56.711	-	-	-	-	13.693.519	-	-	13.750.230
Pembiayaan konsumen	(1.665.489)	(225.741)	(156.546)	(3.200)	2.442.020	(1.666)	(2.863)	(9.710)	376.806
Margin / bagi hasil	(271.987)	(56.681)	(148.365)	(54.761)	(1.233)	(111)	(287)	(359)	(534.018)
Aset	316.037.735	9.022.627	22.794.490	9.829.510	3.943.062	222.096	1.187.262	242.041	1.227.160

31 Desember 2019/December 31, 2019 (Dalam ribuan rupiah/in thousands of rupiah)									
Jabodetabek/ Jabodetabek	Jawa Barat/ West Java	Jawa Tengah dan DIY/ Central Java and DIY	Jawa Timur/ East Java	Sumatera/ Sumatera	Bali dan Nusa Tenggara/ Bali and Nusa Tenggara	Kalimantan/ Kalimantan	Sulawesi/ Sulawesi	Lainnya/ Other	Jumlah/ Total
Pendapatan pembiayaan	39.582.287	-	-	-	2.400.000	-	-	-	41.982.287
Pendapatan sewa pembiayaan	6.137.168	-	-	-	-	-	-	-	6.137.168
Pendapatan pembiayaan konsumen	5.261.899	153.223	89.461	-	309.895	-	42.762	-	5.857.240
Pendapatan margin / bagi hasil	8.290.340	3.031	42.411	2.165	2.403	-	434	320	8.341.104
Labarugi tahun berjalan	42.833.811	156.253	131.873	2.165	2.712.299	-	(231.742)	320	45.604.979
Penjsihan kerugian penurunan nilai									
Pembiayaan	(2.925.731)	-	-	-	-	-	-	-	(2.925.731)
Sewa pembiayaan	(12.620.949)	-	-	-	-	-	-	-	(12.620.949)
Pembiayaan konsumen	-	-	-	-	-	(274.937)	-	-	(274.937)
Margin / bagi hasil	(891.202)	-	-	-	-	-	-	-	(891.202)
Aset	386.332.914	9.121.320	17.634.405	6.058.669	30.540.455	1.389.985	2.391.577	2.253.833	475.585

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (revisi) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Berikut adalah rekonsiliasi laba neto, aset dan liabilitas untuk segmen dilaporkan berdasarkan jenis produk (dalam ribuan rupiah):

	Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ For the Seven-month Period Ended July, 31		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31		
	2021	2020 (Revisi/ Review)	2020	2019	
Laba untuk segmen dilaporkan	42.928.597	61.127.528	94.727.725	45.604.979	Income for reportable segments
Jumlah yang tidak dialokasikan	(35.502.033)	(43.675.664)	(73.083.797)	(43.983.139)	Unallocated amounts
Laba tahun berjalan/periode	7.426.564	17.451.863	21.643.928	1.621.840	Income for the year/period
Aset untuk segmen dilaporkan	416.768.836	331.901.665	364.505.973	456.198.743	Assets for reportable segments
Jumlah yang tidak dialokasikan	103.282.964	49.276.080	78.962.222	24.364.969	Unallocated amounts
Aset	520.051.800	381.177.745	443.468.195	480.563.712	Assets
Liabilitas untuk segmen dilaporkan	-	-	-	-	Liabilities for reportable segments
Jumlah yang tidak dialokasikan	312.513.003	185.505.905	243.349.291	292.416.287	Unallocated amounts
Liabilitas	312.513.003	185.505.905	243.349.291	292.416.287	Liabilities

Berikut adalah rekonsiliasi laba neto, aset dan liabilitas untuk segmen dilaporkan berdasarkan wilayah geografis (dalam ribuan rupiah):

	Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli/ For the Seven-month Period Ended July, 31		Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the Year Ended December, 31		
	2021	2020 (Revisi/ Review)	2020	2019	
Laba untuk segmen dilaporkan	42.928.596	61.127.529	94.727.725	45.604.979	Income for reportable segments
Jumlah yang tidak dialokasikan	(35.502.032)	(43.675.665)	(73.083.796)	(43.983.139)	Unallocated amounts
Laba tahun berjalan/periode	7.426.564	17.451.863	21.643.928	1.621.840	Income for the year/period
Aset untuk segmen dilaporkan	416.768.836	331.901.665	364.505.973	456.198.743	Assets for reportable segments
Jumlah yang tidak dialokasikan	103.282.964	49.276.080	78.962.222	24.364.969	Unallocated amounts
Aset	520.051.800	381.177.745	443.468.195	480.563.712	Assets
Liabilitas untuk segmen dilaporkan	-	-	-	-	Liabilities for reportable segments
Jumlah yang tidak dialokasikan	312.513.003	185.505.905	243.349.291	292.416.287	Unallocated amounts
Liabilitas	312.513.003	185.505.905	243.349.291	292.416.287	Liabilities

The reconciliation of net income, assets and liabilities for reportable segments based on product categories as follows (in thousands of rupiah):

The reconciliation of net income, assets and liabilities for reportable segments based on geographic area as follows (in thousands of rupiah):

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (revisi) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**34. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN –
KEUANGAN YANG DIISYARATKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN**

Informasi rasio keuangan yang diisyaratkan oleh
peraturan Otoritas Jasa Keuangan (tidak diaudit)
adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020	2019	
Rasio piutang pembiayaan bersih terhadap total aset	72,38%	82,19%	94,93%	Net financing receivable to total assets ratio
Rasio piutang pembiayaan bersih terhadap total pinjaman	140,76%	178,59%	176,84%	Net financing receivable to total loans
Rasio piutang pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja terhadap total piutang pembiayaan	56,88%	64,17%	67,69%	The ratio of investment financing receivables and working capital financing to total financing receivables
Rasio piutang pembiayaan bermasalah	1,97%	1,88%	22,41%	Non performing financing ratio
Rasio modal sendiri terhadap modal di setor	156,04%	150,47%	141,46%	Equity to paid capital ratio
Rasio permodalan perusahaan	95,12%	59,43%	80,83%	Capital ratio
Gearing ratio	1,25	1,01	1,32	Gearing ratio
Tingkat kesehatan keuangan	Sangat sehat	Sangat sehat	Sehat	Financial soundness level

**34. SUPPLEMENTARY FINANCIAL
INFORMATION – FINANCIAL RATIO OF
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY**

Information of financial ratio as required by
Financial Services Authority Regulation
(unaudited) are as follows:

**35. REKONSILIASI LIABILITAS YANG BERASAL
DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada
aktivitas liabilitas Perusahaan yang timbul dari
aktivitas pendanaan, yang meliputi perubahan
terkait kas dan nonkas:

**35. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING
FROM FINANCING ACTIVITIES**

The table below details changes in the
Company's liabilities arising from financing
activities, including both cash and non-cash
changes.

	1 Januari/ January 1, 2021	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan nonkas/Non-cash Changes		31 Juli/ July 31, 2021	
			Pergerakan nonkas/ Non-cash Changes	Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction costs		
Surat utang jangka menengah	181.533.639.195	67.000.000.000 *)	-	981.046.458	249.514.685.654	Medium term notes
Pinjaman yang diterima	28.571.512.931	288.398.992 *)	-	33.226.338	28.893.138.261	Loans received
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	210.105.152.126	67.288.398.992	-	1.014.272.796	278.407.823.915	Total liabilities from financing activities

	1 Januari/ January 1, 2020	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan nonkas/Non-cash Changes		31 Desember/ December 31, 2020	
			Pergerakan nonkas/ Non-cash Changes	Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction costs		
Surat utang jangka menengah	235.035.313.737	(54.850.000.000) *)	-	1.348.325.458	181.533.639.195	Medium term notes
Pinjaman yang diterima	37.434.499.513	(8.928.644.318) *)	-	65.657.736	28.571.512.931	Loans received
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	272.469.813.250	(63.778.644.318)	-	1.413.983.194	210.105.152.126	Total liabilities from financing activities

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (review) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**35. REKONSILIASI LIABILITAS YANG BERASAL
DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

**35. RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING
FROM FINANCING ACTIVITIES**

	1 Januari/ January 1, 2019	Arus kas pendanaan/ Financing cash flows	Perubahan nonkas/Non-cash Changes		31 Desember/ December 31, 2019	
			Pergerakan nonkas/ Non-cash Changes	Amortisasi biaya transaksi/ Amortization of transaction costs		
Surat utang jangka menengah	277.766.469.811	(11.070.000.000) *)	(33.000.000.000)	1.338.843.926	235.035.313.737	Medium term notes
Pinjaman yang diterima	39.308.519.536	(1.996.160.577) *)	-	122.140.554	37.434.499.513	Loans received
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	<u>317.074.989.347</u>	<u>(13.066.160.577)</u>	<u>(33.000.000.000)</u>	<u>1.460.984.480</u>	<u>272.469.813.250</u>	Total liabilities from financing activities

*) Arus kas dari surat utang jangka menengah dan pinjaman yang diterima merupakan jumlah bersih dari penerimaan, pembayaran dan biaya transaksi dalam laporan arus kas.

*) Cash flow from medium term notes and loan received are represents net amount of receipts, payments and transaction costs in the cash flow statement.

36. ASET/LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

**36. ASSET/LIABILITY DENOMINATED IN
FOREIGN CURRENCY**

Aset dalam mata uang asing yang dimiliki Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company's assets denominated in foreign currency are as follows:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31,		
		2020	2019	
Piutang pembiayaan				Financing receivables
USD (nilai penuh)	-	1.045.788	1.446.375	USD (full amount)
IDR (ekuivalen)	-	14.750.841.229	20.106.048.095	IDR (equivalent)
Aset neto USD (nilai penuh)	-	1.045.788	1.446.375	Aset neto USD (full amount)
Aset neto IDR (ekuivalen)	-	14.750.841.229	20.106.048.095	Aset neto IDR (equivalent)

Atas aset dalam mata uang asing, jumlah laba/(rugi) selisih kurs yang diakui dalam laporan laba rugi pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp177.133.512, Rp361.088.973 dan (Rp1.479.966.565).

For assets denominated in foreign currencies, the total foreign exchange gain/(loss) recognized in the statements of income for the seven-month period ended July 31, 2021 and in 2020 and 2019 amounted to Rp177,133,512, Rp361,088,973 and (Rp1,479,966,565), respectively.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (reviu) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

37. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN LAPORAN ARUS KAS

Aktivitas pendanaan yang tidak mempengaruhi kas dan bank Perusahaan:

	31 Juli 2021/ July 31, 2021	31 Desember/December 31, 2020	2019
Konversi surat utang jangka menengah menjadi modal saham	-	-	33.000.000.000

Conversion of medium term notes to share capital

38. PERISTIWA SIGNIFIKAN

Pada bulan November 2020, Undang-Undang No. 11/2020 ("UU Cipta Kerja") tentang Cipta Kerja mulai berlaku. Pada tanggal otorisasi laporan keuangan, Pemerintah secara resmi mengesahkan 51 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Perusahaan masih melakukan penilaian atas potensi dampak dari peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja terhadap laporan keuangan Perusahaan.

38. SIGNIFICANT EVENT

In November 2020, Law No. 11/2020 ("Job Creation Law") on Job Creation comes into effect. On the authorization date of the financial statements, the Government officially passed 51 implementing regulations for the Job Creation Law. The company is still conducting an assessment of the potential impact of the implementing regulations on the Employment Creation Law on the Company's financial statements.

39. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN

Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman tanggal 24 Agustus 2021 dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) setuju memberikan *Uncommitted Facility Line* dengan limit setinggi-tingginya Rp10.000.000.000 yang digunakan untuk refinancing KPR. Fasilitas ini berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pencairan pinjaman dan dikenakan suku bunga sesuai dengan yang diatur dalam Surat Penegasan Pemberian Pinjaman yang diterbitkan pada setiap penarikan serta dijamin dengan agunan portofolio KPR (Catatan 7).

39. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

The Company entered into a loan agreement dated August 24, 2021 with PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) agreed to provide an Uncommitted Facility Line with a maximum limit of Rp10,000,000,000 to be used for mortgage refinancing. This facility has a term of 5 (five) years from the date of disbursement of the loan and bears the interest rate as stipulated in the Letter of Confirmation of Lending which is issued on each drawdown and is secured by mortgage portfolio as collateral (Note 7).

40. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospectus sehubungan dengan rencana penawaran umum efek utang Perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

40. PURPOSE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The financial statements were prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed public offering of the debt securities of the Company on Indonesia Stock Exchange.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITAN
Tanggal 31 Juli 2021 dan 31 Desember 2020 dan
2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan yang
Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Juli 2021 dan 2020 (reviu) dan
Untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal- tanggal
31 Desember 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit masing-masing oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dalam Laporan Auditor Independen No. 00225/2.0459/AU.1/09/1482-1/1/IV/2021 tertanggal 16 April 2021 dan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dalam Laporan Auditor Independen No. 00106/3.0351/AU.1/09/0003-3/1/V/2020 tertanggal 19 Mei 2020. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum efek utang, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan yang disebut diatas dan telah diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan dalam Laporan Auditor Independen No. 00687/2.0459/AU.1/09/1482-1/1/VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021, dengan beberapa tambahan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu catatan-catatan 2a, 2l, 2t, 2u, 5, 6, 7, 8, 14, 19, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 40 dan penambahan laba per saham dasar di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCEINDONESIA
NOTES TO THE AUDITED FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2021 and December 31, 2020 and
2019 and For the Seven-month Periods Ended
July 31, 2021 and 2020 (review) and
For the Years Ended
December 31, 2020 and 2019
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

41. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2020 AND 2019

The Company previously has issued its financial statements as of December 31, 2020 and 2019 and for the years then ended which have been audited by Public Accounting Firm Heliantono & Rekan with Independent Auditors' Reports No. 00225/2.0459/AU.1/09/1482-1/1/IV/2021 dated April 16, 2021 and Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris with Independent Auditors' Reports No. 00106/3.0351/AU.1/09/0003-3/1/V/2020 dated May 19, 2020, respectively. In connection with the Company's plan to propose initial public offering of the debt securities, the Company has reissued the above financial statements and have been audited by Public Accounting Firm Heliantono & Rekan with Independent Auditors' Reports No. 00687/2.0459/AU.1/09/1482-1/1/VII/2021 dated July 28, 2021, with additional disclosures in notes to the financial statements which are Notes 2a, 2l, 2t, 2u, 5, 6, 7, 8, 14, 19, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 40 and the addition of basic earnings per share in the statement of profit or loss and other comprehensive income.